

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)



PARIT MALINTANG
Mei 2025





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Parit Malintang, 22 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 salah satu bentuk transparansi pengelolaan keuangan, disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan pendekatan kinerja, artinya setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya terkait dengan pengelolaan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu dihadapkan pada perubahan peraturan perundang-undangan yang dilandasi keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan membawa konsekuensi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk selalu berpacu mengimplementasikan tuntutan perubahan tersebut.

Hal ini disebabkan bahwa pengelolaan keuangan daerah menjadi sub sistem dari pengelolaan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), meliputi : hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan mendasar yang dirasakan daerah akibat dari peraturan perundang-undangan di bidang keuangan adalah perubahan format Laporan Keuangan dan keharusan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian Laporan Keuangan, sebagaimana terlihat pada Pasal 320 yaitu:

- Ayat 1 : Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- Ayat 2 : Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD; dan
- Ayat 3 : Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

Oleh karena itu, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2024.

Parit Malintang, 22 Mei 2025.

BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO.	Uraian	REF	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.A				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.A.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.1.a	67.260.000.000,00	61.253.259.287,50	91,07	61.970.456.485,81
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.1.b	72.924.616.090,00	66.154.972.984,00	90,72	3.603.184.590,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.1.c	8.728.317.039,00	8.728.317.039,00	100,00	8.088.751.162,00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.A.1.d	9.825.000.000,00	8.602.636.435,93	87,56	75.900.122.518,70
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		158.737.933.129,00	144.739.185.746,43	91,18	149.562.514.756,51
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.A.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.1.A.2.a				
10	Dana Perimbangan	5.1.A.2.a.1	1.074.386.520.400,00	1.074.305.359.388,00	99,99	1.080.386.025.961,00
11	Dana Insentif Daerah	5.1.A.2.a.2	27.827.229.000,00	27.827.229.000,00	100,00	0,00
12	Dana Desa	5.1.A.2.a.3	103.458.459.000,00	103.458.459.000,00	100,00	101.544.125.000,00
13	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 12)		1.205.672.208.400,00	1.205.591.057.388,00	99,99	1.181.930.150.961,00
14	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.A.2.b				
15	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.A.2.b.1	109.442.048.083,00	75.625.794.151,00	68,38	61.858.378.407,00
16	Bantuan Keuangan	5.1.A.2.b.2	2.100.000.000,00	1.200.000.000,00	57,14	300.000.000,00
17	Jumlah Transfer Antar Daerah (15 s/d 16)		111.542.048.083,00	77.125.794.151,00	68,15	62.158.378.407,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer (13 + 17)		1.317.214.256.483,00	1.282.716.851.539,00	97,38	1.244.088.529.368,00
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.A.3				
20	Pendapatan Hibah	5.1.A.3.a	0,00	0,00	0,00	445.291.000,00
21	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (20)		0,00	0,00	0,00	445.291.000,00
22	JUMLAH PENDAPATAN (7, + 18 + 22)		1.475.952.189.612,00	1.427.456.037.285,43	96,71	1.394.096.335.144,51
23	BELANJA DAERAH	5.1.B				
24	BELANJA OPERASI	5.1.B.1				
25	Belanja Pegawai	5.1.B.1.a	763.442.216.483,48	742.722.747.909,00	94,80	673.846.730.780,32
26	Belanja Barang dan Jasa	5.1.B.1.b	342.999.003.668,49	312.307.080.893,00	91,05	335.371.214.311,93
27	Belanja Hibah	5.1.B.1.c	45.913.859.840,00	44.812.388.236,88	97,60	24.899.739.360,00
28	Bantuan Bantuan Sosial	5.1.B.1.d	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
29	Jumlah Belanja Operasi (25 s/d 28)		1.172.355.081.991,97	1.099.842.195.038,68	93,81	1.034.417.894.452,25
30	BELANJA MODAL	5.1.B.2				
31	Belanja Tanah	5.1.B.2.a.1	1.087.632.000,00	1.087.632.000,00	100,00	0,00
32	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.2.a	24.847.747.915,70	23.888.798.704,00	96,14	34.104.528.420,00
33	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.B.2.b	24.270.093.725,01	20.826.054.638,00	85,81	29.755.595.199,76
34	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.B.2.c	112.159.475.731,31	103.545.442.710,00	92,32	119.326.461.876,00
35	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.2.d	5.033.603.800,00	5.705.321.800,00	113,34	5.105.918.323,00
36	Jumlah Belanja Modal (31 s/d 35)		167.388.553.172,02	155.953.257.852,00	92,63	188.292.932.818,76
37	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.B.3				
38	Belanja Tak Terduga	5.1.B.3	10.000.000.000,00	7.691.341.000,00	76,91	1.729.508.250,00
39	Jumlah Belanja Tak Terduga (38)		10.000.000.000,00	7.691.341.000,00	76,91	1.729.508.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

NO.	Uraian	REF	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
40	BELANJA TRANSFER	5.1.B.4				
41	Belanja Bagi Hasil	5.1.B.4.a	8.846.259.317,80	7.020.835.480,00	79,37	5.603.798.048,00
42	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.B.4.b	181.049.406.500,00	181.049.406.500,00	100,00	175.913.089.601,00
43	Jumlah Belanja Transfer (41 + 42)		189.895.665.817,80	188.070.241.980,00	99,04	181.518.887.649,00
44	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (29+36+39+43)		1.539.649.390.981,79	1.450.657.035.870,68	94,22	1.405.956.633.170,01
45	SURPLUS/DEFISIT (22 - 44)	5.1.C	(63.697.111.369,79)	(23.200.998.585,25)	36,42	(11.860.298.025,50)
46	PEMBIAYAAN	5.1.D				
47	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.D.1				
48	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya	5.1.D.1	65.903.111.369,79	65.906.541.289,79	100,01	78.763.409.395,29
49	Jumlah Penerimaan (48)		65.903.111.369,79	65.906.541.289,79	100,01	78.763.409.395,29
50	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.D.2				
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.D.2	2.206.000.000,00	2.206.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
52	Jumlah Pengeluaran (51)		2.206.000.000,00	2.206.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
53	PEMBIAYAAN NETTO (49 - 52)		63.697.111.369,79	63.700.541.289,79	100,01	77.763.409.395,29
54	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (46 + 53)	5.1.E	0,00	46.499.542.794,54	0,00	63.903.111.369,79

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Padang, 22 Mei 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.a	65.903.111.369,79	78.763.409.395,28
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.b	65.906.541.269,79	78.763.409.395,28
Sub Total		(3.429.920,00)	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SLPA/SIKPA)	5.2.c	40.499.542.704,54	65.903.111.369,79
Sub Total		40.496.112.784,54	65.903.111.369,79
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.d	3.429.920,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.e	40.499.542.704,54	65.903.111.369,79

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Padang, ~~21~~ 22 Mei 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2024	2023
1	ASET			
2	ASET LANCAR	5.3.A		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.A.1	28.984.627.889,04	50.486.009.485,29
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.A.2	35.236.512,00	312.658,00
5	Kas BLUD	5.3.A.3	7.304.367.109,50	6.651.567.236,50
6	Kas Dana BOSP	5.3.A.4	119.606.781,00	119.055.718,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.A.6	4.055.734.413,00	0,00
8	Kas Lainnya	5.3.A.5	0,00	8.646.498.930,00
9	Piutang Pajak Daerah	5.3.A.5	66.577.672.791,00	57.349.860.172,00
10	Piutang Retribusi Daerah	5.3.A.7	576.240.650,00	836.782.650,00
11	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	5.3.A.8	208.499.763,00	189.405.791,00
12	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.A.8	29.919.993.627,00	26.337.599.443,00
13	Piutang Lainnya	5.3.A.10	11.140.305,00	11.140.305,00
14	Penyisihan Piutang	5.3.A.11	(42.604.370.681,66)	(36.869.449.426,71)
15	Beban Dibayar Dimuka	5.3.A.12	197.456.593,75	207.989.718,75
16	Persediaan	5.3.A.13	15.986.315.979,67	15.879.033.952,90
17	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 16)		111.372.513.732,30	129.845.806.633,73
18	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.B		
19	Investasi Non Permanen	5.3.B.1	0,00	0,00
20	Investasi Non permanen Lainnya	5.3.B.1	4.224.465.232,00	4.232.465.232,00
21	Penyisihan Piutang Inv.Non permanen	5.3.B.2	(4.224.465.232,00)	(4.232.465.232,00)
22	Jumlah Investasi Non Permanen (19 s/d 21)		0,00	0,00
23	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.B.3	92.435.723.017,54	91.575.556.216,69
24	Investasi Permanen Lainnya			
25	Jumlah Investasi Permanen (24)		92.435.723.017,54	91.575.556.216,69
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang (22 + 25)		92.435.723.017,54	91.575.556.216,69
27	ASET TETAP	5.3.C		
28	Tanah	5.3.C.1	216.439.328.749,00	213.088.316.749,00
29	Peralatan dan Mesin	5.3.C.2	497.426.717.246,58	478.877.100.278,58
30	Gedung dan Bangunan	5.3.C.3	1.111.965.690.027,81	1.081.759.974.520,61
31	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.C.4	2.681.736.052.936,05	2.566.695.708.812,05
32	Aset Tetap Lainnya	5.3.C.5	96.245.793.604,35	90.073.340.927,35
33	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.C.6	65.379.807.868,00	83.838.743.955,20
34	Akumulasi Penyusutan	5.3.C.7	(3.526.163.650.186,10)	(3.412.118.803.156,11)
35	Jumlah Aset Tetap (28 s/d 34)		1.143.029.740.245,69	1.102.214.382.086,68
36	ASET LAINNYA	5.3.D		
37	Tagihan Jangka Panjang	5.3.D.1	141.596.387,00	141.596.387,00
38	Aset Tidak Berwujud	5.3.D.2	6.702.682.964,00	6.652.982.964,00
39	Aset Lain-Lain	5.3.D.3	18.565.560.298,29	16.809.387.361,84
40	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.D.4	(5.584.737.213,80)	(4.952.890.166,40)
41	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	5.3.D.5	(18.067.894.891,29)	(16.311.721.954,84)
42	Jumlah Aset Lainnya (37 s/d 42)		1.747.207.544,20	2.339.354.591,60
43	JUNLAH ASET (17+26+35+43+43)		1.348.585.184.539,73	1.325.976.099.528,70



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Ref	2024	2023
44	KEWAJIBAN	5.3.E		
45	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.E.1		
46	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.E.1.a	20.000,00	332.658,00
47	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.E.1.b	1.394.839.416,00	1.744.322.487,92
48	Utang Belanja	5.3.E.1.c	5.019.636.219,40	6.337.311.834,80
49	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s/d 49)		6.414.495.635,40	8.081.966.980,72
50	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.E.2		
51	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.E.2.a	41.824.407,00	41.824.407,00
52	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (52)		41.824.407,00	41.824.407,00
53	Jumlah Kewajiban (50 + 53)		6.456.320.042,40	8.123.791.387,72
54	EKUITAS	5.3.F		
55	EKUITAS	5.3.F	1.342.128.864.497,33	1.317.852.308.140,98
56	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.348.585.184.539,73	1.325.976.099.528,70

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Pari-Matintang, 22 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN


JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

No	URAIAN	REF	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL						
1	PENDAPATAN - LO	5.4.A				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.A.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.A.1.a	70.480.232.490,50	71.987.283.403,89	(1.507.060.913,39)	(2,09)
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.A.1.b	66.206.500.456,00	3.863.434.590,00	62.343.065.866,00	1.613,67
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.A.1.c	8.728.317.039,00	8.088.751.162,00	639.565.877,00	7,91
6	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	5.4.A.1.d	8.620.338.435,93	76.041.790.353,70	(67.421.453.917,77)	(88,66)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)		154.035.388.421,43	159.981.269.509,59	(5.945.881.088,16)	(3,72)
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.A.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.A.2.a	1.102.132.598.388,00	1.078.779.861.824,80	23.352.736.563,20	2,16
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.A.2.b	80.708.188.335,00	77.034.280.367,00	3.673.907.968,00	4,77
11	Jumlah Pendapatan Transfer (9 + 10)		1.182.840.786.723,00	1.155.814.142.191,80	27.026.644.531,20	2,34
12	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	5.4.A.2				
13	Pendapatan Hibah - LO	5.4.A.2.a	551.596.917,00	1.845.283.645,00	(1.293.686.728,00)	(70,11)
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO	5.4.A.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (13 + 14)		551.596.917,00	1.845.283.645,00	(1.293.686.728,00)	(70,11)
16	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 11 + 15)		1.337.427.770.061,43	1.317.648.695.346,39	19.787.074.715,04	1,50
17	BERAN - LO	5.4.B				
18	Beban Pegawai	5.4.B.1	742.758.910.168,00	673.985.437.094,32	68.773.473.074,68	10,20
19	Beban Barang dan Jasa	5.4.B.2	314.318.864.631,23	333.847.151.975,40	(19.528.287.345,17)	(5,85)
20	Beban Hibah	5.4.B.3	44.801.118.235,68	83.736.969.573,19	(38.935.851.337,51)	(88,50)
21	Beban Bantuan Sosial	5.4.B.4	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	(100,00)
22	Beban Penyisihan Piutang	5.4.B.5	42.604.370.681,66	36.888.449.426,71	5.734.921.254,95	15,55
23	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.B.6	38.272.019.860,00	38.156.187.699,00	115.832.161,00	0,30
24	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.B.7	52.245.308.098,99	50.669.154.218,18	1.576.153.880,81	3,11
25	Beban Penyusutan Jalkan Jaringan dan Instalasi	5.4.B.8	26.092.890.591,00	109.328.884.404,00	(83.236.993.813,00)	(76,13)
26	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.B.9	641.847.047,40	680.821.847,40	(38.974.800,00)	(5,72)
27	Beban Bagi Hasil	5.4.B.10	6.319.342.279,60	6.557.366.015,80	(238.023.736,20)	(3,63)
28	Beban Bantuan Keuangan	5.4.B.11	77.590.947.500,00	74.368.964.601,00	3.221.982.899,00	4,33
29	JUMLAH BEBAN (18 s/d 28)		1.345.645.619.094,56	1.408.581.388.856,00	(62.855.767.761,44)	(4,46)
30	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (16-29)		(8.217.848.033,13)	(90.868.691.509,61)	82.642.842.476,48	(90,96)

31	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	5.4.C				
32	Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO	VD.3	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	VD.3	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Surplus Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.C.1	16.486.209.583,00	11.635.821.785,22	4.850.477.797,78	41,69
35	Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset non lancar - LO	5.4.C.2	11.677.939.154,00	13.306.549.224,22	(1.630.610.070,22)	(12,25)
36	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (34 - 35)		4.808.260.429,00	(1.672.727.439,00)	6.481.087.868,00	(387,46)
38	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (30+37)		(3.409.488.604,13)	(92.533.418.948,61)	89.123.930.344,48	(96,32)
39	POS LUAR BIASA - LO	5.4.D				
40	Beban Luar Biasa	5.4.D	7.691.341.000,00	1.729.558.250,00	5.961.782.750,00	344,70
41	POS LUAR BIASA (40)		7.691.341.000,00	1.729.558.250,00	5.961.782.750,00	344,70
42	SURPLUS/DEFISIT-LO (38-41)	5.4.E	(11.106.829.604,13)	(94.262.977.198,61)	83.162.147.594,48	(88,32)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	REF	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.A		
2	Arus Masuk Kas	5.5.A.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.A.1.a	61.253.259.287,50	61.970.456.485,81
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.A.1.b	66.154.972.984,00	3.603.184.599,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.A.1.c	8.728.317.039,00	8.088.751.182,00
6	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah	5.5.A.1.d	8.251.739.335,93	75.439.133.746,70
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.A.1.e	1.205.591.057.388,00	1.161.930.150.981,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.A.1.f	77.125.794.151,00	62.158.378.407,00
9	Pendapatan Hibah	5.5.A.1.g	0,00	445.291.000,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas (3 a/d 10)		1.427.185.140.185,43	1.393.635.346.372,51
11	Arus Keluar Kas	5.5.A.2		
12	Belanja Pegawai	5.5.A.2.a	742.722.747.909,00	673.846.730.789,32
13	Belanja Barang dan Jasa	5.5.A.2.b	312.307.080.893,00	335.371.214.311,83
14	Belanja Hibah	5.5.A.2.c	44.812.396.236,68	24.899.739.366,00
15	Belanja Bantuan Sosial	5.5.A.2.d	0,00	300.000.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.A.2.e	181.049.406.500,00	175.913.089.601,00
17	Belanja Bagi Hasil Pajak	5.5.A.2.f	7.020.835.480,00	5.603.798.048,00
18	Belanja Kejadian Luar Biasa	5.5.A.2.g	7.691.341.000,00	1.729.558.250,00
19	Jumlah Arus Keluar Kas (12 a/d 19)		1.295.683.778.818,68	1.217.664.139.351,25
20	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (10 - 19)		131.501.362.166,75	175.971.216.021,26
21	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.B		
22	Arus Masuk Kas	5.5.B.1		
23	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.B.1.a	350.897.100,00	460.988.772,00
24	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	5.5.B.1.b	0,00	0,00
25	Jumlah Arus Masuk Kas (23 +24)		350.897.100,00	460.988.772,00
26	Arus Keluar Kas	5.5.B.2		
27	Perolehan Tanah	5.5.B.2.a	1.087.632.000,00	0,00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.B.2.b	23.888.796.704,00	34.104.526.420,00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.B.2.c	20.826.064.638,00	29.755.595.198,76
30	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.B.2.d	103.545.442.710,00	119.326.461.876,00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.2.e	5.705.321.800,00	5.105.919.323,00
32	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.B.2.f	2.206.000.000,00	1.000.000.000,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas (27 a/d 32)		157.259.257.852,00	189.292.502.818,76
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (26-33)		(156.908.360.752,00)	(188.831.514.046,76)
35	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.D		
36	Arus Masuk Kas			
37	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.D.1	85.530.125.449,58	101.079.955.959,71
38	Jumlah Arus Masuk Kas (37)		85.530.125.449,58	101.079.955.959,71
39	Arus Keluar Kas			
40	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.D.2	85.530.105.449,58	101.079.823.301,71
41	Jumlah Arus Keluar Kas (40)		85.530.105.449,58	101.079.823.301,71
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (38- 41)		29.000,00	332.658,00
43	Kenalkan/Penurunan Kas		(25.496.978.685,26)	(12.859.965.367,50)
44	Saldo Awal Kas di BUD		65.503.111.369,79	78.763.409.395,29
45	Saldo Akhir Kas di BUD + BLUD		36.288.964.698,54	57.137.244.063,79
46	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		35.236.512,60	312.658,00
47	Saldo Akhir Kas Bos		119.606.781,00	119.055.718,00
48	Saldo Akhir Kas Dana BOK Kesehatan		4.055.734.413,00	8.646.498.930
49	Saldo Akhir Kas		40.499.542.704,54	65.903.111.369,79

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Padang, 12 Mei 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENNEDY AZIS

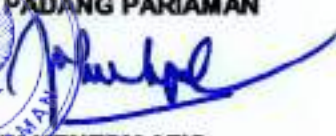


PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
EKUITAS AWAL	5.6.A	1.317.852.308.140,98	1.324.258.353.152,43
SURPLUS/DEFISIT-L.O	5.6.B	(11.100.829.604,13)	(94.262.977.198,61)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.C	-	
KOREKSI EKUITAS			
Koreksi Tambah Ekuitas	5.6.D	39.578.515.457,63	92.708.753.914,45
Koreksi Kurang Ekuitas	5.6.E	(4.201.129.497,15)	(4.851.821.727,29)
Total Koreksi Ekuitas		35.377.385.960,48	87.856.932.187,16
EKUITAS AKHIR	5.6.F	1.342.128.854.497,33	1.317.852.308.140,98

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Parit Malintang, 22 Mei 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	i
KATA PENGANTAR	i
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	iii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	v
NERACA	vi
LAPORAN OPERASIONAL	viii
LAPORAN ARUS KAS	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.	4
1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.	11
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN	12
2.1. Ekonomi Makro	12
A. Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto.	12
B. Pertumbuhan Ekonomi	14
2.2. Kebijakan Keuangan	17
A. Kebijakan Peningkatan Pendapatan.....	17
B. Kebijakan Belanja Daerah	19
C. Kebijakan Pembiayaan Daerah	22
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD	24
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	30
3.1. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan Entitas.....	30
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	37
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan	37
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.	38
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	39
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	39

C.	Neraca	39
D.	Laporan Operasional (LO).....	39
E.	Laporan Arus Kas (LAK)	39
F.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	39
G.	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).....	40
4.3.	Dasar Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	40
4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi.	40
A.	Pendapatan-LRA.....	40
B.	Belanja	42
C.	Transfer.....	43
D.	Pembiayaan.....	45
E.	Pendapatan-LO	47
F.	Beban	52
G.	Kas dan Setara Kas	56
H.	Piutang	57
I.	Persediaan	67
J.	Investasi	70
K.	Aset Tetap dan Penyusutan.....	72
L.	Dana Cadangan.	83
M.	Aset Lainnya	84
N.	Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.....	88
O.	Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi	90
P.	Properti Investasi	95
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		97
5.1.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	97
A.	PENDAPATAN DAERAH	97
B.	BELANJA DAERAH.....	112
C.	SURPLUS / (DEFISIT)	126
D.	PEMBIAYAAN.....	126
E.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	127
5.2.	LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH.....	128
5.3.	NERACA	131
A.	ASET LANCAR.....	131
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG.....	141
C.	ASET TETAP	144
D.	ASET LAINNYA	164

E.	KEWAJIBAN	168
F.	EKUITAS	173
5.4.	LAPORAN OPERASIONAL	174
A.	PENDAPATAN	174
B.	BEBAN	185
C.	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	194
D.	POS LUAR BIASA	196
E.	SURPLUS/DEFISIT-LO	197
5.5.	LAPORAN ARUS KAS	198
A.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	198
B.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	198
C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	199
D.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	200
5.6.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	203
A.	EKUITAS AWAL	203
B.	SURPLUS/DEFISIT-LO	203
C.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	203
D.	EKUITAS AKHIR	205
BAB VI	PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA	206
6.1.	<i>MANDATORY SPENDING</i>	206
A.	Bidang Pendidikan	206
B.	Bidang Kesehatan	207
C.	Belanja Infrastruktur Pelayanan publik	207
6.2.	PENGGANTIAN MANAJEMEN	208
6.3.	KOMITMEN DAN KONTIJENSI	209
6.4.	STRUKTUR ORGANISASI	210
6.5.	KEPEMIMPINAN DAERAH	212
BAB VII	PENUTUP	213

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas Dasar Harga Berlaku.....	14
Tabel 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto	14
Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.....	16
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja	25
Tabel 2. 5 Ringkasan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan	26
Tabel 2. 6 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan	26
Tabel 2. 7 Anggaran Belanja Per SKPD Sebelum dan Sesudah Perubahan.....	27
Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024	30
Tabel 3. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024	30
Tabel 3. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024.....	32
Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024	33
Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024	35
Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024	36
Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024.....	36
Tabel 4. 1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak	65
Tabel 4. 2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi	65
Tabel 4. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak.....	66
Tabel 4. 4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih selain Retribusi	66
Tabel 5. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	97
Tabel 5. 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah	98
Tabel 5. 3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah	100
Tabel 5. 4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..	101
Tabel 5. 5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.....	102
Tabel 5. 6 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer	104
Tabel 5. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	105
Tabel 5. 8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan.....	106
Tabel 5. 9 Target dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	106
Tabel 5. 10 Target dan Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah	109
Tabel 5. 11 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.....	109
Tabel 5. 12 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	110
Tabel 5. 13 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah	111
Tabel 5. 14 Target dan Realisasi Belanja	112
Tabel 5. 15 Target dan Realisasi Belanja Operasi.....	113

Tabel 5. 16 Target dan Realisasi Belanja Pegawai	114
Tabel 5. 17 Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	114
Tabel 5. 18 Target dan Realisasi Belanja Hibah.....	116
Tabel 5. 19 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.....	116
Tabel 5. 20 Belanja Hibah kepada Badan.....	117
Tabel 5. 21 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba.....	117
Tabel 5. 22 Belanja Hibah Dana BOS	118
Tabel 5. 23 Anggaran Dan Realisasi Hibah Kepada Partai Politik.....	118
Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	119
Tabel 5. 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah	119
Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120
Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	121
Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	122
Tabel 5. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	122
Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer.....	123
Tabel 5. 31 Target Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah.....	124
Tabel 5. 32 Target Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	125
Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan.....	127
Tabel 5. 34 Rincian SILPA.....	128
Tabel 5. 35 Rincian Kas di BLUD	132
Tabel 5. 36 Piutang Pajak Daerah.....	134
Tabel 5. 37 Piutang Pajak Air Tanah	135
Tabel 5. 38 Piutang PBB P2	136
Tabel 5. 39 Piutang Retribusi	137
Tabel 5. 40 Rincian Piutang BLUD Puskesmas dan RSUD	138
Tabel 5. 41 Piutang Transfer Antar Daerah	139
Tabel 5. 42 Tagihan Ganti Rugi.....	140
Tabel 5. 43 Penyisihan Piutang.....	140
Tabel 5. 44 Rincian Persediaan per jenis.....	141
Tabel 5. 45 Investasi Jangka Panjang	141
Tabel 5. 46 Penyertaan Modal Daerah.....	142
Tabel 5. 47 Aset Tetap	145
Tabel 5. 48 Tanah per SKPD.....	145
Tabel 5. 49 Nilai Peralatan dan Mesin per SKPD	148
Tabel 5. 50 Nilai gedung dan bangunan per SKPD	152

Tabel 5. 51 Rincian Unit Gedung dan Bangunan DHS2.....	155
Tabel 5. 52 Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD	156
Tabel 5. 53 Nilai Aset Tetap Lainnya per SKPD	159
Tabel 5. 54 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD	161
Tabel 5. 55 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	162
Tabel 5. 56 Aset Lainnya.....	164
Tabel 5. 57 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	164
Tabel 5. 58 Kewajiban	168
Tabel 5. 59 Utang Belanja	169
Tabel 5. 60 Utang Belanja Pegawai	170
Tabel 5. 61 Utang Belanja Barang dan Jasa.....	171
Tabel 5. 62 Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi	172
Tabel 5. 63 Realisasi Pendapatan-LO	174
Tabel 5. 64 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	174
Tabel 5. 65 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO.....	175
Tabel 5. 66 Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah.....	176
Tabel 5. 67 Penerimaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO.....	177
Tabel 5. 68 Rincian Pendapatan Transfer-LO.....	179
Tabel 5. 69 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.....	180
Tabel 5. 70 Rincian Dana Perimbangan-LO	180
Tabel 5. 71 Dana Bagi Hasil.....	181
Tabel 5. 72 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah	182
Tabel 5. 73 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	183
Tabel 5. 74 Rincian Beban.....	185
Tabel 5. 75 Rincian Beban Pegawai.....	186
Tabel 5. 76 Rincian Beban Barang dan Jasa	188
Tabel 5. 77 Rincian Beban Hibah.....	189
Tabel 5. 78 Rincian Beban Penyisihan Piutang.....	192
Tabel 5. 79 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	193
Tabel 5. 80 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	193
Tabel 5. 81 Rincian Beban Bagi Hasil	194
Tabel 5. 82 Rincian Beban Bantuan Keuangan	194
Tabel 5. 83 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	195
Tabel 5. 84 Surplus dari Kegiatan Non Operasional.....	195
Tabel 5. 85 Defisit Kegiatan Non Operasional-LO.....	196

Tabel 5. 86 Rincian Pos Luar Biasa	197
Tabel 5. 87 Koreksi Tambah Ekuitas	203
Tabel 5. 88 Koreksi Kurang Ekuitas	204
Tabel 6. 1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja <i>Mandatory Spending</i>	206
Tabel 6. 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja <i>Mandatory Spending</i>	207
Tabel 6. 3 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2024.....	208
Tabel 6. 4 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah TA 2024.....	208
Tabel 6. 5 Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman.....	212
Tabel 6. 6 Susunan Pejabat Eksekutif Kabupaten Padang Pariaman.....	212

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman Tahun 2020-2024	15
Gambar 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto.....	16
Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.....	17
Gambar 5. 1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah	99
Gambar 5. 2 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah	101
Gambar 5. 3 Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.....	103
Gambar 5. 4 Pendapatan Asli Daerah	104
Gambar 5. 5 Perbandingan Realisasi Dana Transfer Tahun 2024 - 2023.....	110
Gambar 5. 6 Porsi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023	111

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
 - a. Rincian Perhitungan SiLPA tahun 2024
2. Daftar Rincian Kas di Bendahara BOS
3.
 - a. Rincian Piutang Pajak Reklame per Wajib Pajak
 - b. Daftar Rincian Piutang Pajak PBB P2
4.
 - a. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame
 - b. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Air Tanah
 - c. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Retribusi
 - e. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD
 - f. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
 - g. Daftar Rincian Penyisihan Piutang Lainnya
5. Daftar Rincian Persediaan per SKPD
6. Rincian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
7. Laporan Keuangan BUMD
8. Daftar Aset Tetap-Tanah
9. Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
10. Daftar Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
11. Daftar Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi
12. Daftar Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya
13. Daftar Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan
14. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
15. Daftar Aset Tak Berwujud
16. Daftar Amortisasi Aset Tak Berwujud
17. Daftar Aset Lain-lain – Rusak Berat
18. Daftar Aset Lain-lain – Dalam Penelusuran
19. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
20. Daftar Perbandingan Pendapatan LRA dengan Pendapatan-LO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan kesungguhan Pemerintah dalam mereformasi sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Misi utama kedua Undang-undang tersebut tidak hanya sekedar pelimpahan kewenangan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih mendasar adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu, suatu laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami mutlak diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Disamping itu, dengan laporan keuangan yang baik dan dapat dipercaya akan memudahkan pengukuran tentang sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah harus mencerminkan adanya kemandirian entitas, yang berarti bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD disusun dalam bentuk laporan keuangan daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan

kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024;
36. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
37. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

38. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
39. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
40. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
41. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
42. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
43. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
44. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
45. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
46. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
47. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

48. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
49. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
50. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
51. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
52. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
53. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
54. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
55. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
56. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

57. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
58. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
59. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
60. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
61. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
62. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 48 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
63. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
64. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
65. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
66. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam tujuh Bab, yaitu:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen laporan realisasi anggaran, komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen neraca, komponen laporan operasional, komponen laporan arus kas dan komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Berisi pengungkapan penting lainnya berkaitan dengan penggantian manajemen, komitmen dan kontijensi, struktur organisasi dan pengungkapan lainnya.
- BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2024 dilakukan dengan menganalisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan akan terjadi, proyeksi ketersediaan dana pembangunan serta kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto.

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha, PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga *Non Profit* yang melayani Rumah Tangga (LNPRRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah, sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi tujuh komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini

mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif, Barang dan Jasa Individu merupakan Barang dan Jasa *Privat*, dimana ciri-ciri barang *privat* adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula disini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi enam sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (*residen*) ke bukan penduduk (*non residen*). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya

didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga Tahun 2010.

Tabel 2. 1 PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman (juta rupiah), 2020-2024

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Laju Indeks Implisit (%)
2020	17.934,81	11.939,48	-10,46
2021	18.455,09	12.195,75	2,15
2022	22.193,35	13.029,17	6,83
2023*	25.070,85	13.740,82	5,46
2024**	26.808,95	14.369,24	4,57

Catatan/Note:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2025

PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dari nilai sebesar Rp25.070,85 juta menjadi sebesar Rp26.808,95 juta.

Produktivitas ekonomi secara riil yang mencerminkan kenaikan produktivitas dapat dilihat dari perkembangan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Dari data diatas, kenaikan produktivitas ditunjukkan dengan adanya kenaikan nilai PDRB dari sebesar Rp13.740,82 juta pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp14.369,24 juta pada Tahun 2024.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh berbagai sektor dalam perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, namun sektor yang dominan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman adalah sektor Pertanian dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman, 2020 - 2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,68	22,65	21,37	20,55	20,20
B	Pertambangan dan Penggalian	7,42	7,54	6,71	6,48	6,32
C	Industri Pengolahan	11,19	11,95	10,92	10,48	10,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	10,16	10,66	9,82	9,83	10,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,54	10,65	10,44	10,19	10,19

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
H	Transportasi dan Pergudangan	16,29	13,57	19,34	21,97	22,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,05	1,13	1,27	1,27	1,25
J	Informasi dan Komunikasi	3,67	3,96	3,75	3,63	3,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,77	1,63	1,53	1,54
L	Real Estat	1,10	1,12	1,03	1,02	1,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,68	6,10	5,36	5,06	5,13
P	Jasa Pendidikan	6,19	6,40	5,97	5,59	5,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,77	0,70	0,70	0,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,50	1,56	1,53	1,54	1,57
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

* Angka Sementara

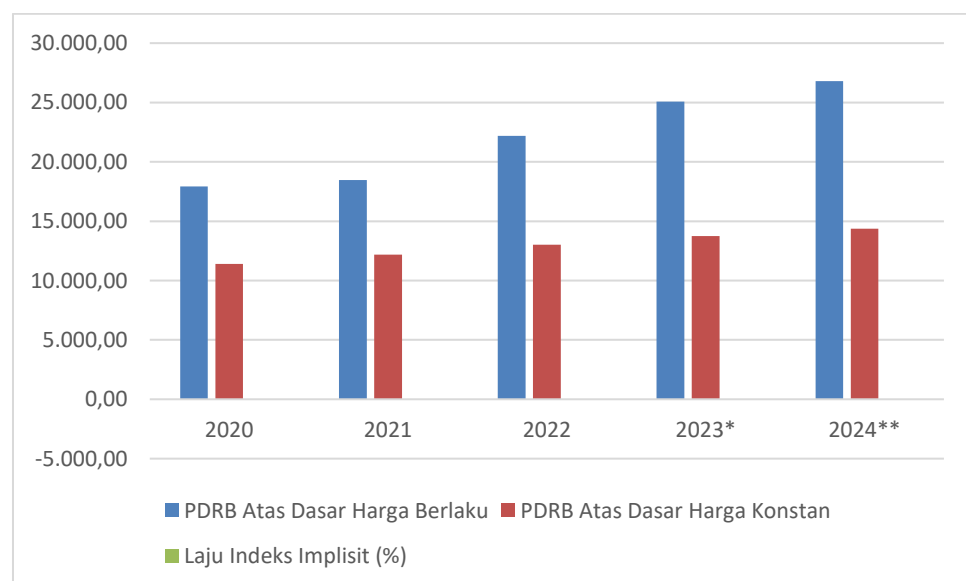
**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2025

Berdasarkan jenis lapangan usaha, nilai PDRB perkapita menurut harga berlaku yang paling tinggi adalah PDRB perkapita dari lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan nilai sebesar 22,43% per tahun, disusul dengan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mempunyai PDRB perkapita sebesar 20,20% per tahun, selanjutnya disusul dengan Industri Pengolahan yang mempunyai PDRB sebesar 10,31% per tahun dan industri Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mempunyai PDRB sebesar 10,19%. Sementara itu, lapangan usaha lainnya memiliki PDRB perkapita di bawah 10% pada Tahun 2024.

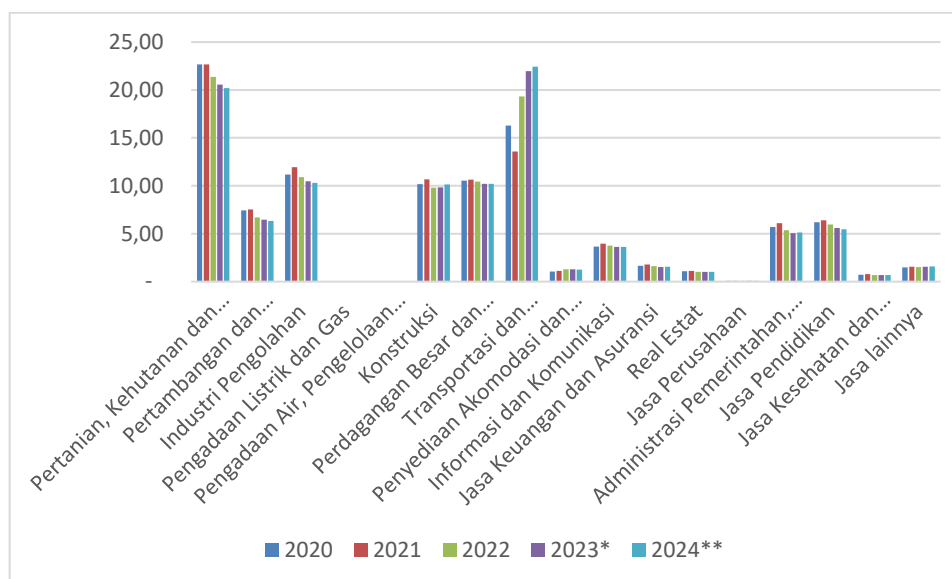
Pada Tahun 2024, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari lapangan usaha Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa lainnya.

Gambar 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2025 (diolah)

Gambar 2. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2025

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam persen)

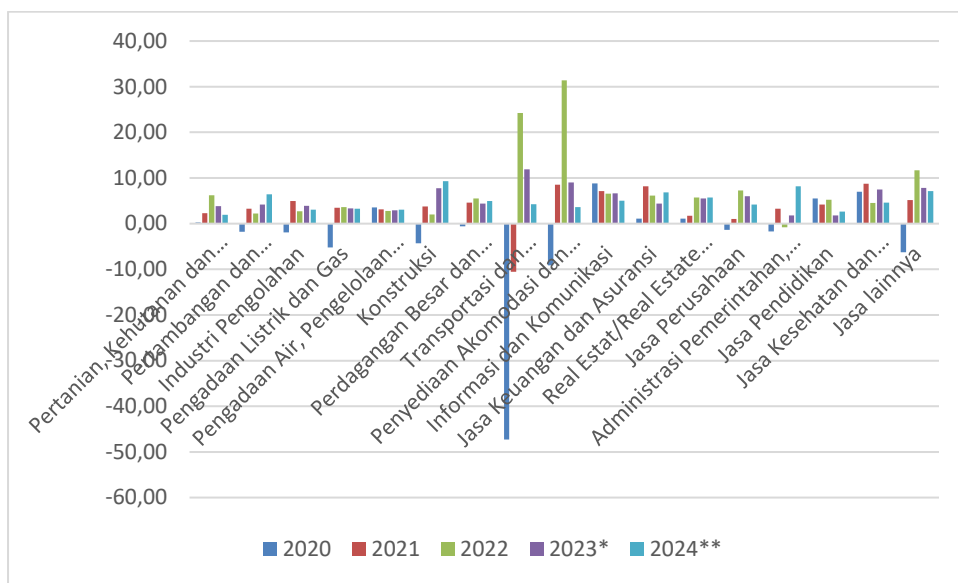
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,29	2,28	6,19	3,87	1,91
B Pertambangan dan Penggalian	-1,76	3,28	2,19	4,16	6,40
C Industri Pengolahan	-1,88	4,97	2,68	3,93	3,09
D Pengadaan Listrik dan Gas	-5,21	3,49	3,59	3,37	3,25
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,58	3,12	2,80	2,89	3,04
F Konstruksi	-4,28	3,78	2,02	7,77	9,29
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,60	4,58	5,50	4,42	4,95
H Transportasi dan Pergudangan	-47,30	-10,54	24,26	11,92	4,27
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,12	8,52	31,41	9,00	3,65
J Informasi dan Komunikasi	8,78	7,11	6,57	6,63	5,00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,10	8,20	6,16	4,40	6,85
L Real Estate/Real Estate Activities	1,12	1,75	5,75	5,51	5,72
M,N Jasa Perusahaan	-1,34	1,03	7,24	5,98	4,20
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,72	3,30	-0,81	1,82	8,18
P Jasa Pendidikan	5,53	4,20	5,27	1,81	2,67
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,99	8,72	4,54	7,45	4,62
R,S,T,U Jasa lainnya	-6,24	5,16	11,72	7,80	7,15
Produk Domestik Regional Bruto	-10,46	2,15	6,83	5,46	4,57

* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2025

Gambar 2. 3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (dalam persen)



Sumber: BPS, Padang Pariaman Dalam Angka 2025

2.2. Kebijakan Keuangan

A. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Musrenbang Tahun 2023, maka pada Tahun 2024 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2024 untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman unggul, berkelanjutan, religius, sejahtera dan berbudaya. Kebijakan pendapatan daerah relatif sama dengan APBD awal Tahun 2024 yaitu melalui pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensial maka peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan asas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya Pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak;
2. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan

adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan;

3. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB perkapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan; dan
4. Rencana Tindak Peningkatan Pendapatan Daerah (*Local Government Revenue Improvement Action Plan*) adalah program terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada; dan b). mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa rencana peningkatan penerimaan daerah ini merupakan program yang bersifat *self corrected*. Hal ini berarti bahwa selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah sesuai potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan. Hal tersebut terutama berkaitan langsung dengan penerimaan yang rencana pembelanjaannya telah ditetapkan secara baku dalam cakupan anggaran satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dituntut untuk dapat membiayai kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat Padang Pariaman dengan menggali potensi pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp158.737.933.129,00 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.317.214.256.483,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp0,00 merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang dianggarkan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Pendekatan ini guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan untuk belanja daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan total anggaran sebesar Rp1.172.355.081.991,97 meliputi:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp783.442.218.483,48 digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan Pegawai ASN;
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp342.999.003.668,49 digunakan untuk mencatat pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
- c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan;
- d. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;

- e. Belanja Hibah, digunakan untuk mencatat pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp45.913.859.840,00; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi dengan total anggaran sebesar Rp167.398.553.172,02 meliputi :

- a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai dengan anggaran sebesar Rp1.087.632.000,00;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai yang dianggarkan sebesar Rp24.847.747.915,70;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai yang dianggarkan sebesar Rp24.270.093.725,01;
- d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi yang mencakup jalan, jaringan dan irigasi, yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai yang dianggarkan sebesar Rp112.159.475.731,31;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai yang dianggarkan sebesar Rp5.033.603.800,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa/nagari yang dianggarkan sebesar Rp189.895.665.817,80 yang terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa/nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dianggarkan sebesar Rp8.846.259.317,80.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang dianggarkan sebesar Rp181.049.406.500,00.

Kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah:

- a. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah setiap tahun, tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya, dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS), sesuai dengan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk pemerintahan desa/nagari sekurang-kurangnya sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah khususnya di daerah tertinggal, dan pusat-pusat pertumbuhan;
- e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa/nagari yang bersumber dari pendapatan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dengan prioritas menekan angka kemiskinan;
- g. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- i. Memantapkan infrastruktur transportasi dan sarana prasarana dasar, khususnya di daerah pedesaan dan perbatasan;
- j. Memantapkan diversifikasi energi melalui peningkatan konservasi energi sebagai pilar manajemen energi regional dan pemanfaatan energi;
- k. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodasi konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi;
- l. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost* dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet dan *service* kendaraan dinas);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tupoksi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian evaluasi dan perencanaan; dan
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen pemerintah.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah digunakan untuk mencatat SiLPA tahun sebelumnya pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan pembiayaan

dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah. Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp65.903.111.369,79 yang terdiri dari:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2024, sebesar Rp65.903.111.369,79;
- b. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan, sebesar Rp0,00;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sebesar Rp0,00;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan, sebesar Rp0,00;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp0,00; dan
- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp0,00.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebesar Rp2.206.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank Nagari.

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan Dana Cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah

yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebesar Rp0,00;

- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, sebesar Rp2.206.000.000,00;
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp0,00; dan
- d. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN, Koperasi, dan/atau Masyarakat, sebesar Rp0,00.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Nagari, Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, dan perusahaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan. Dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	158.737.933.129,00	144.739.185.746,43	91,18
Pendapatan Transfer	1.317.214.256.483,00	1.282.716.851.539,00	97,38
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.475.952.189.612,00	1.427.456.037.285,43	96,71
Belanja Operasi	1.172.355.081.991,97	1.099.842.195.038,68	93,81
Belanja Modal	167.398.553.172,02	155.053.257.852,00	92,63
Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	7.691.341.000,00	76,91
Belanja Transfer	189.895.665.817,80	188.070.241.980,00	99,04
Jumlah Belanja	1.539.649.300.981,79	1.450.657.035.870,68	94,22
Surplus/(Defisit)	(63.697.111.369,79)	(23.200.998.585,25)	36,42
Penerimaan Pembiayaan	65.903.111.369,79	65.906.541.289,79	100,01
Pengeluaran Pembiayaan	2.206.000.000,00	2.206.000.000,00	100,00
Pembiayaan Neto	63.697.111.369,79	63.700.541.289,79	100,01
SiLPA	0,00	40.499.542.704,54	0,00

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah berjalan memasuki paruh tahun dengan berbagai dinamika yang menyertainya mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator *influen*-nya. Sejalan dengan rencana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, dimana telah memberikan gambaran arah kebijakan umum terkait kondisi dan kebijakan anggaran.

Penyesuaian dimaksud dikarenakan beberapa hal antara lain: Pertama, penyesuaian target pendapatan, baik peningkatan maupun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2024 pengurangan target pendapatan pada pos-pos tertentu sebagai penyesuaian *riil* dari peningkatan kinerja ataupun penyesuaian dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta hambatan dan kendala yang terjadi, berdasarkan evaluasi hasil pencapaian target pada triwulan pertama dan kedua. Kedua, perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama semester pertama yang dalam implementasinya ternyata perlu untuk dilakukan peninjauan ulang program. Ketiga, adanya berbagai kebutuhan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya dalam perubahan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dinyatakan bahwa dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024, proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama tahun anggaran 2024, namun Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan setelah Persetujuan Bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2024.

Tabel 2. 5 Ringkasan Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan

Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Tambah/ (Kurang) (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)
Pendapatan	1.405.629.562.670,00	70.322.626.942,00	1.475.952.189.612,00
Belanja	1.558.262.094.379,00	(18.612.793.397,21)	1.539.649.300.981,79
Surplus/(Defisit)	(152.632.531.709,00)	88.935.420.339,21	(63.697.111.369,79)
Pembiayaan			
Penerimaan	155.132.531.709,00	(89.229.420.339,21)	65.903.111.369,79
Pengeluaran	2.500.000.000,00	(294.000.000,00)	2.206.000.000,00
Pembiayaan Neto	152.632.531.709,00	(88.935.420.339,21)	63.697.111.369,79

Pendapatan sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp1.405.629.562.670,00 dan setelah anggaran perubahan sebesar Rp1.475.952.189.612,00 dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp70.322.626.942,00 atau 5,00% sebagaimana terlihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan

Pendapatan	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Naik/Turun (%)
Pendapatan Asli Daerah	154.642.536.458,00	158.737.933.129,00	2,65
Pendapatan Transfer	1.250.987.026.212,00	1.317.214.256.483,00	5,29
Total Pendapatan	1.405.629.562.670,00	1.475.952.189.612,00	5,00

Pada pos belanja terjadi penurunan, dari anggaran semula sebesar Rp1.558.262.094.379,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.539.649.300.981,79 terjadi penurunan sebesar Rp18.612.793.397,21 atau 1,19%.

Rincian penambahan dan pengurangan belanja masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Anggaran Belanja Per SKPD Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	594.373.314.684,00	584.540.310.334,48	(9.833.004.349,52)	(1,65)
2	Dinas Kesehatan	184.591.352.054,00	179.095.909.583,00	(5.495.442.471,00)	(2,98)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	85.126.410.708,00	84.413.659.836,00	(712.750.872,00)	(0,84)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	145.843.027.809,00	144.113.790.391,51	(1.729.237.417,49)	(1,19)
5	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	7.512.914.240,00	8.849.315.981,00	1.336.401.741,00	17,79
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.390.305.865,00	10.025.279.610,00	(365.026.255,00)	(3,51)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.715.299.547,00	20.565.811.977,00	14.850.512.430,00	259,84
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.753.874.641,00	5.750.942.315,00	(2.932.326,00)	(0,05)
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.148.673.433,00	19.524.143.929,00	(624.529.504,00)	(3,10)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.618.679.913,00	5.265.961.120,00	(352.718.793,00)	(6,28)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.942.587.446,00	4.606.966.816,00	(335.620.630,00)	(6,79)
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.454.309.702,00	10.809.137.211,00	(645.172.491,00)	(5,63)
13	Dinas Perhubungan	23.306.925.042,00	23.849.577.569,00	542.652.527,00	2,33
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.586.029.451,00	7.223.070.393,00	(362.959.058,00)	(4,78)
15	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.388.589.804,00	7.624.439.915,00	(764.149.889,00)	(9,11)
16	Dinas Penanaman	5.514.773.261,00	5.068.805.116,00	(445.968.145,00)	(8,09)

No	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
	Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian				
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	17.708.787.213,00	21.788.390.143,00	4.079.602.930,00	23,04
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.833.627.964,00	4.393.993.350,00	(439.634.614,00)	(9,10)
19	Dinas Perikanan	5.618.580.021,00	5.390.552.797,00	(228.027.224,00)	(4,06)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.785.094.634,00	5.059.287.594,00	(725.807.040,00)	(12,55)
21	Sekretariat Daerah	42.165.929.468,00	42.353.590.445,00	187.660.977,00	0,45
22	Sekretariat DPRD	41.852.114.013,00	43.716.733.413,00	1.864.619.400,00	4,46
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	7.619.422.062,00	7.837.539.023,00	218.116.961,00	2,86
24	Badan Pengelola Keuangan Daerah	216.610.569.943,00	219.435.489.568,80	2.824.919.625,80	1,30
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.292.759.471,00	15.187.088.596,00	(105.670.875,00)	(0,69)
26	Inspektorat Daerah	7.008.160.683,00	6.816.259.690,00	(191.900.993,00)	(2,74)
27	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung	884.077.794,00	801.972.557,00	(82.105.237,00)	(9,29)
28	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam	942.186.096,00	881.504.704,00	(60.681.392,00)	(6,44)
29	Pemerintah Kecamatan Batang Gasan	822.033.378,00	773.993.568,00	(48.039.810,00)	(5,84)
30	Pemerintah Kecamatan Batang Anai	1.101.675.845,00	948.072.718,00	(153.603.127,00)	(13,94)
31	Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung	915.548.380,00	824.262.987,00	(91.285.393,00)	(9,97)
32	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang	850.406.584,00	749.648.215,00	(100.758.369,00)	(11,85)
33	Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung	954.068.590,00	951.810.726,00	(2.257.864,00)	(0,24)

No	SKPD	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
34	Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris	924.017.361,00	818.646.927,00	(105.370.434,00)	(11,40)
35	Pemerintah Kecamatan Padang Sago	787.915.176,00	732.922.343,00	(54.992.833,00)	(6,98)
36	Pemerintah Kecamatan Patamuan	895.591.298,00	843.368.117,00	(52.223.181,00)	(5,83)
37	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging	977.235.889,00	868.332.593,00	(108.903.296,00)	(11,14)
38	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	975.801.675,00	847.035.012,00	(128.766.663,00)	(13,20)
39	Pemerintah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	893.509.538,00	826.837.011,00	(66.672.527,00)	(7,46)
40	Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakis	853.146.683,00	798.725.794,00	(54.420.889,00)	(6,38)
41	Pemerintah Kecamatan V Koto Timur	889.674.865,00	745.638.280,00	(144.036.585,00)	(16,19)
42	Pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	907.487.370,00	846.264.603,00	(61.222.767,00)	(6,75)
43	Pemerintah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	1.023.128.817,00	1.211.578.782,00	188.449.965,00	18,42
44	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	51.902.475.968,00	31.872.639.328,00	(20.029.836.640,00)	(38,59)
Jumlah		1.558.262.094.379,00	1.539.649.300.981,79	(18.612.793.397,21)	(1,19)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan terjadi penurunan belanja pada perubahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp18.612.793.397,21 atau 1,19%.

Persentase penurunan belanja pada perubahan anggaran terbesar terjadi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu berkurang sebesar Rp20.029.836.640,00 atau 38,59%. Sementara itu, persentase kenaikan terbesar terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebesar Rp14.850.512.430,00 atau 259,84%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan Entitas

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara luas sejak Tahun 2018.

Tabel 3. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.475.952.189.612,00	1.427.456.037.285,43	96,71	1.394.096.335.144,51
2	Belanja Daerah	1.539.649.300.981,79	1.450.657.035.870,68	94,22	1.405.956.633.170,01
	Belanja Operasi	1.172.355.081.991,97	1.099.842.195.038,68	93,81	1.034.417.684.452,25
	Belanja Modal	167.398.553.172,02	155.053.257.852,00	92,63	188.292.502.818,76
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	7.691.341.000,00	76,91	1.729.558.250,00
	Belanja Transfer	189.895.665.817,80	188.070.241.980,00	99,04	181.516.887.649,00

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.475.952.189.612,00 dan terealisasi sebesar Rp1.427.456.037.285,43 atau sebesar 96,71%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.394.096.335.144,51 realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp33.359.702.140,92 atau sebesar 2,39%.

Tabel 3. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
01.02.01	Dinas Kesehatan	21.814.813.890,00	19.454.586.207,00	89,18
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	49.352.802.200,00	44.760.221.828,00	90,69
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.085.000.000,00	1.204.821.949,00	111,04
01.04.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	550.000.000,00	606.458.000,00	110,27

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
02.15.01	Dinas Perhubungan	42.000.000,00	32.045.000,00	76,30
03.25.01	Dinas Perikanan	30.000.000,00	30.040.000,00	100,13
04.01.01	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	66.800.000,00	133,60
05.02.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.403.027.573.522,00	1.361.301.064.301,43	97,03
Total Pendapatan		1.475.952.189.612,00	1.427.456.037.285,43	96,71

Penerimaan Pendapatan Daerah terutama Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Padang Pariaman belum optimal disebabkan oleh:

- 1) Penetapan target yang tidak berdasarkan data kenyataan di lapangan karena belum melalui survei terhadap potensi;
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;
- 3) Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan;
- 4) Belum lengkapnya data tentang pajak dan retribusi daerah;
- 5) Perannya yang relatif kecil dalam total penerimaan daerah, sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat;
- 6) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar;
- 7) Kurangnya koordinasi internal dan dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- 8) Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Optimalisasi sumber pendapatan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial (kurang koordinasi), sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada

sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan belanja sebesar Rp1.539.649.300.981,79 dan terealisasi sebesar Rp1.450.636.050.120,68 atau sebesar 94,22%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.405.956.633.170,01 realisasi belanja tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp44.679.416.950,67 atau 3,18%.

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2024 dijelaskan pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	584.540.310.334,48	562.040.228.939,00	96,15
01.02.01	Dinas Kesehatan	179.095.909.583,00	164.758.176.148,00	91,99
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	84.413.659.836,00	77.398.474.566,00	91,69
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	144.113.790.391,51	132.029.404.842,00	91,61
01.04.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	8.849.315.981,00	8.304.756.928,00	93,85
01.05.01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.025.279.610,00	9.557.447.797,00	95,33
01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.565.811.977,00	16.547.034.741,00	80,46
01.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.750.942.315,00	5.237.935.350,00	91,08
02.09.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.524.143.929,00	18.616.541.001,00	95,35
02.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.265.961.120,00	5.034.580.143,00	95,61
02.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.606.966.816,00	3.978.790.077,00	86,36
02.14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.809.137.211,00	10.488.768.846,00	97,04
02.15.01	Dinas Perhubungan	23.849.577.569,00	23.607.465.373,00	98,98
02.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.223.070.393,00	7.053.925.558,00	97,66
02.17.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.624.439.915,00	7.304.544.725,00	95,80
02.18.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	5.068.805.116,00	4.748.767.366,00	93,69
02.19.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	21.788.390.143,00	18.036.017.031,00	82,78
02.23.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.393.993.350,00	4.108.107.936,00	93,49
03.25.01	Dinas Perikanan	5.390.552.797,00	5.074.955.690,00	94,15
03.27.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.059.287.594,00	4.911.100.498,00	97,07
04.01.01	Sekretariat Daerah	42.353.590.445,00	40.079.510.985,00	94,63
04.02.01	Sekretariat DPRD	43.716.733.413,00	39.894.659.613,00	91,26
05.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	7.837.539.023,00	7.198.074.131,00	91,84
05.02.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	219.435.489.568,80	212.908.222.357,00	97,03

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
05.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.187.088.596,00	10.724.242.539,00	70,61
06.01.01	Inspektorat Daerah	6.816.259.690,00	6.540.849.430,00	95,96
07.01.01	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung	801.972.557,00	753.227.502,00	93,92
07.01.02	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam	881.504.704,00	723.497.082,00	82,08
07.01.03	Pemerintah Kecamatan Batang Gasan	773.993.568,00	672.663.221,00	86,91
07.01.04	Pemerintah Kecamatan Batang Anai	948.072.718,00	767.334.041,00	80,94
07.01.05	Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung	824.262.987,00	777.520.801,00	94,33
07.01.06	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang	749.648.215,00	636.197.817,00	84,87
07.01.07	Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung	951.810.726,00	821.139.270,00	86,27
07.01.08	Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris	818.646.927,00	711.823.765,00	86,95
07.01.09	Pemerintah Kecamatan Padang Sago	732.922.343,00	679.281.832,00	92,68
07.01.10	Pemerintah Kecamatan Patamuan	843.368.117,00	725.338.060,00	86,00
07.01.11	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging	868.332.593,00	766.195.381,00	88,24
07.01.12	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	847.035.012,00	797.479.604,00	94,15
07.01.13	Pemerintah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	826.837.011,00	762.260.608,00	92,19
07.01.14	Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakis	798.725.794,00	715.919.960,00	89,63
07.01.15	Pemerintah Kecamatan V Koto Timur	745.638.280,00	636.327.513,00	85,34
07.01.16	Pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	846.264.603,00	731.536.931,00	86,44
07.01.17	Pemerintah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	1.211.578.782,00	1.098.825.569,00	90,69
08.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	31.872.639.328,00	31.697.884.303,68	99,45
Jumlah Belanja		1.539.649.300.981,79	1.450.657.035.870,68	94,22

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel 3.3 tersebut, rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2024 yang dibagi dalam kelompok belanja operasi pada tabel 3.4, belanja modal pada tabel 3.5, belanja tidak terduga pada tabel 3.6 dan belanja transfer pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	560.915.481.712,48	538.266.017.657,00	95,96
01.02.01	Dinas Kesehatan	173.763.565.339,00	159.861.438.743,00	92,00
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	75.923.357.411,00	69.352.017.519,00	91,34
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.542.071.751,19	35.403.646.429,00	83,22
01.04.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	7.279.437.721,30	6.738.787.804,00	92,57
01.05.01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.936.326.010,00	9.478.747.797,00	95,39

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.382.961.136,00	5.227.531.241,00	97,11
01.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.748.542.315,00	5.237.935.350,00	91,12
02.09.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.524.143.929,00	18.616.541.001,00	95,35
02.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.145.761.120,00	4.918.755.668,00	95,59
02.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.606.966.816,00	3.978.790.077,00	86,36
02.14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.765.537.211,00	9.530.685.026,00	97,60
02.15.01	Dinas Perhubungan	23.849.577.569,00	23.607.465.373,00	98,98
02.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.212.414.393,00	7.043.425.558,00	97,66
02.17.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.587.118.915,00	7.269.035.825,00	95,81
02.18.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	5.068.805.116,00	4.748.767.366,00	93,69
02.19.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	13.769.859.713,00	12.393.404.459,00	90,00
02.23.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.214.493.350,00	3.929.123.136,00	93,23
03.25.01	Dinas Perikanan	5.371.552.797,00	5.056.955.690,00	94,14
03.27.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.059.287.594,00	4.911.100.498,00	97,07
04.01.01	Sekretariat Daerah	41.822.970.445,00	39.729.141.705,00	94,99
04.02.01	Sekretariat DPRD	43.360.623.413,00	39.655.050.113,00	91,45
05.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	7.325.455.023,00	6.690.771.381,00	91,34
05.02.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	19.044.823.751,00	16.663.392.377,00	87,50
05.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.153.088.596,00	10.690.242.539,00	70,55
06.01.01	Inspektorat Daerah	6.816.259.690,00	6.540.849.430,00	95,96
07.01.01	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung	774.883.557,00	726.143.502,00	93,71
07.01.02	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam	881.504.704,00	723.497.082,00	82,08
07.01.03	Pemerintah Kecamatan Batang Gasan	773.993.568,00	672.663.221,00	86,91
07.01.04	Pemerintah Kecamatan Batang Anai	921.072.718,00	741.929.857,00	80,55
07.01.05	Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung	824.262.987,00	777.520.801,00	94,33
07.01.06	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang	731.648.215,00	618.197.817,00	84,49
07.01.07	Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung	907.310.726,00	779.139.270,00	85,87
07.01.08	Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris	813.896.927,00	707.073.765,00	86,88

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
07.01.09	Pemerintah Kecamatan Padang Sago	732.922.343,00	679.281.832,00	92,68
07.01.10	Pemerintah Kecamatan Patamuan	843.368.117,00	725.338.060,00	86,00
07.01.11	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging	838.516.483,00	736.572.381,00	87,84
07.01.12	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	840.035.012,00	790.479.604,00	94,10
07.01.13	Pemerintah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	826.837.011,00	762.260.608,00	92,19
07.01.14	Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakis	798.725.794,00	715.919.960,00	89,63
07.01.15	Pemerintah Kecamatan V Koto Timur	737.138.280,00	629.910.713,00	85,45
07.01.16	Pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	834.264.603,00	719.936.931,00	86,30
07.01.17	Pemerintah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	1.211.578.782,00	1.098.825.569,00	90,69
08.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	31.872.639.328,00	31.697.884.303,68	99,45
Jumlah Belanja		1.172.355.081.991,97	1.099.842.195.038,68	93,81

Tabel 3. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.624.828.622,00	23.774.211.282,00	100,63
01.02.01	Dinas Kesehatan	5.332.344.244,00	4.896.737.405,00	91,83
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	8.490.302.425,00	8.046.457.047,00	94,77
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.571.718.640,32	96.625.758.413,00	95,13
01.04.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	1.569.878.259,70	1.565.969.124,00	99,75
01.05.01	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	88.953.600,00	78.700.000,00	88,47
01.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.182.850.841,00	11.319.503.500,00	74,55
01.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.400.000,00	0,00	0,00
02.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	120.200.000,00	115.824.475,00	96,36
02.14.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.043.600.000,00	958.083.820,00	91,81
02.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.656.000,00	10.500.000,00	98,54
02.17.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	37.321.000,00	35.508.900,00	95,14
02.19.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	8.018.530.430,00	5.642.612.572,00	70,37
02.23.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	179.500.000,00	178.984.800,00	99,71
03.25.01	Dinas Perikanan	19.000.000,00	18.000.000,00	94,74

Kode	SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%
04.01.01	Sekretariat Daerah	530.620.000,00	350.369.280,00	66,03
04.02.01	Sekretariat DPRD	356.110.000,00	239.609.500,00	67,29
05.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	512.084.000,00	507.302.750,00	99,07
05.02.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	495.000.000,00	483.247.000,00	97,63
05.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00
07.01.01	Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung	27.089.000,00	27.084.000,00	99,98
07.01.04	Pemerintah Kecamatan Batang Anai	27.000.000,00	25.404.184,00	94,09
07.01.06	Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
07.01.07	Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung	44.500.000,00	42.000.000,00	94,38
07.01.08	Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
07.01.11	Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging	29.816.110,00	29.623.000,00	99,35
07.01.12	Pemerintah Kecamatan Sungai Limau	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
07.01.15	Pemerintah Kecamatan V Koto Timur	8.500.000,00	6.416.800,00	75,49
07.01.16	Pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam	12.000.000,00	11.600.000,00	96,67
Jumlah Belanja		167.398.553.172,02	155.053.257.852,00	92,63

Tabel 3. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024

Kode	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
04.04.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	10.000.000.000,00	7.691.341.000,00	76,91
Jumlah Belanja		10.000.000.000,00	7.691.341.000,00	76,91

Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024

Kode	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
04.04.01	Badan Pengelola Keuangan Daerah	189.895.665.817,80	188.070.241.980,00	99,04
Jumlah Belanja		189.895.665.817,80	188.070.241.980,00	99,04

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Selain kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 juga mengacu kepada kebijakan akuntansi secara umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) beserta Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman entitas pelaporan dalam hal ini adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Dalam Tahun 2024 Satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanian;
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Perhubungan;

14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Perikanan;
20. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
24. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung;
28. Pemerintah Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam;
29. Pemerintah Kecamatan Batang Gasan;
30. Pemerintah Kecamatan Batang Anai;
31. Pemerintah Kecamatan Enam Lingkung;
32. Pemerintah Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
33. Pemerintah Kecamatan Lubuk Alung;
34. Pemerintah Kecamatan Nan Sabaris;
35. Pemerintah Kecamatan Padang Sago;
36. Pemerintah Kecamatan Patamuan;
37. Pemerintah Kecamatan Sungai Geringging;
38. Pemerintah Kecamatan Sungai Limau;
39. Pemerintah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
40. Pemerintah Kecamatan Ulakan Tapakis;
41. Pemerintah Kecamatan V Koto Timur;
42. Pemerintah Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
43. Pemerintah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak; dan
44. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang terdiri dari PPKD (BUD), SKPD dan dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2024 terdiri dari:

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran memuat informasi mengenai Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk pos-pos yang terdiri dari: Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak dan Bukan Pajak, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas.

D. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari kegiatan operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/defisit-LO dan penyajiannya disandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

E. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama tahun anggaran 2024.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari: Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap dan Ekuitas akhir.

G. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis akrual digunakan baik dalam pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, termasuk Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara basis kas, digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau dikeluarkan dari RKUD.

4.3. Dasar Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis (*historical cost*), yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

A. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Beberapa ketentuan terkait dengan pengakuan Pendapatan LRA adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
2. Pendapatan kas yang diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
3. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
4. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
5. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
6. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
3. Pengembalian yang bersifat sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan- LRA;
4. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama;
5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan

6. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada saat terjadi Pendapatan-LRA;

Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian jenis pendapatan lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat SP2D GU/GU Nihil/TU-Nihil terbit; dan
3. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah dan diukur berdasarkan asas bruto penilaian.

Pengungkapan

1. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam CaLK;
2. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CaLK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan;

3. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional;
4. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan beban adalah:
 - a. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - c. Penjelasan mengenai sebab dan kaitan belanja dengan akun laporan keuangan lainnya misalnya berkaitan dengan timbulnya hutang piutang, timbulnya aset dan informasi mengenai wanprestasi pekerjaan; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

C. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan

1. Transfer masuk diakui pada saat terjadinya penerimaan kas ke RKUD;
2. Transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer;
3. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, diakui saat terjadinya transfer keluar dari RKUD;
4. Transfer keluar atau transfer pada LRA disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos transfer;
5. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), transfer diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD;
6. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi;
7. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus kas keluar aktivitas operasi;
8. Pendapatan transfer pada Laporan Operasional dilakukan pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
9. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakui sebagai piutang transfer;
10. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan

bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan Laporan Keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa;

11. Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas Pendapatan Transfer-LO dan diakui sebagai Pendapatan Transfer Diterima Dimuka; dan
12. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengukuran

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah yang didukung dengan dokumen yang sah;
3. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
4. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional serta perbandingan dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Akun Penerimaan Pembiayaan meliputi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Pencairan dana cadangan diakui ketika Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan dan mengurangi saldo dana cadangan yang tercatat tersebut dianggarkan dalam belanja SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah mencakup Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain, Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pinjaman Daerah dari Masyarakat;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah mencakup Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat, Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD;

- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD;
- 2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Penggunaan SiLPA mencakup Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan nomor yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran; dan
 - d. Penyertaan Modal Daerah merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengukuran

- 1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan;
- 2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto;
- 3. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan; dan
- 4. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

E. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayarannya secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*);
2. Pengakuan Pendapatan-LO tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:
 1. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
 2. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan;
 3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan;
3. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD dan PPKD adalah sebagai berikut:
 - a. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) PAD Melalui Penetapan

Merupakan kelompok pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (*official assessment*) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui pada saat diterbitkannya penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

Contoh Pajak Daerah yang melalui penetapan yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Contoh Retribusi Daerah yang melalui penetapan yaitu Retribusi IMB, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Menara Telekomunikasi, Retribusi Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah Dipotong, dan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus.

Pendapatan ini diakui pada saat:

- (1) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB) apabila berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran oleh wajib pajak daerah;
- (3) Diterbitkannya penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas pendapatan terkait apabila wajib pajak tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) dan tidak membayar kewajibannya sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan;
- (4) Apabila wajib pajak melakukan kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya, maka atas kelebihan pembayaran tersebut bisa di kredit pajaknya. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka, dan apabila kelebihan pembayaran pajak tersebut telah dikreditkan, maka diakui sebagai Pendapatan Pajak - LO pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
- (5) Apabila wajib pajak melakukan pembayaran di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan, Pendapatan Pajak-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah berlalu.

Selain pendapatan pajak tersebut, PAD yang masuk ke dalam kategori melalui penetapan adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, Pajak sarang Burung Walet, dan Pengambilan Bahan Mineral bukan Logam dan Batuan, Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Terminal, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika diterima di Rekening Kas Umum Daerah baik secara langsung maupun melalui Bendahara Penerimaan.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui berdasarkan Hasil RUPS atau dokumen yang dipersamakan. Contoh: pendapatan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

Contoh:

- a) Untuk Pendapatan Transfer DAU diakui setiap awal bulan atau akhir bulan sebelumnya sebesar jumlah kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Untuk Pendapatan Transfer DAK diakui pada saat pengajuan pencairan dana disampaikan oleh PPKD ke Menteri Keuangan sesuai jumlah yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Untuk Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- d) Untuk Pendapatan Transfer yang merupakan tunda salur atau kurang bayar diakui pada saat diterimanya peraturan perundang-undangan tentang Tunda Salur atau Kurang Bayar. Apabila Peraturan perundang-undangan tentang Tunda Salur atau Kurang Bayar diterima sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka pendapatan tunda salur/kurang bayar tersebut dicatat pada laporan keuangan

tahun berkenaan. Apabila peraturan perundang-undangan tentang Tunda Salur atau Kurang Bayar diterima setelah laporan keuangan diterbitkan, maka pendapatan tunda salur/kurang bayar tersebut dicatat pada laporan keuangan tahun berjalan;

- e) Untuk Pendapatan Transfer dari Provinsi diakui setiap akhir triwulan tahun yang berkenaan sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat;
 - f) Untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut sesuai Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang ada;
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan yang terdiri dari :

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga atau Sejenis, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

c) Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering/rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah dan atau diterima pada SKPD.

Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment* dicatat sebesar nilai pajak/retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi

daerah, dan yang dicantumkan dalam SKPDKB/ SKRDKB dan SKPDKBT/SKRDKBT;

3. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official assessment*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam SKPD/SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKPD/SKRD mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman;
4. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses eksekusi jaminan dicatat sebesar nilai jaminan yang dapat direalisasikan;
5. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil dijual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut;
6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
7. Pendapatan Operasional Non Pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut; dan
11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian Pendapatan-LO dijelaskan CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO antara lain adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

F. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
 Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset
 Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
 Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)
4. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
6. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas..
7. Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
8. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya.

9. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Pengukuran

1. Beban Pegawai

- a. Beban diukur dan dicatat dalam satuan rupiah sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.
- b. Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi beban pegawai dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

2. Beban Barang dan Jasa

a. Beban Barang

Beban dicatat sebesar pemakaian Barang/persediaan. Penghitungan beban barang/persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD mencatat persediaan dengan metode sebagai berikut :

1) Sistem Perpetual

Dalam sistem perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Sistem ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pencatatan perpetual terhadap persediaan obat-obatan pada Gudang Farmasi di Dinas Kesehatan, Gudang Obat di RSUD, dan persediaan obat-obatan di OPD lainnya, dengan menggunakan metode FIFO.

2) Sistem Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode ini untuk semua persediaan yang dimiliki SKPD kecuali persediaan obat-obatan. Dalam hal ini metode yang dipakai adalah metode harga pembelian terakhir.

b. Beban Jasa

- 1) Beban jasa terdiri atas Beban jasa, barang, pemeliharaan, dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen; dan

- 2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Bunga

Beban bunga utang dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

d. Beban Subsidi

- 1) Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan; dan
- 2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban Hibah

- 1) Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku; dan
- 2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan *audited* terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

f. Beban Bantuan Sosial

- 1) Pengukuran beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga; dan
- 2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan beban piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Beban Lain-lain

- 1) Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
- 2) Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas.

i. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus.

j. Beban Tidak terduga

k. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut.

Pengungkapan

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam CaLK.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban;
2. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

G. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Kas dan setara kas diakui pada saat:
 - a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
 - b. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - c. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.
2. Penambahan Kas Daerah dicatat pada saat diterima di RKUD yang berasal dari:
 - a. Penyetoran PAD;
 - b. Penyetoran pengembalian sisa UYHD dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
3. Pengeluaran Kas Daerah dicatat pada saat dikeluarkan dari RKUD yang digunakan untuk:
 - a. Uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
 - b. Pembayaran tagihan pihak ketiga;
 - c. belanja daerah, antara lain pembayaran belanja gaji, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga dan belanja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, pemberian dana bergulir; dan
- e. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas serta dokumen-dokumen yang dijadikan dasar manajemen kas, dan disajikan pada Aset Lancar;
2. Rincian kas yang disajikan pada Aset Non Lancar beserta penjelasannya;
3. Kebijakan manajemen setara kas; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

H. Piutang

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria :

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;

3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang sesuai dengan kelompok piutangnya adalah sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/dokumen yang dipersamakan.

Perbedaan dasar pengakuan Piutang pendapatan dengan mekanisme sistem *official assessment* dengan mekanisme sistem *self assessment* adalah pada *self assessment* wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan sendiri pula berdasarkan hasil inventarisasi SKPD untuk mengetahui adanya pajak yang kurang bayar atau lebih bayar. Jika diketahui kurang bayar, maka pemerintah daerah perlu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Jika tidak terealisasi sampai akhir tahun maka diakuiilah menjadi piutang. Demikian juga dengan mekanisme sistem *official assessment*, jika tidak terealisasi sesuai jumlah yang ditetapkan maka jumlah ini diakui sebagai piutang pada akhir tahun.

Pengakuan piutang tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah seharusnya mendapatkan haknya, akan tetapi belum mendapatkan pembayaran oleh wajib pajak.

2. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.

Pengakuan piutang tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah sudah seharusnya mendapatkan haknya, akan tetapi belum mendapatkan pembayaran oleh wajib retribusi.

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD, BUMN maupun swasta (*joint venture*).

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang sewa dan piutang dari angsuran/cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila per 31 Desember telah ada dokumen sumber resmi yang diakui dan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atas DAU, DAK dan DBH yang terutang dan akan dibayarkan ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah mengakui jumlah tersebut sebagai piutang di neraca. Sebaliknya, sepanjang Pemerintah Pusat belum menetapkan dan mengakui adanya DAU, DAK dan DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran, maka pemerintah daerah tidak dapat mengakui adanya piutang. Informasi tentang hal ini cukup diungkapkan dalam CaLK.

6. Piutang Transfer Antar Daerah, terdiri dari:

Dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut gubernur/kepala daerah telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

7. Piutang lainnya

Diakui pada saat munculnya Peristiwa yang menimbulkan hak tagih, berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Terkait Uang Muka, piutang ini terjadi apabila terdapat uang muka pekerjaan pengadaan barang dan jasa maupun hal yang mengharuskannya uang muka tidak terealisasi sebagaimana harusnya hak daerah.

Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut dan apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah atau Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran Piutang berdasarkan jenis piutang adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah berdasarkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
2. Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran dan biaya-biaya yang harus ditanggung pembeli, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan yang diakui oleh pihak yang melakukan transfer dan didukung dengan adanya dokumen resmi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
4. Pengukuran piutang lainnya adalah sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah yang didukung oleh dokumen yang sah.

Khusus untuk piutang yang bersifat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran piutang:

1. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

2. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu : penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang ganti rugi yang tidak dapat ditagih oleh instansi/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL. Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Setelah mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus-tagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan untuk pemerintah daerah, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Miliar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Miliar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Sedangkan penghapusbukuan piutang adalah kebijakan internal manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

3. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berhutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Lancar, apabila pelunasan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan lewat dari tanggal jatuh tempo sampai dengan enam bulan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
3. Kualitas Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
4. Kualitas Macet, apabila belum melakukan pelunasan lebih dari 12 bulan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Penggolongan Kualitas Piutang bukan Pajak dan Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan tanggal jatuh tempo;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lewat dari tanggal jatuh tempo sampai dengan 12 bulan setelah jatuh tempo;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 12 bulan sampai dengan 24 bulan setelah jatuh tempo; dan
4. Kualitas Macet, jika umur piutang diatas 24 bulan setelah jatuh tempo.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	25 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

Tabel 4. 2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2.	1 – 3 tahun	Kurang Lancar	25%
3.	3 – 5 tahun	Diragukan	50%
4.	> 5 tahun	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Tabel 4. 3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak Selain Retribusi

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 bulan	Lancar	0,5%
2	1 – 3 bulan	Kurang Lancar	25%
3	3 – 12 bulan	Diragukan	50%
4	> 12 bulan	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 25% (dua puluh lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Tabel 4. 4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi

No.	Uraian	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	s.d. tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	25%
3.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	50%
4.	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis piutang, saldo menurut umur dan kualitas untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

I. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah; dan
- c. Akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu :

a. Pendekatan aset

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama

satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

b. Pendekatan beban

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerapkan pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban, artinya pada saat terjadi pembelian persediaan, akan dibukukan pada akun beban, namun pada saat pemakaian persediaan tidak dibukukan (karena metode Periodik) pada akhir periode laporan dihitung nilai persediaan dengan cara jumlah persediaan yang ada dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Selanjutnya dihitung jumlah saldo akhir persediaan dengan cara menghitung sisa persediaan di gudang, kemudian dibukukan pada akun persediaan.

Khusus Persediaan Obat-obatan, pengakuan persediaan terbatas hanya sampai persediaan yang ada di puskesmas-puskesmas, tidak termasuk persediaan yang ada pada sub unit di bawah Puskesmas.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3. Selisih Persediaan

Selisih persediaan dapat terjadi antara catatan persediaan menurut Bendahara Barang/Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*);

Persediaan di SKPD dinilai dengan menggunakan metode harga pembelian terakhir. Khusus untuk persediaan obat-obatan di gudang Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD menggunakan metode FIFO kecuali persediaan obat-obatan di RSUD yang dibeli terakhir namun masa berlakunya (*expired*) lebih singkat dari yang dibeli sebelumnya maka digunakan metode LIFO.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Sistem Pencatatan Persediaan.

Persediaan dicatat dengan sistem perpetual (*perpetual methods*) dan sistem fisik yang disebut juga sistem periodik (*periodic methods*).

1. Sistem Perpetual

Dalam sistem perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Sistem ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pencatatan perpetual terhadap persediaan obat-obatan pada Gudang Farmasi di Dinas Kesehatan, Gudang Obat di RSUD, dan persediaan obat-obatan di SKPD lainnya, dengan menggunakan metode FIFO.

2. Sistem Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menggunakan metode ini untuk semua persediaan yang dimiliki SKPD kecuali persediaan obat-obatan. Dalam hal ini metode yang dipakai adalah metode harga pembelian terakhir.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian dan pencatatan persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang/kadaluarsa.

J. Investasi

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal, suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.

Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu :

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi non permanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;

3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
7. Perubahan pos investasi.

K. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Tanah untuk gedung dan bangunan; dan
- b. Tanah untuk bukan gedung dan bangunan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (Dua Belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap, berupa alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu dan peralatan olahraga.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa mechanical engineering (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin air

conditioning), dan komponen penunjang lain yang berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah bangunan gedung, monumen, bangunan menara, tugu titik kontrol/prasasti.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, jaringan dan irigasi tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, jaringan dan irigasi adalah jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi (biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya).

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan

1. Tanah

Aset tetap tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah daerah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;
- b. dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;
- c. dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;
- d. perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;
 - 2) dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;
 - 3) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan;

- 4) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

Tanah Wakaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah daerah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.

2. Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Untuk itu, suatu aset diakui sebagai peralatan dan mesin jika memenuhi kriteria tersebut diatas.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi kas umum negara/daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam laporan realisasi anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin pada neraca dan sebagai Pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.

3. Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Untuk itu, suatu aset diakui sebagai gedung dan bangunan jika memenuhi kriteria tersebut diatas.

Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.

Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Perolehan gedung dan bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Untuk dapat diakui sebagai jalan, irigasi, dan jaringan, maka jalan, irigasi, dan jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, jaringan dan irigasi diakui pada saat jalan, jaringan dan irigasi telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, jaringan dan irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya sebagai berikut:

- a. apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset tetap dalam renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
- b. apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan;
- c. apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir a dan b diatas adalah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Perolehan aset tetap lainnya, selain aset tetap dalam renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan.

Suatu konstruksi dalam pengerjaan akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai berita acara penyelesaian pekerjaan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. apabila aset telah selesai dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;
- b. apabila aset tetap telah selesai dibangun, berita acara penyelesaian pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai aset tetap definitifnya;
- c. apabila aset telah selesai dibangun yang didukung dengan bukti yang sah walaupun berita acara penyelesaian pekerjaan belum diperoleh, namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan;
- d. apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
- e. apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan) karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tetap tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut konstruksi dalam pengerjaan dapat dihapusbukukan;
- f. apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam beberapa kasus, suatu konstruksi dalam pengerjaan dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian konstruksi dalam pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.

Apabila suatu konstruksi dalam pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan.

Namun, apabila pembangunan konstruksi dalam pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka konstruksi dalam pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut termasuk dalam harga perolehan tanah.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

Untuk aset tetap tanah, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan tanah dikapitalisasi. Tanah disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut tanpa mengurangi akumulasi penyusutan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Apabila biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun diakui dan disajikan sebagai ekstra komptabel.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan PBG, notaris, dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, gedung dan bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk gedung dan bangunan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum. Gedung dan bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, jaringan dan irigasi dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, jaringan dan irigasi meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan irigasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

Jalan, jaringan dan Irigasi yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk jalan, jaringan dan irigasi tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum. Jalan, jaringan dan irigasi disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap dalam renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung,

yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Nilai satuan minimum perolehan aset tetap lainnya berupa tanaman adalah Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per batang. Apabila biaya perolehan aset tetap lainnya berupa tanaman kurang dari Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) maka aset tetap lainnya berupa tanaman tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun diakui dan disajikan sebagai ekstra komptabel. Untuk aset tetap lainnya berupa hewan dan biota perairan dihitung sebagai aset tetap lainnya adalah indukan, sedangkan anakan tercatat sebagai persediaan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi dalam pengerjaan tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - b. pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
6. Untuk KDP perlu diungkapkan:
 - a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian pada tanggal neraca;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan tanggal neraca;
 - e. jumlah retensi (yaitu persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

L. Dana Cadangan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme-LS.

Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

M. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan jangka panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan penjualan angsuran.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah/dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

b. Tagihan tuntutan kerugian daerah,

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang - undangan.

a. Kemitraan dengan pihak ketiga-sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa;

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP);

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*).

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*).

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB).

Untuk dapat diakui sebagai ATB, suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.

Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. Aset lain-lain
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan atau direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

1. Tagihan jangka Panjang
 - a. Tagihan penjualan angsuran.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKPJM) dan dokumen lainnya yang dipersamakan.
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa.

Dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan dengan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build Transfer Operate-BTO*)

Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build Transfer Operate-BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud
 - a. Pengukuran pada saat perolehan

Secara umum ATB awalnya diukur pada saat perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

b. Pengukuran setelah perolehan

Pengeluaran setelah perolehan dari ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi dimasa datang atau jasa potensial yang terkandung pada ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.

4. Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage asset*)

Aset Tak Berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

5. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

6. Aset lain-lain

Yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain antara lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat (nilai perolehan aset tetap yang direklasifikasi beserta akumulasi penyusutannya) atau nilai bukunya, dengan tetap memperhitungkan pembebanan penyusutan untuk aset lain-lain tersebut.

7. Penurunan nilai (*impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji ATB dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapan pun terdapat indikasi bahwa ATB mengalami penurunan nilai.

Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penghentian dan pelepasan ATB

Aset Tak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepas atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara:

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
- c. D hibahkan; dan
- d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

N. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Pengakuan dan Pengukuran

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

Pengungkapan

Pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

1. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
2. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Memutakhiran pengungkapan kondisi pada tanggal pelaporan.

1. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
2. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

Pengungkapan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan.

Apabila peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

1. sifat peristiwa; dan
2. estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

Berikut adalah contoh peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

1. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
2. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
3. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
4. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
5. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
6. dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak signifikan.

O. Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

1. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2. Mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah padang pariaman yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1. Disediakan oleh mitra, yang:
 - a. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
2. Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Pengakuan dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Hal-Hal yang diatur dalam pengakuan dan pengukuran aset adalah sebagai berikut :

1. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang di partisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa saja publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan:
 - b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
2. Pernyataan kebijakan ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam Poin 1 huruf (a) terpenuhi.
3. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan poin 1 (atau poin 2-untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam poin 4.
4. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud poin 1 huruf (a) dan poin 1 huruf (b) (atau poin 2 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasi nya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
5. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur aset tak berwujud.
6. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur akuntansi aset tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur akuntansi aset tak berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
7. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

8. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud poin 1 (atau poin 2-untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam poin 4, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam poin 9.
9. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud poin 8 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud poin 3, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
10. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
11. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a. pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - b. pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - 1) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - 2) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.
12. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud poin 8 sebagai kewajiban keuangan.
13. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam poin 13 huruf (a), walaupun

jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

14. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana poin 8 berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam pernyataan kebijakan ini.
15. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud poin 8;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
16. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud poin 15 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud poin 15 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
17. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi. Skema pemberian hak usaha kepada mitra.
18. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan poin 8 sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
19. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) sebagaimana dimaksud poin 18 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
20. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi

konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban-pendapatan tangguhan.

21. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun mengurangi nilai kewajiban-pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.
22. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud poin 12 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud poin 18, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud poin 8 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud poin 9.
23. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam poin 22 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana poin 12 sampai dengan poin 21. Kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi.
24. Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. pendapatan lainnya
25. Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud poin 18 sampai dengan poin 21, berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan.

Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan :

1. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;

2. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
3. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - a. hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - b. hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - c. nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - d. hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - e. opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - f. ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - g. ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
4. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

Pengungkapan merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai kebijakan akuntansi lain tersebut.

Pengungkapan disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

P. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
3. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari definisi properti investasi aset-aset sebagai berikut:

1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
3. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan sewa dibawah harga pasar.
5. Properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 dan Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023. Perubahan APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024 dan Penjabaran Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024.

Secara ringkas APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2024 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp1.475.952.189.612,00, belanja sebesar Rp1.539.649.300.981,79, dan defisit sebesar Rp(63.697.111.369,79). Defisit anggaran tahun 2024 dianggarkan akan ditutup dengan pembiayaan neto sebesar Rp63.697.111.369,79.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi APBD Kabupaten Padang Pariaman TA 2024 dapat digambarkan pada uraian berikut ini.

A. PENDAPATAN DAERAH

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.427.456.037.285,43	1.394.096.335.144,51

Realisasi Pendapatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.427.456.037.285,43 dan Rp1.394.096.335.144,51 mengalami peningkatan sebesar Rp33.359.702.140,92 atau sebesar 2,39%. Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	158.737.933.129,00	144.739.185.746,43	91,18	149.562.514.756,51
2	Pendapatan Transfer	1.317.214.256.483,00	1.282.716.851.539,00	97,38	1.244.088.529.388,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	445.291.000,00
Jumlah Pendapatan		1.475.952.189.612,00	1.427.456.037.285,43	96,71	1.394.096.335.144,51

Penjelasan terhadap pendapatan dan realisasi anggaran tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
144.739.185.746,43	149.562.514.756,51

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp158.737.933.129,00 dengan realisasi sebesar Rp144.739.185.746,43 atau 91,18%. Jika dibandingkan realisasi PAD Tahun 2023 sebesar Rp149.562.514.756,51 maka realisasi Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp4.823.329.010,08 atau 3,22%.

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
61.253.259.287,50	61.970.456.485,81

Untuk tahun anggaran 2024 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp67.260.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.253.259.287,50 atau 91,07%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp61.970.456.485,81, pajak daerah untuk Tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar Rp717.197.198,31 atau 1,16%.

Rincian anggaran dan realisasi pajak daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	450.000.000,00	439.635.143,00	97,70	218.946.253,00
2	Pajak Restoran	4.000.000.000,00	3.879.817.783,00	97,00	3.824.851.501,81
3	Pajak Hiburan	100.000.000,00	107.192.500,00	107,19	167.372.800,00
4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	994.031.250,00	99,40	950.104.406,00
5	Pajak Penerangan Jalan	22.000.000.000,00	22.152.538.103,00	100,69	21.057.720.441,00
6	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	1.015.333.318,00	101,53	2.919.636.000,00
7	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00	1.385.466.152,00	92,36	1.491.916.392,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya	6.200.000.000,00	6.103.732.424,50	98,45	7.146.130.900,00
10	PBB Pedesaan&Perkotaan	20.000.000.000,00	16.406.733.263,00	82,03	14.431.339.363,00
11	BPHTB	11.000.000.000,00	8.768.779.351,00	79,72	9.762.438.429,00
Jumlah		67.260.000.000,00	61.253.259.287,50	91,07	61.970.456.485,81

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah diatas terlihat bahwa masih banyak penerimaan Pajak daerah yang belum mencapai target 100% dari yang ditetapkan, bahkan ada yang tidak terealisasi sama sekali seperti Pajak Sarang Burung Walet, hal ini terjadi karena Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak baru yang menjadi objek tahun ini, namun petunjuk teknis pelaksanaan belum selesai. Apabila dilihat dari sisi nilai maka kontribusi realisasi penerimaan Pajak Daerah yang tertinggi adalah penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp22.152.538.103,00 atau 36,17% dari total realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Gambar 5. 1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 - 2023



b. Retribusi Daerah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
66.154.972.984,00	3.603.184.590,00

Target penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp72.924.616.090,00 dengan realisasi sebesar Rp66.154.972.984,00 atau 90,72%. Dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp3.603.184.590,00 retribusi daerah untuk Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp62.551.788.394,00 atau 1.736,01%.

Adapun penyebab tidak tercapainya target pendapatan retribusi tahun ini karena masih rendahnya penerimaan beberapa retribusi daerah bahkan terdapat retribusi daerah yang capaiannya dibawah 80% yaitu Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.

Rincian anggaran dan realisasi retribusi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut:

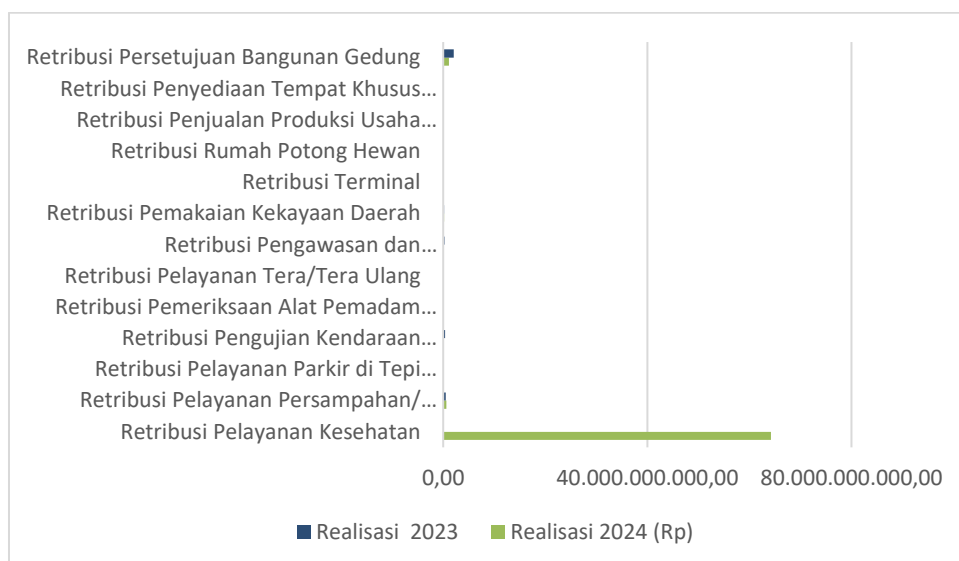
Tabel 5. 3 Target dan Realisasi Retribusi Daerah

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	71.167.616.090,00	64.214.808.035,00	90,23	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	550.000.000,00	606.458.000,00	110,27	493.550.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	30.524.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	395.662.900,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	36.690.500,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	38.951.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	272.500.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.000.000,00	160.626.000,00	118,98	169.256.080,00
9	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	36.092.000,00
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	31.720.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00	30.040.000,00	100,13	40.050.000,00
12	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	42.000.000,00	32.045.000,00	76,30	0,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.110.995.949,00	111,10	2.058.188.110,00
Jumlah		72.924.616.090,00	66.154.972.984,00	90,72	3.603.184.590,00

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan capaian target Retribusi sebesar 1.736,01% dibandingkan dengan Tahun 2023. Hal ini terjadi karena pendapatan dari BLUD dicatat sebagai retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gambar 5. 2 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah

Tahun 2024 - 2023



c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
8.728.317.039,00	8.088.751.162,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp8.728.317.039,00 dengan realisasi sebesar Rp8.728.317.039,00 atau 100%. Jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp8.088.751.162,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp639.565.877,00 atau 7,91%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

- 1) Setoran dividen Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) tahun buku 2023 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 4 April 2024 sebesar Rp8.635.381.720,00; dan
- 2) Setoran dividen BPR-PKPP tahun buku 2023 yang diterima di Kas Umum Daerah pada tanggal 16 April 2024 sebesar Rp92.935.319,00.

Tabel 5. 4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dividen Bank Nagari	8.635.381.720,00	8.635.381.720,00	100,00	8.006.468.822,00
2	Dividen BPR-PKPP	92.935.319,00	92.935.319,00	100,00	82.282.340,00
Jumlah		8.728.317.039,00	8.728.317.039,00	100,00	8.088.751.162,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
8.602.636.435,93	75.900.122.518,70

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp9.825.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.602.636.435,93 atau 87,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp75.900.122.518,70 terjadi penurunan sebesar Rp67.297.486.082,77 atau 88,67%.

Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	330.000.000,00	350.897.100,00	106,33	460.988.772,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	2.417.465.459,57	69,07	2.878.023.051,00
4	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	77.948,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.000.000.000,00	2.196.849.337,97	109,84	717.505.461,84
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.450.000.000,00	1.340.513.287,41	92,45	2.504.392.337,31
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	60.000.000,00	52.438.120,00	87,40	114.948.148,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	2.400.000.000,00	2.159.473.130,98	89,98	490.785.728,55
9	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	68.733.401.072,00
Jumlah		9.825.000.000,00	8.602.636.435,93	87,56	75.900.122.518,70

Dari rincian penerimaan diatas dapat dijelaskan juga bahwa:

- 1) Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp350.897.100,00 merupakan Hasil Penjualan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- 2) Penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp85.000.000,00 merupakan Hasil Sewa BMD;
- 3) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.417.465.459,57 merupakan Jasa Giro pada Kas Daerah;

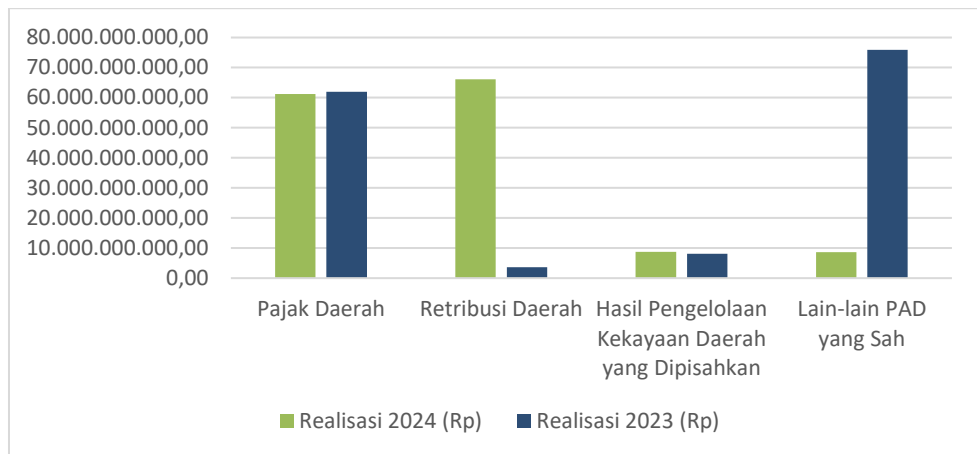
- 4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp2.196.849.337,97 merupakan pendapatan daerah yang didapat dari berbagai transaksi, seperti penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengadaan barang dan jasa.
- 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.340.513.287,41 merupakan penerimaan dana dari pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaan. Denda ini didasarkan pada kontrak kerja yang disepakati bersama.
- 6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp52.438.120,00 merupakan Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan
- 7) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.159.473.130,98 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp409.100.896,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp1.750.372.234,98.

Berdasarkan Penjelasan atas Pendapatan Asli Daerah diatas dapat dilihat bahwa adanya kenaikan beberapa komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Gambar 5. 3 Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 - 2023



Gambar 5. 4 Pendapatan Asli Daerah



2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan akun yang menampung penerimaan transfer yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan;
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- b. Dana Desa;
- c. Insentif Fiskal; dan

Pendapatan transfer Antar Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Bagi hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

Adapun rincian dari Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. 6 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.	1.205.672.208.400,00	1.205.591.057.388,00	99,99	1.181.930.150.981,00
	Dana Perimbangan	1.074.386.520.400,00	1.074.305.369.388,00	99,99	1.080.386.025.981,00
	Dana Desa	103.458.459.000,00	103.458.459.000,00	100,00	101.544.125.000,00
	Insentif Fiskal	27.827.229.000,00	27.827.229.000,00	100,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	111.542.048.083,00	77.125.794.151,00	69,15	62.158.378.407,00
	Pendapatan Bagi Hasil	109.442.048.083,00	75.925.794.151,00	69,38	61.858.378.407,00
	Bantuan Keuangan	2.100.000.000,00	1.200.000.000,00	57,14	300.000.000,00
	Jumlah	1.317.214.256.483,00	1.282.716.851.539,00	97,38	1.244.088.529.388,00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 realisasi Penerimaan dari Pendapatan Transfer sebesar Rp1.282.716.851.539,00 atau 97,38%.

Jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp1.244.088.529.388,00 maka penerimaan untuk tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp38.628.322.151,00 atau 3,10%. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
1.205.591.057.388,00	1.181.930.150.981,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal. Dasar penganggaran Dana Transfer tahun anggaran 2024 adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.205.672.208.400,00 dengan realisasi sebesar Rp1.205.591.057.388,00 atau 99,99%. Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.074.386.520.400,00	1.074.305.369.388,00	99,99	1.080.386.025.981,00
2	Dana Desa	103.458.459.000,00	103.458.459.000,00	100,00	101.544.125.000,00
3	Insentif Fiskal	27.827.229.000,00	27.827.229.000,00	100,00	-
Jumlah		1.205.672.208.400,00	1.205.591.057.388,00	99,99	1.181.930.150.981,00

Dari tabel di atas terlihat realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp23.660.906.407,00 atau 2,00%.

1) Dana Perimbangan

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
1.074.305.369.388,00	1.080.386.025.981,00

Dana Perimbangan tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.074.386.520.400,00 dengan realisasi sebesar Rp1.074.305.369.388,00 atau 99,99%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp1.080.386.025.981,00 realisasi tahun 2024 turun sebesar Rp6.080.656.593,00 atau 0,56%.

Rincian rencana dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	13.458.046.000,00	16.206.591.009,00	120,42	16.486.805.665,00
2	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	767.475.769.000,00	784.480.463.956,00	102,22	744.273.216.799,00
3	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57.490.986.000,00	53.623.510.594,00	93,27	87.426.804.427,00
4	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	235.961.719.400,00	219.994.803.829,00	93,23	232.199.199.090,00
Jumlah		1.074.386.520.400,00	1.074.305.369.388,00	99,99	1.080.386.025.981,00

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Tahun 2024 (Rp) 16.206.591.009,00	Tahun 2023 (Rp) 16.486.805.665,00

Penerimaan Dana Transfer Umum-DBH tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp13.458.046.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.206.591.009,00 atau 120,42%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-DBH Tahun 2023 sebesar Rp16.486.805.665,00 realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp280.214.656,00 atau 1,70%.

Realisasi DBH Tahun 2024 merupakan gabungan dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) yang masing-masingnya berjumlah Rp8.901.530.009,00 dan Rp7.305.061.000. Rincian rencana dan realisasi penerimaan DBH sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Target dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	966.004.000,00	3.713.200.009,00	384,39	1.707.356.625,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.151.038.000,00	5.151.038.000,00	100,00	5.275.349.000,00

No	Jenis Penerimaan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.943.000,00	37.292.000,00	103,75	41.353.040,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	147.572.000,00	147.572.000,00	100,00	300.596.000,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	690.321.000,00	690.321.000,00	100,00	1.550.345.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	5.992.868.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	53.265.000,00	53.265.000,00	100,00	0,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.425.506.000,00	1.425.506.000,00	100,00	1.618.938.000,00
9	DBH Sawit	4.988.397.000,00	4.988.397.000,00	100,00	0,00
Jumlah		13.458.046.000,00	16.206.591.009,00	120,42	16.486.805.665,00

b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
784.480.463.956,00	744.273.216.799,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp767.475.769.000,00 dengan realisasi sebesar Rp784.480.463.956,00 atau 102,22%. Dibandingkan realisasi DAU Tahun 2023 sebesar Rp744.273.216.799,00 penerimaan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.207.247.157,00 atau 5,40%.

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) melebihi anggaran yang ditetapkan karena adanya tambahan transfer dari Pemerintah Pusat untuk pembayaran TPP THR untuk Guru sebesar Rp20.959.053.000,00

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
53.623.510.594,00	87.426.804.427,00

Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp57.490.986.000,00 dengan realisasi sebesar Rp53.623.510.594,00 atau 93,27%. Dibandingkan realisasi DAK Fisik Tahun 2023 sebesar Rp87.426.804.427,00 penerimaan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp33.803.293.833,00 atau 38,66%.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
219.994.803.829,00	232.199.199.090,00

Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp235.961.719.400,00 dengan realisasi sebesar Rp219.994.803.829,00 atau 93,23%. Dibandingkan realisasi DAK Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp232.199.199.090,00 penerimaan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.204.395.261,00 atau 5,26%.

2) Dana Desa

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
103.458.459.000,00	101.544.125.000,00

Penerimaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp103.458.459.000,00 dengan realisasi sebesar Rp103.458.459.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp101.544.125.000,00 penerimaan Dana Desa Tahun 2024 meningkat sebesar Rp1.914.334.000,00 atau 1,89%.

3) Insentif Fiskal

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
27.827.229.000,00	0,00

Penerimaan dari Insentif Fiskal tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp27.827.229.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.827.229.000,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Insentif Fiskal Tahun 2023 sebesar Rp0,00 penerimaan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp27.827.229.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
77.125.794.151,00	62.158.378.407,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 merupakan penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan sebesar Rp111.542.048.083,00 dengan realisasi sebesar Rp77.125.794.151,00 atau 69,15%. Bila dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp62.158.378.407,00 pendapatan ini meningkat sebesar Rp14.967.415.744,00 atau 24,08%.

Tabel 5. 10 Target dan Realisasi Penerimaan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	109.442.048.083,00	75.925.794.151,00	69,38	61.858.378.407,00
2	Bantuan Keuangan	2.100.000.000,00	1.200.000.000,00	57,14	300.000.000,00
Jumlah		111.542.048.083,00	77.125.794.151,00	69,15	62.158.378.407,00

1) Pendapatan Bagi Hasil

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
75.925.794.151,00	61.858.378.407,00

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2024 berasal dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp109.442.048.083,00 dengan realisasi sebesar Rp75.925.794.151,00 atau 69,38%. Dibanding penerimaan Tahun 2023 pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp14.067.415.744,00 atau 22,74%.

Dasar penganggaran dari Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-330-2024 tanggal 26 April 2024 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat TA 2024.

Sementara dasar pengakuan realisasi Pendapatan Bagi Hasil mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun anggaran 2024.

Tabel 5. 11 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi hasil Pajak Kendaraan bermotor	20.957.624.683,00	16.197.822.663,00	77,29	13.091.514.828,00
2	Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.882.899.216,00	8.105.250.414,00	74,48	6.617.095.639,00
3	Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.577.313.311,00	31.151.052.135,00	58,14	22.609.172.776,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	255.489.118,00	121.426.251,00	47,53	105.177.988,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	23.768.721.755,00	20.350.242.688,00	85,62	19.435.417.176,00
Jumlah		109.442.048.083,00	75.925.794.151,00	69,38	61.858.378.407,00

2) Bantuan Keuangan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.200.000.000,00	300.000.000,00

Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun 2024 berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.200.000.000,00.

Tabel 5. 12 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus	2.100.000.000,00	1.200.000.000,00	57,14	300.000.000,00
Jumlah	2.100.000.000,00	1.200.000.000,00	57,14	300.000.000,00

Komposisi komponen Pendapatan Dana Transfer digambarkan dalam grafik dibawah ini.

Gambar 5. 5 Perbandingan Realisasi Dana Transfer Tahun 2024 - 2023



3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
0,00	445.291.000,00

Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp445.291.000,00 realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp445.291.000,00.

Tabel 5. 13 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	445.291.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	445.291.000,00

a. Pendapatan Hibah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
0,00	445.291.000,00

Pendapatan hibah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp445.291.000,00 realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp445.291.000,00 atau 100,00%.

Dari total realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebesar Rp1.427.456.037.285,43 dapat kita lihat bahwa kontribusi PAD 10,14%, Pendapatan Transfer 89,86% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00%. Komposisi pendapatan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2024 dan 2023 digambarkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 5. 6 Porsi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023



Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap dana transfer masih cukup tinggi, yaitu sebesar 89,86%.

B. BELANJA DAERAH

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.450.657.035.870,68	1.405.956.633.170,01

Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp1.539.649.300.981,79 dengan realisasi sebesar Rp1.450.657.035.870,68 atau 94,22%. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.405.956.633.170,01 mengalami kenaikan sebesar Rp 44.700.402.700,67 atau 3,18%.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja Tahun 2024 dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer;
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Secara rinci rencana dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Target dan Realisasi Belanja

NO.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.172.355.081.991,97	1.099.842.195.038,68	93,81	1.034.417.684.452,25
2	Belanja Modal	167.398.553.172,02	155.053.257.852,00	92,63	188.292.502.818,76
3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	7.691.341.000,00	76,91	1.729.558.250,00
4	Belanja Transfer	189.895.665.817,80	188.070.241.980,00	99,04	181.516.887.649,00
Jumlah		1.539.649.300.981,79	1.450.657.035.870,68	94,22	1.405.956.633.170,01

Rincian Belanja Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.099.842.195.038,68	1.034.417.684.452,25

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.172.355.081.991,97 dengan realisasi sebesar Rp1.099.842.195.038,68 atau 93,81%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.034.417.684.452,25 Belanja Operasi tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp65.424.510.586,43 atau 5,95%. Rincian Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 5. 15 Target dan Realisasi Belanja Operasi

NO.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	783.442.218.483,48	742.722.747.909,00	94,80	673.846.730.780,32
2	Belanja Barang dan Jasa	342.999.003.668,49	312.307.080.893,00	91,05	335.371.214.311,93
3	Belanja Hibah	45.913.859.840,00	44.812.366.236,68	97,60	24.899.739.360,00
4	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Jumlah		1.172.355.081.991,97	1.099.842.195.038,68	93,81	1.034.417.684.452,25

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2024 terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
742.722.747.909,00	673.846.730.780,32

Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp783.442.218.483,48 dengan realisasi sebesar Rp742.722.747.909,00 atau 94,80%. Nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp742.722.747.909,00 sudah termasuk pengurangan nilai realisasi belanja pegawai karena koreksi atas gaji ASN yang indisipliner tidak masuk kerja lebih dari 84 hari, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa ASN yang bersangkutan diberhentikan gajinya pada bulan berikutnya sehingga gaji yang bersangkutan harus dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp35.236.512,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp673.846.730.780,32 Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp68.876.017.128,68 atau 10,22%.

Adapun rincian dari belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Target dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	480.723.176.162,48	459.833.756.054,00	95,65	405.238.342.093,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	102.960.755.802,00	92.473.535.960,00	89,81	89.930.523.484,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya	153.178.871.179,00	147.783.786.646,00	96,48	133.403.420.909,00
4	Belanja Gaji dan tunjangan DPRD	16.434.754.187,00	15.447.526.164,00	93,99	15.456.630.613,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	786.321.193,00	675.917.896,00	85,96	695.774.514,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	713.652.000,00	694.844.000,00	97,36	680.880.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	28.644.687.960,00	25.813.381.189,00	90,12	28.441.159.167,32
JUMLAH		783.442.218.483,48	742.722.747.909,00	94,80	673.846.730.780,32

b. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
312.307.080.893,00	335.371.214.311,93

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 dianggarkan Rp342.999.003.668,49 dengan realisasi sebesar Rp312.307.080.893,00 atau 91,05%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp335.371.214.311,93, mengalami penurunan sebesar Rp23.064.133.418,93 atau 6,88%. Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa per komponen biaya tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 17 Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	80.994.765.754,33	71.166.790.753,00	87,87	91.085.320.995,93
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	735.100.000,00	508.925.600,00	69,23	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	77.713.128.317,00	74.217.719.058,00	95,50	82.222.363.609,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.637.144.042,00	15.521.947.499,00	93,30	14.948.529.324,00
5	Belanja Sewa Tanah	16.000.000,00	0,00	0,00	221.122.500,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.359.789.000,00	5.905.501.158,00	92,86	4.057.640.167,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.410.032.000,00	4.014.556.500,00	91,03	3.229.470.900,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	4.169.998,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.250.000,00	11.250.000,00	73,77	7.000.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.000.000.000,00	691.386.065,00	69,14	445.368.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	450.000.000,00	448.537.000,00	99,67	143.777.043,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	703.556.000,00	584.447.983,00	83,07	0,00
13	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	4.800.000,00	1.615.470,00	33,66	2.806.069,00
14	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00	99.918.000,00	99,92	110.703.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.658.097.918,43	2.126.185.975,00	79,99	1.423.572.165,00
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	856.544.900,00	701.645.851,00	81,92	598.583.367,00
17	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	3.047.756.565,50	2.964.940.822,00	97,28	1.575.828.521,00
18	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58.656.537.565,23	50.830.100.206,00	86,66	50.738.164.136,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.323.200.000,00	2.303.845.400,00	99,17	509.410.000,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.710.743.400,00	1.188.329.034,00	69,46	959.768.475,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.316.599.627,00	44.155.456.443,00	97,39	46.880.402.377,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.289.958.579,00	34.863.982.076,00	88,74	36.187.213.665,00
Jumlah		342.999.003.668,49	312.307.080.893,00	91,05	335.371.214.311,93

c. Belanja Hibah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
44.812.366.236,68	24.899.739.360,00

Belanja Hibah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp45.913.859.840,00 dengan realisasi sebesar Rp44.812.366.236,68 atau 97,60%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp24.899.739.360,00 Belanja Hibah

Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19.912.626.876,68 atau 79,97%.

Anggaran dan realisasi Belanja Hibah per komponen biaya tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 18 Target dan Realisasi Belanja Hibah

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	28.208.649.840,00	28.208.649.840,00	100,00	16.561.194.560,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.117.200.000,00	7.150.815.800,00	88,09	4.541.760.000,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	3.052.100.000,00	3.052.039.430,00	100,00	2.840.274.800,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.001.510.000,00	974.364.166,68	97,29	956.510.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	5.534.400.000,00	5.426.497.000,00	98,05	0,00
Total		45.913.859.840,00	44.812.366.236,68	97,60	24.899.739.360,00

Penjelasan atas tabel di atas sebagai berikut.

Tabel 5. 19 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Pembayaran Belanja Hibah ke Bawaslu Kab. Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan NPHD Nomor 911/175/NPHD.KESBANGPOL-2023 dan Nomor 040/HK.01.01/K.SB-05/11/2023 tgl 10 November 2023 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 18 Desember 2023	7.800.000.000,00
2	Pembayaran Belanja Hibah ke KPU Kab Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan NPHD Nomor 911/174/NPHD.KESBANGPOL-2023 dan Nomor 1/KU.07-NK/1305/2023 tanggal 10 November 2023 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 18 Desember 2023	17.041.791.840,00
3	Permintaan Pembayaran Belanja Hibah ke Polres Pariaman Tahun 2024 Berdasarkan NPHD Nomor 911/096/NPHD.KESBANGPOL-2024 dan Nomor B/533/VI/2024 dan Nomor B/533/VI/2024 tanggal 4 juni 2024 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 2 Juli 2024	483.233.000,00
4	Pembayaran Belanja Hibah ke Polres Padang Pariaman Tahun 2024 Berdasarkan NPHD Nomor 911/095/NPHD.KESBANGPOL-2024 dan Nomor B/341/VI/HUK.81.1/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 2 Juli 2024	1.733.625.000,00
5	pembayaran Belanja Hibah ke Korem 032 Wirabaja Tahun 2024 Berdasarkan NPHD Nomor B/10/Korem032/V/2024 dan Nomor 911/094/NPHD.KESBANGPOL-2024 tanggal 4 Juni 2024 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 2 Juli 2024	1.150.000.000,00
TOTAL		28.208.649.840,00

Nilai belanja hibah pada pemerintah pusat sebesar Rp28.208.649.840,00 merupakan hibah pemerintah daerah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Polres Pariaman, Polres Padang Pariaman dan Korem 032 Wirabaja.

Tabel 5. 20 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Hibah Kepada PMI	150.000.000,00
2	Hibah Kepada KONI	711.315.800,00
3	Hibah Kepada NPC	100.000.000,00
4	Hibah Kepada Pramuka	600.000.000,00
5	Hibah Kepada Veteran LVRI	56.000.000,00
6	Hibah Uang kepada NU dan Muhammadiyah	100.000.000,00
7	Hibah kepada Baznas	150.000.000,00
TOTAL		1.867.315.800,00

Tabel 5. 21 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Hibah Uang diserahkan kepada masyarakat An Masjid Al Hidayah Kec Patamuan dan Masjid lainnya (119 Masjid) berdasarkan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 67 KEP BPP 2024 tgl 5 2 2024 sesuai daftar terlampir (dana berasal dari DAU-SG Kes, Dana Tagging)	892.500.000,00
2	Belanja Hibah Uang untuk masyarakat An Surau Batung Kec V Kotim dan Masjid Mushalla Surau Majelis Taklim TPA lainnya (74 Masjid Mushalla Surau TPA) sesuai SK Bupati Pdg Pariaman No 72 KEP BPP 2024 tgl 7 2 2024, daftar terlampir, dana Tagging (DAU SG-Kes)	1.806.000.000,00
3	PEMBAYARAN Belanja Hibah Uang diserahkan ke masyarakat An PP Nurul Yaqin M Qalbi Kec Pd Sago dan Masjid, Surau, BKMT lainnya (18 Masjid, Surau, BKMT) sesuai SK Bupati Pdg Pariaman No 72 KEP BPP 2024 tgl 7 2 2024, daftar terlampir, dana tagging (DAU SG-Kes)	550.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Kemasyarakatan Untuk Organisasi KNPI Kabupaten Padang Pariaman Tahap I Tahun 2024	100.000.000,00
5	Belanja Hibah Uang diserahkan kepada masyarakat (Guru Mengaji) An M Indra Febriadi dan kawan kawan (sebanyak 70 orang guru mengaji) sesuai dengan SK Bupati Padang Pariaman no 318/KEP/BPP/ 2024 tgl 3 Juli 2024, daftar terlampir, dana tagging (DAU SG-Kes)	300.000.000,00
6	Pembayaran Belanja Hibah Uang yg diserahkan kepada masyarakat An Masjid Raya Lubuk Pandan Kec 2x11 EL dan Masjid lainnya (sebanyak 32 Masjid) sesuai SK Bupati Pd Pariaman no 318/KEP/BPP/ 2024 tgl 3 Juli 2024, daftar terlampir, dana tagging (DAU SG-Kes)	1.460.000.000,00
7	Belanja Hibah Uang diserahkan kpd masyarakat An Mushalla Nurul Falah Kec V Koto Kp Dlm & Surau Nurul Iman Kec Bt Gsn (sebanyak 2 Mushalla) sesuai SK Bupati Pd Prm no 318/KEP/BPP/ 2024 tgl 3 Juli 2024, daftar terlampir, dana tagging (DAU SG-Kes)	75.000.000,00
8	Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan untuk Organisasi KNPI Kab Padang Pariaman Tahap II Tahun 2024, Dana bersumber dari DAU Tagging Tahun 2024.	100.000.000,00
Jumlah		5.283.500.000,00

Tabel 5. 22 Belanja Hibah Dana BOS

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2.927.039.430,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	125.000.000,00
Jumlah		3.052.039.430,00

Tabel 5. 23 Anggaran Dan Realisasi Hibah Kepada Partai Politik

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat	87.583.750,00	87.583.750,00	100,00	70.915.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	97.387.916,67	97.387.916,67	100,00	76.565.000,00
3	Partai Keadilan Kesejahteraan	115.577.916,67	115.577.916,67	100,00	121.655.000,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	46.227.500,00	46.227.500,00	100,00	43.440.000,00
5	Partai Golongan Karya	99.959.583,33	99.959.583,33	100,00	90.820.000,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	150.127.916,67	150.127.916,67	100,00	164.355.000,00
7	Partai Demokrat	103.284.166,66	103.284.166,66	100,00	95.830.000,00
8	Partai Amanat Nasional	164.920.416,67	164.920.416,67	100,00	158.010.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	86.349.583,34	86.349.583,34	100,00	95.585.000,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	50.091.249,99	22.945.416,67	45,81	39.335.000,00
Total		1.001.510.000,00	974.364.166,68	97,29	956.510.000,00

d. Bantuan Sosial

**Tahun 2024
(Rp)
0,00**

**Tahun 2023
(Rp)
300.000.000,00**

Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00 realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp300.000.000,00.

Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan belanja bantuan sosial stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

2. BELANJA MODAL

**Tahun 2024
(Rp)
155.053.257.852,00**

**Tahun 2023
(Rp)
188.292.502.818,76**

Belanja Modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp167.398.553.172,02 dengan realisasi sebesar Rp155.053.257.852,00 atau 92,63%.

Dibandingkan realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp188.292.502.818,76 Belanja Modal tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp33.239.244.966,76 atau 17,65%. Anggaran dan realisasi belanja modal per komponen biaya Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.087.632.000,00	1.087.632.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.847.747.915,70	23.888.796.704,00	96,14	34.104.526.420,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.270.093.725,01	20.826.064.638,00	85,81	29.755.595.199,76
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	112.159.475.731,31	103.545.442.710,00	92,32	119.326.461.876,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.033.603.800,00	5.705.321.800,00	113,34	5.105.919.323,00
Jumlah		167.398.553.172,02	155.053.257.852,00	92,63	188.292.502.818,76

Rincian Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut.

a. Belanja Modal Tanah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.087.632.000,00	0,00

Belanja Modal Tanah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.087.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.087.632.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00 Belanja Modal Tanah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.087.632.000,00.

Tabel 5. 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pembayaran ganti kerugian pemegang hak atas tanah yg terkena dampak pembangunan jalan pasar limau-tarok nagari kapalo hilalang kec 2x11 kayu tanam Kab padang pariaman an Hanafi	1.049.032.000,00	1.049.032.000,00	100,00	0,00
2	Pembayaran ganti kerugian pemegang hak atas tanah yg terkena dampak pembangunan jalan masuk asrama haji di nagari sungai buluh selatan kec batang anai Kab padang pariaman an Mawarlis	38.600.000,00	38.600.000,00	100,00	0,00
Jumlah		1.087.632.000,00	1.087.632.000,00	100,00	0,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
23.888.796.704,00	34.104.526.420,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp24.847.747.915,70 dengan realisasi sebesar Rp23.888.796.704,00 atau 96,14%. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp34.104.526.420,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp10.215.729.716,00 atau 29,95%.

Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	40.000.000,00	20.535.000,00	51,34	824.512.170,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.921.275.000,00	1.818.286.200,00	94,64	3.920.348.750,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	12.377.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5	Belanja Modal Alat Ukur	29.382.000,00	26.760.000,00	91,08	0,00
6	Belanja Modal Alat Kantor	460.119.157,00	393.267.914,00	85,47	3.352.320.869,00
7	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.354.441.593,00	2.176.883.817,00	92,46	2.320.947.711,00
8	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	53.218.000,00	49.800.000,00	93,58	316.550.200,00
9	Belanja Modal Alat Studio	1.079.324.430,00	1.025.259.800,00	94,99	47.256.423,00
10	Belanja Modal Alat Komunikasi	7.950.000,00	3.000.000,00	37,74	0,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.774.502.919,00	5.633.674.543,00	97,56	10.018.904.171,00
12	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	615.032.500,00	614.500.000,00	99,91	2.922.904.030,00
13	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	304.630.937,70	264.111.860,00	86,70	1.044.054.420,00
14	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	367.700.000,00	360.778.000,00	98,12	22.800.000,00
15	Belanja Modal Komputer Unit	1.589.316.750,00	1.419.558.318,00	89,32	2.443.050.048,00
16	Belanja Modal Peralatan Komputer	807.797.916,00	741.980.502,00	91,85	338.216.555,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.223.003.873,00	1.451.587.383,00	118,69	6.510.284.073,00

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.872.892.700,00	5.056.054.300,00	103,76	0,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.347.160.140,00	2.832.759.067,00	84,63	0,00
Jumlah		24.847.747.915,70	23.888.796.704,00	96,14	34.104.526.420,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
20.826.064.638,00	29.755.595.199,76

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp24.270.093.725,01 dengan realisasi sebesar Rp20.826.064.638,00 atau 85,81%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp29.755.595.199,76 realisasi anggaran tahun 2024 turun sebesar Rp8.929.530.561,76 atau 30,01%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini digunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat menambah umur ekonomis bangunan tersebut.

Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	22.406.359.810,01	18.966.047.837,00	84,65	26.725.110.718,76
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.863.733.915,00	1.860.016.801,00	99,80	3.030.484.481,00
Jumlah		24.270.093.725,01	20.826.064.638,00	85,81	29.755.595.199,76

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
103.545.442.710,00	119.326.461.876,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp112.159.475.731,31 dengan realisasi sebesar Rp103.545.442.710,00 atau 92,32%. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp119.326.461.876,00 realisasi Tahun 2024 berkurang sebesar Rp15.781.019.166,00 atau 13,23%. Belanja ini umumnya digunakan untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rutin/periodik jalan dan jembatan serta jaringan air oleh Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang.

Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	79.422.747.637,31	77.308.741.236,00	97,34	95.323.998.425,00
2	Belanja Modal Jembatan	3.550.214.000,00	2.540.310.974,00	71,55	5.825.429.900,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	26.805.514.094,00	21.482.345.050,00	80,14	16.087.464.424,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.285.000.000,00	1.132.718.000,00	88,15	694.533.000,00
5	Belanja Modal Instalasi Lain	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Jaringan Air Minum	305.000.000,00	297.967.720,00	97,69	1.209.355.277,00
7	Belanja Modal Jaringan Listrik	725.000.000,00	722.463.900,00	99,65	185.680.850,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	57.000.000,00	51.895.830,00	91,05	0,00
Jumlah		112.159.475.731,31	103.545.442.710,00	92,32	119.326.461.876,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.705.321.800,00	5.105.919.323,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp5.033.603.800,00 dengan realisasi sebesar Rp5.705.321.800,00 atau 113,34%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.105.919.323,00 realisasi Tahun 2024 meningkat sebesar Rp599.402.477,00 atau 11,74%. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman, bibit dan barang bercorak seni dan budaya.

Tabel 5. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.000.000,00	49.492.000,00	98,98	430.949.000,00
2	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces /Ikan Bersirip)	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.443.668.900,00	2.104.268.000,00	145,76	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	3.539.934.900,00	3.551.561.800,00	100,33	4.625.020.323,00
Jumlah		5.033.603.800,00	5.705.321.800,00	113,34	5.105.919.323,00

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7.691.341.000,00	1.729.558.250,00

Belanja Tidak Terduga tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.691.341.000,00 atau sebesar 76,91%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.729.558.250,00 realisasi Tahun 2024 meningkat sebesar Rp5.961.782.750,00 atau sebesar 344,70%.

Belanja ini dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengembalian pendapatan tahun lalu dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. BELANJA TRANSFER

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
188.070.241.980,00	181.516.887.649,00

Belanja Transfer merupakan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Desa/Nagari. Belanja Transfer tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp189.895.665.817,80 dengan realisasi sebesar Rp188.070.241.980,00 atau 99,04%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp181.516.887.649,00 realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp6.553.354.331,00 atau 3,61%. Rincian Belanja Transfer sebagai berikut.

Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No.	Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
a	Belanja Bagi Hasil	8.846.259.317,80	7.020.835.480,00	79,37	5.603.798.048,00
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.581.226.536,60	6.765.183.918,00	78,84	5.273.282.380,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	265.032.781,20	255.651.562,00	96,46	330.515.668,00
b	Belanja Bantuan Keuangan	181.049.406.500,00	181.049.406.500,00	100,00	175.913.089.601,00
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	181.049.406.500,00	181.049.406.500,00	100,00	175.913.089.601,00
Total		189.895.665.817,80	188.070.241.980,00	99,04	181.516.887.649,00

a. Belanja Bagi Hasil

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
7.020.835.480,00	5.603.798.048,00

Belanja Bagi Hasil Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp8.846.259.317,80 dengan realisasi sebesar Rp7.020.835.480,00 atau sebesar 79,37%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.603.798.048,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.417.037.432,00 atau 25,29%.

1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
6.765.183.918,00	5.273.282.380,00

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp8.581.226.536,60 dengan realisasi sebesar Rp6.765.183.918,00 atau 78,84%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.273.282.380,00 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.491.901.538,00 atau 28,29%.

Rincian Transfer Bagi hasil Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Target Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran kekurangan bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 103 pemerintah nagari tahun 2023 berdasarkan keputusan Bupati Padang Pariaman No 392/KEP/BPP/2024 Tgl 5 Sept 2024. sub kegiatan pengelolaan dana bagi hasil kab/kota	1.855.224.471,00
2	Pembayaran dana bagi hasil pajak daerah kepada 103 (seratus tiga) pemerintah nagari tahun 2024, berdasarkan keputusan Bupati Padang Pariaman No 550/KEP/BPP/2024 tgl 16 des 2024. sub keg pengelolaan dana bagi hasil kab/kota.	4.909.959.447,00
JUMLAH		6.765.183.918,00

2) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
255.651.562,00	330.515.668,00

Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp265.032.781,20 dengan realisasi sebesar Rp255.651.562,00 atau 96,46%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp330.515.668,00 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp74.864.106,00 atau 22,65%.

Rincian Transfer Bagi hasil Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Target Dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran kekurangan bayar Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 103 pemerintah nagari tahun 2023 berdasarkan keputusan Bupati Padang Pariaman No 392/KEP/BPP/2024 Tgl 5 Sept 2024. sub kegiatan pengelolaan dana bagi hasil kab/kota	89.332.724,00
2.	Pembayaran dana bagi hasil retribusi daerah kepada 103 (seratus tiga) pemerintah nagari tahun 2024, berdasarkan keputusan Bupati Padang Pariaman No 550/KEP/BPP/2024 tgl 16 des 2024. sub keg pengelolaan dana bagi hasil kab/kota.	166.318.838,00
Jumlah		255.651.562,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
181.049.406.500,00	175.913.089.601,00

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp181.049.406.500,00 dengan realisasi sebesar Rp181.049.406.500,00 atau 100%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp175.913.089.601,00 Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.136.316.899,00 atau 2,92%.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp181.049.406.500,00 merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang terdiri dari:

1) Dana Desa (Nagari) sebesar Rp103.458.459.000,00

Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa atau nagari di Kabupaten Padang Pariaman yang disalurkan kepada pemerintah Nagari yang mana mekanisme penyalurannya tidak melalui Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa langsung ditransfer dari KPPN ke rekening Desa (Nagari).

2) Alokasi Dana Nagari sebesar Rp41.002.347.500,00

Alokasi Dana Nagari merupakan Dana yang dianggarkan Pemerintah Daerah dengan yang diperuntukan bagi Nagari sesuai peraturan perundang-undangan dan disalurkan kepada pemerintah Nagari melalui kas umum daerah.

3) SILTAP sebesar Rp36.588.600.000,00

Siltap merupakan penghasilan tetap yang diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkatnya yang bersumber dari ADN (Alokasi Dana Nagari).

Daftar Transfer Bantuan Keuangan ke Desa di Tahun 2024, dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

C. SURPLUS / (DEFISIT)

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
(23.200.998.585,25)	(11.860.298.025,50)

Surplus/defisit anggaran merupakan pengurangan total pendapatan daerah dengan belanja daerah. Defisit APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp(63.697.111.369,79) dengan realisasi sebesar Rp(23.200.998.585,25) atau 36,42%.

D. PEMBIAYAAN

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
63.700.541.289,79	77.763.409.395,29

Rencana dan realisasi Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
65.906.541.289,79	78.763.409.395,29

Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp65.903.111.369,79 dengan realisasi sebesar Rp65.906.541.289,79 atau sebesar 100,01%. Adapun rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 adalah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya sebesar Rp65.903.111.369,79 dan koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya yang berasal dari saldo awal dana BOS terdiri dari Silpa Tahun Sebelumnya sebesar Rp3.429.920,00.

adapun rincian dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya sebesar Rp65.903.111.369,79 sebagai berikut:

a.	Sisa Dana Alokasi Fisik	Rp	11.012.673.830,00
b.	Sisa Dana Alokasi Non Fisik	Rp	19.728.401.503,00
c.	DAU Bidang Pendidikan	Rp	5.442.607.661,49
d.	DAU Bidang Kesehatan	Rp	2.031.564.965,00
e.	DAU Bidang Pekerjaan Umum	Rp	3.321.324.408,00
f.	SiLPA Dana Bantuan BNPB	Rp	14.952.850.841,00
g.	SiLPA Dana Transfer ke Desa/Nagari	Rp	1.944.559.317,80
h.	SiLPA DID Tambahan	Rp	817.561.607,00
i.	SiLPA BLUD	Rp	6.651.567.236,50
	Jumlah	Rp	65.903.111.369,79

2. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2.206.000.000,00	1.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.206.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.206.000.000,00 atau 100%. Dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.206.000.000,00 atau 120,60%.

Adapun rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pemb Penyertaan Modal Pada Pada Bank Nagari Thn 2024, sesuai dgn perda kab. pdg prm no 7 thn 2023 ttg perubahan ke 3 atas perda no 3 thn 2013 ttg penyertaan modal pada bank nagari, serta surat dari bank nagari no: SR/016/DIR/PD/05-2024 tgl 8 mei 2024.	2.206.000.000,00
Jumlah		2.206.000.000,00

E. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
40.499.542.704,54.	65.903.111.369,79

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan neto Tahun 2024, pembiayaan neto dianggarkan sebesar Rp63.697.111.369,79 dengan realisasi sebesar Rp63.700.541.289,79.

Pembiayaan neto ditambah dengan surplus anggaran, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Jumlah SiLPA akhir tahun 2024 sebesar Rp40.499.542.704,54. Dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp65.903.111.369,79 maka SiLPA Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.403.568.665,25 atau 38,55%.

Adapun rincian SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp40.499.542.704,54:

Kas di Kas Daerah	Rp	28.984.627.889,04
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	35.236.512,00
Kas BLUD	Rp	7.304.357.109,50
Kas Bos	Rp	119.606.781,00
Kas BOK	Rp	4.055.734.413,00
Utang PFK	Rp	(20.000,00)
Jumlah	Rp	40.499.542.704,54

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 sebesar Rp65.903.111.369,79.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

Merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Tahun 2024 merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp65.906.541.289,79.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 sebesar Rp40.499.542.704,54.

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp3.429.920,00.

e. Saldo Anggaran Lebih pada tahun 2024 sebesar Rp40.499.542.704,54 yang terdiri dari:

Tabel 5. 34 Rincian SILPA

No	Uraian	Saldo Revisi (Rp)
1	2	3
A	DAK Fisik Reguler	
1	DAK Bidang Pendidikan	
	a DAK Pendidikan (PAUD)	2.350,00
	b DAK Pendidikan (SD)	334.970.205,00
	c DAK Pendidikan (SMP)	11.800,00
	d Silfa Bidang pendidikan Tahun 2023	1.039.047.568,00
2	DAK Bid. Kesehatan dan KB	
	a DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar)	25.000.000,00
	b DAK Kesehatan (Keluarga Berencana)	14.000,00
	c Silpa Bidang Kesehatan tahun 2023	3.471.508.559,00
3	DAK Sanitasi	9.750.000,00
4	DAK Perumahan dan Pemukiman	49.642.000,00
5	DAK Air Minum	14.087.000,00
Jumlah DAK Fisik Reguler		4.944.033.482,00
B	DAK Fisik Penugasan	
1	DAK Penugasan Bid. Irigasi	41.816.800,00

No	Uraian	Saldo Revisi (Rp)
2	DAK Penugasan Bid. Pertanian	40.425.100,00
3	DAK Penugasan Bid. Industri Kecil dan Menengah	122.484.950,00
4	DAK Penugasan Bid. Kelautan dan Perikanan	14.443.450,00
5	DAK Penugasan Bid. Pariwisata	23.756.088,00
Jumlah DAK Fisik Penugasan		242.926.388,00
Jumlah DAK Fisik Reguler dan Penugasan		5.186.959.870,00
C	DAK Non Fisik	
1	DAK Non Fisik-Bos Reguler	119.291.007,00
2	DAK Non Fisik-Bos Kinerja	315.774,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	3.833.495.800,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.394.750.000,00
5	DAK Non Fisik-BOSP Paud Reguler	742.532.490,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	688.454.100,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.572.972.888,00
8	BOKKB Akreditasi Puskesmas	4.055.734.814,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	48.458.020,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	21.088.000,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	209.872.600,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	47.771.475,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.650.474,00
14	DAK Non Fisik-BOKT	2.308.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	95.186,00
Jumlah DAK Non Fisik		12.745.790.628,00
Total DAK		17.932.750.498,00
D	Diluar DAK	
1	DAU Bidang Pendidikan	4.089.808.190,00
2	DAU Bidang Kesehatan	1.620.065.182,00
3	Silpa DAU TPG/THR	20.959.053.000,00
4	DBH Sawit	586.348.984,00
5	Silpa Dana BNPB	5.109.985.286,00
6	Silpa Dana Transfer Ke Nagari	1.243.063.995,00
7	Silpa Insentif Fiskal dan DID Tambahan	1.047.631.890,00
8	SILPA BLUD	7.304.357.109,50
Jumlah Diluar DAK		41.960.313.636,50
Total SiLPA DAK dan Diluar DAK		59.893.064.134,50

Nilai rincian Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 seharusnya sebesar Rp59.893.064.134,50 nilai Saldo Anggaran Lebih tahun 2024 pada onface sebesar Rp40.499.542.704,54 terdapat perbedaan sebesar Rp19.393.521.429,96. Hal tersebut terjadi karena adanya SiLPA yang terpakai yang merupakan SiLPA DAU TPP/THR sebesar Rp19.393.521.429,96 yang digunakan untuk pembayaran belanja Tambahan Penghasilan Pegawai, pembayaran belanja barang dan jasa serta belanja modal atas kegiatan yang sudah dikontrakkan. Selanjutnya nilai SiLPA DAU TPP/THR yang terpakai sebesar Rp19.393.521.429,96 sudah dikembalikan dan sudah dibayarkan pada Triwulan I Tahun 2025.

Kemudian Rincian DAK Fisisk sebesar Rp17.953.736.248,00 merupakan nilai yang diperoleh dari hasil koreksi dan penyesuaian oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas SiLPA sampai tahun 2023 maupun atas penyaluran tahun 2024 sedangkan nilai DAK Non Fisik sebesar Rp12.766.776.378,00 sudah termasuk reklas atas dana BOP PUD ke SiLPA dana BOS sebesar Rp9.900.000,000. Rincian Perhitungan SiLPA tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1a**.

5.3. NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan total nilai Aset sebesar Rp1.348.585.184.539,73 Kewajiban sebesar Rp6.456.320.042,40 dan Ekuitas sebesar Rp1.342.128.864.497,33 Rincian masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

A. ASET LANCAR

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
111.372.513.732,30	129.845.806.633,73

Aset Lancar adalah Kas dan Setara Kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai untuk dimiliki atau dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2024 Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berjumlah Rp111.372.513.732,30 yang terdiri atas:

1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
28.984.627.889,04	50.486.009.485,29

Saldo Kas Daerah pembukuan per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.984.627.889,04 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp50.486.009.485,29. Sedangkan pada rekening koran Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.059.471.796,37 yang disimpan di Rekening Kas Umum Daerah Nomor 1700.0101.00052.9 Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, sehingga terdapat selisih sebesar Rp74.843.907,33 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Kota Pariaman (2016)	Rp	811.000,00
Kurang Catat SP2D No. 1681 oleh Bank (2016)	Rp	8,00
Lebih Catat Saldo Awal oleh Bank (2016)	Rp	0,06
Koreksi PBB Pajak yang dipotong Bank (2016)	Rp	20,00
Pajak Yang Dipotong Bank (2016)	Rp	(339,00)
Pajak Yang Dipotong Bank (2017)	Rp	32.336,00
Kas yang dibatasi penggunaannya atas jaminan reklamasi yang sudah direklas ke aset lain-lain.	Rp	41.824.407,00
Kesalahan bank dalam mencairkan 0222/sp2d-ls/gj/bud/2022	Rp	600,00
Kurang Potong Bank atas SP2D Nomor 6020	Rp	344.850,00
SP2D Nomor 8233 tahun 2023 terpotong 2 kali	Rp	(1.380.000,00)
Kekurangan debit kas daerah oleh Bank	Rp	33.211.025,27
Jumlah	Rp	74.843.907,33

Selain kas dikas daerah sebagaimana dijelaskan diatas masih terdapat kas yang masih di tangan bendahara yang seharusnya merupakan kas daerah tetapi sampai tanggal 31 Desember 2024 kas tersebut belum disetorkan ke kas daerah. Kas tersebut merupakan gaji yang terlanjur dicairkan kepada ASN yang indiscipliner dan tidak masuk kerja lebih dari 84 hari. sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 bahwa PNS yang bersangkutan diberhentikan gajinya pada bulan berikutnya dengan tidak perlu menunggu keluarnya Keputusan Hukuman Disiplin.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
35.236.512,00	312.658,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.236.512,00 merupakan gaji ASN atas nama w (kasus indisciplin) yang sampai 31 Desember 2024 tidak disetorkan oleh bendahara kepada yang bersangkutan dan akan disetorkan kembali ke kas daerah. Kas sebesar Rp35.236.512,00 dengan rincian Rp34.936.974,00 direkening bendahara dan Rp299.538,00 kas tunai. Sedangkan kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp312.658,00.

3. Kas di BLUD

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
7.304.357.109,50	6.651.567.236,50

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.304.357.109,50 dan Rp6.651.567.236,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35 Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)	Rincian Saldo Akhir	
			Bank (Rp)	Tunai (Rp)
1	Anduring	337.449,00	337.449,00	0,00
2	Batu Basa	0,00	0,00	0,00
3	Gasam Gadang	0,00	0,00	0,00
4	Ketaping	0,00	0,00	0,00
5	Kampung Dalam	23.105.092,00	23.105.092,00	0,00
6	Kampung Guci	17.665.688,00	17.665.688,00	0,00
7	Koto Bangko	0,00	0,00	0,00
8	Kayu Tanam	0,00	0,00	0,00
9	Limau Purut	0,00	0,00	0,00
10	Lubuk Alung	28.045.759,00	28.045.759,00	0,00
11	Padang Alai	14.562.706,00	14.562.706,00	0,00
12	Padang Sago	0,00	0,00	0,00
13	Enam Lingkung	0,00	0,00	0,00
14	Pasar Usang	22.722.108,00	22.722.108,00	0,00

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)	Rincian Saldo Akhir	
			Bank (Rp)	Tunai (Rp)
15	Patamuan	0,00	0,00	0,00
16	Sungai Geringging	0,00	0,00	0,00
17	Sungai Limau	4.069.875,00	4.069.875,00	0,00
18	Sungai Sarik	0,00	0,00	0,00
19	Sicincin	0,00	0,00	0,00
20	Sikabu	8.731.080,00	8.731.080,00	0,00
21	Sintuak	0,00	0,00	0,00
22	Ulakan	0,00	0,00	0,00
23	Pauh Kambar	0,00	0,00	0,00
24	Ampalu	0,00	0,00	0,00
25	Sikucur	0,00	0,00	0,00
26	RSUD Parit Malintang	7.185.117.352,50	7.185.117.352,50	0,00
Jumlah		7.304.357.109,50	7.304.357.109,50	0,00

4. Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
119.606.781,00	119.055.718,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp119.606.781,00 dan Rp119.055.718,00. Saldo Kas sebesar Rp140.592.531,00 terdiri dari Kas di Bank sebesar Rp60.630.858,00 dan Kas Tunai sebesar Rp58.975.923,00 yang dikelola SD dan SMP. Dalam saldo dana bos sebesar Rp119.606.781,00 sudah termasuk reklas dari Silpa dana BOP Paud sebesar Rp9.900.000,00. Jumlah tersebut telah disetor ke Kas Daerah, yaitu a) Rp1.500.000,00 tanggal 5 Februari 2025, b) Rp8.295.013,00 tanggal 18 Februari 2025. Rincian Kas di Bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5. Kas Dana BOK Puskesmas

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
4.055.734.413,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.055.734.413,00 dan Rp0,00. Pada tahun 2023 Saldo kas dana BOK kesehatan tergabung di dalam saldo kas lainnya sebesar Rp8.636.598.930,00.

6. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
0,00	8.646.498.930,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.646.498.930,00. Pada tahun 2023 Saldo kas

lainnya tercatat sebesar Rp8.646.498.930,00 dengan rincian saldo kas yang berasal dari SiLPA DAK Non Fisik BOK Puskesmas sebesar Rp8.636.598.930,00 dan SiLPA dana BOP PAUD sebesar Rp9.900.000,00 telah di reklas ke silpa dana BOS.

7. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
66.577.672.791,00	57.349.860.172,00

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp66.577.672.791,00 dan Rp57.349.860.172,00 sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1.	Piutang Pajak Restoran	2.230.000,00
2.	Piutang Pajak Reklame	79.152.800,00
3.	Piutang Pajak Air Tanah	60.776.368,00
4.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	66.435.513.623,00
Jumlah		66.577.672.791,00

- a. Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.230.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023	Rp	0,00
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2024	Rp	0,00
Penerimaan 2024	Rp	2.230.000,00
Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024	Rp	2.230.000,00

- b. Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.152.800,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023	Rp	64.389.300,00
Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2024	Rp	1.008.794.750
Penerimaan 2024	Rp	(994.031.250,00)
Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024	Rp	79.152.800,00

Rincian Piutang Pajak Reklame per Wajib Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 3a.**

- c. Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.776.368,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024	Rp	51.321.664,00

Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2024	Rp	1.394.081.448,00
Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2024	Rp	(1.385.466.152,00)
Pajak Air Tanah Lebih Bayar	Rp	839.416,00
Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024	Rp	60.776.376,00

Rincian Piutang Pajak Air Tanah per wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 5. 37 Piutang Pajak Air Tanah

No.	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah (Rp)
1	PT Multikon Jagad Perkasa	2020	437.964,00
2	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
3	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
4	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
5	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
6	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
7	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
8	PT Multikon Jagad Perkasa	2023	1.382.932,00
9	PT.Jaya Sentrikon Indonesia	2024	32.748.012,00
10	PT.Jaya Sentrikon Indonesia	2024	3.503.069,00
11	PT.Jaya Sentrikon Indonesia	2024	8.404.153,00
12	PT.Kunango Jantan	2024	6.002.646,00
Jumlah			60.776.368,00

- d. Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.435.513.623,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo Piutang PBB P2 per 31 Desember 2023 Rp **57.234.149.208,00**

Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2024	Rp	25.608.087.678,00
Penerimaan Pajak PBB Tahun 2024	Rp	(16.406.723.263,00)

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 Rp **66.435.513.623,00**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp66.435.513.623,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Piutang PBB-P2 tahun 2009 s.d. 2013 diserahkan oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ke Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan:
 - a) Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-23/WPJ.27/KP.04/2013 tanggal 19 Desember 2013;
 - b) Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-

07/WPJ.27/KP.04/2014, tanggal 24 Januari 2014. Berdasarkan BAST tersebut piutang PBB P2 yang dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp18.198.672.111,00.

- 2) Piutang PBB P2 tahun 2009 sampai dengan 2022 per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 38 Piutang PBB P2

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang PBBP2 Tahun 2009	2.843.675.290,00
2	Piutang PBBP2 Tahun 2010	2.911.173.985,00
3	Piutang PBBP2 Tahun 2011	4.152.722.763,00
4	Piutang PBBP2 Tahun 2012	3.717.761.420,00
5	Piutang PBBP2 Tahun 2013	4.573.338.653,00
6	Piutang PBBP2 Tahun 2014	2.439.677.596,00
7	Piutang PBBP2 Tahun 2015	2.235.222.407,00
8	Piutang PBBP2 Tahun 2016	2.275.531.869,00
9	Piutang PBBP2 Tahun 2017	2.254.443.110,00
10	Piutang PBBP2 Tahun 2018	2.833.838.997,00
11	Piutang PBBP2 Tahun 2019	3.792.163.846,00
12	Piutang PBBP2 Tahun 2020	3.907.575.705,00
13	Piutang PBBP2 Tahun 2021	3.641.689.050,00
14	Piutang PBBP2 Tahun 2022	4.570.941.112,00
15	Piutang PBBP2 Tahun 2023	11.252.921.149,00
16	Piutang PBBP2 Tahun 2024	9.032.855.443,00
Jumlah		66.435.532.395,00

Dari rincian piutang PBB P2 sebesar Rp66.435.532.395,00 diatas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Limpahan KPP Pratama Rp18.198.672.111,00
- b. Hasil Validasi sampai dengan 15 Mei 2024
dengan Rincian sebagai berikut :
- objek pajak dan subjek pajak diketahui Rp19.546.778.960,00
- objek dan subjek pajak tidak diketahui Rp18.174.619.381,00
- Objek pajak dengan subjek pajak ganda Rp57.991.925,00
- Objek pajak diketahui subjek pajak tidak diketahui Rp275.531.325,00
- Total nilai yang sudah tervalidasi Rp38.054.921.591,00
- c. Sisa belum divalidasi Rp10.181.938.693,00
- Total Rp66.435.532.395,00**

Nilai Piutang PBB yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.435.513.623,00 sementara nilai dari tarikan sistem SIM PBB sebesar Rp66.435.532.395,00 terdapat selisih lebih di sistem sebesar Rp18.772,00 merupakan kelebihan imput disistem yang belum dapat ditelusuri yang sudah tersaji dari tahun-tahun sebelumnya.

Rincian Piutang PBB P2 dapat dilihat pada **Lampiran 3** dan **Lampiran 4**.

8. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
576.240.650,00	836.782.650,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp576.240.650,00 dan Rp836.782.650,00. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp576.240.650,00 merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp450.032.650,00 dan Piutang Retribusi Pelayanan Sampah sebesar Rp126.208.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 39 Piutang Retribusi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT. Akses Prima Indonesia berdasarkan SKRD Tahun 2019, 2020 dan 2021	14.250.000,00
2	PT. Tower Bersama Group (TBG) berdasarkan SKRD tahun 2021	2.500.000,00
3	PT. Mega Tower berdasarkan SKRD tahun 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023	63.060.729,00
4	PT. XL Axiata berdasarkan SKRD tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023	142.500.000,00
5	PT. Solusi Tunas Pratama berdasarkan SKRD tahun 2020, 2021 dan 2023	22.750.000,00
6	PT. Infrasys Persada berdasarkan SKRD tahun 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023	22.284.263,00
7	PT. Indosat berdasarkan SKRD tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023	134.500.000,00
8	PT. Telkomsel berdasarkan SKRD tahun 2013, 2018, 2019, 2020 dan 2021	6.937.658,00
9	PT. Inti Bangun Sejahtera berdasarkan SKRD tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021	41.250.000,00
10	Retribusi Pelayanan Sampah	126.208.000,00
JUMLAH		576.240.650,00

9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
208.499.763,00	189.405.791,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp208.499.763,00 dan Rp189.405.791,00. Total Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp208.499.763,00 terdiri atas:

- a. Saldo Piutang BLUD sebesar Rp205.019.496,00; dan
- b. Saldo Piutang Bunga Dana BOS sebesar Rp3.480.267,00.

Piutang BLUD terdiri atas piutang BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Piutang BLUD RSUD 31 Desember 2023	Rp	170.190.024,00
Penerimaan Piutang Tahun 2024	Rp	(129.257.539,00)
Piutang Tahun 2024	Rp	145.015.011,00
Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2024	Rp	185.947.496,00
Saldo Piutang BLUD Puskesmas 31 Desember 2023	Rp	9.010.000,00
Penerimaan Piutang Tahun 2023	Rp	(9.010.000,00)
Piutang Tahun 2023	Rp	19.072.000,00
Saldo Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024	Rp	19.072.000,00
Jumlah		Rp 205.019.496,00

Rincian Piutang BLUD masing-masing Puskesmas dan RSUD sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Rincian Piutang BLUD Puskesmas dan RSUD

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Limau Purut	2.045.000,00
2	Puskesmas Pasar Usang	8.307.000,00
3	Puskesmas Sungai Limau	8.720.000,00
4	RSUD	185.947.496,00
Jumlah		205.019.496,00

Piutang Dana BOS berasal dari Dana BOS yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp3.480.267,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo atas Piutang Dana BOS per 31 Desember 2023	Rp	10.205.767,00
Pelunasan atas piutang Bunga Dana BOS Tahun 2024	Rp	6.725.500,00
Piutang Bunga BOS di Kas Daerah Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo Piutang Bunga Bos per 31 Desember 2024	Rp	3.480.267,00

Saldo Piutang Dana Bos sebesar Rp3.480.267,00 merupakan pendapatan bunga Dana BOS dari tahun 2019 sampai dengan 2024 yang belum disetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bunga Dana BOS tahun 2019	Rp	2.121.323,00
Piutang Bunga Dana BOS tahun 2020	Rp	783.159,00
Piutang Bunga Dana BOS tahun 2021	Rp	575.785,00
Saldo Piutang Bunga BOS per 31 Desember 2024	Rp	3.480.267,00

10. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
29.919.993.627,00	26.337.599.443,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp29.919.993.627,00 dan Rp26.337.599.443,00 Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2024 merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5. 41 Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Jenis DBH Provinsi	Kurang Salur per 31 Des 2024 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.954.087.404,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.798.324.117,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.113.219.381,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	54.362.725,00
Jumlah		29.919.993.627,00

Keputusan atas Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat TA 2024.

11. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
11.140.305,00	11.140.305,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.140.305,00 dan Rp11.140.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Reklas atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 ke Kas Negara di Tahun 2011 sebesar Rp3.040.305,00 ke Piutang Lainnya; dan
- Reklas Tagihan Ganti Rugi sebesar Rp8.100.000,00 ke Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Rincian Tagihan Ganti Rugi sebagai berikut:

Tabel 5. 42 Tagihan Ganti Rugi

No.	Tahun	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tahun 2019	Piutang TGR ke Darfa Yenil	2.900.000,00
2.	Tahun 2019	Piutang TGR ke Nailus	250.000,00
3.	Tahun 2021	Piutang TGR ke By .Kenek	350.000,00
4.	Tahun 2022	Piutang TGR a.n. Qorri Suti Armi, A.Md.Keb	4.600.000,00

12. Penyisihan Piutang**Per 31 Desember 2024****Per 31 Desember 2023****(Rp)****(Rp)****(42.604.370.681,66)****(36.869.449.426,71)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp(42.604.370.681,66) dan Rp(36.869.449.426,71) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 43 Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	59.280.580,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	3.111.384,40
3	Penyisihan Piutang PBB P2	41.805.296.599,61
4	Penyisihan Piutang Retribusi	550.229.650,00
5	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	25.701.044,50
6	Penyisihan Piutang Antar daerah	149.599.968,15
7	Penyisihan Piutang Lainnya	11.140.305,00
Jumlah		42.604.359.531,66

13. Beban Bayar Dimuka**Per 31 Desember 2024****Per 31 Desember 2023****(Rp)****(Rp)****197.458.593,75****207.989.718,75**

Saldo Beban Bayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp197.458.593,75 dan Rp207.989.718,75. Beban Bayar Dimuka merupakan Sewa Bayar Dimuka atas lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan perjanjian sewa menyewa lahan Nomor 06/PSML/DLHKPP/IX/2023.

14. Persediaan**Per 31 Desember 2024****Per 31 Desember 2023****(Rp)****(Rp)****15.986.315.979,67****15.879.033.952,90**

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang

yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp15.986.315.979,67 dan Rp15.879.033.952,90. Penyajian nilai persediaan sebesar Rp15.986.315.979,67 sudah termasuk persediaan yang berasal dari bongkaran gerbang Tarok City sebesar Rp79.900.000,00 yang dicatat sebagai persediaan untuk dijual/Diserahkan yang sebelumnya tercatat sebesar Rp4.500.000,00. Persediaan per 31 Desember 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Rincian Persediaan per jenis

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Persediaan Bahan	20.192.945,00
2.	Persediaan Suku Cadang	19.415.249,00
3.	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	916.375.744,00
4.	Obat-obatan	14.946.132.041,67
5.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	84.200.000,00
Jumlah		15.986.315.979,67

Rincian Persediaan Per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Selain persediaan yang tercatat di atas, juga terdapat obat kadaluarsa sebesar Rp331.534.308,59 dengan rincian pada Dinas Kesehatan sebesar Rp180.367.086,01 dan di RSUD sebesar Rp151.167.222,58 disamping itu juga terdapat Bahan Habis Pakai (Bahan Kimia) kadaluarsa sebesar Rp467.733.194,97 dengan rincian pada RSUD sebesar Rp453.520.771,35 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp14.212.423,62.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
92.435.723.017,54	91.576.556.216,69

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp92.435.723.017,54 dan Rp91.576.556.216,69 berupa Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)	4.224.465.232,00
2.	Penyisihan Investasi Non Permanen	(4.224.465.232,00)
3.	Investasi Permanen	92.435.723.017,54
Jumlah		92.435.723.017,54

Investasi jangka Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
4.224.465.232,00	4.232.465.232,00

Saldo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.224.465.232,00 dan Rp4.232.465.232,00.

2. Penyisihan Investasi Non Permanen

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
(4.224.465.232,00)	(4.232.465.232,00)

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Investasi Non Permanen yang kemungkinan tidak tertagih yang diperoleh melalui *aging schedule*. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Penyisihan Piutang Non Permanen telah mencapai nilai maksimal dari nilai Investasi Non Permanen. Rincian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

3. Investasi Permanen

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
92.435.723.017,54	91.576.556.216,69

Investasi Permanen merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah. Saldo per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp92.435.723.017,54 dan Rp91.576.556.216,68. Rincian Investasi Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 7**. Rincian Penyertaan modal tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 5. 46 Penyertaan Modal Daerah

No	Uraian	Jumlah (Rp)						
1.	Bank Nagari Sumatera Barat	46.147.000.000,00						
	Per 31 Desember 2024 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Bank Nagari Sumatera Barat Rp46.147.000.000,00. Dari jumlah penyertaan modal sebesar Rp46.147.000.000,00 telah dikonversikan menjadi lembar saham dengan jumlah lembar sebanyak 46.147 lembar. Persentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2023 sebesar 2.37%. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Bank Nagari Sumatera Barat Rp46.147.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: <table><tr><td>Saldo awal penyertaan modal tahun 2024 sebesar</td><td>Rp43.941.000.000,00</td></tr><tr><td>Tambahan Penyertaan modal tahun 2024 sebesar</td><td><u>Rp2.206.000.000,00</u></td></tr><tr><td>Nilai Penyertaan Modal akhir</td><td>Rp46.147.000.000,00</td></tr></table>		Saldo awal penyertaan modal tahun 2024 sebesar	Rp43.941.000.000,00	Tambahan Penyertaan modal tahun 2024 sebesar	<u>Rp2.206.000.000,00</u>	Nilai Penyertaan Modal akhir	Rp46.147.000.000,00
Saldo awal penyertaan modal tahun 2024 sebesar	Rp43.941.000.000,00							
Tambahan Penyertaan modal tahun 2024 sebesar	<u>Rp2.206.000.000,00</u>							
Nilai Penyertaan Modal akhir	Rp46.147.000.000,00							
2.	PDAM	36.775.076.793,55						
	<table><tr><th>No</th><th>Kekayaan Pemda yang dipisahkan</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr></table>		No	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Jumlah (Rp)			
No	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Jumlah (Rp)						

1.	Tahun 1995	5.792.864.988	
	Tahun 2002	1.185.764.899	
	Tahun 2004	1.608.778.000	
	Tahun 2005	48.444.000	
	Tahun 2006	1.773.800.000	
	Tahun 2007	1.827.799.300	
	Tahun 2013	1.812.459.000	
	Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor : PHD-08/PK/2016, tentang Hibah Air Minum (MBR)	1.276.000.000	
	Perda Kab. Padang Pariaman No 11 Tahun 2016, modal non tunai untuk skema penghapusan utang PDAM Kab. Padang Pariaman kepada Pemerintah Pusat	52.254.085.000	
	Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 15 Maret 2017, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman	6.945.000.000	
	Perjanjian Hibah Daerah No PHD-14/AMK/MK7/2018, Tanggal 23 Mei 2018 berupa pemasangan 2.546 Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	7.638.000.000	
	Perjanjian Hibah Daerah No PHD-136/MK7/2019, Tanggal 5 Agustus 2019 berupa pemasangan 2.720 Sambungan Rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	8.160.000.000	
	Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-91/MK7/DTK03/AMK/2021, Tanggal 4 Mei 2021 berupa pemasangan 2.487 Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	7.461.000.000	
	Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-5/MK.7/DTK.03/AMK/2022, Tanggal 11 Februari 2022 berupa pemasangan 481 Sambungan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	1.299.000.000	
	Jumlah Penyertaan Modal		99.082.995.187
	Modal yang Belum ditetapkan Statusnya		
	Pemda Tingkat II	Rp22.471.978.920	
	Pemerintah Pusat	Rp5.548.542.465	
	Total Modal PDAM		127.103.516.572,00
	Persentase Kepemilikan Pemda atas PDAM (99.082.995.187 /128.695.532.572)	77,95	
	Nilai penyertaan modal pada PDAM per 31 Desember 2023		37.391.897.458,22
	Rugi Tahun berjalan		1.303.593.757,00
	Penyesuaian atas kerugian Tahun Berjalan 2024 (1.303.593.757,00*77,95)		1.016.210.860,52
		Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2024	
3.	PT. BPR-PKPP		6.988.137.419,83
	Nilai Modal Disetor PT.BPR-PKPP	6.771.500.000,00	
	Setoran Modal Pemerintah Daerah		
	Setoran Awal Pendirian PT.BPR-PKPP Tahun 2007		750.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2009		250.000.000
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2015		2.000.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2016		500.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2017		1.000.000.000,00

	Tambahan Setoran Modal Tahun 2018	1.500.000.000,00
	Tambahan Setoran Modal Tahun 2020	750.000.000,00
	Nilai Setoran Modal Pemda	6.750.000.000,00
	persentase kepemilikan Pemda (6.750.000.000/6.771.500.000x100)	99,68
	Nilai penyertaan modal pada PT. BPR-PKPP per 31 Desember 2023	7.318.759.758,46
	Rugi Tahun Berjalan 2024	(331.675.432,00)
	Akumulasi Kerugian Sampai dengan 31 Desember 2024 yang ditanggung Pemda	(330.622.338,63)
	Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2024	6.988.137.419,83
4.	KUD Dwi Sri	100.000.000,00
	Penyertaan modal pada KUD Dwi Sri dengan nilai perolehan (<i>cost method</i>) sebesar Rp100.000.000,00. KUD Dwi Sri sejak beberapa tahun belakang tidak lagi melakukan aktivitas dan secara manajemen tidak ada lagi penanggung jawabnya. Sehingga sampai dengan penyusunan laporan keuangan Tahun 2020 laporan keuangan KUD Dwi Sri tidak diperoleh.	
5.	Perusahaan Daerah Saiyo	0,00
	Nilai perolehan (<i>cost method</i>) investasi permanen pada Perusda Saiyo sebesar Rp0,00. Perusda ini tidak beroperasi lagi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Saiyo Sakato Padang Pariaman, Perusahaan Daerah Saiyo Sakato telah resmi dibubarkan sejak tanggal 3 Mei 2016. Berdasarkan hal tersebut, sambil menunggu langkah selanjutnya. Pencatatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Perusda Saiyo Sakato di reklas ke Aset Lain-lain.	
6.	PT. Balairung CitraJaya Sumbar	2.824.899.000,00
	Penyertaan modal pada Tahun 2012 pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar dalam bentuk Saham Gabungan yang merupakan Saham atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1.131.655 lembar dengan rincian saham seri A sebanyak 1.694 lembar dan saham seri B sebanyak 1.130.960 lembar. Persentase kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebesar 1.72%.	
JUMLAH		92.835.113.213,39

C. ASET TETAP

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
1.143.029.740.245,69	1.102.214.382.086,68

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp1.143.029.740.245,69 dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023, nilai Aset Tetap Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.815.358.159,01 atau 3,70%.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.143.029.740.245,69 terdiri atas:

Saldo Awal (sebelum penyusutan)	Rp	4.514.333.185.242,79
Belanja Modal 2024 (+)	Rp	155.053.257.852,00
Kurang Catat (+)	Rp	2.270.580.000,00
Utang Jangka Pendek (+)	Rp	506.572.229,00
Belanja Tak Terduga (+)	Rp	4.811.148.000,00

Hibah Dari Pihak Ketiga (+)	Rp	562.844.918,00
Reklasifikasi Ke Aset Tetap (+)	Rp	28.715.621.351,20
Penghapusan (-)	Rp	(3.502.018.161,55)
Reklasifikasi dari Aset Tetap (-)	Rp	(33.557.800.999,65)
Saldo akhir (+)	Rp	4.669.193.390.431,79
Akumulasi Penyusutan (-)	Rp	(3.526.163.650.186,10)
Saldo Akhir Setelah Penyusutan	Rp	1.143.029.740.245,69

Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 47 Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tanah	216.439.328.749,00
2.	Peralatan dan Mesin	497.426.717.246,58
3.	Gedung dan Bangunan	1.111.965.690.027,81
4.	Jalan, Jembatan Jaringan dan Irigasi	2.681.736.052.936,05
5.	Aset Tetap Lainnya	96.245.793.604,35
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.379.807.868,00
Total Aset Tetap Sebelum Penyusutan		4.669.193.390.431,79

1. Tanah

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
216.439.328.749,00	213.088.316.749,00

Nilai tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp216.439.328.749,00 terdiri atas:

Saldo Awal	Rp	213.088.316.749,00
Belanja Modal (+)	Rp	1.087.632.000,00
Kurang Catat (+)	Rp	2.270.580.000,00
Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	50.000.000,00
Penghapusan (-)	Rp	(57.200.000,00)
Saldo akhir	Rp	216.439.328.749,00

Nilai tanah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 48 Tanah per SKPD

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	16.858.346.241,00	14.644.966.241,00
2	Sekretariat DPRD	7.652.000,00	7.652.000,00
3	Inspektorat Kabupaten	8.360.000,00	8.360.000,00
4	Kecamatan Lubuk Alung	772.500.000,00	772.500.000,00
5	Kecamatan Sei. Geringging	38.900.000,00	38.900.000,00
6	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	10.000.000,00	10.000.000,00

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
7	Kecamatan Ulakan Tapakis	10.922.500,00	10.922.500,00
8	Kecamatan Sei. Limau	55.485.000,00	55.485.000,00
9	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	11.000.000,00	11.000.000,00
10	Kecamatan VII Koto	15.925.000,00	15.925.000,00
11	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	60.480.000,00	60.480.000,00
12	Kecamatan Nan Sabaris	11.325.000,00	11.325.000,00
13	Kecamatan Batang Anai	12.900.000,00	12.900.000,00
14	Kecamatan V Koto Timur	5.000.000,00	5.000.000,00
15	Kecamatan Padang Sago	4.970.000,00	4.970.000,00
16	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	75.680.000,00	75.680.000,00
17	Kecamatan Patamuan	30.000.000,00	30.000.000,00
18	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	8.000.000,00	8.000.000,00
19	Kecamatan Batang Gasan	50.000.000,00	50.000.000,00
20	Kecamatan Enam Lingkung	70.000.000,00	70.000.000,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.073.133.533,00	13.073.133.533,00
22	Dinas Kesehatan	2.385.988.100,00	2.438.188.100,00
23	Rumah Sakit Umum Daerah	1.222.160.000,00	1.222.160.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.003.591.225,00	141.003.591.225,00
25	Dinas Perhubungan	483.109.000,00	483.109.000,00
26	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.020.747.750,00	28.933.115.750,00
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.740.000,00	14.740.000,00
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000,00	300.000.000,00
29	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335.370.000,00	335.370.000,00
30	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	96.595.000,00	96.595.000,00
31	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.812.858.400,00	1.762.858.400,00
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.200.000,00	0,00
33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	321.630.000,00	321.630.000,00
34	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.030.468.000,00	4.030.468.000,00
35	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	55.750.000,00	55.750.000,00
36	Dinas Perikanan	3.113.542.000,00	3.113.542.000,00
Total		216.439.328.749,00	213.088.316.749,00

Penambahan Aset Tanah sebesar Rp3.408.212.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.087.632.000,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- b. Kurang Catat atas Hibah Tanah Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007 pada Sekretariat Daerah seluas $\pm 113.529 \text{ m}^2$ senilai Rp2.270.580.000,00 ($113.529 \text{ m}^2 \times \text{NJOP Rp}20.000,00$).
- c. Hibah dari Pihak Ketiga tanah dari Nagari III Koto Aur Malintang seluas 5000 m^2 senilai Rp50.000.000,00.

Pengurangan Aset Tanah sebesar Rp57.200.000,00 merupakan penghapusan atas tanah pada Sekretariat Daerah yang dihibahkan ke Panti Asuhan Aisyah Kota Pariaman.

Kemudian nilai tanah Tahun 2024 sebesar Rp214.168.748.749,00 secara luas adalah sebanyak 1.466 persil tanah yang terdiri dari 364 persil tanah telah bersertifikat, 6 persil tanah dalam proses sertifikat dan 1.096 persil tanah belum bersertifikat yang diantaranya termasuk tanah jalan sebanyak 741 persil tanah.

Berdasarkan Surat Hibah pada Tahun 2007 tanah yang dihibahkan untuk IKK seluas 100 Hektar, namun hasil pengukuran untuk ganti rugi tanaman dan bangunan luas tanah ditemukan seluas ± 73 Hektar, dari 73 Hektar dihibahkan ke Kementerian Agama yang direncanakan membangun Madrasah Bertaraf Internasional (MBI) seluas 10 Hektar. Selanjutnya Tanah IKK yang seharusnya dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah pada Sekretariat Daerah seluas ± 63 Hektar, namun sampai dengan per 31 Desember 2024 tanah IKK yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah pada Sekretariat Daerah seluas ± 53 Hektar belum bersertifikat dan saat ini bagian dari tanah tersebut sedang dalam proses hukum.

Selain tanah IKK, tanah SDN 06 Batang Anai seluas 1.000 m^2 , juga sedang dalam proses hukum (adanya gugatan dari pewaris tanah) yang dapat berdampak terhadap status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman apabila keluar keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selanjutnya untuk penggantian tanah BPP Buayan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdampak pembangunan jalan tol seluas $+12.000 \text{ m}^2$ dalam proses pengurusan Sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Rincian lebih lanjut tentang aset Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
497.426.717.246,58	478.877.100.278,58

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp497.426.717.246,58 terdiri:

Saldo Awal	Rp	478.877.100.278,58
a. Belanja Modal 2024 (+)	Rp	23.888.796.704,00
b. Hibah dari pihak ketiga (+)	Rp	285.674.041,00
c. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin (+)	Rp	46.056.500,00
d. Penghapusan (-)	Rp	(1.755.334.347,55)
e. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin (-)	Rp	(3.915.575.929,45)
Saldo akhir	Rp	497.426.717.246,58

Nilai peralatan dan mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 49 Nilai Peralatan dan Mesin per SKPD

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	28.164.440.301,71	26.868.237.646,71
2	Sekretariat DPRD	8.239.282.740,23	9.103.322.887,78
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	5.399.717.145,00	5.723.201.808,00
4	Inspektorat Kabupaten	1.439.302.647,00	1.546.748.147,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.895.741.316,00	1.879.984.316,00
6	Kecamatan Lubuk Alung	504.108.243,00	462.108.243,00
7	Kecamatan Sei. Geringging	585.954.440,00	556.331.440,00
8	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	503.068.578,00	485.068.578,00
9	Kecamatan Ulakan Tapakis	464.164.191,00	464.164.191,00
10	Kecamatan Sei. Limau	600.992.958,00	593.992.958,00
11	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	486.985.558,00	475.385.558,00
12	Kecamatan VII Koto	508.401.431,00	541.910.231,00
13	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	454.781.167,00	441.137.192,00
14	Kecamatan Nan Sabaris	502.206.952,00	497.456.952,00
15	Kecamatan Batang Anai	560.171.229,00	547.956.645,00
16	Kecamatan V Koto Timur	552.080.027,00	542.277.727,00
17	Kecamatan Padang Sago	432.826.651,00	432.826.651,00
18	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	506.356.251,00	537.877.501,00
19	Kecamatan Patamuan	588.711.008,00	588.711.008,00
20	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	375.352.256,00	404.760.006,00
21	Kecamatan Batang Gasan	529.237.107,00	664.076.107,00
22	Kecamatan Enam Lingkung	602.754.593,00	602.754.593,00
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	138.334.587.843,81	132.033.542.019,81
24	Dinas Kesehatan	96.850.481.570,19	94.749.797.404,64
25	Rumah Sakit Umum Daerah	99.472.857.626,75	92.725.848.531,75
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.178.850.621,10	16.976.269.621,10
27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.354.072.243,00	2.144.704.693,00
28	Dinas Perhubungan	10.392.393.126,00	10.533.393.126,00

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.040.004.460,60	4.004.954.460,60
30	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.592.709.519,00	7.995.446.711,00
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.429.707.225,00	3.297.726.825,00
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.040.060.615,00	956.518.615,00
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.974.194.984,00	7.998.468.664,00
34	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.332.970.429,00	2.154.050.891,00
35	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	4.514.987.756,23	4.508.442.756,23
36	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	5.664.825.345,00	5.762.311.803,00
37	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.088.923.339,00	2.269.760.689,00
38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	384.360.359,00	392.360.359,00
39	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	11.771.335.625,00	11.617.635.625,00
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.606.655.035,00	7.594.966.463,00
41	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.780.613.893,00	3.651.121.093,00
42	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.854.570.332,36	6.721.071.032,36
43	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.681.143.663,66	2.681.143.663,66
44	Dinas Perikanan	4.189.774.844,94	4.147.274.844,94
	Total	497.426.717.246,58	478.877.100.278,58

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.888.796.704,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2024.
- b. Hibah dari Pihak Ketiga sebesar Rp285.674.041,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hibah dari Komite dan BOP Paud di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 37.773.001,00
 - 2) Hibah Kendaraan Roda Empat (Pick Up) dari PT. Angkasa Pura II (Persero) ke Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tanggal 5 September 2024. Rp 181.000.000,00
 - 3) Hibah PC Unit dan Printer dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (BAST Nomor : 195/XI/PH-Komputer Daerah/DPPM/KEMENINVEST-BKPM/2021 tanggal 20 Desember 2021. Rp 17.651.040,00

- 4) Hibah Perahu Polyethylene dari Badan Rp 49.250.000,00 Nasional Penanggulangan Bencana ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAST Nomor. 97/BNPB/D-V/RT.03.05/06/2024 tanggal 10 Juni 2024)
- c. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.056.500,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa berupa:
 - 1) Pembelian Kursi Kerja Pejabat sebanyak 2 unit Rp 3.385.500,00 pada Kecamatan V Koto Timur.
 - 2) Pembelian Kursi Kerja Pejabat sebanyak 4 unit Rp 7.125.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Pembelian Laptop sebanyak 2 unit dan Printer Rp 34.046.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - 4) Pembelian Kursi Resepsionis pada Dinas Rp 1.500.000,00 Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penghapusan senilai Rp1.755.334.347,55 merupakan penghapusan aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan sesuai Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:522/KEP/BPP/2024, dan Nomor:565/KEP/BPP/2024 dengan rincian:
 - a) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.103.649.647,55;
 - b) Dinas Kesehatan sebesar Rp185.600.000,00;
 - c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp58.377.200,00;
 - d) Dinas Perhubungan sebesar Rp141.000.000,00;
 - e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp222.707.500,00;
 - f) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM sebesar Rp4.000.000,00;
 - g) Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp40.000.000,00.
- 2) Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.915.575.929,45 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.612.000,00 berupa:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Belanja BOS) sebesar Rp27.622.000,00;
 - (2) Dinas Kesehatan (Belanja BLUD Puskesmas) sebesar Rp35.990.000,00.
 - b) Reklasifikasi ke Jalan Jembatan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp24.880.000,00 berupa:

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Belanja BOS) sebesar Rp5.000.000,00;
 - (2) Dinas Kesehatan (Belanja BLUD Puskesmas) sebesar Rp19.880.000,00.
- c) Reklasifikasi ke Aset Lain Lain Rusak Berat sebesar Rp1.761.812.936,45 berupa:
- (1) Inspektorat Kabupaten sebesar Rp145.325.500,00;
 - (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp169.033.000,00;
 - (3) Kecamatan VII Koto Sungai Sariak sebesar Rp33.508.800,00;
 - (4) Kecamatan 2X11 Enam Lingkung sebesar Rp13.440.025,00;
 - (5) Kecamatan Batang Anai sebesar Rp13.189.600,00;
 - (6) Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Rp31.521.250,00;
 - (7) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Rp29.407.750,00;
 - (8) Kecamatan Batang Gasan sebesar Rp9.955.000,00;
 - (9) Dinas Kesehatan sebesar Rp811.716.869,45;
 - (10) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp260.524.316,00;
 - (11) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebesar Rp170.229.398,00;
 - (12) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp8.000.000,00;
 - (13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp65.961.428,00.
- d) Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel sebesar Rp1.982.166.018,00 sebagai berikut:
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.931.791.658,00;
 - (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp43.146.860,00;
 - (3) RSUD sebesar Rp1.827.500,00;
 - (4) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp5.400.000,00.
- e) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp83.104.975,00 dengan rincian:
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp74.952.800,00;
 - (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.500.000,00;
 - (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp924.075,00;
 - (4) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebesar Rp1.728.100,00.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
1.111.965.690.027,81	1.081.759.974.520,61

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.111.965.690.027,81. Nilai ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan Tahun 2024. Rincian Gedung dan bangunan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	1.081.759.974.520,61
a. Belanja Modal 2024 (+)	Rp	20.826.064.638,00
b. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan (+)	Rp	14.726.021.893,20
c. Penghapusan (-)	Rp	(227.098.814,00)
d. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan (-)	Rp	(5.119.272.210,00)
Saldo akhir	Rp	1.111.965.690.027,81

Nilai gedung dan bangunan per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 50 Nilai gedung dan bangunan per SKPD

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 2024(Rp)
1.	Sekretariat Daerah	118.455.039.885,97	118.455.039.885,97
2.	Sekretariat DPRD	5.595.516.907,00	5.595.516.907,00
3.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	8.447.792.643,00	8.447.792.643,00
4.	Inspektorat Kabupaten	6.355.963.180,00	6.355.963.180,00
5.	Kecamatan Lubuk Alung	777.241.996,00	611.425.616,00
6.	Kecamatan Sei. Geringging	1.058.031.803,00	1.264.134.420,00
7.	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1.100.052.986,00	1.100.052.986,00
8.	Kecamatan Ulakan Tapakis	737.238.000,00	737.238.000,00
9.	Kecamatan Sei. Limau	1.328.003.642,00	1.178.889.000,00
10.	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	1.960.376.000,00	1.960.376.000,00
11.	Kecamatan VII Koto	2.722.535.567,76	2.722.535.567,76
12.	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	784.305.980,00	618.482.600,00
13.	Kecamatan Nan Sabaris	1.366.565.000,00	1.366.565.000,00
14.	Kecamatan Batang Anai	697.992.900,00	697.992.900,00
15.	Kecamatan V Koto Timur	634.140.000,00	634.140.000,00
16.	Kecamatan Padang Sago	297.000.000,00	297.000.000,00
17.	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	2.259.848.679,48	2.259.848.679,48
18.	Kecamatan Patamuan	787.339.363,00	787.339.363,00
19.	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	540.192.000,00	540.192.000,00
20.	Kecamatan Batang Gasan	870.852.181,00	705.058.801,00
21.	Kecamatan Enam Lingkung	662.397.130,00	496.577.750,00

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 2024(Rp)
22.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	597.136.550.007,19	587.984.633.483,19
23.	Dinas Kesehatan	103.900.385.459,11	102.406.274.763,11
24.	Rumah Sakit Umum Daerah	87.903.985.405,39	87.355.760.783,39
25.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.339.753.137,60	17.019.074.299,60
26.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.205.138.715,06	10.205.138.715,06
27.	Dinas Perhubungan	9.235.123.443,80	9.235.123.443,80
28.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.857.422.678,00	24.857.422.678,00
29.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	488.343.425,00	488.343.425,00
30.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.000.000,00	65.000.000,00
31.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.181.090.576,82	5.181.090.576,82
32.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	912.089.524,00	912.089.524,00
33.	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	1.232.364.200,00	1.232.364.200,00
34.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	40.878.550.266,44	40.878.550.266,44
35.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.889.129.604,20	8.010.711.939,00
36.	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	755.076.617,00	548.974.000,00
37.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.695.687.250,00	3.695.687.250,00
38.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.575.544.240,00	1.575.544.240,00
39.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.294.198.795,00	13.294.198.795,00
40.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.073.332.010,00	3.073.332.010,00
41.	Dinas Perikanan	6.908.498.828,99	6.908.498.828,99
	Total	1.111.965.690.027,81	1.081.759.974.520,61

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.826.064.638,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2024;
- b. Reklasifikasi ke Gedung Bangunan sebesar Rp14.726.021.893,20 sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp63.612.000,00 berupa:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Belanja BOS) sebesar Rp27.622.000,00;

- b) Dinas Kesehatan (Belanja BLUD Puskesmas) sebesar Rp35.990.000,00;
- 2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga berupa Gedung Olahraga Tertutup (*Sport Hall*) yang selesai dikerjakan tahun 2024 sebesar Rp14.080.382.293,20;
- 3) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp582.027.600,00 dapat dirinci sebagai berikut:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp462.869.100,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp119.158.500,00.

Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penghapusan senilai Rp227.098.814,00 merupakan penghapusan Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Puskesmas dan Rumah Negara Golongan III Lain-lain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 312/KEP/BPP/2024.
- b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp5.119.272.210,00 dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi ke Jalan Jaringan Irigasi sebesar Rp11.011.200,00 merupakan Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Rabat Beton pada SDN 04 Sungai Limau pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.432.034.345,00 dengan rincian:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Pekerjaan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pembangunan Ruang Laboratorium, Perencanaan dan Pengawasan SDN 02 Batang Anai) sebesar Rp856.117.145,00;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lanjutan Pembangunan Kantor DPRD) sebesar Rp2.532.066.000,00;
 - c) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Perencanaan Pembangunan Pagar *Sport Hall*) sebesar Rp43.851.200,00.
 - 3) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa merupakan realisasi belanja modal gedung bangunan sebesar Rp1.536.504.000,00 yang peruntukannya bukan untuk barang milik daerah. Realisasi ini terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek sebesar Rp139.722.665,00 merupakan utang jangka pendek tahun 2023 atas :
 - a) Pembangunan Pagar pada SDN 21 Batang Anai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah dicatatkan ke Aset Tetap Gedung Bangunan pada tahun 2023 senilai Rp134.733.915,00;

- b) Rehab Musholla di UPT ALKAL pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.988.750,00.

Disamping itu masih terdapat 26 unit gedung dan bangunan yang didanai oleh *District Health System* versi 2 (DHS2) dan telah dimanfaatkan tetapi belum dicatat karena belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun rincian unit gedung dan bangunannya tersebut adalah:

Tabel 5. 51 Rincian Unit Gedung dan Bangunan DHS2

No.	Nama Fasilitas Kesehatan	Alamat
1.	Kantor Dinas Kesehatan	Kecamatan Enam Lingkung
2.	Puskesmas Sintuk	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
3.	Puskesmas Pembantu Pasar Sintuk	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
4.	Puskesmas Pembantu Batu Mangaum	Kecamatan Sungai Geringging
5.	Puskesmas Pembantu Kampung Dadok	Kecamatan Sungai Geringging
6.	Puskesmas Pembantu Malai Tengah	Kecamatan Batang Gasan
7.	Puskesmas Pembantu Barang-barangan	Kecamatan Batang Gasan
8.	Puskesmas Pembantu Sungai Pingai	Kecamatan IV Koto Aur Malintang
9.	Puskesmas Pembantu Koto Dalam	Kecamatan Padang Sago
10.	Puskesmas Pembantu Bukit Gonggang	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
11.	Puskesmas Pembantu Labu Kumbang	Kecamatan Patamuan
12.	Puskesmas Pembantu Durian Dangka	Kecamatan V Koto Kampung Dalam
13.	Polindes Du (Kp.Ladang Limau Purut)	Kecamatan V Koto Timur
14.	Polindes Kampung Tengah	Kecamatan Padang Alai
15.	Polindes Sunur Tengah	Kecamatan Nan Sabaris
16.	Polindes Kampung Kandang	Kecamatan Nan Sabaris
17.	Polindes Padang Karambia	Kecamatan Sungai Limau
18.	Polindes Lambéh	Kecamatan Sungai Geringging
19.	Polindes Satu (Talau Atas Limau Purut)	Kecamatan V Koto Timur
20.	Polindes Padang Kunik	Kecamatan Batang Anai
21.	Polindes Batang Piaman	Kecamatan V Koto Timur
22.	Polindes Ulakan	Kecamatan Ulakan Tapakis
23.	Polindes Kantarok	Kecamatan Batang Gasan
24.	Polindes Tanjung Alai	Kecamatan Sungai Geringging
25.	Polindes Lubuk Napa	Kecamatan 2X11Kayu Tanam
26.	Polindes Malai	Kecamatan Sungai Geringging

Rincian lebih lanjut tentang aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Desember 2024
(Rp)
2.681.736.052.936,05

Per 31 Desember 2023
(Rp)
2.566.695.708.812,05

Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.681.736.052.936,05 terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	2.566.695.708.812,05
▪ Belanja Modal 2024 (+)	Rp	103.545.442.710,00
▪ Utang Jangka Pendek (+)	Rp	171.602.024,00
▪ Belanja Tak Terduga (+)	Rp	4.811.148.000,00
▪ Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (+)	Rp	9.461.570.960,00
▪ Penghapusan (-)	Rp	(1.462.385.000,00)
▪ Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (-)	Rp	(1.487.034.570,00)
Saldo akhir	Rp	2.681.736.052.936,05

Nilai jalan, jaringan dan irigasi per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 52 Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	865.748.050,00	865.748.050,00
2	Sekretariat DPRD	138.827.450,00	138.827.450,00
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	134.441.200,00	134.441.200,00
4	Inspektorat Kabupaten	80.257.000,00	80.257.000,00
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.015.000,00	41.015.000,00
6	Kecamatan Lubuk Alung	40.874.310,00	40.874.310,00
7	Kecamatan Sei. Geringging	6.988.000,00	6.988.000,00
8	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	6.933.000,00	6.933.000,00
9	Kecamatan Ulakan Tapakis	6.971.500,00	6.971.500,00
10	Kecamatan Sei. Limau	6.988.000,00	6.988.000,00
11	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	7.000.000,00	7.000.000,00
12	Kecamatan VII Koto	6.890.500,00	6.890.500,00
13	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	13.730.500,00	13.730.500,00
14	Kecamatan Nan Sabaris	6.988.000,00	6.988.000,00
15	Kecamatan Batang Anai	6.992.000,00	6.992.000,00
16	Kecamatan V Koto Timur	10.471.500,00	10.471.500,00
17	Kecamatan Padang Sago	9.842.000,00	9.842.000,00
18	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	6.930.000,00	6.930.000,00
19	Kecamatan Patamuan	7.000.000,00	7.000.000,00
20	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	7.000.000,00	7.000.000,00
21	Kecamatan Batang Gasan	6.988.000,00	6.988.000,00
22	Kecamatan Enam Lingkung	6.890.500,00	6.890.500,00
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.024.516.660,00	848.925.943,00
24	Dinas Kesehatan	617.160.789,00	588.280.789,00
25	Rumah Sakit Umum Daerah	3.544.362.626,00	2.794.966.796,00

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.638.927.092.998,81	2.533.530.459.085,81
27	Dinas Perhubungan	7.453.498.326,00	7.368.682.116,00
28	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	133.946.000,00	133.946.000,00
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118.061.808,00	118.061.808,00
30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	25.000.000,00
31	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	139.975.000,00	139.975.000,00
32	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	55.106.900,00	30.143.000,00
33	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	1.744.474.500,00	1.744.474.500,00
34	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00	25.000.000,00
35	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	177.447.000,00	177.447.000,00
36	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	8.550.000,00	8.550.000,00
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.567.897.954,00	8.987.834.400,00
38	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.265.000,00	10.265.000,00
39	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.587.840,00	29.587.840,00
40	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	52.850.000,00	52.850.000,00
41	Dinas Perikanan	8.655.493.024,24	8.655.493.024,24
Total		2.681.736.052.936,05	2.566.695.708.812,05

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp103.545.442.710,00 berdasarkan LRA Tahun 2024;
- b. Utang Jangka Pendek sebesar Rp171.602.024,00 merupakan pembayaran belanja modal retensi (5%) yang belum terbayarkan atas pekerjaan rehab jembatan tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Belanja Tak Terduga atas pekerjaan rehab Jembatan dan Jalan yang terkena bencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.811.148.000,00;
- d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp9.461.570.960,00 adalah:
 - 1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp24.880.000,00 terdiri dari:

- a) Belanja BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Rp 5.000.000,00
- b) Belanja Modal BLUD Puskesmas berupa Jaringan Listrik (tambah daya) pada Dinas Kesehatan. Rp 19.880.000,00
- 2) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan merupakan realisasi belanja modal untuk Perencanaan Pekerjaan Rabat Beton SDN 04 Sungai Limau pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp11.011.200,00.
- 3) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp8.955.535.997,00 berupa :
 - a) Pemeliharaan Jalan serta perencanaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Rp 2.574.981.543,00
 - b) Pembangunan Cek Dam/Bendung di Sungai Limau) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rp 6.380.554.454,00
- 4) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp470.143.763,00 terdiri dari:
 - a) Perencanaan dan Pengawasan yang direalisasikan pada Belanja Barang Diserahkanke Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Rp 385.327.553,00
 - b) Pengadaan Meterisasi yang direalisasikan pada Belanja Pemeliharaan di Dinas Perhubungan. Rp 84.816.210,00

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penghapusan Gerbang Tarok City akibat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (*Exit Tol*). Gerbang Tarok City tercatat pada Jalan Kabupaten Dinas PUPR senilai Rp1.462.385.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 71/KEP/BPP/2024;
- b. Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.487.034.570,00 terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp731.919.400,00 terdiri dari:
 - a) Realisasi belanja modal perencanaan jalan dan irigasi yang pekerjaannya belum selesai per 31 Desember 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp599.419.400,00;
 - b) Realisasi belanja modal Pengawasan Pekerjaan Rehab Jembatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp132.500.000,00;
 - 2) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud senilai Rp49.700.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah realisasi belanja modal

Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Master Plan Drainase Kabupaten Padang Pariaman;

- 3) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp647.077.720,00 adalah realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa pekerjaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat; dan
- 4) Reklasifikasi ke Utang Jangka Pendek atas Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp58.337.450,00 merupakan pembayaran utang tahun 2023 atas pekerjaan Jembatan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian tentang Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
96.245.793.604,35	90.073.340.927,35

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp96.245.793.604,35 merupakan nilai buku perpustakaan, barang bercorak seni/budaya dan lainnya yang tidak bisa dikelompokkan kedalam empat jenis aset tetap di atas dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	90.073.340.927,35
▪ Belanja Modal 2024 (+)	Rp	5.705.321.800,00
▪ Hibah dari Pihak Ketiga (+)	Rp	227.170.877,00
▪ Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (+)	Rp	239.960.000,00
Saldo akhir	Rp	96.245.793.604,35

Nilai aset tetap lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 53 Nilai Aset Tetap Lainnya per SKPD

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	109.298.300,00	109.298.300,00
2	Sekretariat DPRD	239.960.000,00	0,00
3	Kecamatan Batang Gasan	7.000.000,00	7.000.000,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.837.663.617,79	86.954.662.940,79
5	Dinas Kesehatan	13.869.505,00	13.869.505,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	50.454.300,00	50.454.300,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.550.000,00	49.550.000,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	49.269.000,00	49.269.000,00
9	Dinas Perhubungan	193.861.200,00	193.861.200,00
10	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	678.469.998,00	678.469.998,00

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
11	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	747.811.761,56	747.811.761,56
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	49.275.000,00	49.275.000,00
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	218.522.500,00	218.522.500,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	855.178.839,00	805.686.839,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.222.000,00	20.222.000,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.150.000,00	11.150.000,00
17	Dinas Perikanan	114.237.583,00	114.237.583,00
Total		96.245.793.604,35	90.073.340.927,35

Penambahan aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.705.321.800,00 adalah berdasarkan LRA Tahun 2024; dan
- Hibah dari pihak ketiga sebesar Rp227.170.877,00 merupakan hibah dari Komite dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berupa Buku Pengayaan Pendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN) ke SDN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp239.960.000,00 merupakan pengadaan Pin Emas sebanyak 40 unit pada Sekretariat DPRD.

Rincian lebih lanjut tentang aset Tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
65.379.807.868,00	83.838.743.955,20

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp65.379.807.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	83.838.743.955,20
Reklasifikasi dari Belanja Gedung Bangunan (+)	Rp	3.432.034.345,00
Reklasifikasi dari Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi (+)	Rp	731.919.400,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (+)	Rp	78.058.253,00
Utang Jangka Pendek (+)	Rp	334.970.205,00
Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan (-)	Rp	(14.080.382.293,20)
Reklasifikasi ke Aset Jalan Jembatan Jaringan Irigasi (-)	Rp	(8.955.535.997,00)
Saldo akhir	Rp	65.379.807.868,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.191.087.350,00	-
24	Dinas Kesehatan	59.200.000,00	59.200.000,00
25	Rumah Sakit Umum Daerah	122.040.940,00	122.040.940,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.032.082.821,00	62.475.578.964,00
28	Dinas Perhubungan	59.066.925,00	59.066.925,00
36	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	661.920.379,00	661.920.379,00
37	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	43.851.200,00	14.080.382.293,20
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	210.558.253,00	6.380.554.454,00
	Total	65.379.807.868,00	83.838.743.955,20

Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari:

- a. Reklasifikasi dari Belanja Gedung Bangunan sebesar Rp3.432.034.345,00 merupakan:
 - 1) Pekerjaan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pembangunan Ruang Laboratorium (Fisik, Perencanaan, Pengawasan) pada SDN 02 Batang Anai sebesar Rp856.117.145,00;
 - 2) Lanjutan Pembangunan Kantor DPRD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.532.066.000,00;
 - 3) Perencanaan Pagar *Sport Hall* di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp43.851.200,00.
- b. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa merupakan perencanaan pembangunan 3 unit Jembatan sebesar Rp78.058.253,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Reklasifikasi dari Utang Jangka Pendek merupakan kewajiban jangka pendek/ utang belanja terhadap pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pembangunan Ruang Laboratorium Tahun 2024 SDN 02 Batang Anai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp334.970.205,00;
- d. Reklasifikasi dari Aset Jalan Jembatan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp731.919.400,00 terdiri dari:
 - 1) Perencanaan jalan dan irigasi yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun berikutnya sebesar Rp599.419.400,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - 2) Pengawasan Perbaikan Jembatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp132.500.000,00.

Pengurangan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp23.035.918.290,20 merupakan :

- e) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp8.163.167,00;
 - f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp21.092.699,00;
 - g) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp17.867.374,00;
- 2) Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp5.115.857.460,00 terdiri dari:
- a) Koreksi Lebih Catat sebesar Rp288.082.130,00 merupakan kelebihan penghitungan Akumulasi Penyusutan sebagai akibat pembulatan, perubahan kondisi dan pindah masuk pencatatan antar SKPD dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sekretariat Daerah Rp 1,00
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 70.614.765,00
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 217.467.364,00
 - b) Penghapusan sebesar Rp3.118.888.763,55 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat penghapusan aset tetap peralatan mesin, gedung bangunan dan Jalan Jaringan Irigasi masing-masing:
 - 1) Sekretariat DPRD Rp 777.720.249,55
 - 2) Dinas Kesehatan Rp 185.600.000,00
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 1.520.762.200,00
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 141.000.000,00
 - 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 222.707.500,00
 - 6) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Rp 4.000.000,00
 - 7) Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Rp 40.000.000,00
 - 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 227.098.814,00
 - c) Reklasifikasi dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.708.886.566,45 merupakan perhitungan akumulasi penyusutan sebagai akibat reklasifikasi ke Aset Lain-lain terdiri dari:
 - 1) Inspektorat Kabupaten Rp 145.325.500,00
 - 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 168.169.080,00
 - 3) Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Rp 31.135.466,00
 - 4) Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Rp 13.440.025,00
 - 5) Kecamatan Batang Anai Rp 13.189.600,00
 - 6) Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Rp 30.897.917,00
 - 7) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Rp 28.857.750,00
 - 8) Kecamatan Batang Gasan Rp 9.955.000,00
 - 9) Dinas Kesehatan Rp 784.138.115,45
 - 10) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp 241.917.887,00

11) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp	168.118.798,00
12) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	8.000.000,00
13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	65.741.428,00

Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp(116.610.218.549,99) terdiri dari:

a. Peralatan dan Mesin	Rp	(38.272.019.860,00)
b. Gedung dan Bangunan	Rp	(52.245.308.098,99)
c. Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	(26.092.890.591,00)

Rincian lebih lanjut tentang Akumulasi Penyusutan aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

D. ASET LAINNYA

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1.747.207.544,20	2.339.354.591,60

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan investasi jangka panjang. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.747.207.544,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Aset Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tagihan Jangka Panjang	141.596.387,00
2.	Aset Tak Berwujud	6.702.682.964,00
3.	Aset Lain-lain	18.565.560.298,29
4.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.594.737.213,80)
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(18.067.894.891,29)
Jumlah		1.747.207.544,20

Penjelasan masing-masing akun aset lainnya sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
141.596.387,00	141.596.387,00

Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp141.596.387,00 terdiri atas:

Tabel 5. 57 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No.	Nama	Nilai (Rp)
1.	Ali Arifin	3.700.000,00
2.	Chandra Mustika	2.110.000,00
3.	Rasul Hamidi	5.125.000,00
4.	Baharuddin	16.136.105,00

No.	Nama	Nilai (Rp)
5.	Wirda Satria	22.917.900,00
6.	Sudirman	44.261.040,00
7.	Busri Noneh	3.432.500,00
8.	Ramlan	5.915.292,00
9.	Suripno Azhari	5.300.000,00
10.	Surya Warsilah	24.000.000,00
11.	Normansyah	8.698.550,00
Jumlah		141.596.387,00

2. Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
6.702.682.964,00	6.652.982.964,00

Nilai Rp6.702.682.964,00 merupakan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024, yang terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	6.652.982.964,00
Reklas dari Aset Tetap (+)	Rp	49.700.000,00
Saldo akhir	Rp	6.702.682.964,00

Aset tak berwujud merupakan *software* dan kajian yang berada pada SKPD dan masih digunakan dengan penambahan Tahun 2024 sebesar Rp49.700.000,00 berupa Kajian Sanitasi Kabupaten Padang Pariaman yang direklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Jembatan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp49.700.000,00.

Rincian lebih lanjut tentang aset lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

3. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
18.565.560.298,29	16.809.387.361,84

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.565.560.298,29 merupakan aset kondisi rusak berat yang belum diterbitkan SK penghapusannya, aset dalam penelusuran berkondisi rusak berat dan Investasi Non Permanen yang krediturnya tidak diketahui.

Rincian saldo akun Aset Lain-lain sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	16.809.387.361,84
Reklasifikasi dari aset tetap (+)	Rp	1.761.812.936,45
Penghapusan (-)	Rp	(5.640.000,00)
Saldo akhir	Rp	18.565.560.298,29

Penambahan Aset Lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.761.812.936,45 merupakan peralatan mesin yang sudah rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan pada :

a. Inspektorat Kabupaten	Rp 145.325.500,00
b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 169.033.000,00
c. Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	Rp 33.508.800,00
d. Kecamatan 2X11 Enam Lingkung	Rp 13.440.025,00
e. Kecamatan Batang Anai	Rp 13.189.600,00
f. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 31.521.250,00
g. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	Rp 29.407.750,00
h. Kecamatan Batang Gasan	Rp 9.955.000,00
i. Dinas Kesehatan	Rp 811.716.869,45
j. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rp 260.524.316,00
k. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Rp 170.229.398,00
l. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 8.000.000,00
n. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 65.961.428,00

Pengurangan Aset Lain-lain merupakan Penghapusan Aset Rusak Berat Peralatan dan Mesin berdasarkan SK Bupati Padang Pariaman Nomor 522/KEP/BPP/2024 sebesar Rp5.640.000,00 pada:

a. Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rp 3.340.000,00
b. Kecamatan Sungai Limau	Rp 2.300.000,00

Aset Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut :

- Aset Rusak Berat sebesar Rp18.177.406.891,29 (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 19**);
- Aset Lain-lain Dalam Penelusuran sebesar Rp25.629.000,00 (rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**);
- Kas dalam penelusuran pada kegiatan reklamasi sebesar Rp41.824.407,00;
- Dana Bergulir yang masih dalam penelusuran sebesar Rp170.700.000,00; dan
- Investasi Non Permanen ke Perusda Saiyo yang sudah dibubarkan sebesar Rp150.000.000,00.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
(5.594.737.213,80)	(4.952.890.166,40)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(5.594.737.213,80) terdiri dari:

Saldo Awal	Rp (4.952.890.166,40)
Amortisasi 2024 (+)	Rp (641.847.047,40)
Saldo akhir	Rp (5.594.737.213,80)

Amortisasi Aset Tak Berwujud untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp(641.847.047,40)

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

	Per 31 Desember 2024 (Rp) (18.067.894.891,29)	Per 31 Desember 2023 (Rp) (16.311.721.954,84)
Saldo Awal	Rp (16.311.721.954,84)	
Reklasifikasi dari Aset Tetap (+)	Rp (1.708.886.566,45)	
Penghapusan (-)	Rp 5.640.000,00	
Penyusutan tahun 2024 (+)	Rp (52.926.370,00)	
Saldo akhir	Rp (18.067.894.891,29)	

Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain berasal dari:

- 1) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan mesin yang berubah kondisi menjadi rusak berat sebesar Rp1.708.886.566,45 pada :
 - a) Inspektorat Kabupaten Rp 145.325.500,00
 - b) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 168.169.080,00
 - c) Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Rp 31.135.466,00
 - d) Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Rp 13.440.025,00
 - e) Kecamatan Batang Anai Rp 13.189.600,00
 - f) Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Rp 30.897.917,00
 - g) Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Rp 28.857.750,00
 - h) Kecamatan Batang Gasan Rp 9.955.000,00
 - i) Dinas Kesehatan Rp 784.138.115,45
 - j) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp 241.917.887,00
 - k) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Rp 168.118.798,00
 - l) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 8.000.000,00
 - l) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 65.741.428,00

- m) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2) Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain berasal dari Penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.640.000,00 pada:

- a) Badan Pengelola Keuangan Daerah Rp 3.340.000,00
- b) Kecamatan Sungai Limau Rp 2.300.000,00

- b. Penyusutan Aset Lain-lain tahun ini sebesar Rp52.926.370,00.

Rincian Akumulasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

E. KEWAJIBAN

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
6.456.320.042,40	8.123.791.387,72

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.456.320.042,40 dan sebesar Rp8.123.791.387,72. Saldo kewajiban tahun 2024 sebesar Rp6.456.320.042,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Kewajiban

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	6.414.495.635,40
2.	Kewajiban Jangka Panjang	41.824.407,00
	Jumlah	6.456.320.042,40

1. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
6.414.495.635,40	8.081.966.980,72

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.414.495.635,40 yang terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
20.000,00	332.658,00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp20.000,00 dan sebesar Rp332.658,00. Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2024 merupakan utang Taperum Tahun 2021 sebesar Rp20.000,00 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
1.394.839.416,00	1.744.322.487,92

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.394.839.416,00 terdiri dari:

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa tanah untuk Bangunan Ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Nagari di RSUD Parit Malintang sebesar Rp16.875.000,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan untuk pemasangan dan penempatan Menara Telekomunikasi Bersama (Multi Operator) dan Fasilitas Penunjangnya antara PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Pemda Padang Pariaman Rp76.500.000,00;
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Lahan Parkir beserta seluruh fasilitas pendukung lainnya PT. Andalas Anai Permai Internasional sebesar Rp1.262.500.000,00;
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Fasilitas Gedung Kantor UPTD Puskesmas Kampung Dalam untuk Kantor Kas Bank Nagari dan Ruang ATM sebesar Rp29.375.000,00;
- 5) Pendapatan atas Retribusi Pelayanan Sampah diterima Dimuka sebesar Rp8.750.000,00; dan
- 6) Pendapatan terima dimuka atas Pajak Air tanah Rp839.416,00.

c. Utang Belanja

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
5.019.636.219,40	6.337.311.834,80

Saldo utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.019.636.219,40 terdiri dari:

Tabel 5. 59 Utang Belanja

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	323.805.062,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.743.743.345,00
3.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	334.970.205,00
4.	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Jembatan	171.602.024,00
5.	Utang Belanja Bagi Hasil	1.445.515.583,40
Jumlah		5.019.636.219,40

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

1) Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai sebelumnya tercatat sebesar Rp174.308.620,00 terdapat koreksi penambahan sebesar Rp149.496.442,00 yang terdiri dari utang belanja pegawai Dinas Pendidikan sebesar Rp144.510.512 dan utang belanja pegawai Inspektorat sebesar Rp4.985.930,00.

Tabel 5. 60 Utang Belanja Pegawai

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 dengan Rincian :	172.271.766,00
	a. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada SMPN 1 Sintuk Toboh Gadang Tahun 2023 sebesar Rp9.043.659,00	
	b. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada KSPW 2x11 Enam Lingkung Tahun 2023 sebesar Rp11.545.046,00	
	c. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada KSPW 2x11 Kayu Tanam Tahun 2023 sebesar Rp7.172.549,00	
	d. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada KSPW Lubuk Alung sebesar Rp110.661.582,00	
	e. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada SMPN 1 Sungai Geringging sebesar Rp12.782.717,00	
	f. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada SMPN 3 Sungai Geringging sebesar Rp12.925.813,00	
	g. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada KSPW Batang Gasan sebesar Rp3.544.600,00	
	h. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada KSPW V Koto Timur sebesar Rp3.248.800,00	
	i. Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan pada SMPN 1 Enam Lingkung sebesar Rp1.347.000,00	
2	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 pada RSUD	49.627.641,00
3	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji Pegawai per 31 Desember 2024 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	4.335.788,00
4	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji Pegawai per 31 Desember 2024 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	13.136.769,00
5	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji Pegawai per 31 Desember 2024 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.	10.562.937,00
6	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji Pegawai dan Tunjangan Per 31 Desember 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	18.672.693,00
7	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji Pegawai per 31 Desember 2024 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.	7.030.274,00
8	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji Pegawai per 31 Desember 2024 pada Inspektorat Daerah.	8.289.298,00
9	Utang Belanja Pegawai atas Beban Gaji Pegawai per 31 Desember 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	868.814,00
10	Utang Belanja Pegawai atas Beban Tunjangan Fungsional Umum Pegawai PPPK per 31 Desember 2024 pada Dinas Kesehatan	39.009.082,00
Jumlah		323.805.062,00

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Terdapat koreksi pengurangan utang belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas utang Tahun 2023 yang tercatat dua kali.

Tabel 5. 61 Utang Belanja Barang dan Jasa

No	SKPD	SALDO AUDITED (Rp)
1	Dinas Kesehatan	17.335.000,00
a	Utang Belanja Barang dan Jasa atas Belanja Internet PSC 119 Bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp17.335.000,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/20/Insp/2025.	
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.360.206.695,00
a	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD atas Belanja Obat-Obatan sebesar Rp1.474.595.908,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/06/Insp/2025	
b	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD atas Belanja Bahan Laboratorium dan BMHP sebesar Rp842.564.987,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/06/Insp/2025	
c	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD atas Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp43.045.800,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/07/Insp/2025	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	366.201.650,00
a	Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Pada Tahun 2023 atas kegiatan Kegiatan Bidang Bina Marga Kegiatan Jalan pada Peningkatan Jalan Korong Koto Nagari Kasang Kec. Batang Anai sebesar Rp9.485.150,00.	
b	Utang Belanja Barang dan Jasa, Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atas Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pada Bidang Cipta Karya sebesar Rp356.716.500,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/18/Insp/III/2025	
Jumlah		2.743.743.345,00

3) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 02 Batang Anai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman yang terutang pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp334.970.205,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/46/Ins/2025.

4) Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp171.602.024,00 sesuai hasil Reviu Inspektorat Nomor LHR/18/Insp/III/2025 terdiri dari:

- Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Pembangunan Jembatan Seulayat Ulakan Tapakis (Lanjutan) dengan Nomor SPK : 11/SP/BM-DPUPR/IX-2024 oleh CV. MITRA PUTRA UTAMA sebesar Rp34.732.265,00; dan

- b) Utang Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Pembangunan Jembatan Batang Kapecong dengan Nomor SPK : 10/SP/BM-DPUPR/IX-2024 oleh CV. AVINDO sebesar Rp136.869.759,00.

5) Utang Belanja Transfer Bagi Hasil

Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.445.515.583,40 merupakan Utang Transfer Dana Bagi Hasil yang terdiri dari:

- a) Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi Ke Pemerintah Desa/Nagari yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 62 Utang Belanja Transfer Pajak dan Retribusi

No	Uraian	SALDO AUDITED (Rp)
1	Transfer DBH Pajak Hotel ke Nagari	10.378.641,10
2	Transfer DBH Pajak Restoran ke Nagari	89.181.675,90
3	Transfer DBH Pajak Hiburan ke Nagari	1.933.250,00
4	Transfer DBH Pajak Reklame ke Nagari	17.836.050,00
5	Transfer DBH Pajak Penerangan Jalan ke Nagari	369.099.009,40
6	Transfer DBH Pajak Pengambilan Galian Gol C ke Nagari	16.950.044,60
7	Transfer DBH Pajak Parkir ke Nagari	23.887.261,70
8	Transfer DBH BPHTB ke Nagari	148.078.291,50
9	Transfer DBH PBB Pedesaan & Perkotaan ke Nagari	391.556.342,50
10	Transfer DBH Retribusi Jasa Umum ke Nagari	146.465.859,70
11	Transfer DBH Retribusi Jasa Usaha ke Nagari	13.858.600,80
12	Transfer DBH Retribusi IMB ke Nagari	8.538.800,00
13	Transfer DBH Retribusi Izin Trayek ke Nagari	5.300.168,20
Total Utang Transfer		1.243.063.995,40

- b) Utang Belanja Transfer Pemerintah Pusat

Utang Belanja Transfer Pemerintah Pusat berupa lebih bayar dari pemerintah pusat atas Transfer DBH Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2019 sebesar Rp202.451.588,00. Hingga saat ini belum ada keputusan dari Pusat atas kelebihan bayar tersebut.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
41.824.407,00	41.824.407,00

Utang Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp41.824.407,00 merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya berupa Utang Jaminan Reklamasi.

F. EKUITAS

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
1.342.128.864.497,33	1.317.852.308.140,98

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 di Neraca sebesar Rp1.342.128.864.497,33 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang sama tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya untuk TA 2024.

Adapun rincian dari Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.337.427.770.061,43	1.317.640.695.346,39

Pendapatan-LO Tahun 2024 sebesar Rp1.337.427.770.061,43 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.317.640.695.346,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 63 Realisasi Pendapatan-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	154.035.386.421,43	159.981.269.509,59	(5.945.883.088,16)
Pendapatan Transfer-LO	1.182.840.786.723,00	1.155.814.142.191,80	27.026.644.531,20
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	551.596.917,00	1.845.283.645,00	(1.293.686.728,00)
JUMLAH	1.337.427.770.061,43	1.317.640.695.346,39	19.787.074.715,04

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
154.035.386.421,43	159.981.269.509,59

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp154.035.386.421,43 dan Tahun 2023 sebesar Rp159.981.269.509,59 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	70.480.232.490,50	71.987.293.403,89	(1.507.060.913,39)
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	66.206.500.456,00	3.863.434.590,00	62.343.065.866,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.728.317.039,00	8.088.751.162,00	639.565.877,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	8.620.336.435,93	76.041.790.353,70	(67.421.453.917,77)
JUMLAH	154.035.386.421,43	159.981.269.509,59	(5.945.883.088,16)

a. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
70.480.232.490,50	71.987.293.403,89

Rincian Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp70.480.232.490,50 dan Tahun 2023 sebesar Rp71.987.293.403,89. Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp70.480.232.490,50 sudah termasuk koreksi penambahan atas Pajak Restoran-LO sebesar Rp 2.230.000,00 dan koreksi penambahan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan-LO sebesar Rp16.771.427,00. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 65 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pajak Hotel-LO	439.635.143,00	218.946.253,00	220.688.890,00
Pajak Restoran-LO	3.882.047.783,00	3.824.851.501,81	57.196.281,19
Pajak Hiburan-LO	107.192.500,00	167.372.800,00	(60.180.300,00)
Pajak Reklame-LO	1.008.794.750,00	624.052.668,08	384.742.081,92
Pajak Penerangan Jalan-LO	22.152.538.103,00	21.057.720.441,00	1.094.817.662,00
Pajak Parkir-LO	1.015.333.318,00	2.919.636.000,00	(1.904.302.682,00)
Pajak Air Tanah-LO	1.394.081.440,00	1.452.687.749,00	(58.606.309,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	6.103.732.424,50	7.146.130.900,00	(1.042.398.475,50)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	25.608.097.678,00	24.813.456.662,00	794.641.016,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	8.768.779.351,00	9.762.438.429,00	(993.659.078,00)
JUMLAH	70.480.232.490,50	71.987.293.403,89	(1.507.060.913,39)

Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.480.232.490,50 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2024	Rp	61.253.259.287,50
(-) Piutang Pajak Tahun 2023	Rp	(57.349.860.172,00)
(-)Pajak Daerah terima Dimuka Tahun 2024	Rp	(839.416,00)
(+) Piutang Pajak Tahun 2024	Rp	66.577.672.791,00
Jumlah	Rp	70.480.232.490,50

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
66.206.500.456,00	3.863.434.590,00

Rincian Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp66.206.500.456,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.863.434.590,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 66 Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	19.464.648.207,00	0,00	19.464.648.207,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	44.775.979.300,00	0,00	44.775.979.300,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	632.166.000,00	580.800.000,00	51.366.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	0,00	30.524.000,00	(30.524.000,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	395.662.900,00	(395.662.900,00)
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	36.690.500,00	(36.690.500,00)
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	38.951.000,00	(38.951.000,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	445.500.000,00	(445.500.000,00)
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	66.800.000,00	43.500.000,00	23.300.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	72.950.000,00	25.696.080,00	47.253.920,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	20.876.000,00	100.060.000,00	(79.184.000,00)
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	36.092.000,00	(36.092.000,00)
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	0,00	31.720.000,00	(31.720.000,00)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	30.040.000,00	40.050.000,00	(10.010.000,00)
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	32.045.000,00	0,00	32.045.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.110.995.949,00	2.058.188.110,00	(947.192.161,00)
JUMLAH	66.206.500.456,00	3.863.434.590,00	62.343.065.866,00

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.206.500.456,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2024	Rp	66.154.972.984,00
(-) Pendapatan Retribusi Terima Dimuka tahun 2024	Rp	(8.750.000,00)
(-)Piutang Retribusi Tahun 2024	Rp	(576.240.650,00)
(+) Piutang Retribusi Tahun 2023	Rp	636.518.122,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024	Rp	66.206.500.456,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
8.728.317.039,00	8.088.751.162,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp8.728.317.039,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp8.088.751.162,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Nagari dan dari PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
8.620.336.435,93	76.041.790.353,70

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp8.620.336.435,93 dan Tahun 2023 sebesar Rp76.041.790.353,70 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 67 Penerimaan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO	346.117.100,00	0,00	346.117.100,00
Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	0,00	460.988.772,00	(460.988.772,00)
Hasil Sewa BMD-LO	110.700.000,00	102.325.000,00	8.375.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.414.843.597,57	2.878.023.051,300	(463.179.453,43)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	0,00	77.948,00	(77.948,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.191.471.199,97	680.005.461,84	1.511.465.738,13

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.340.513.287,41	2.504.392.337,31	(1.163.879.049,90)
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	206.560,00	(206.560,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	0,00	945.200,00	(945.200,00)
Pendapatan Denda PBBP2-LO	52.438.120,00	113.796.388,00	(61.358.268,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	166.771.648,00	(166.771.648,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	1.750.372.234,98	324.014.080,55	1.426.358.154,43
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	409.100.896,00	0,00	409.100.896,00
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	68.810.243.907,00	(68.810.243.907,00)
Jumlah	8.620.336.435,93	76.041.790.353,70	(67.421.453.917,77)

Saldo Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.620.336.435,93 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LRA Tahun 2024	Rp	8.602.636.435,93
(-) Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Sewa ATM dan Lahan	Rp	110.700.000,00
(+) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka PT Daya Mitra Tahun 2024"	Rp	(85.000.000,00)
(-) Pelunasan Piutang dana bergulir tahun 2024	Rp	(8.000.000,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LO	Rp	8.620.336.435,93

2. PENDAPATAN TRANSFER-LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.182.840.786.723,00	1.155.814.142.191,80

Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.182.840.786.723,00 dan Rp1.155.814.142.191,80 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 68 Rincian Pendapatan Transfer-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.102.132.598.388,00	1.078.779.861.824,80	23.352.736.563,20
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	80.708.188.335,00	77.034.280.367,00	3.673.907.968,00
JUMLAH	1.182.840.786.723,00	1.155.814.142.191,80	27.026.644.531,20

Saldo Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.182.840.786.723,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer-LRA 2024	Rp	1.282.716.851.539,00
(-) Penerimaan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023	Rp	(26.337.599.443,00)
(-) Dana Desa	Rp	(103.458.459.000,00)
(+) Piutang Transfer Antar daerah Tahun 2024	Rp	29.919.993.627,00
	Rp	1.182.840.786.723,00

Jika dibandingkan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO maka terdapat perbedaan sebesar Rp99.876.064.806,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Piutang transfer antar daerah Tahun 2023	Rp	26.337.599.433,00
Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024	Rp	(29.919.993.627,00)
Dana Desa Tahun 2023		103.458.459.000,00
Selisih	Rp	99.876.064.806,00

Selisih pendapatan transfer-LO sebesar Rp99.876.064.806,00 merupakan pendapatan yang berasal dari dana desa sebesar Rp103.458.459.000,00 tidak dicatat sebagai Pendapatan-LO, namun tetap dicatat sebagai Pendapatan-LRA. Selanjutnya terdapat penerimaan piutang Transfer Antar Daerah tahun 2023 sebesar Rp26.337.599.433,00 dan juga piutang transfer Antar daerah Tahun 2024 sebesar Rp29.919.993.627,00.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.102.132.598.388,00	1.078.779.861.824,80

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp1.102.132.598.388,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.078.779.861.824,80 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 69 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Perimbangan-LO	1.074.305.369.388,00	1.078.779.861.824,80	(4.474.492.436,80)
Insentif Fiskal-LO	27.827.229.000,00	0,00	27.827.229.000,00
JUMLAH	1.102.132.598.388,00	1.078.779.861.824,80	23.352.736.563,20

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.102.132.598.388,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LRA 2024	Rp	1.205.591.057.388,00
(-) Dana Desa Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>(103.458.459.000,00)</u>
	Rp	1.102.132.598.388,00

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp1.205.591.057.388,00 dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp1.102.132.598.388,00 maka terdapat perbedaan sebesar Rp103.458.459.000,00 yang merupakan dana desa dan tidak dicatat sebagai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO.

1) Dana Perimbangan-LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.074.305.369.388,00	1.078.779.861.824,80

Rincian Pendapatan Dana Perimbangan-LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.074.305.369.388,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.078.779.861.824,80 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 70 Rincian Dana Perimbangan-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	16.206.591.009,00	14.880.641.508,80	1.325.949.500,20
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	784.480.463.956,00	744.273.216.799,00	40.207.247.157,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	53.623.510.594,00	87.426.804.427,00	(33.803.293.833,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	219.994.803.829,00	232.199.199.090,00	(12.204.395.261,00)
JUMLAH	1.074.305.369.388,00	1.078.779.861.824,80	(4.474.492.436,80)

a) Dana Bagi Hasil - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
16.206.591.009,00	14.880.641.508,80

Rincian Pendapatan Transfer-Dana Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp16.206.591.009,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp14.880.641.508,80 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 71 Dana Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DBH PBB-LO	3.713.200.009,00	101.192.468,80	3.612.007.540,20
DBH PPh Pasal 21-LO	5.151.038.000,00	5.275.349.000,00	(124.311.000,00)
DBH CHT-LO	37.292.000,00	41.353.040,00	(4.061.040,00)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	147.572.000,00	300.596.000,00	(153.024.000,00)
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	690.321.000,00	1.550.345.000,00	(860.024.000,00)
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	5.992.868.000,00	(5.992.868.000,00)
DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	53.265.000,00	0,00	53.265.000,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.425.506.000,00	1.618.938.000,00	(193.432.000,00)
DBH Sawit-LO	4.988.397.000,00	0,00	4.988.397.000,00
Jumlah	16.206.591.009,00	14.880.641.508,80	1.325.949.500,20

b) Dana Alokasi Umum - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
784.480.463.956,00	744.273.216.799,00

Pendapatan Transfer DAU-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp784.480.463.956,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp744.273.216.799,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DAU-LO dengan Pendapatan Transfer DAU-LRA.

c) Dana Alokasi Khusus Fisik - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
53.623.510.594,00	87.426.804.427,00

Pendapatan Transfer DAK Fisik-LO Tahun 2024 sebesar Rp53.623.510.594,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp87.426.804.427,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DAK Fisik-LO dengan Pendapatan Transfer DAK Fisik-LRA.

d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
219.994.803.829,00	232.199.199.090,00

Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-LO Tahun 2024 sebesar Rp219.994.803.829,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp232.199.199.090,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-LO dengan Pendapatan Transfer DAK Non Fisik-LRA.

2) Insentif Fiskal-LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
27.827.229.000,00	0,00

Pendapatan Transfer Insentif Fiskal-LO Tahun 2024 sebesar Rp27.827.229.000,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Transfer Insentif Fiskal-LO dengan Pendapatan Transfer Insentif Fiskal-LRA.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
80.708.188.335,00	77.034.280.367,00

Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp80.708.188.335,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp77.034.280.367,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 72 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	79.508.188.335,00	76.734.280.367,00	2.773.907.968,00
Bantuan Keuangan	1.200.000.000,00	300.000.000,00	900.000.000,00
JUMLAH	80.708.188.335,00	77.034.280.367,00	3.673.907.968,00

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp80.708.188.335,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA	Rp	77.125.794.151,00
2024		
(-) Penerimaan Piutang Transfer	Rp	(26.337.599.443,00)
Pusat Tahun 2023		
(+) Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	29.919.993.627,00
Tahun 2023		
Pendapatan Transfer Antar	Rp	80.708.188.335,00
Daerah-LO		

Apabila dibandingkan antara Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp80.708.188.335,00 dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA sebesar Rp77.125.794.151,00 maka terdapat perbedaan sebesar Rp3.582.394.184. Perbedaan tersebut merupakan selisih antara penerimaan piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp26.337.599.443,00 dengan penetapan piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2024 sebesar Rp29.919.993.627,00

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
551.596.917,00	1.845.283.645,00

Rincian penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp551.596.917,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.845.283.645,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 73 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	294.071.917,00	588.525.525,00	(294.453.608,00)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	26.525.000,00	112.645.000,00	(86.120.000,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	231.000.000,00	0,00	231.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	1.144.113.120,00	(1.144.113.120,00)
JUMLAH	551.596.917,00	1.845.283.645,00	(1.293.686.728,00)

Apabila Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp551.596.917,00 dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA Tahun 2024 sebesar Rp0,00 maka terdapat selisih sebesar Rp551.596.917,00 yang tidak dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA. Selisih tersebut merupakan Pendapatan Hibah berupa Barang dan Jasa yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap yang terdiri atas:

- a. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp294.071.917,00 berupa:
 - 1) Hibah Dari BKPMRI sebesar Rp17.651.040,00;
 - 1) Hibah Perahu *polyethylene* dari BNPB sebesar Rp49.250.000,00;
 - 2) Hibah kementerian untuk sekolah sebesar Rp 227.170.877,00
- b. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp26.525.000,00 merupakan Hibah Komite SD & SMP berupa aset peralatan dan mesin:
- c. Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO sebesar Rp231.000.000,00 berupa:

- 1) Hibah Pick Up dari PT. Angkasa Pura II sebesar Rp181.000.000,00; dan
- 2) Hibah tanah 5000 m2 di Nagari III Koto Aur Malintang sebesar Rp50.000.000,00.

Penjelasan atas rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO sebagai berikut.

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
294.071.917,00	588.525.525,00

Penerimaan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2024 sebesar Rp294.071.917,00 merupakan :

- 1) Hibah Dari BKPMRI NO BAST: 195/XII/BAST komputer Daerah/PPPM/KEMEINVES-BKPM/2021 Tanggal 20 Desember 2021 sebesar Rp17.651.040,00;
- 2) Hibah Masuk Peralatan dan Mesin Hibah BNPB 2024 No 98/BNPB/D-V/RT.03.05/06/2024 Tanggal 10 Juni 2024 Perahu *polyethylene* satu Unit sebesar Rp49.250.000,00; dan
- 3) Hibah kementerian untuk sekolah sebesar Rp 227.170.877,00.

b. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
26.525.000,00	112.645.000,00

Penerimaan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri tahun 2024 sebesar Rp26.525.000,00 merupakan Hibah Komite SD & SMP.

c. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
231.000.000,00	0,00

Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO pada Tahun 2024 sebesar Rp231.000.000,00 terdiri atas :

- 1) Hibah Pick Up dari PT. Angkasa Pura II sebesar Rp181.000.000,00.
- 2) Hibah tanah 5000 m2 di Nagari III Koto Aur Malintang penilaian NJOP No 970/544/BPKD-PP/IX/2024 sebesar Rp50.000.000,00.

d. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
00	1.144.113.120,00

Tidak ada Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO pada Tahun 2024.
Pengujian terhadap pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan
Pendapatan Laporan Realisasi (LRA) dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

B. BEBAN

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.345.645.619.094,56	1.408.501.386.856,00

Rincian beban Tahun 2024 sebesar Rp1.345.645.619.094,56 dan Tahun
2023 sebesar Rp1.408.501.386.856,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 74 Rincian Beban

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Pegawai	742.758.910.169,00	673.985.437.094,32	68.773.473.074,68
Beban Barang dan Jasa	314.318.864.631,23	333.847.151.976,40	-19.528.287.345,17
Beban Hibah	44.801.118.235,68	83.736.969.573,19	(38.935.851.337,51)
Beban Bantuan Sosial	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)
Beban Penyisihan Piutang	42.604.370.681,66	36.869.449.426,71	5.734.910.104,95
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.272.019.860,00	38.156.187.699,00	115.832.161,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.245.308.098,99	50.669.154.218,18	1.576.153.880,81
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	26.092.890.591,00	109.329.884.404,00	(83.236.993.813,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	641.847.047,40	680.821.847,40	(38.974.800,00)
Beban Bagi Hasil	6.319.342.279,60	6.557.366.015,80	(238.023.736,20)
Beban Bantuan Keuangan	77.590.947.500,00	74.368.964.601,00	3.221.982.899,00
JUMLAH	1.345.645.619.094,56	1.408.501.386.856,00	-62.855.767.761,44

Beban Tahun 2024 dibandingkan dengan Beban Tahun 2023 mengalami
Penurunan Sebesar Rp62.855.767.761,44 atau 4,46%.

Penjelasan atas Beban pada tabel di atas sebagai berikut.

1. Beban Pegawai

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
742.758.910.169,00	673.985.437.094,32

Beban pegawai merupakan beban atas kompensasi, yang dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp742.758.910.169,00 dan tahun 2023 sebesar Rp673.985.437.094,32 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 75 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Gaji Pokok ASN	355.259.133.018,00	310.719.192.468,00	44.539.940.550,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	33.713.175.513,00	29.566.700.578,00	4.146.474.935,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.916.305.000,00	5.977.820.324,00	(1.061.515.324,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	23.859.691.360,00	22.434.708.980,00	1.424.982.380,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.585.159.082,00	3.772.136.430,00	1.813.022.652,00
Beban Tunjangan Beras ASN	18.521.342.540,00	17.237.171.918,00	1.284.170.622,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	584.908.784,00	292.304.564,00	292.604.220,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	4.829.589,00	4.216.145,00	613.444,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.509.606.674,00	12.822.975.904,00	1.686.630.770,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	728.945.170,00	640.808.558,00	88.136.612,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.186.821.584,00	1.922.412.136,00	264.409.448,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	86.388.097.168,00	84.652.855.337,00	1.735.241.831,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.382.200.602,00	3.141.771.647,00	240.428.955,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.703.238.190,00	2.135.896.500,00	567.341.690,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.300.100.000,00	2.388.250.000,00	(88.150.000,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	73.939.600,00	144.160.000,00	(70.220.400,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	133.315.161.625,00	121.108.241.450,00	12.206.920.175,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.392.500.000,00	1.731.500.000,00	2.661.000.000,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.040.140.421,00	2.353.813.459,00	(313.673.038,00)
Beban Honorarium	5.661.945.000,00	5.677.456.000,00	(15.511.000,00)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Uang Representasi DPRD	877.665.544,00	885.990.000,00	(8.324.456,00)
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	75.677.700,00	74.797.800,00	879.900,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	112.251.000,00	96.970.380,00	15.280.620,00
Beban Uang Paket DPRD	75.306.000,00	76.009.500,00	(703.500,00)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.272.201.000,00	1.284.685.500,00	(12.484.500,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.732.775,00	115.101.000,00	(10.368.225,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.844.375,00	15.894.900,00	(1.050.525,00)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.977.109.216,00	3.005.100.000,00	(27.990.784,00)
Beban Tunjangan Reses	497.700.000,00	743.400.000,00	(245.700.000,00)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	664.128,00	797.302,00	(133.174,00)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.166.855.210,00	3.199.584.231,00	(32.729.021,00)
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.913.734.216,00	5.952.000.000,00	(38.265.784,00)
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	358.785.000,00	6.300.000,00	352.485.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	50.700.000,00	3.900.000,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	6.552.000,00	504.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.720.000,00	91.260.000,00	(540.000,00)
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	6.083.280,00	1.013.880,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	328.576,00	375.554,00	(46.978,00)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	360,00	280,00	80,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.181.120,00	5.026.560,00	154.560,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	102.960,00	9.360,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	308.880,00	28.080,00
Beban Insentif bagi KDH/ WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	504.900.000,00	524.250.000,00	(19.350.000,00)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Insentif bagi KDH/ WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.585.400,00	11.115.000,00	(5.529.600,00)
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	94.844.000,00	110.880.000,00	(16.036.000,00)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	570.000.000,00	30.000.000,00
Beban Pegawai BLUD	25.813.381.189,00	28.427.759.569,32	(2.614.378.380,32)
JUMLAH	742.758.910.169,00	673.985.437.094,32	68.773.473.074,68

Beban pegawai pada tahun 2024 dibandingkan dengan beban tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp68.773.473.074,68 atau 10,20%.

2. Beban Barang dan Jasa

Tahun 2024 **Tahun 2023**
(Rp) **(Rp)**
314.318.864.631,23 333.847.151.976,40

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp314.318.864.631,23 dan Tahun 2023 sebesar Rp333.847.151.976,40 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 76 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	72.682.161.026,40	93.424.606.185,66	(20.742.445.159,26)
Beban Jasa Kantor	74.233.854.258,00	82.193.771.564,00	(7.959.917.306,00)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.050.309.899,00	15.420.166.924,00	(369.857.025,00)
Beban Sewa Tanah	0,00	13.132.781,25	(13.132.781,25)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.905.501.158,00	4.057.640.167,00	1.847.860.991,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.014.556.500,00	3.229.470.900,00	785.085.600,00
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	4.169.998,00	(4.169.998,00)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	11.250.000,00	7.000.000,00	4.250.000,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	1.615.470,00	2.806.069,00	(1.190.599,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	890.663.065,00	445.368.000,00	445.295.065,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	448.537.000,00	143.777.043,00	304.759.957,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	584.447.983,00	0,00	584.447.983,00
Beban Pemeliharaan Tanah	99.918.000,00	110.703.000,00	(10.785.000,00)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.126.185.975,00	1.423.572.165,00	702.613.810,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	701.645.851,00	598.583.367,00	103.062.484,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.964.940.822,00	1.376.128.521,00	1.588.812.301,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.830.100.206,00	50.738.164.136,00	91.936.070,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.303.845.400,00	509.410.000,00	1.794.435.400,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.188.329.034,00	924.768.475,00	263.560.559,00
Beban Barang dan Jasa BOS	44.155.456.443,00	46.880.402.377,00	(2.724.945.934,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	36.125.546.540,83	32.323.510.303,49	3.802.036.237,34
Jumlah	314.318.864.631,23	333.847.151.976,40	(19.528.287.345,17)

Beban barang dan jasa pada tahun 2024 dibandingkan dengan beban tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.549.273.095,17 atau 5,86%.

3. Beban Hibah

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
44.801.118.235,68	83.736.969.573,19

Rincian Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp44.801.118.235,68 dan tahun 2023 sebesar Rp83.736.969.573,19 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 77 Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.208.649.840,00	16.561.194.560,00	11.647.455.280,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.867.315.800,00	59.337.230.213,19	(57.469.914.413,19)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	40.800.000,00	(40.800.000,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.283.500.000,00	4.000.960.000,00	1.282.540.000,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2.927.039.430,00	0,00	2.927.039.430,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	125.000.000,00	2.840.274.800,00	(2.715.274.800,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	974.364.166,68	956.510.000,00	17.854.166,68
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.288.648.999,00	0,00	4.288.648.999,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.126.600.000,00	0,00	1.126.600.000,00
Jumlah	44.801.118.235,68	83.736.969.573,19	(38.935.851.337,51)

Beban hibah Tahun 2024 sebesar Rp44.801.118.235,68 terdiri atas:

a. Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp28.208.649.840,00 yaitu:

- 1) Pembayaran Belanja Hibah ke Bawaslu Kab. Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan NPHD Nomor 911/175/NPHD.KESBANGPOL-2023 dan Nomor 040/HK.01.01/K.SB-05/11/2023 tgl 10 November 2023 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp7.800.000.000,00;
- 2) Pembayaran Belanja Hibah ke KPU Kab Padang Pariaman Tahun 2024 berdasarkan NPHD Nomor 911/174/NPHD.KESBANGPOL-2023 dan Nomor 1/KU.07-NK/1305/2023 tanggal 10 November 2023 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp17.041.791.840,00;
- 3) Pembayaran Belanja Hibah ke Polres Pariaman Tahun 2024 Berdasarkan NPHD Nomor 911/096/NPHD.KESBANGPOL-2024 dan Nomor B/533/VI/2024 dan Nomor B/533/VI/2024 tanggal 4 juni 2024 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp483.233.000,00;
- 4) Pembayaran Belanja Hibah ke Polres Padang Pariaman Tahun 2024 Berdasarkan NPHD Nomor 911/095/NPHD.KESBANGPOL-2024 dan Nomor B/341/VI/HUK.81.1/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp1.733.625.000; dan
- 5) Pembayaran Belanja Hibah ke Korem 032 Wirabraja Tahun 2024 Berdasarkan NPHD Nomor B/10/Korem032/V/2024 dan Nomor 911/094/NPHD.KESBANGPOL-2024 tanggal 4 Juni 2024 dan

Persetujuan Bupati Padang Pariaman tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp1.150.000.000,00.

- b. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.867.315.800,00 yaitu:
 - 1) Hibah Kepada PMI sebesar Rp150.000.000,00;
 - 2) Hibah Kepada KONI sebesar Rp711.315.800,00;
 - 3) Hibah Kepada NPC sebesar Rp100.000.000,00;
 - 4) Hibah Kepada Pramuka sebesar Rp600.000.000,00;
 - 5) Hibah Kepada Veteran LVRI sebesar Rp56.000.000,00;
 - 6) Hibah Uang kepada NU dan Muhammadiyah sebesar Rp100.000.000,00; dan
 - 7) Hibah kepada Baznas sebesar Rp150.000.000,00.
- c. Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp5.283.500.000,00 sebagaimana yang telah dirinci pada Belanja Hibah-LRA;
- d. Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp3.052.039.430,00 yaitu :
 - 1) Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp2.927.039.430,00 merupakan hibah yang diberikan kepada sekolah negeri yang berasal dari dana BOS; dan
 - 2) Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp125.000.000,00 merupakan hibah yang diberikan kepada sekolah swasta yang berasal dari dana BOS;
- e. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp974.364.166,68 merupakan hibah yang diberikan kepada partai politik; dan
- f. Beban Hibah Dana BOSP sebesar Rp5.415.248.999,00 yaitu :
 - 1) Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp4.288.648.999,00 merupakan Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD; dan
 - 2) Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp1.126.600.000,00.

4. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
00	300.000.000,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan tahun 2023 sebesar Rp300.000.000,00

5. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
42.604.370.681,66	36.869.449.426,71

Beban Penyisihan Piutang merupakan pencatatan atas kenaikan piutang berdasarkan persentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp42.604.370.681,66 dan Tahun 2023 sebesar Rp36.869.449.426,71 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 78 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyisihan Pajak Restoran	11.150,00	0,00	11.150,00
Beban Penyisihan Pajak Reklame	59.280.580,00	56.736.378,75	2.544.201,25
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	3.111.384,40	5.611.539,81	(2.500.155,41)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	41.805.296.599,61	36.148.965.739,56	5.656.330.860,05
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	550.229.650,00	507.051.983,50	43.177.666,50
Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro	3.480.267,00	9.917.874,50	(6.437.607,50)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	22.220.777,50	3.112.608,37	19.108.169,13
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	149.599.968,15	131.687.997,22	17.911.970,93
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	11.140.305,00	6.365.305,00	4.775.000,00
Jumlah	42.604.370.681,66	36.869.449.426,71	5.734.921.254,95

6. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
38.272.019.860,00	38.156.187.699,00

Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp38.272.019.860,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp38.156.187.699,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 79 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.790.128.769,00	4.610.044.805,00	(819.916.036,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.481.891.091,00	33.546.142.894,00	935.748.197,00
Jumlah	38.272.019.860,00	38.156.187.699,00	115.832.161,00

7. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
52.245.308.098,99	50.669.154.218,18

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp52.245.308.098,99 dan Tahun 2023 sebesar Rp50.669.154.218,18 terjadi peningkatan sebesar Rp1.576.153.880,81 atau 3,11%.

8. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
26.092.890.591,00	109.329.884.404,00

Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 sebesar Rp26.092.890.591,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp109.329.884.404,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 80 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	16.650.969.261,00	108.322.606.384,00	(91.671.637.123,00)
Beban Penyusutan Bangunan Air	940.790.198,00	0,00	940.790.198,00
Beban Penyusutan Instalasi	8.215.329.913,00	623.974.284,00	7.591.355.629,00
Beban Penyusutan Jaringan	285.801.219,00	383.303.736,00	(97.502.517,00)
Jumlah	26.092.890.591,00	109.329.884.404,00	(83.236.993.813,00)

9. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
641.847.047,40	680.821.847,40

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 sebesar Rp641.847.047,40 dan Tahun 2023 sebesar Rp680.821.847,40 terjadi penurunan sebesar Rp38.974.800,00 atau 5,72%.

10. Beban Bagi Hasil

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6.319.342.279,6	6.557.366.015,80

Rincian Beban Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp6.319.342.279,6 dan Tahun 2023 sebesar Rp6.557.366.015,80 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 81 Rincian Beban Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.125.325.873,40	6.197.047.613,60	(71.721.740,20)
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	194.016.406,20	360.318.402,20	(166.301.996,00)
Jumlah	6.319.342.279,6	6.557.366.015,80	(238.023.736,20)

11. Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
77.590.947.500,00	74.368.964.601,00

Rincian Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp77.590.947.500,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp74.368.964.601,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.221.982.899,00 atau 4,33%. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 82 Rincian Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	77.590.947.500,00	74.368.964.601,00	3.221.982.899,00
Jumlah	77.590.947.500,00	74.368.964.601,00	3.221.982.899,00

C. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.808.360.429,00	(1.672.727.439,00)

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp4.808.360.429,00 dan tahun 2023 sebesar Rp(1.672.727.439,00) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 83 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	16.486.299.583,00	11.635.821.785,22	4.850.477.797,78
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(11.677.9.154,00)	(13.308.549.224,22)	1.630.610.070,22
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.808.360.429,00	(1.672.727.439,00)	6.481.087.868,00

1. SURPLUS KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
16.486.299.583,00	11.635.821.785,22

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp16.486.299.583,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp11.635.821.785,22 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 84 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO	0,00	28.378.345,66	(28.378.345,66)
Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	0,00	11.594.000,00	(11.594.000,00)
Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO	0,00	45.796.016,56	(45.796.016,56)
Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah-LO	52.200.000,00	5.250.000,00	46.950.000,00
Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	1.523.352.201,00	379.126.493,00	1.144.225.708,00
Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	0,00	67.835.245,00	(67.835.245,00)
Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO	977.630.519,00	10.154.486.989,00	(9.176.856.470,00)
Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO	0,00	166.018.616,00	(166.018.616,00)
Surplus Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0,00	59.086.080,00	(59.086.080,00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	718.250.000,00	(718.250.000,00)
Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO	13.933.116.863,00	0,00	13.933.116.863,00
Jumlah	16.486.299.583,00	11.635.821.785,22	4.850.477.797,78

2. DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
(11.677.939.154,00)	(13.308.549.224,22)

Rincian defisit non operasional-LO tahun 2024 sebesar Rp11.677.939.154,00 dan tahun 2023 sebesar Rp13.308.549.224,22 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 85 Defisit Kegiatan Non Operasional-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Defisit Tukar Menukar Tanah - LO	52.200.000,00	5.250.000,00	46.950.000,00
Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	540.716.624,00	364.126.493,00	176.590.131,00
Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	982.635.577,00	17.568.746,00	965.066.831,00
Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO	977.630.519,00	10.366.301.621,56	(9.388.671.102,56)
Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO	8.741.627.036,00	0	8.741.627.036,00
Defisit Tukar Menukar Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0	72.199.400,00	(72.199.400,00)
Defisit Penghapusan Tanah-LO	57.200.000,00	0	57.200.000,00
Defisit Penghapusan Alat Angkutan-LO	325.929.398,00	0	325.929.398,00
Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	0	312.523.400,66	(312.523.400,66)
Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	0	1.694.738.880,00	(1.694.738.880,00)
Defisit Penghapusan Monumen-LO	0	466.553.550,00	(466.553.550,00)
Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0	9.287.133,00	(9.287.133,00)
Jumlah	11.677.939.154,00	13.308.549.224,22	(1.630.610.070,22)

D. POS LUAR BIASA

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
7.691.341.000,00	1.729.558.250,00

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik seperti kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal TA, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp7.691.341.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 86 Rincian Pos Luar Biasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Belanja tidak terduga tahun 2024 pada TU1 untuk rehab jalan kayu putih kalawi korong lubuak napa nagari anduriang kecamatan kayu tanam, rehab jembatan ladang laweh kec.2x11 enam lingkung dan rehp jalan mudiak aia nagari kasikan nagari kampung tanjung koto mambang sungai durian kec.patamuan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten padang pariaman, (Dokumen terlampir)	792.000.000,00
2	Pemb.BTT Th 2024 Pada TU2, Pek.Normalisasi & Pemb.Perkuatan Tebing Sungai Batang Naras (Pengamanan Rmh Oman) Nag.Sikucur Kec.V Koto, Pek.Normalisasi & Perkuatan Tebing Sungai Kasang Kec.Bt.Anai & Pek.Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Gunung Nag.Sg.Durian Kec.Patamuan di Kab.Pd.Prm Kpd DPU & Penataan Ruang Kab.Pd.Prm	2.354.000.000,00
3	Pemb.BTT 2024 TU3 Penanganan Jemb Gaduang Ksg, Jembatan Koto Buruak, Jembatan Lubuak Napa, Jembatan Pulau Air, Pengaman Jl Simp Toboh Kt Hilalang dan Penanganan Badan Jl Sungai Sirah Tj Alai sei Geringging Kepada DPU dan Penataan Ruang Kab.Pd.Pariaman	3.995.341.000,00
4	Pembayaran BTT Pekerjaan Penanggulangan Darurat Jaringan Irigasi Anai Sasapan Nagari Guguak Kec.2x11 Kayu Tanam Kab.Padang Pariaman Pada TU IV Tahun 2024 kepada DPU dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Untuk CV.KYT	550.000.000,00
Jumlah		7.691.341.000,00

E. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian Luar Biasa. Pada Tahun 2024 ini terdapat Defisit-LO sebesar Rp(11.100.829.604,13) dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan – LO	Rp	1.337.427.770.061,43
Beban – LO	Rp	1.345.645.619.094,56
Surplus/Defisit Dari Operasional	Rp	(8.217.849.033,13)
Kegiatan Non Operasional	Rp	4.808.360.429,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(3.409.488.604,13)
Pos Luar Biasa	Rp	7.691.341.000,00
Surplus/Defisit-LO	Rp	(11.100.829.604,13)

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp131.501.362.166,75 yang merupakan selisih surplus antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas selama TA 2024 sebesar Rp1.427.105.140.185,43 terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp	61.253.259.287,50
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	66.154.972.984,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	8.728.317.039,00
d. Lain-lain PAD yang Sah	Rp	8.251.739.335,93
e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.205.591.057.388,00
f. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	77.125.794.151,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp	1.427.105.140.185,43

2. Arus Keluar Kas selama TA 2024 sebesar Rp1.295.582.792.268,68 terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	Rp	742.722.747.909,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	312.307.080.893,00
c. Belanja Hibah	Rp	44.812.366.236,68
d. Belanja Bantuan Sosial	Rp	0
e. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	181.049.406.500,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp	7.020.835.480,00
g. Pembayaran Kejadian Luar Biasa	Rp	7.691.341.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp	1.295.603.778.018,68

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama TA 2024

defisit sebesar Rp156.908.360.752,00 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas

Arus kas masuk ini, merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari penjualan Aset Daerah. Dalam TA 2024 arus kas masuk aktivitas investasi aset non keuangan yang berasal dari pendapatan dari penjualan aset sebesar Rp350.897.100,00.

2. Arus Keluar Kas

Selama Tahun 2024 arus kas keluar sebesar Rp157.259.257.852,00. Pengeluaran ini merupakan pengeluaran dana dari Kas Daerah untuk Belanja Modal yaitu:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.087.632.000,00 merupakan pengeluaran untuk mendapatkan tanah, termasuk pengadaan, pembelian, pembebasan, dan penyelesaian. Belanja modal tanah juga mencakup pengosongan, perataan, pematangan, dan pembuatan sertifikat tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp23.888.796.704,00 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal Tahun 2024 yang dibelanjakan untuk kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor/ rumah tangga, alat studio dan alat kedokteran;
- c. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.826.064.638,00 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dipergunakan untuk pembangunan gedung dan bangunan baru serta perbaikan/ rehab gedung dan bangunan lama sehingga dapat berfungsi serta menambah umur ekonomis bangunan tersebut;
- d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp103.545.442.710,00 merupakan total realisasi pengeluaran Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan irigasi dan jaringan;
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya Rp5.705.321.800,00 merupakan total realisasi pengeluaran belanja Aset Tetap Lainnya yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman dan barang-barang bercorak budaya; dan
- f. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp2.206.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal pada Bank Nagari.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah

dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 sebesar Rp20.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Penerimaan PFK Rp85.530.125.449,58 terdiri atas:

a.	Askes	Rp	168.778.435,00
b.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	1.106.998,00
c.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp	32.335.971,00
d.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	3.673.470,00
e.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp	102.008.922,00
f.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	31.794.977,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	59.998.143,00
h.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	646.213.168,00
i.	Iuran Jaminan Kematian	Rp	1.933.790.614,00
j.	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	Rp	15.276.515.711,00
k.	Iuran Wajib Pegawai	Rp	13.064.111,00
l.	Iuran Wajib Pegawai 1%	Rp	4.126.021.541,00
m.	Iuran Wajib Pegawai 8%	Rp	22.312.194.715,00
n.	Lainnya	Rp	459.287.576,00
o.	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	608.473.410,98
p.	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	306.933.606,00
q.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	3.062.693.598,00
r.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp	19.098.246.204,60
s.	PPH 21	Rp	17.137.919.330,00
t.	Taperum	Rp	20.000,00
u.	Taspen	Rp	128.420.274,00
v.	Zakat	Rp	20.634.674,00
	Jumlah	Rp	85.530.125.449,58

2. Pengeluaran PFK Rp85.530.105.449,58 terdiri atas:

a.	Askes	Rp	168.778.435,00
b.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp	1.106.998,00
c.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp	32.335.971,00
d.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp	3.673.470,00
e.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp	102.008.922,00
f.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp	31.794.977,00
g.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp	59.998.143,00
h.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	646.213.168,00
i.	Iuran Jaminan Kematian	Rp	1.933.790.614,00
j.	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	Rp	15.276.515.711,00
k.	Iuran Wajib Pegawai	Rp	13.064.111,00
l.	Iuran Wajib Pegawai 1%	Rp	4.126.021.541,00
m.	Iuran Wajib Pegawai 8%	Rp	22.312.194.715,00
n.	Lainnya	Rp	459.287.576,00
o.	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	608.473.410,98
p.	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	306.933.606,00
q.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	3.062.693.598,00
r.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp	19.098.246.204,60
s.	PPH 21	Rp	17.137.919.330,00
T	Taspen	Rp	128.420.274,00
U	Zakat	Rp	20.634.674,00
	Jumlah	Rp	85.530.105.449,58

Akumulasi dari kenaikan/penurunan kas pada Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Kenaikan/ Penurunan Kas sebesar Rp(25.385.992.835,25) yang bersumber dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	131.501.362.166,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(156.908.360.752,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
Arus Kas Bersih dari Transitoris	Rp	20.000,00
	Rp	(25.406.978.585,25)

2. Saldo akhir kas sebesar Rp40.499.542.704,54 yang bersumber dari:

Saldo Akhir Kas Di BUD + BLUD	Rp	36.288.964.998,54
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	35.236.512,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
Saldo Akhir Kas Bos	Rp	119.606.781,00
Saldo Akhir Kas BOK	Rp	4.055.734.413,00
	Rp	40.499.542.704,54

Dengan demikian Saldo kas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.499.542.704,54 yang terdiri dari Saldo Kas di BUD dan BLUD sebesar Rp36.288.964.998,54, (masing-masing sebesar Rp28.984.627.889,04 kas BUD dan kas BLUD sebesar Rp7.304.357.109,5), Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp119.606.781,00 dan Saldo Kas dana BOK sebesar Rp4.055.734.413,00

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit-LO dan perubahan ekuitas lainnya. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 di Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp1.342.128.864.497,33 adalah nilai Ekuitas yang juga tersaji di Neraca per 31 Desember 2024.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada Neraca awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.317.852.308.140,98.

B. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(11.100.829.604,13) Perhitungan Defisit-LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	Rp	1.337.427.770.061,43
Beban – LO	Rp	1.345.645.619.094,56
Surplus/Defisit Dari Operasional	Rp	(8.217.849.033,13)
Kegiatan Non Operasional	Rp	4.808.360.429,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(3.409.488.604,13)
Pos Luar Biasa	Rp	7.691.341.000,00
Surplus/Defisit-LO	Rp	(11.100.829.604,13)

C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN

1. Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya pada LPE Tahun 2024 sebesar Rp35.377.385.960,48 terdiri atas koreksi tambah sebesar Rp39.578.515.457,63 dan koreksi kurang sebesar Rp4.201.129.497,15. Adapun Koreksi Tambah Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp35.377.385.960,48 dengan rincian:

Tabel 5. 87 Koreksi Tambah Ekuitas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Ekuitas atas saldo awal Kas Dana BOS	3.429.920,00
2	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	56.736.378,75
3	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	5.611.539,81

No	Uraian	Nilai (Rp)
4	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang PBBP2	36.148.965.739,56
5	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	507.051.983,50
6	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	97.362,30
7	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	3.112.608,37
8	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	9.820.512,20
9	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	131.687.997,22
10	Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	6.365.305,00
11	Koreksi Ekuitas atas Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	8.000.000,00
12	Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00
13	Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.242.000,00
14	Koreksi Ekuitas atas Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	4.500.000,00
15	Koreksi Ekuitas atas Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	328.872.487,92
16	Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.065,00
17	Koreksi Ekuitas atas Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	57,00
18	Koreksi Ekuitas atas bongkaran Gerbang tarok City	79.700.000,00
19	Koreksi Ekuitas atas dobel catat utang barang dan jasa tahun 2023	4.739.500,00
20	Koreksi Ekuitas atas Hibah Kurang Catat Tanah IKK tahun 2007	2.270.580.000,00
Jumlah		39.578.515.457,63

2. Koreksi Kurang Ekuitas

Selanjutnya Koreksi Kurang Ekuitas sebesar Rp(4.201.129.497,15) terdiri atas:

Tabel 5. 88 Koreksi Kurang Ekuitas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	6.725.500,00
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	10.531.125,00
3	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	947.443.003,30

No	Uraian	Nilai (Rp)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	125.728.441,00
5	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	2.326.197.543,00
6	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	35.805.308,00
7	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	1.381.883,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	52.926.370,00
9	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	128,00
10.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	295.000.000,00
11	Mencatat Penyesuaian atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM	399.390.195,85
Jumlah		4.201.129.497,15

D. EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir sebesar Rp1.342.128.864.497,33 adalah sama dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024.

BAB VI

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1. MANDATORY SPENDING

Mandatory Spending merupakan belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh Undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

A. Bidang Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada bagian hal khusus lainnya menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total Belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2024 telah mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sebesar 42,10% dari total belanja daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. 1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan TA 2024

No.	Komponen Perhitungan			Anggaran	Realisasi	%
				Rp	Rp	
1.	a.	Belanja pada Dinas Pendidikan:		584.540.310.334,48	561.890.846.279,00	96,15
		1)	Belanja Operasi:	560.915.481.712,48	538.266.017.657,00	95,96
		a.	belanja pegawai;	484.431.792.305,48	463.722.085.142,00	95,72
		b.	belanja barang dan jasa;	67.897.189.407,00	66.065.396.085,00	97,30
		c.	belanja hibah;	8.586.500.000,00	8.478.536.430,00	98,74
		d.	belanja bantuan sosial.			
		2)	Belanja Modal;	23.624.828.622,00	23.624.828.622,00	100,00
	b.	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Arsip dan Pustaka, antara lain:		26.182.383.493,00	22.144.124.967,00	84,58
		1)	Belanja Operasi:	17.984.353.063,00	16.322.527.595,00	90,76
		a.	belanja pegawai;	6.400.757.124,00	6.165.947.674,00	96,33
		b.	belanja barang dan jasa;	9.358.595.939,00	8.545.264.121,00	91,31
		c.	belanja hibah;	2.225.000.000,00	1.611.315.800,00	72,42

No.	Komponen Perhitungan			Anggaran	Realisasi	%	
				Rp	Rp		
			d.	belanja bantuan sosial.			
		2)	Belanja Modal;		8.198.030.430,00	5.821.597.372,00	71,01
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)			610.722.693.827,48			
3.	Total Belanja Daerah			1.450.692.272.382,68			
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%			42,10 %			

B. Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2024 telah mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan sebesar 25,91% dari total belanja daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan TA 2024

No.	Komponen Perhitungan			Anggaran	Realisasi	%
				Rp	Rp	
1.	a.	Belanja pada Dinas Kesehatan:		179.095.909.583,00	164.758.176.148,00	91,99
		1)	Belanja Operasi:			
			a. belanja pegawai;	111.481.505.209,00	105.558.842.661,00	94,69
			b. belanja barang dan jasa;	62.132.060.130,00	54.152.596.082,00	87,16
			c. belanja hibah;	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
			d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
		2)	Belanja Modal;	5.332.344.244,00	4.896.737.405,00	91,83
	b.	Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan		95.222.797.047,00	87.887.243.412,00	92,30
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)			274.318.706.630,00		
3.	Total Belanja Daerah			1.539.649.300.981,79		
4.	Gaji ASN			480.723.176.162,48		
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)			1.058.926.124.819,31		
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%			25,91 %		

C. Belanja Infrastruktur Pelayanan publik

Pemerintah daerah mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan transfer kepada daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum

mencapai 40%, pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 tahun.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 atas Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik baru memenuhi sebesar 30,63% dan hal tersebut akan kita upayakan secara bertahap. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. 3 Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2024
Kabupaten Padang Pariaman%**

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2024 (Rp)	P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.558.262.094.379,00	1.539.649.300.981,79	1.450.692.272.382,68
2				
	a belanja bagi hasil	7.180.200.000,00	8.846.259.317,80	7.020.835.480,00
	b bantuan keuangan	178.135.000.500,00	181.049.406.500,00	181.049.406.500,00
	c jumlah (a+b)	185.315.200.500,00	189.895.665.817,80	188.070.241.980,00
3	Selisih (1-2)	1.372.946.893.879,00	1.349.753.635.163,99	1.262.622.030.402,68
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	549.178.757.551,60	539.901.454.065,60	505.048.812.161,07

**Tabel 6. 4 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah TA 2024
Kabupaten Padang Pariaman**

No.	Komponen Perhitungan		Jumlah		
			APBD 2024	P-APBD 2024	Realisasi
1	a	Belanja Modal:	137.764.685.626,00	167.398.553.172,02	155.053.257.852,00
		1) tanah;	109.600.000,00	1.087.632.000,00	1.087.632.000,00
		2) peralatan dan mesin;	19.402.917.942,00	24.847.747.915,70	23.888.796.704,00
		3) bangunan dan gedung;	21.860.762.214,00	24.270.093.725,01	20.826.064.638,00
		4) jalan, jaringan, dan irigasi;	96.179.605.470,00	112.159.475.731,31	103.545.442.710,00
		5) aset tetap lainnya;	131.800.000,00	5.033.603.800,00	5.705.321.800,00
		6) aset lainnya.	80.000.000,00		
	b	Belanja Pemeliharaan	5.880.277.084,00	6.662.399.383,93	5.892.690.648,00
		Jumlah 1 = (a + b)	143.644.962.710,00	174.060.952.555,95	160.945.948.500,00
2	a	Belanja Hibah;	65.460.210.000,00	45.913.859.840,00	44.812.366.236,68
	b	Belanja Bantuan Sosial;	0,00	0,00	0,00
	c	Belanja Bantuan Keuangan.	178.135.000.500	181.049.406.500,00	181.049.406.500,00
		jumlah 2 = (a + b + c)	243.595.210.500,00	226.963.266.340,00	225.861.772.736,68
3		Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	387.240.173.210,00	401.024.218.895,95	386.807.721.236,68

6.2. PENGGANTIAN MANAJEMEN

Selama tahun 2024 terjadi penggantian manajemen dan pegawai sebanyak 204 orang dengan rincian:

1. Tanggal 18 Januari 2024 sebanyak 111 orang dengan rincian:
 - a) Pelantikan Kepala SMPN sebanyak 21 orang;
 - b) Pelantikan Kepala SDN sebanyak 81 orang;
 - c) Pelantikan Kepala TKN sebanyak 2 orang; dan
 - d) Perpindahan dari Jabatan Fungsional sebanyak 7 orang.
2. Tanggal 20 Februari 2024 dilantik sebanyak 47 orang dengan rincian:
 - a) Pelantikan Pejabat Administrator 16 Orang;
 - b) Pelantikan Pejabat Pengawas 29 Orang; dan
 - c) Pelantikan UPTD Puskesmas 2 Orang.
3. Tanggal 21 Maret 2024 dilantik sebanyak 42 orang dengan rincian;
 - a) Pelantikan Pejabat PPT Pratama 6 Orang;
 - b) Pelantikan Pejabat Administrator 9 Orang;
 - c) Pelantikan Pejabat Pengawas 12 Orang;
 - d) Pelantikan UPTD Puskesmas 1 Orang;
 - e) Pelantikan Kepala SMPN sebanyak 2 orang;
 - f) Pelantikan Kepala SDN sebanyak 11 orang; dan
 - g) Pelantikan Kepala TKN sebanyak 1 orang;
4. Tanggal 16 Juli 2024 Pelantikan Pejabat PPT Pratama sebanyak 1 Orang;
5. Tanggal 20 Agustus 2024 dilantik sebanyak 3 orang Pejabat Administrator.

6.3. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Terdapat beberapa Kasus Hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024, antara lain :

1. Perkara Perdata Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn yang di ajukan oleh Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, M.S., yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Desember 2023 dengan perubahan gugatan tanggal 28 Desember 2023 dengan Objek Gugatan Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tanggal 8 Agustus 2015 maupun Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2016 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tanggal 31 Juli 2016. Gugatan Penggugat dalam gugatan wanprestasi berupa Debitur terlambat memenuhi perikatannya. Majelis Hakim mengeluarkan Putusan pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan amar putusan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya untuk membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan sebesar Rp1.060.000.000,00. Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding Kepengadilan Tinggi Padang pada tanggal 22 Januari 2024 dengan nomor Perkara Perdata Nomor 12/PDT /2025/PT.PDG dan telah diputus dengan Amar

Putusan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebagian sebesar Rp898.600.000,00 dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

2. Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2024/PN.PNM yang diajukan Cindrawati selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Suci Lestari ke Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 Februari 2024, dengan objek perkara pemutusan kontrak Rekontruksi bendungan/cek dam Sungai Limau. Majelis Hakim mengeluarkan Putusan pada tanggal 10 Februari 2025 dengan amar putusan Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

6.4. STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelenggarakan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah yang dibentuk mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri atas:

1. Bupati dan Wakil Bupati.
2. Sekretariat Daerah.
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Inspektorat Daerah.
5. Dinas yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Dinas Kesehatan.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - f. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - j. Dinas Perhubungan.
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - l. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - m. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian.
 - n. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - o. Dinas Arsip dan Perpustakaan.
 - p. Dinas Perikanan.
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- r. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 6. Badan yang terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 7. Kecamatan yang terdiri dari:
 - a. Kecamatan Batang Anai.
 - b. Kecamatan Lubuk Alung.
 - c. Kecamatan 2X11 Kayu Tanam.
 - d. Kecamatan IV Koto Aur Malintang.
 - e. Kecamatan VII Koto Sungai Sarik.
 - f. Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
 - g. Kecamatan V Koto Timur.
 - h. Kecamatan Sungai Limau.
 - i. Kecamatan Sungai Geringging.
 - j. Kecamatan Patamuan.
 - k. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.
 - l. Kecamatan Ulakan Tapakis.
 - m. Kecamatan Nan Sabaris.
 - n. Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.
 - o. Kecamatan Enam Lingkung.
 - p. Kecamatan Padang Sago.
 - q. Kecamatan Gasan Gadang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari:

- 1. Sekretariat Daerah.
- 2. Staf Ahli, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan , Ekonomi dan Keuangan.
 - c. Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya.

3. Asisten Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi 3 (tiga) bagian:
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum.
 - 2) Bagian Hukum.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Asisten Bidang Pembangunan, membawahi 3 (Tiga) bagian:
 - 1) Bagian Pembangunan Ekonomi.
 - 2) Bagian Pembangunan Fisik dan Prasarana.
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi 4 (Empat) bagian:
 - 1) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
 - 2) Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - 3) Bagian Humas dan Protokol.
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

6.5. KEPEMIMPINAN DAERAH

Susunan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 5 Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kabupaten Padang Pariaman

Nama	Jabatan
APRINALDI, S.Pd, M.Pd, AIFO	Ketua
WIRA SATRIA, S. Sos	Wakil Ketua I
FIRMAN, S. Si	Wakil Ketua II

Susunan Pejabat Eksekutif Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

Tabel 6. 6 Susunan Pejabat Eksekutif Kabupaten Padang Pariaman

Nama	Jabatan
JOHN KENEDY AZIS	BUPATI
RAHMAT HIDAYAT	WAKIL BUPATI
RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM	SEKRETARIS DAERAH
TASLIM LETER, SE, Ak	BENDAHARA UMUM DAERAH

BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Padang Pariaman TA 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024.

Terakhir, kami berharap peran serta seluruh masyarakat termasuk pihak pemeriksa eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Parik Malintang, 22 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN



JOHN KENEDY AZIS

IKHTISAR TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE NAGARI TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NO	NAGARI	ADN ANGGARAN	ADN REALISASI	SILTAP ANGGARAN	SILTAP REALISASI	DD ANGGARAN	DD REALISASI	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
1	LUBUK ALUNG	1	LUBUK ALUNG	433.329.500,00	433.329.500,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.054.591.000,00	1.054.591.000,00	1.890.520.500,00	1.890.520.500,00
		2	PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG	450.354.800,00	450.354.800,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.085.916.000,00	1.085.916.000,00	1.914.870.800,00	1.914.870.800,00
		3	PASIE LAWEH LUBUK ALUNG	424.411.300,00	424.411.300,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.222.970.000,00	1.222.970.000,00	2.024.781.300,00	2.024.781.300,00
		4	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	406.799.200,00	406.799.200,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.007.742.000,00	1.007.742.000,00	1.741.541.200,00	1.741.541.200,00
		5	SIKABU LUBUK ALUNG	374.076.500,00	374.076.500,00	301.800.000,00	301.800.000,00	899.188.000,00	899.188.000,00	1.575.064.500,00	1.575.064.500,00
		6	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	376.955.000,00	376.955.000,00	301.800.000,00	301.800.000,00	845.741.000,00	845.741.000,00	1.524.496.000,00	1.524.496.000,00
		7	SINGGULIANG LUBUK ALUNG	370.506.200,00	370.506.200,00	327.000.000,00	327.000.000,00	876.401.000,00	876.401.000,00	1.573.907.200,00	1.573.907.200,00
		8	SALIBUTAN LUBUK ALUNG	370.428.900,00	370.428.900,00	301.800.000,00	301.800.000,00	701.657.000,00	701.657.000,00	1.373.885.900,00	1.373.885.900,00
		9	BALAH HILIA LUBUK ALUNG	421.873.900,00	421.873.900,00	427.800.000,00	427.800.000,00	1.087.533.000,00	1.087.533.000,00	1.937.206.900,00	1.937.206.900,00
2	BATANG ANAI	10	KATAPIANG	493.304.300,00	493.304.300,00	429.000.000,00	429.000.000,00	1.645.063.000,00	1.645.063.000,00	2.567.367.300,00	2.567.367.300,00
		11	KASANG	484.131.000,00	484.131.000,00	479.400.000,00	479.400.000,00	1.492.770.000,00	1.492.770.000,00	2.456.301.000,00	2.456.301.000,00
		12	SUNGAI BULUAH	368.235.000,00	368.235.000,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.032.883.000,00	1.032.883.000,00	1.779.718.000,00	1.779.718.000,00
		13	BUAYAN LUBUK ALUNG	373.891.900,00	373.891.900,00	353.400.000,00	353.400.000,00	1.245.943.000,00	1.245.943.000,00	1.973.234.900,00	1.973.234.900,00
		14	SUNGAI BULUAH TIMUR	406.531.100,00	406.531.100,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.041.391.000,00	1.041.391.000,00	1.825.322.100,00	1.825.322.100,00
		15	SUNGAI BULUAH BARAT	405.606.100,00	405.606.100,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.082.982.000,00	1.082.982.000,00	1.865.988.100,00	1.865.988.100,00
		16	SUNGAI BULUAH UTARA	358.921.800,00	358.921.800,00	301.800.000,00	301.800.000,00	741.388.000,00	741.388.000,00	1.402.109.800,00	1.402.109.800,00
3	NAN SABARIS	17	SUNGAI BULUAH SELATAN	387.545.400,00	387.545.400,00	353.400.000,00	353.400.000,00	895.278.000,00	895.278.000,00	1.636.223.400,00	1.636.223.400,00
		18	KAPALO KOTO	355.295.200,00	355.295.200,00	303.000.000,00	303.000.000,00	746.661.000,00	746.661.000,00	1.404.956.200,00	1.404.956.200,00
		19	PAUH KAMBAR	396.332.700,00	396.332.700,00	429.000.000,00	429.000.000,00	1.436.792.000,00	1.436.792.000,00	2.262.124.700,00	2.262.124.700,00
		20	PADANG BINTUNGAN	370.876.000,00	370.876.000,00	301.800.000,00	301.800.000,00	807.798.000,00	807.798.000,00	1.480.474.000,00	1.480.474.000,00
		21	KURAI TAJI	424.991.600,00	424.991.600,00	403.800.000,00	403.800.000,00	1.490.652.000,00	1.490.652.000,00	2.319.443.600,00	2.319.443.600,00
		22	SUNUA	379.621.000,00	379.621.000,00	328.200.000,00	328.200.000,00	808.737.000,00	808.737.000,00	1.516.558.000,00	1.516.558.000,00
		23	PADANG KANDANG PULAU AIE PADANG BINTUNGAN	360.007.800,00	360.007.800,00	327.000.000,00	327.000.000,00	771.664.000,00	771.664.000,00	1.458.671.800,00	1.458.671.800,00
		24	SUNUA TENGAH	374.969.100,00	374.969.100,00	327.000.000,00	327.000.000,00	869.998.000,00	869.998.000,00	1.571.967.100,00	1.571.967.100,00
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	25	SUNUA BARAT	372.957.100,00	372.957.100,00	327.000.000,00	327.000.000,00	948.569.000,00	948.569.000,00	1.648.526.100,00	1.648.526.100,00
		26	KURAI TAJI TIMUR	370.136.300,00	370.136.300,00	353.400.000,00	353.400.000,00	804.095.000,00	804.095.000,00	1.527.631.300,00	1.527.631.300,00
		27	SICINCIN	426.035.100,00	426.035.100,00	301.800.000,00	301.800.000,00	1.375.233.000,00	1.375.233.000,00	2.103.068.100,00	2.103.068.100,00
		28	LUBUK PANDAN	390.647.600,00	390.647.600,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.326.170.000,00	1.326.170.000,00	2.043.817.600,00	2.043.817.600,00
5	VII KOTO	29	SUNGAI ASAM	384.258.000,00	384.258.000,00	276.600.000,00	276.600.000,00	948.777.000,00	948.777.000,00	1.609.635.000,00	1.609.635.000,00
		30	BALAH AIA	379.336.300,00	379.336.300,00	328.200.000,00	328.200.000,00	1.153.251.000,00	1.153.251.000,00	1.860.787.300,00	1.860.787.300,00
		31	SUNGAI SARIAK	404.688.100,00	404.688.100,00	301.800.000,00	301.800.000,00	1.244.632.000,00	1.244.632.000,00	1.951.120.100,00	1.951.120.100,00
		32	LURAH AMPALU	446.353.800,00	446.353.800,00	579.000.000,00	579.000.000,00	1.281.185.000,00	1.281.185.000,00	2.306.538.800,00	2.306.538.800,00
		33	LAREH NAN PANJANG	362.452.300,00	362.452.300,00	328.200.000,00	328.200.000,00	864.250.000,00	864.250.000,00	1.554.902.300,00	1.554.902.300,00
		34	LAREH NAN PANJANG SELATAN	366.958.300,00	366.958.300,00	327.000.000,00	327.000.000,00	895.175.000,00	895.175.000,00	1.589.133.300,00	1.589.133.300,00

NO.	KECAMATAN	NO	NAGARI	ADN ANGGARAN	ADN REALISASI	SILTAP ANGGARAN	SILTAP REALISASI	DD ANGGARAN	DD REALISASI	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
		35	LAREH NAN PANJANG BARAT	358.334.300,00	358.334.300,00	301.800.000,00	301.800.000,00	692.218.000,00	692.218.000,00	1.352.352.300,00	1.352.352.300,00
		36	BISATI SUNGAI SARIAK	373.679.600,00	373.679.600,00	327.000.000,00	327.000.000,00	955.506.000,00	955.506.000,00	1.656.185.600,00	1.656.185.600,00
		37	AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIAK	360.447.900,00	360.447.900,00	301.800.000,00	301.800.000,00	686.900.000,00	686.900.000,00	1.349.147.900,00	1.349.147.900,00
		38	LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK	381.468.600,00	381.468.600,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.174.012.000,00	1.174.012.000,00	1.934.080.600,00	1.934.080.600,00
		39	LIMPATO SUNGAI SARIAK	377.279.200,00	377.279.200,00	377.400.000,00	377.400.000,00	874.881.000,00	874.881.000,00	1.629.560.200,00	1.629.560.200,00
		40	BALAH AIE UTARA	373.949.900,00	373.949.900,00	301.800.000,00	301.800.000,00	877.665.000,00	877.665.000,00	1.553.414.900,00	1.553.414.900,00
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	41	BALAH AIE TIMUR	378.019.900,00	378.019.900,00	301.800.000,00	301.800.000,00	853.265.000,00	853.265.000,00	1.533.084.900,00	1.533.084.900,00
		42	CAMPAGO	408.049.100,00	408.049.100,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.327.152.000,00	1.327.152.000,00	2.137.801.100,00	2.137.801.100,00
		43	SIKUCUR	386.723.000,00	386.723.000,00	301.800.000,00	301.800.000,00	961.847.000,00	961.847.000,00	1.650.370.000,00	1.650.370.000,00
		44	CAMPAGO BARAT	383.595.100,00	383.595.100,00	352.200.000,00	352.200.000,00	895.768.000,00	895.768.000,00	1.631.563.100,00	1.631.563.100,00
		45	CAMPAGO SELATAN	371.790.000,00	371.790.000,00	352.200.000,00	352.200.000,00	748.171.000,00	748.171.000,00	1.472.161.000,00	1.472.161.000,00
		46	SIKUCUA UTARA	370.921.500,00	370.921.500,00	327.000.000,00	327.000.000,00	736.528.000,00	736.528.000,00	1.434.449.500,00	1.434.449.500,00
		47	SIKUCUA TIMUR	401.986.600,00	401.986.600,00	402.600.000,00	402.600.000,00	933.344.000,00	933.344.000,00	1.737.930.600,00	1.737.930.600,00
		48	SIKUCUA TENGAH	364.411.500,00	364.411.500,00	327.000.000,00	327.000.000,00	655.751.000,00	655.751.000,00	1.347.162.500,00	1.347.162.500,00
		49	SIKUCUA BARAT	390.512.600,00	390.512.600,00	403.800.000,00	403.800.000,00	834.109.000,00	834.109.000,00	1.628.421.600,00	1.628.421.600,00
		50	KURANJI HULU	459.774.400,00	459.774.400,00	429.000.000,00	429.000.000,00	1.139.703.000,00	1.139.703.000,00	2.028.477.400,00	2.028.477.400,00
7	SUNGAI GARINGGIAN G	51	MALAI III KOTO	409.502.700,00	409.502.700,00	353.400.000,00	353.400.000,00	996.567.000,00	996.567.000,00	1.759.469.700,00	1.759.469.700,00
		52	BATU GADANG KURANJI HULU	410.411.100,00	410.411.100,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.016.322.000,00	1.016.322.000,00	1.805.333.100,00	1.805.333.100,00
		53	SUNGAI SIRAH KURANJI HULU	500.783.100,00	500.783.100,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.627.594.000,00	1.627.594.000,00	2.530.977.100,00	2.530.977.100,00
		54	KURANJI HILIR	467.935.800,00	467.935.800,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.142.137.000,00	1.142.137.000,00	2.012.672.800,00	2.012.672.800,00
8	SUNGAI LIMAU	55	PILUBANG	539.462.600,00	539.462.600,00	402.600.000,00	402.600.000,00	1.413.413.000,00	1.413.413.000,00	2.355.475.600,00	2.355.475.600,00
		56	GUGUAK KURANJI HILIR	386.576.500,00	386.576.500,00	352.200.000,00	352.200.000,00	871.835.000,00	871.835.000,00	1.610.611.500,00	1.610.611.500,00
		57	KOTO TINGGI KURANJI HILIR	396.782.800,00	396.782.800,00	352.200.000,00	352.200.000,00	1.184.707.000,00	1.184.707.000,00	1.933.689.800,00	1.933.689.800,00
9	IV KOTO AUR MALINTANG	58	III KOTO AUR MALINTANG	424.257.300,00	424.257.300,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.161.688.000,00	1.161.688.000,00	1.964.545.300,00	1.964.545.300,00
		59	III KOTO AUR MALINTANG UTARA	401.474.600,00	401.474.600,00	378.600.000,00	378.600.000,00	902.303.000,00	902.303.000,00	1.682.377.600,00	1.682.377.600,00
		60	III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	385.483.900,00	385.483.900,00	328.200.000,00	328.200.000,00	836.678.000,00	836.678.000,00	1.550.361.900,00	1.550.361.900,00
		61	III KOTO AUR MALINTANG SELATAN	510.999.700,00	510.999.700,00	403.800.000,00	403.800.000,00	1.344.186.000,00	1.344.186.000,00	2.258.985.700,00	2.258.985.700,00
		62	BALAI BAIK MALAI III KOTO	401.275.400,00	401.275.400,00	377.400.000,00	377.400.000,00	987.756.000,00	987.756.000,00	1.766.431.400,00	1.766.431.400,00
10	ULAKAN TAPAKIH	63	TAPAKIH	443.520.200,00	443.520.200,00	553.800.000,00	553.800.000,00	1.117.290.000,00	1.117.290.000,00	2.114.610.200,00	2.114.610.200,00
		64	ULAKAN	383.079.400,00	383.079.400,00	327.000.000,00	327.000.000,00	870.545.000,00	870.545.000,00	1.580.624.400,00	1.580.624.400,00
		65	PADANG TOBOH ULAKAN	361.363.400,00	361.363.400,00	327.000.000,00	327.000.000,00	862.908.000,00	862.908.000,00	1.551.271.400,00	1.551.271.400,00
		66	SUNGAI GIMBA ULAKAN	366.114.200,00	366.114.200,00	327.000.000,00	327.000.000,00	842.844.000,00	842.844.000,00	1.535.958.200,00	1.535.958.200,00
		67	SEULAYAT ULAKAN	364.949.100,00	364.949.100,00	301.800.000,00	301.800.000,00	767.742.000,00	767.742.000,00	1.434.491.100,00	1.434.491.100,00
		68	MANGGPOH PALAK GADANG ULAKAN	380.276.700,00	380.276.700,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.093.860.000,00	1.093.860.000,00	1.851.536.700,00	1.851.536.700,00
		69	SANDI ULAKAN	387.824.900,00	387.824.900,00	427.800.000,00	427.800.000,00	852.058.000,00	852.058.000,00	1.667.682.900,00	1.667.682.900,00

NO.	KECAMATAN	NO	NAGARI	ADN ANGGARAN	ADN REALISASI	SILTAP ANGGARAN	SILTAP REALISASI	DD ANGGARAN	DD REALISASI	TOTAL ANGGARAN	TOTAL REALISASI
		70	KAMPUANG GELAPUANG ULAKAN	352.436.000,00	352.436.000,00	301.800.000,00	301.800.000,00	629.950.000,00	629.950.000,00	1.284.186.000,00	1.284.186.000,00
11	SINTUAK TOBOH GADANG	71	SINTUAK	453.543.900,00	453.543.900,00	427.800.000,00	427.800.000,00	1.204.317.000,00	1.204.317.000,00	2.085.660.900,00	2.085.660.900,00
		72	TOBOH GADANG	383.351.100,00	383.351.100,00	352.200.000,00	352.200.000,00	845.095.000,00	845.095.000,00	1.580.646.100,00	1.580.646.100,00
		73	TOBOH GADANG SELATAN	371.368.200,00	371.368.200,00	301.800.000,00	301.800.000,00	883.948.000,00	883.948.000,00	1.557.116.200,00	1.557.116.200,00
		74	TOBOH GADANG BARAT	376.149.900,00	376.149.900,00	352.200.000,00	352.200.000,00	889.022.000,00	889.022.000,00	1.617.371.900,00	1.617.371.900,00
		75	TOBOH GADANG TIMUR	370.826.400,00	370.826.400,00	301.800.000,00	301.800.000,00	997.195.000,00	997.195.000,00	1.669.821.400,00	1.669.821.400,00
12	PADANG SAGO	76	KOTO BARU	377.528.800,00	377.528.800,00	301.800.000,00	301.800.000,00	740.835.000,00	740.835.000,00	1.420.163.800,00	1.420.163.800,00
		77	KOTO DALAM	371.167.800,00	371.167.800,00	328.200.000,00	328.200.000,00	956.056.000,00	956.056.000,00	1.655.423.800,00	1.655.423.800,00
		78	BATU KALANG	359.922.700,00	359.922.700,00	301.800.000,00	301.800.000,00	899.200.000,00	899.200.000,00	1.560.922.700,00	1.560.922.700,00
		79	KOTO DALAM BARAT	375.532.200,00	375.532.200,00	301.800.000,00	301.800.000,00	800.154.000,00	800.154.000,00	1.477.486.200,00	1.477.486.200,00
		80	KOTO DALAM SELATAN	365.399.300,00	365.399.300,00	301.800.000,00	301.800.000,00	750.500.000,00	750.500.000,00	1.417.699.300,00	1.417.699.300,00
		81	BATU KALANG UTARA	353.350.000,00	353.350.000,00	301.800.000,00	301.800.000,00	806.059.000,00	806.059.000,00	1.461.209.000,00	1.461.209.000,00
13	BATANG GASAN	82	MALAI V SUKU	398.623.300,00	398.623.300,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.157.278.000,00	1.157.278.000,00	1.882.901.300,00	1.882.901.300,00
		83	GASAN GADANG	412.321.400,00	412.321.400,00	301.800.000,00	301.800.000,00	1.045.153.000,00	1.045.153.000,00	1.759.274.400,00	1.759.274.400,00
		84	MALAI V SUKU TIMUR	396.110.700,00	396.110.700,00	352.200.000,00	352.200.000,00	895.793.000,00	895.793.000,00	1.644.103.700,00	1.644.103.700,00
14	V KOTO TIMUR	85	KUDU GANTING	385.813.500,00	385.813.500,00	352.200.000,00	352.200.000,00	952.973.000,00	952.973.000,00	1.690.986.500,00	1.690.986.500,00
		86	LIMAU PURUIK	392.148.400,00	392.148.400,00	454.200.000,00	454.200.000,00	987.270.000,00	987.270.000,00	1.833.618.400,00	1.833.618.400,00
		87	GUNUNG PADANG ALAI	431.624.100,00	431.624.100,00	427.800.000,00	427.800.000,00	1.148.544.000,00	1.148.544.000,00	2.007.968.100,00	2.007.968.100,00
		88	KUDU GANTIANG BARAT	369.746.300,00	369.746.300,00	328.200.000,00	328.200.000,00	881.714.000,00	881.714.000,00	1.579.660.300,00	1.579.660.300,00
15	2 X 11 KAYU TANAM	89	KAYU TANAM	409.551.900,00	409.551.900,00	378.600.000,00	378.600.000,00	1.254.115.000,00	1.254.115.000,00	2.042.266.900,00	2.042.266.900,00
		90	GUGUAK	457.500.100,00	457.500.100,00	328.200.000,00	328.200.000,00	1.351.808.000,00	1.351.808.000,00	2.137.508.100,00	2.137.508.100,00
		91	ANDURIANG	556.589.500,00	556.589.500,00	377.400.000,00	377.400.000,00	1.276.632.000,00	1.276.632.000,00	2.210.621.500,00	2.210.621.500,00
		92	KAPALO HILALANG	446.873.600,00	446.873.600,00	301.800.000,00	301.800.000,00	1.055.284.000,00	1.055.284.000,00	1.803.957.600,00	1.803.957.600,00
16	PATAMUAN	93	SUNGAI DURIAN	370.867.500,00	370.867.500,00	301.800.000,00	301.800.000,00	785.235.000,00	785.235.000,00	1.457.902.500,00	1.457.902.500,00
		94	TANDIKEK	407.281.300,00	407.281.300,00	402.600.000,00	402.600.000,00	934.763.000,00	934.763.000,00	1.744.644.300,00	1.744.644.300,00
		95	TANDIKEK UTARA	391.462.200,00	391.462.200,00	352.200.000,00	352.200.000,00	809.103.000,00	809.103.000,00	1.552.765.200,00	1.552.765.200,00
		96	TANDIKEK SELATAN	410.833.200,00	410.833.200,00	427.800.000,00	427.800.000,00	985.566.000,00	985.566.000,00	1.824.199.200,00	1.824.199.200,00
		97	TANDIKEK BARAT	380.981.300,00	380.981.300,00	402.600.000,00	402.600.000,00	830.843.000,00	830.843.000,00	1.614.424.300,00	1.614.424.300,00
		98	KAMPUANG TANJUANG KOTO MAMBANG SUNGAI DURIAN	388.507.300,00	388.507.300,00	352.200.000,00	352.200.000,00	950.866.000,00	950.866.000,00	1.691.573.300,00	1.691.573.300,00
17	ENAM LINGKUNG	99	PAKANDANGAN	390.839.500,00	390.839.500,00	327.000.000,00	327.000.000,00	1.442.938.000,00	1.442.938.000,00	2.160.777.500,00	2.160.777.500,00
		100	KOTO TINGGI	389.401.200,00	389.401.200,00	328.200.000,00	328.200.000,00	1.018.283.000,00	1.018.283.000,00	1.735.884.200,00	1.735.884.200,00
		101	TOBOH KETEK	379.287.900,00	379.287.900,00	301.800.000,00	301.800.000,00	942.359.000,00	942.359.000,00	1.623.446.900,00	1.623.446.900,00
		102	PARIT MALINTANG	415.288.800,00	415.288.800,00	427.800.000,00	427.800.000,00	1.442.557.000,00	1.442.557.000,00	2.285.645.800,00	2.285.645.800,00
		103	GADUR	374.283.400,00	374.283.400,00	353.400.000,00	353.400.000,00	934.722.000,00	934.722.000,00	1.662.405.400,00	1.662.405.400,00
JUMLAH				41.002.347.500,00	41.002.347.500,00	36.588.600.000,00	36.588.600.000,00	103.458.459.000,00	103.458.459.000,00	181.049.406.500,00	181.049.406.500,00

No	Uraian	Saldo Revisi
1	2	3
A	DAK Fisik	
	DAK Bidang Pendidikan	
	A DAK Pendidikan (PAUD)	2.350
	B DAK Pendidikan (SD)	334.970.205
	C DAK Pendidikan (SMP)	11.800
1.	D Silfa Bidang pendidikan Tahun 2023	1.039.047.568
	DAK Bid. Kesehatan dan KB	
	A DAK Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar)	25.000.000
	B DAK Kesehatan (Keluarga Berencana)	14.000
2.	C Silpa Bidang Kesehatan tahun 2023	3.471.508.559
3.	DAK Sanitasi	9.750.000
4.	DAK Perumahan dan Pemukiman	49.642.000
5.	DAK Air Minum	14.087.000
6.	DAK Penugasan Bid. Irigasi	41.816.800
7.	DAK Penugasan Bid. Pertanian	40.425.100
8.	DAK Penugasan Bid. Industri Kecil dan Menengah	122.484.950
9.	DAK Penugasan Bid. Kelautan dan Perikanan	14.443.450
10.	DAK Penugasan Bid. Pariwisata	23.756.088
	Jumlah DAK Fisik	5.186.959.870
B	DAK Non Fisik	
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	140.276.757
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	315.774
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	3.833.495.800
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.394.750.000
5.	DAK Non Fisik-BOSP PAUD Reguler	742.532.490
6.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	688.454.100
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.572.972.888
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	4.055.734.814
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	48.458.020
10.	DAK Non Fisik-PK2UKM	21.088.000
11.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	209.872.600
12.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	47.771.475
13.	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.650.474
14.	DAK Non Fisik-BOKT	2.308.000
15.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kepend	95.186
	Jumlah DAK Non Fisik	12.766.776.378
	Total Silpa DAK	17.953.736.248

C	Diluar DAK	
1.	DAU Bidang Pendidikan	4.089.808.190
2.	DAU Bidang Kesehatan	1.620.065.182
3.	Silpa DAU TPG/THR	20.959.053.000
4.	DBH Sawit	586.348.984
5.	Silpa Dana BNPB	5.109.985.286
6.	Silpa Dana Transfer Kenaagari	1.243.063.995
7.	Silpa Insentif Fiskal dan DID Tambahan	1.047.631.890
8.	Silpa BLUD	7.304.357.110
	Total Silpa Diluar DAK	41.960.313.637
	Total SILPA DAK dan Diluar DAK	59.914.049.885

Silpa pada LRA tahun 2024 40.520.528.455

Dana Silpa terpakai akhir tahun 19.393.521.430

Silpa Dana TPG/THR 19.393.521.430

(0)

RINCIAN SILPA TAHUN 2023 DAN 2024

RINCIAN SILPA TAHUN 2023 DAN 2024											
Penerimaan				Pengeluaran							
No	Bidang	DAK	Saldo akhir Tahun 2023 Audited	Penerimaan 2024	Total Penerimaan 2024	SP2D LS/UP/GU/TU	SP2B/SP2B	Jumlah Realisasi Belanja	Penyesuaian dari Kementerian Keuangan	Koreksi Audited dan reklas	SILPA
DAK FISIK											
1	Bidang Pendidikan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	7.575.001,00	227.307.180,00	234.882.181,00	227.304.830,00	-	227.304.830,00	(7.575.001,00)	-	2.350,00
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	753.453.720,00	2.363.451.655,00	3.116.905.375,00	2.028.481.450,00	-	2.028.481.450,00	(753.453.720,00)	-	334.970.205,00
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.674.900,00	2.410.416.420,00	2.417.091.320,00	2.410.404.620,00	-	2.410.404.620,00	(6.674.900,00)	-	11.800,00
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	300.197.202,00	-	-	-	-	-	(300.197.202,00)	-	-
		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan	400,00	-	-	-	-	-	(400,00)	-	-
		Silpa 2023 Audited	-	-	-	-	-	-	1.039.047.568,00	-	1.039.047.568,00
6	Bidang Kesehatan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar	1.723.076.400,00	-	1.723.076.400,00	-	-	-	(1.723.076.400,00)	-	-
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan - Kesiapan Sistem Kesehatan	18.448.000,00	-	18.448.000,00	-	-	-	(18.448.000,00)	-	-
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	890.913.923,00	-	890.913.923,00	-	-	-	(890.913.923,00)	-	-
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan Keparmasian dan Perbekalan Kesehatann	202.511.637,00	-	202.511.637,00	-	-	-	(202.511.637,00)	-	-
		DAK Penugasan Bidang Kesehatan (pengendalian penyakit)	50,00	-	50,00	-	-	-	(50,00)	-	-
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	9.621.734,00	5.799.319.300,00	5.808.941.034,00	5.799.319.300,00	-	5.799.319.300,00	(9.621.734,00)	-	-
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-	1.376.487.739,00	1.376.487.739,00	1.351.487.739,00	-	1.351.487.739,00		-	25.000.000,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	-	973.914.000,00	973.914.000,00	973.900.000,00	-	973.900.000,00		-	14.000,00
		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	-	7.002.900.000,00	7.002.900.000,00	7.001.472.600,00	-	7.001.472.600,00	38.997.700,00	-	40.425.100,00
		Silpa Btahun 2023	-	-	-	-	-	-	3.471.508.559,00	-	3.471.508.559,00
3	Bidang Sanitasi	DAK Sanitasi	5.950.000,00	-	5.950.000,00	-	-	-	3.800.000,00	-	9.750.000,00
4	Bidang Perumahan dan Pemukiman	DAK Perumahan dan Pemukiman	186.932.000,00	-	186.932.000,00	-	-	-	(137.290.000,00)	-	49.642.000,00
5	Bidang Air Minum	DAK Air Minum	350.231.000,00	-	350.231.000,00	-	-	-	(336.144.000,00)	-	14.087.000,00
6	Bidang Irigasi	DAK Penugasan Air Minum	10.797.000,00	-	10.797.000,00	-	-	-	(10.797.000,00)	-	-
6	Bidang Irigasi	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	42.557.800,00	3.001.268.300,00	3.043.826.100,00	3.001.178.300,00	-	3.001.178.300,00	(831.000,00)	-	41.816.800,00
7	Bidang Pertanian	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	154.709.900,00	-	154.709.900,00	-	-	-	(154.709.900,00)	-	-
8	Bidang Industri Kecil Menengah	DAK Industri Kecil Menengah	1.354.295.270,00	-	1.354.295.270,00	-	-	-	(1.231.810.320,00)	-	122.484.950,00
9	Bidang Kelautan dan Perikanan	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	14.423.450,00	-	14.423.450,00	-	-	-	20.000,00	-	14.443.450,00
10	Bidang pariwisata	DAK Bidang pariwisata	67.181.972,00	1.997.222.572,00	2.064.404.544,00	1.976.081.572,00	-	1.976.081.572,00	(64.566.884,00)	-	23.756.088,00
11	Bidang jalan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	258.025.471,00	-	258.025.471,00	-	-	-	(258.025.471,00)	-	-
		DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan tematik ketahanan pangan	2.983.402.000,00	-	2.983.402.000,00	-	-	-	(2.983.402.000,00)	-	-
		DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1.671.695.000,00	28.471.223.428,00	30.142.918.428,00	28.471.223.428,00	-	28.471.223.428,00	(1.671.695.000,00)	-	-
Jumlah DAK FISIK			11.012.673.830,00	53.623.510.594,00	64.636.184.424,00	53.240.853.839,00	-	53.240.853.839,00	(6.208.370.715,00)	-	5.186.959.870,00
DAK NON FISIK											
1	Bidang Pendidikan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	118.739.944,00	57.437.292.137,00	57.556.032.081,00	-	57.445.967.356,00	57.446.641.074,00	-	30.885.750,00	140.276.757,00
		DAK Non Fisik-BOS Kinerja	315.774,00	1.925.000.000,00	1.925.315.774,00	-	1.925.000.000,00	1.925.000.000,00	-	-	315.774,00
		DAK Non Fisik-TPG PNSD	3.746.842.300,00	123.205.562.000,00	126.952.404.300,00	123.118.908.500,00	-	123.118.908.500,00	-	-	3.833.495.800,00
		DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.808.250.000,00	3.979.500.000,00	5.787.750.000,00	4.393.000.000,00	-	4.393.000.000,00	-	-	1.394.750.000,00

		DAK Non Fisik-BOSP PAUD Reguler	742.532.490,00	4.209.897.000,00	4.952.429.490,00	-	4.209.897.000,00	4.209.897.000,00	-	-	742.532.490,00
		DAK Non Fisik-BOSP PAUD Kinerja	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-
2	Bidang Kesehatan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenitaraan	688.454.100,00	1.126.600.000,00	1.815.054.100,00	-	1.126.600.000,00	1.126.600.000,00	-	-	688.454.100,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.754.488.296,00	9.082.148.704,00	12.836.637.000,00	11.263.664.112,00	-	11.263.664.112,00	-	-	1.572.972.888,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.636.599.331,00	10.904.544.070,00	19.541.143.401,00	-	15.485.408.587,00	15.485.408.587,00	-	-	4.055.734.814,00
		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	200.305.400,00	4.852.673.600,00	5.052.979.000,00	5.004.520.980,00	-	5.004.520.980,00	-	-	48.458.020,00
		DAK Non Fisik-BOKT	2.308.000,00	-	2.308.000,00	-	-	-	-	-	2.308.000,00
3	Bidang P2UKM	DAK Non Fisik-PK2UKM	8.905.700,00	529.902.300,00	538.808.000,00	517.720,00	-	517.720,00	(517.202.280,00)	-	21.088.000,00
4	Bidang Pariwisata	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	5.469.472,00	1.233.272.528,00	1.238.742.000,00	1.028.869.400,00	-	1.028.869.400,00	-	-	209.872.600,00
5	Bidang Penanaman Modal	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	8.819.500,00	816.037.500,00	824.857.000,00	777.085.525,00	-	777.085.525,00	-	-	47.771.475,00
6	Bidang Pariwisata	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.276.010,00	602.373.990,00	608.650.000,00	599.999.526,00	-	599.999.526,00	-	-	8.650.474,00
7	Bidang Kependudukan	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	95.186,00	-	95.186,00	-	-	-	-	-	95.186,00
		Jumlah DAK Non Fisik	19.728.401.503,00	219.994.803.829,00	239.723.205.332,00	146.186.565.763,00	80.282.872.943,00	226.470.112.424,00	(517.202.280,00)	30.885.750,00	12.766.776.378,00
		Total DAK	30.741.075.333,00	273.618.314.423,00	304.359.389.756,00	199.427.419.602,00	80.282.872.943,00	279.710.292.545,00	359.993.165.488,00	639.703.458.033,00	17.953.736.248,00
											-
	Diluar DAK										-
1		DAU Bidang Pendidikan	6.574.896.490,00	66.069.660.000,00	72.644.556.490,00	68.554.748.300,00	-	68.554.748.300,00	-	-	4.089.808.190,00
2		DAU Bidang Kesehatan	2.031.564.965,00	38.665.531.000,00	40.697.095.965,00	39.077.030.783,00	-	39.077.030.783,00	-	-	1.620.065.182,00
3		DAU Bidang Pekerjaan Umum	3.321.324.408,00	43.720.571.000,00	47.041.895.408,00	47.041.895.408,00	-	47.041.895.408,00	-	-	-
4		DAU PPPK	62.533.421.724,00	4.982.866.956,00	67.516.288.680,00	67.516.288.680,00	-	67.516.288.680,00	-	-	-
		Silpa DAU TPG/THR	-	20.959.053.000,00	20.959.053.000,00	-	-	-	-	-	20.959.053.000,00
5		DBH Sawit	-	10.635.589.000,00	10.635.589.000,00	10.049.240.016,00	-	10.049.240.016,00	-	-	586.348.984,00
6		Silpa Dana BNPB	14.952.850.841,00	-	14.952.850.841,00	9.842.865.555,00	-	9.842.865.555,00	-	-	5.109.985.286,00
7		Silpa Dana Transfer Kenaagari	1.944.559.317,80	63.193.424.237,00	65.137.983.554,80	63.894.919.559,80	-	63.894.919.559,80	-	-	1.243.063.995,00
8		Silpa Insentif Fiskal dan DID Tambahan	817.561.607,00	27.827.229.000,00	28.644.790.607,00	27.597.158.717,00	-	27.597.158.717,00	-	-	1.047.631.890,00
9		Silpa BLUD	6.651.567.236,50	64.214.808.035,00	70.866.375.271,50	-	63.562.018.162,00	63.562.018.162,00	-	-	7.304.357.109,50
		Total Diluar DAK	98.827.746.589,30	340.268.732.228,00	439.096.478.817,30	333.574.147.018,80	63.562.018.162,00	397.136.165.180,80	-	-	41.960.313.636,50
		Total Silpa	129.568.821.922,30	613.887.046.651,00	743.455.868.573,30	533.001.566.620,80	143.844.891.105,00	676.846.457.725,80	-	-	59.914.049.884,50



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PMDA KAB. PADANG PARIAMAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN TAHUNAN 2024

NO	JENIS / BIDANG / SUBBIDANG	PAOU	NILAI KONTRAK	PENYALURAN	REALISASI PENYERAPAN	PENYERAPAN DANA	TEMAGA KERJA	SISA DANA DI RKUD	CAPAIAN OUTPUT
1	DAK Risk Pengusiran								
1	Pendidikan								
	PAUD	274.788.000	227.307.180	227.307.180	227.304.830	100.00%	10	2.350	100.00%
	SD	2.797.887.000	2.383.451.855	2.383.451.855	2.028.481.450	85.83%	31	934.870.205	90.14%
	SMP	2.552.327.000	2.410.415.420	2.410.415.420	2.410.404.520	100.00%	11	11.800	95.46%
2	Kesehatan dan KB								
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	1.493.708.000	1.376.487.739	1.376.487.739	1.361.487.739	98.18%	0	25.000.000	100.00%
	Penguatan Sistem Kesehatan	6.067.501.000	5.799.319.300	5.799.319.300	5.799.319.300	100.00%	0	0	100.00%
	Keluarga Berencana	1.059.434.000	973.914.000	973.914.000	973.900.000	100.00%	0	14.000	100.00%
3	Jalan								
	Jalan	9.036.428.000	8.757.729.900	8.757.729.900	8.757.729.900	100.00%	25	0	100.00%
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	8.528.929.000	8.237.154.000	8.237.154.000	8.237.154.000	100.00%	25	0	100.00%
	Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	11.865.888.000	11.476.339.528	11.476.339.528	11.476.339.528	100.00%	25	0	100.00%
4	Irigasi								
	Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	4.120.301.000	3.001.269.300	3.001.269.300	3.001.179.300	100.00%	50	90.000	100.00%
5	Pertanian								
	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	7.245.536.000	7.002.900.000	7.002.900.000	7.001.472.600	99.98%	725	1.427.400	99.98%
6	Pariwisata								
	Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	2.447.480.000	1.997.222.572	1.997.222.572	1.976.081.572	98.94%	43	21.141.000	100.00%
	Grand Total	67.490.986.000	63.623.510.584	63.623.510.584	63.246.853.830	99.39%	940	982.688.705	

Berita Acara Rekonsiliasi Sisa DAK Fisik s.d. TA 2023
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Pada hari Selasa Tanggal Dua puluh sembilan Bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : TASJUM LETER, SE, Ak
 NIP : 19700715 200212 1 011
 Jabatan : Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman
2. **Nama** : HENDRA ASWARA, S.STP, MM, CGCAE
 NIP : 19810926 199312 1 001
 Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman
3. **Nama** : JOKO SUPRIYANTO, S.ST, Ak, M.Ak
 NIP : 197603071990031001
 Jabatan : Kepala KPPN Padang

Telah melaksanakan rekonsiliasi sisa DAK Fisik dan penggunaan sisa DAK Fisik s.d. TA 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Bagian A. Data Sisa DAK Fisik dan Penggunaannya berdasarkan OMSPAN

Bagian A. Data Sisa DAK Fisik dan Penggunaannya berdasarkan OMSPAN				
NO	Bidang DAK Fisik	Sisa dan Penggunaan Berdasarkan OMSPAN		
		Sisa DAK	Penggunaan	Saldo Sisa DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1	BIDANG PEMERINTAHAN	5.039.647,508	-	5.039.647,508
2	BIDANG KESEHATAN DAN EB	4.618.549,007	-	4.618.549,007
3	BIDANG SANITASI	154.946,700	-	154.946,700
4	BIDANG JALAN	747.584,891	-	747.584,891
5	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	4.308.808,074	-	4.308.808,074
6	BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN-GABUNGAN	49.643,000	-	49.643,000

No	Bidang DAK Fisik	Sisa dan Penggunaan Berdasarkan OMSPAN		
		Sisa DAK	Penggunaan	Saldo Sisa DAK
10	10	10	10	10
7	BIDANG PERTANIAN	14.087.000		14.087.000
8	BIDANG PERAGAN	125.803.572	-	125.803.572
9	BIDANG PERTANIAN	68.997.700	-	68.997.700
10	BIDANG RELATIF DAN PERAGAN	18.400.000	-	18.400.000
11	BIDANG PERAGAN	3.615.000	-	3.615.000
TOTAL		14.087.000	-	14.087.000

Bagian B. Rekapitulasi Penggunaan Sisa DAK Fisik yang belum dilaporkan dalam OMSPAN

No	Bidang Penggunaan	Nilai Penggunaan
1	BIDANG PERTANIAN dan PERAGAN	1.107.000.448
2	BIDANG PERAGAN	1.44.800.700
3	BIDANG PERAGAN	747.995.000
4	BIDANG INDUSTRI, KECIL DAN MENENGAH	4.278.332.124
5	BIDANG PERAGAN	79.000.000
TOTAL		8.657.998.272

No		Bidang DAK Fisik	Sisa dan Penggunaan Berdasarkan OMSPM					
			Sisa DAK	Penggunaan		Saldo Sisa DAK		
01		02	03	04		05+06+07		
Bagian C. Saldo Akhir Sisa DAK Fisik s.d. TA 2023								
NO		Bidang	Saldo Sisa DAK (OMSPM)	Koreksi Saldo Sisa DAK		Saldo Sisa DAK Setelah Koreksi	Nilai Penggunaan yang belum dikam	Saldo Akhir Sisa DAK s.d TA 2023
				Pencadangan	Pengurangan			
01		02	03	04	05	06+07+08+09	10+11	12+13+14
1		BIDANG PERDOKAN	3.039.040,568			3.439.040,568		3.039.040,568
2		BIDANG KESEHATAN DAN KE	4.618.569,037			4.618.569,037	3.347.202,448	3.471.366,589
3		BIDANG SARITASI	114.346,700			114.346,700	144.200,700	9.700,000
4		BIDANG JALAN	747.084,033			747.084,033	747.084,033	
5		BIDANG INDUSTRI, EDCI DAN MENENGM	4.320.808,074			4.320.808,074	4.178.323,134	112.484,940
6		BIDANG PERUMAHAN DAN PERKOTAAN-CADANGAN	49.640,000			49.640,000		49.640,000
7		BIDANG AIR MINUM	14.087,000			14.087,000		14.087,000
8		BIDANG IRIGASI	121.421,572			121.421,572	79.900,772	41.520,800
9		BIDANG PERTANIAN	68.907,700			68.907,700		68.907,700
10		BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.440,850			14.440,850		14.440,850
11		BIDANG PERWISATA, CADANGAN	2.625,088			2.625,088		2.625,088
TOTAL			11.130.876,196			11.130.876,196	4.297.375,973	6.833.500,223

Keterangan:

01 : nomor urut

02 : Bidang DAK Fisik yang memiliki sisa DAK

03 : nilai sisa DAK Fisik berdasarkan aplikasi OMSPM

04 : penggunaan sisa DAK Fisik berdasarkan aplikasi OMSPM

05 : saldo sisa DAK Fisik berdasarkan aplikasi OMSPM

06 : bidang penggunaan sisa DAK Fisik

[illegible]

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul, 10 Januari 2017.



DAK FISIK TAHUN 2024
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	BIDANG	SUB BIDANG	SISA 2023	TOTAL SALUR 2024	TOTAL REALISASI 2024	Pembayaran utang Tahun 2023 yang bersumber dari DAK tahun 2024	SISA 2024	Sisa 2023	Total Silpa
1	Pendidikan	PAUD		227.307.180,00	227.304.830,00		2.350,00	-	2.350,00
		SD		2.363.451.655,00	2.028.481.450,00		334.970.205,00	-	334.970.205,00
		SMP		2.410.416.420,00	2.410.404.620,00		11.800,00	-	11.800,00
		Sisa 2023	1.039.047.568					1.039.047.568,00	1.039.047.568,00
	Total Silpa Bidang pendidikan		1.039.047.568				1.039.047.568,00	1.039.047.568,00	1.374.031.923,00
2	Bidaang Kesehatan dan KB	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting		1.376.487.739,00	1.351.487.739,00		25.000.000,00	-	25.000.000,00
		Penguatan Sistem Kesehatan		5.799.319.300,00	5.799.319.300,00		-	-	-
		Keluarga Berencana		973.914.000,00	973.900.000,00		14.000,00	-	14.000,00
		Sisa Tahun 2023	3.471.508.559				3.471.508.559,00	3.471.508.559,00	3.471.508.559,00
	Total Bidang kesehatan						-	3.471.508.559,00	3.496.522.559,00
3	Sanitasi		9.750.000				9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00
4	Jalan	Jalan		8.757.729.900,00	8.757.729.900,00		-	-	-
		Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas		8.237.154.000,00	8.237.154.000,00		-	-	-
		Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)		11.476.339.528,00	11.476.339.528,00		-	-	-
		Total Bidang jalan					-	-	-
5	Bidang Industri Menengah		122.484.950				122.484.950,00	122.484.950,00	122.484.950,00
6	Bidang Perumahan dan Pemukiman -Cadangan		49.642.000				49.642.000,00	49.642.000,00	49.642.000,00
7	Bidang Air Minum		14.087.000				14.087.000,00	14.087.000,00	14.087.000,00
8	Irigasi	Irigasi - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	41.726.800	3.001.268.300,00	3.001.178.300,00		41.816.800,00	41.726.800,00	41.816.800,00
9	Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian,Perikanan, dan Hewani)	68.997.700	7.002.900.000,00	7.001.472.600,00	30.000.000,00	70.425.100,00	38.997.700,00	40.425.100,00
10	Kelautan dan Perikanan		14.443.450				14.443.450,00	14.443.450,00	14.443.450,00
11	Pariwisata	Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	2.615.088	1.997.222.572,00	1.976.081.572,00		23.756.088,00	2.615.088,00	23.756.088,00
			5.873.350.683	53.623.510.594,00	53.240.253.839,00	53.240.253.840,00	6.256.607.438,00	4.804.303.115,00	5.186.959.870,00

Kas di Kas Daerah	Rp	28.984.627.889,04
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	35.236.512,00
Kas BLUD	Rp	7.304.357.109,50
Kas Bos	Rp	140.592.531,00
Kas BOK	Rp	4.055.734.413,00
Utang PFK	Rp	-20.000,00
JUMLAH	Rp	40.520.528.454,54
silpa seharusnya	Rp	59.914.049.884,50
Silpa DAU TPP/THR yang terpakai	Rp	19.393.521.429,96

**SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2024
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
1	SDN 01 2X11 ENAM LINGKUNG	629.112,00	464.922,00	164.190,00
2	SDN 02 2X11 ENAM LINGKUNG	60.629,00	60.629,00	-
3	SDN 03 2X11 ENAM LINGKUNG	121.431,00	121.431,00	-
4	SDN 04 2X11 ENAM LINGKUNG	4.605,00	-	4.605,00
5	SDN 05 2X11 ENAM LINGKUNG	10.307,00	10.307,00	-
6	SDN 06 2X11 ENAM LINGKUNG	694.281,00	200.617,00	493.664,00
7	SDN 07 2X11 ENAM LINGKUNG	16.061,00	16.061,00	-
8	SDN 08 2X11 ENAM LINGKUNG	8.743,00	8.743,00	-
9	SDN 09 2X11 ENAM LINGKUNG	7.500,00	-	7.500,00
10	SDN 10 2X11 ENAM LINGKUNG	48.978,00	47.748,00	1.230,00
11	SDN 11 2X11 ENAM LINGKUNG	-	-	-
12	SDN 12 2X11 ENAM LINGKUNG	10.605,00	10.605,00	-
13	SDN 13 2X11 ENAM LINGKUNG	789.595,00	96.595,00	693.000,00
14	SD N 01 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
15	SD N 02 2X11 KAYUTANAM	264.113,00	25.865,00	238.248,00
16	SD N 03 2X11 KAYUTANAM	236,00	-	236,00
17	SD N 04 2X11 KAYUTANAM	3.260,00	-	3.260,00
18	SD N 05 2X11 KAYUTANAM	65.830,00	65.830,00	-
19	SD N 06 2X11 KAYUTANAM	34.926,00	34.917,00	9,00
20	SD N 07 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
21	SD N 08 2X11 KAYUTANAM	123.989,00	123.989,00	-
22	SD N 09 1X11 KAYUTANAM	13.604,00	13.604,00	-
23	SD N 10 2X11 KAYUTANAM	135.477,00	133.077,00	2.400,00
24	SD N 11 2X11 KAYUTANAM	482.740,00	293.900,00	188.840,00
25	SD N 12 2X11 KAYUTANAM	12.672,00	12.672,00	-
26	SD N 13 2X11 KAYUTANAM	-	-	-
27	SD N 14 2X11 KAYUTANAM	9.111,00	8.311,00	800,00
28	SD N 15 2X11 KAYUTANAM	651.150,00	651.150,00	-
29	SD N 16 2X11 KAYUTANAM	7.619,00	7.619,00	-
30	SD N 17 2X11 KAYUTANAM	542,00	542,00	-
31	SD N 18 2X11 KAYUTANAM	13.527,00	13.527,00	-
32	SD N 01 BATANG ANAI	100.164,00	-	100.164,00
33	SD N 02 BATANG ANAI	815,00	815,00	-
34	SD N 03 BATANG ANAI	264.823,00	-	264.823,00
35	SD N 04 BATANG ANAI	49.790,00	-	49.790,00

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
36	SD N 05 BATANG ANAI	-	-	-
37	SD N 06 BATANG ANAI	33.523,00	33.523,00	-
38	SD N 07 BATANG ANAI	241.017,00	517,00	240.500,00
39	SD N 08 BATANG ANAI	60.450,00	66,00	60.384,00
40	SD N 09 BATANG ANAI	281.871,00	243.000,00	38.871,00
41	SD N 10 BATANG ANAI	937.658,00	937.658,00	-
42	SD N 11 BATANG ANAI	155.621,00	155.621,00	-
43	SD N 12 BATANG ANAI	226.007,00	120.000,00	106.007,00
44	SD N 13 BATANG ANAI	19.199,00	-	19.199,00
45	SD N 14 BATANG ANAI	122.784,00	61.736,00	61.048,00
46	SD N 15 BATANG ANAI	25.586,00	-	25.586,00
47	SD N 16 BATANG ANAI	2.314.913,00	17.413,00	2.297.500,00
48	SD N 17 BATANG ANAI	2.342.500,00	-	2.342.500,00
49	SD N 18 BATANG ANAI	55.580,00	55.580,00	-
50	SD N 19 BATANG ANAI	578.882,00	-	578.882,00
51	SD N 20 BATANG ANAI	444.732,00	158.000,00	286.732,00
52	SD N 21 BATANG ANAI	1.116.719,00	1.116.719,00	-
53	SD N 22 BATANG ANAI	101.258,00	101.258,00	-
54	SD N 23 BATANG ANAI	30.654,00	30.654,00	-
55	SD N 24 BATANG ANAI	53.983,00	53.983,00	-
56	SD N 25 BATANG ANAI	2.497.463,00	963,00	2.496.500,00
57	SD N 26 BATANG ANAI	115,00	-	115,00
58	SD N 27 BATANG ANAI	21.030,00	21.030,00	-
59	SD N 28 BATANG ANAI	77.680,00	76.290,00	1.390,00
60	SD N 29 BATANG ANAI	143.728,00	38.985,00	104.743,00
61	SD N 30 BATANG ANAI	62.571,00	-	62.571,00
62	SD N 01 BATANG GASAN	45.592,00	45.592,00	-
63	SD N 02 BATANG GASAN	1.114,00	-	1.114,00
64	SD N 03 BATANG GASAN	-	-	-
65	SD N 04 BATANG GASAN	586.649,00	-	586.649,00
66	SD N 05 BATANG GASAN	156.359,00	56.359,00	100.000,00
67	SD N 06 BATANG GASAN	49.648,00	16.542,00	33.106,00
68	SD N 07 BATANG GASAN	351.491,00	265.609,00	85.882,00
69	SD N 08 BATANG GASAN	67.031,00	67.031,00	-
70	SD N 09 BATANG GASAN	35.161,00	35.161,00	-
71	SD N 10 BATANG GASAN	78.734,00	78.734,00	-
72	SD N 11 BATANG GASAN	50.000,00	50.000,00	-

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
73	SD N 12 BATANG GASAN	-	-	-
74	SD N 13 BATANG GASAN	150.044,00	110.044,00	40.000,00
75	SD N 14 BATANG GASAN	102.960,00	102.960,00	-
76	SD N 15 BATANG GASAN	69.754,00	-	69.754,00
77	SD N 16 BATANG GASAN	62.834,00	15.834,00	47.000,00
78	SD N 17 BATANG GASAN	5.280,00	-	5.280,00
79	SD N 18 BATANG GASAN	136.778,00	-	136.778,00
80	SD N 19 BATANG GASAN	2.000,00	2.000,00	-
81	SD N 01 ENAM LINGKUNG	269.012,00	266.012,00	3.000,00
82	SD N 02 ENAM LINGKUNG	30.731,00	-	30.731,00
83	SD N 03 ENAM LINGKUNG	18.279,00	-	18.279,00
84	SD N 04 ENAM LINGKUNG	1.675,00	1.675,00	-
85	SD N 05 ENAM LINGKUNG	223.028,00	223.028,00	-
86	SD N 06 ENAM LINGKUNG	-	-	-
87	SD N 07 ENAM LINGKUNG	222.064,00	124.364,00	97.700,00
88	SD N 08 ENAM LINGKUNG	16.365,00	16.365,00	-
89	SD N 09 ENAM LINGKUNG	240.522,00	240.522,00	-
90	SD N 10 ENAM LINGKUNG	53.703,00	50.072,00	3.631,00
91	SD N 11 ENAM LINGKUNG	64.554,00	64.554,00	-
92	SD N 12 ENAM LINGKUNG	531,00	-	531,00
93	SD N 13 ENAM LINGKUNG	3.535,00	3.535,00	-
94	SD N 14 ENAM LINGKUNG	79.007,00	-	79.007,00
95	SD N 15 ENAM LINGKUNG	242,00	121,00	121,00
96	SD N 16 ENAM LINGKUNG	591.757,00	-	591.757,00
97	SD N 17 ENAM LINGKUNG	18.856,00	18.856,00	-
98	SD N 18 ENAM LINGKUNG	167.646,00	167.646,00	-
99	SD N 19 ENAM LINGKUNG	117.070,00	117.070,00	-
100	SD N 01 IV KOTO AUR MALINTANG	91.824,00	91.824,00	-
101	SD N 02 IV KOTO AUR MALINTANG	93.887,00	68.006,00	25.881,00
102	SD N 03 IV KOTO AUR MALINTANG	130.664,00	130.664,00	-
103	SD N 04 IV KOTO AUR MALINTANG	18.958,00	-	18.958,00
104	SD N 05 IV KOTO AUR MALINTANG	5.413,00	273,00	5.140,00
105	SD N 06 IV KOTO AUR MALINTANG	462,00	462,00	-
106	SD N 07 IV KOTO AUR MALINTANG	529,00	529,00	-
107	SD N 08 IV KOTO AUR MALINTANG	423.449,00	344.649,00	78.800,00
108	SD N 09 IV KOTO AUR MALINTANG	180.852,00	180.852,00	-
109	SD N 10 IV KOTO AUR MALINTANG	407.863,00	407.863,00	-

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
110	SD N 11 IV KOTO AUR MALINTANG	328.168,00	328.168,00	-
111	SD N 12 IV KOTO AUR MALINTANG	356.016,00	1.570,00	354.446,00
112	SD N 13 IV KOTO AUR MALINTANG	603,00	603,00	-
113	SD N 14 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
114	SD N 15 IV KOTO AUR MALINTANG	1.915.628,00	428,00	1.915.200,00
115	SD N 16 IV KOTO AUR MALINTANG	17.052,00	17.052,00	-
116	SD N 17 IV KOTO AUR MALINTANG	732,00	732,00	-
117	SD N 18 IV KOTO AUR MALINTANG	410.370,00	410.370,00	-
118	SD N 19 IV KOTO AUR MALINTANG	657.602,00	657.602,00	-
119	SD N 20 IV KOTO AUR MALINTANG	134.483,00	134.483,00	-
120	SD N 21 IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-
121	SD N 22 IV KOTO AUR MALINTANG	16.157,00	16.157,00	-
122	SD N 23 IV KOTO AUR MALINTANG	117.262,00	97.306,00	19.956,00
123	SD N 24 IV KOTO AUR MALINTANG	1.844.326,00	308,00	1.844.018,00
124	SD N 01 LUBUK ALUNG	844.714,00	-	844.714,00
125	SD N 02 LUBUK ALUNG	404.520,00	1.978,00	402.542,00
126	SD N 03 LUBUK ALUNG	13.862,00	-	13.862,00
127	SD N 04 LUBUK ALUNG	851,00	-	851,00
128	SD N 05 LUBUK ALUNG	-	-	-
129	SD N 06 LUBUK ALUNG	18.159,00	18.159,00	-
130	SD N 07 LUBUK ALUNG	111.300,00	39.400,00	71.900,00
131	SD N 08 LUBUK ALUNG	1.712.658,00	1.712.658,00	-
132	SD N 09 LUBUK ALUNG	10.675,00	575,00	10.100,00
133	SDN 10 LUBUK ALUNG	18.657,00	18.657,00	-
134	SD N 11 LUBUK ALUNG	16.523,00	16.523,00	-
135	SD N 12 LUBUK ALUNG	-	-	-
136	SD N 13 LUBUK ALUNG	99.040,00	92.531,00	6.509,00
137	SD N 14 LUBUK ALUNG	60.428,00	60.428,00	-
138	SD N 15 LUBUK ALUNG	513.732,00	58.232,00	455.500,00
139	SD N 16 LUBUK ALUNG	1.572,00	1.572,00	-
140	SD N 17 LUBUK ALUNG	153.753,00	3.391,00	150.362,00
141	SD N 18 LUBUK ALUNG	340.000,00	340.000,00	-
142	SD N 19 LUBUK ALUNG	1.774,00	1.774,00	-
143	SD N 20 LUBUK ALUNG	182.665,00	182.665,00	-
144	SD N 21 LUBUK ALUNG	464.499,00	-	464.499,00
145	SD N 22 LUBUK ALUNG	22.599,00	22.599,00	-
146	SD N 23 LUBUK ALUNG	103.278,00	103.278,00	-

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
147	SD N 24 LUBUK ALUNG	-	-	-
148	SD N 25 LUBUK ALUNG	138.599,00	138.599,00	-
149	SD N 26 LUBUK ALUNG	133.500,00	133.500,00	-
150	SD N 27 LUBUK ALUNG	49.736,00	49.736,00	-
151	SD N 28 LUBUK ALUNG	425.431,00	425.431,00	-
152	SD N 29 LUBUK ALUNG	-	-	-
153	SD N 30 LUBUK ALUNG	-	-	-
154	SD N 31 LUBUK ALUNG	128.374,00	128.374,00	-
155	SD N 32 LUBUK ALUNG	57.725,00	-	57.725,00
156	SD N 33 LUBUK ALUNG	516,00	516,00	-
157	SD N 34 LUBUK ALUNG	36.729,00	36.729,00	-
158	SD N 01 NAN SABARIS	64.821,00	64.821,00	-
159	SD N 02 NAN SABARIS	11.186,00	11.186,00	-
160	SD N 03 NAN SABARIS	114.510,00	114.510,00	-
161	SD N 04 NAN SABARIS	191.106,00	191.106,00	-
162	SD N 05 NAN SABARIS	61.861,00	43.861,00	18.000,00
163	SD N 06 NAN SABARIS	114.784,00	77.144,00	37.640,00
164	SD N 07 NAN SABARIS	239.808,00	20.697,00	219.111,00
165	SD N 08 NAN SABARIS	182.829,00	20.000,00	162.829,00
166	SD N 09 NAN SABARIS	154.674,00	154.674,00	-
167	SD N 10 NAN SABARIS	236.919,00	13.422,00	223.497,00
168	SD N 11 NAN SABARIS	79.359,00	79.359,00	-
169	SD N 12 NAN SABARIS	119.284,00	19.284,00	100.000,00
170	SD N 13 NAN SABARIS	225.524,00	23.024,00	202.500,00
171	SD N 14 NAN SABARIS	79.822,00	79.822,00	-
172	SD N 15 NAN SABARIS	121.887,00	-	121.887,00
173	SD N 16 NAN SABARIS	745.662,00	662,00	745.000,00
174	SD N 17 NAN SABARIS	-	-	-
175	SD N 18 NAN SABARIS	18.011,00	18.011,00	-
176	SD N 19 NAN SABARIS	60.261,00	60.261,00	-
177	SD N 20 NAN SABARIS	177.252,00	88.376,00	88.876,00
178	SD N 21 NAN SABARIS	28.206,00	28.206,00	-
179	SD N 22 NAN SABARIS	128.423,00	246,00	128.177,00
180	SD N 23 NAN SABARIS	-	-	-
181	SD N 01 PADANG SAGO	1.015,00	1.015,00	-
182	SD N 02 PADANG SAGO	69.933,00	-	69.933,00
183	SD N 03 PADANG SAGO	39.306,00	39.306,00	-

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
184	SD N 04 PADANG SAGO	599,00	599,00	-
185	SD N 05 PADANG SAGO	-	-	-
186	SD N 06 PADANG SAGO	5.016.568,00	68,00	5.016.500,00
187	SD N 07 PADANG SAGO	95.773,00	-	95.773,00
188	SD N 08 PADANG SAGO	1.919.871,00	-	1.919.871,00
189	SD N 09 PADANG SAGO	42.281,00	470,00	41.811,00
190	SD N 10 PADANG SAGO	92.622,00	92.622,00	-
191	SD N 11 PADANG SAGO	214.323,00	214.323,00	-
192	SDN 01 PATAMUAN	67.083,00	66.508,00	575,00
193	SDN 02 PATAMUAN	1.357.951,00	-	1.357.951,00
194	SDN 03 PATAMUAN	3.460.828,00	-	3.460.828,00
195	SDN 04 PATAMUAN	236.904,00	151.904,00	85.000,00
196	SDN 05 PATAMUAN	272.810,00	272.810,00	-
197	SDN 06 PATAMUAN	146.349,00	146.349,00	-
198	SDN 07 PATAMUAN	56.972,00	56.890,00	82,00
199	SDN 08 PATAMUAN	136.729,00	136.729,00	-
200	SDN 09 PATAMUAN	670.047,00	-	670.047,00
201	SDN 10 PATAMUAN	215.074,00	151.705,00	63.369,00
202	SDN 11 PATAMUAN	13.310,00	810,00	12.500,00
203	SDN 12 PATAMUAN	1.113.391,00	1.113.391,00	-
204	SDN 13 PATAMUAN	39.092,00	-	39.092,00
205	SDN 14 PATAMUAN	52.972,00	52.972,00	-
206	SDN 15 PATAMUAN	4.458,00	-	4.458,00
207	SD N 01 V KOTO KAMPUNG DALAM	390.752,00	39.942,00	350.810,00
208	SD N 02 V KOTO KAMPUNG DALAM	213.536,00	200.536,00	13.000,00
209	SD N 03 V KOTO KAMPUNG DALAM	141.351,00	141.351,00	-
210	SD N 04 V KOTO KAMPUNG DALAM	728.864,00	-	728.864,00
211	SD N 05 V KOTO KAMPUNG DALAM	198.562,00	179.318,00	19.244,00
212	SD N 06 V KOTO KAMPUNG DALAM	21.097,00	-	21.097,00
213	SD N 07 V KOTO KAMPUNG DALAM	79.056,00	4.656,00	74.400,00
214	SD N 08 V KOTO KAMPUNG DALAM	75.484,00	75.484,00	-
215	SD N 09 V KOTO KAMPUNG DALAM	127.426,00	86.769,00	40.657,00
216	SD N 10 V KOTO KAMPUNG DALAM	38.951,00	38.951,00	-
217	SD N 11 V KOTO KAMPUNG DALAM	96.139,00	96.139,00	-
218	SD N 12 V KOTO KAMPUNG DALAM	145.938,00	145.938,00	-
219	SD N 13 V KOTO KAMPUNG DALAM	105.354,00	105.354,00	-
220	SD N 14 V KOTO KAMPUNG DALAM	101.325,00	101.325,00	-

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
221	SD N 15 V KOTO KAMPUNG DALAM	182.526,00	54.626,00	127.900,00
222	SD N 16 V KOTO KAMPUNG DALAM	285.227,00	285.227,00	-
223	SD N 17 V KOTO KAMPUNG DALAM	157.641,00	157.641,00	-
224	SD N 18 V KOTO KAMPUNG DALAM	110.497,00	110.497,00	-
225	SD N 19 V KOTO KAMPUNG DALAM	79.933,00	79.933,00	-
226	SD N 20 V KOTO KAMPUNG DALAM	150.601,00	150.601,00	-
227	SD N 21 V KOTO KAMPUNG DALAM	160.818,00	158.103,00	2.715,00
228	SD N 22 V KOTO KAMPUNG DALAM	49.116,00	-	49.116,00
229	SD N 23 V KOTO KAMPUNG DALAM	41.845,00	41.845,00	-
230	SD N 24 V KOTO KAMPUNG DALAM	149.126,00	148.626,00	500,00
231	SD N 25 V KOTO KAMPUNG DALAM	7.357,00	7.357,00	-
232	SD N 26 V KOTO KAMPUNG DALAM	77.346,00	77.346,00	-
233	SD N 27 V KOTO KAMPUNG DALAM	118.600,00	118.600,00	-
234	SD N 28 V KOTO KAMPUNG DALAM	134.195,00	134.195,00	-
235	SD N 29 V KOTO KAMPUNG DALAM	2.635,00	-	2.635,00
236	SD N 30 V KOTO KAMPUNG DALAM	24.854,00	24.854,00	-
237	SD N 01 SINTUK TOBOH GADANG	241.266,00	241.266,00	-
238	SD N 02 SINTUK TOBOH GADANG	19.097,00	19.097,00	-
239	SD N 03 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
240	SD N 04 SINTUK TOBOH GADANG	16.692,00	16.597,00	95,00
241	SD N 05 SINTUK TOBOH GADANG	15.987,00	15.987,00	-
242	SD N 06 SINTUK TOBOH GADANG	458.588,00	458.588,00	-
243	SD N 07 SINTUK TOBOH GADANG	97.926,00	97.926,00	-
244	SD N 08 SINTUK TOBOH GADANG	31.359,00	31.359,00	-
245	SD N 09 SINTUK TOBOH GADANG	115.233,00	95.742,00	19.491,00
246	SD N 10 SINTUK TOBOH GADANG	11.131,00	11.131,00	-
247	SD N 11 SINTUK TOBOH GADANG	192.501,00	192.501,00	-
248	SD N 12 SINTUK TOBOH GADANG	9.945,00	9.945,00	-
249	SD N 13 SINTUK TOBOH GADANG	32.245,00	32.245,00	-
250	SD N 14 SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-
251	SD N 15 SINTUK TOBOH GADANG	10.000,00	-	10.000,00
252	SD N 16 SINTUK TOBOH GADANG	22.400,00	22.400,00	-
253	SD N 17 SINTUK TOBOH GADANG	2.191,00	2.191,00	-
254	SD N 01 SUNGAI GERINGGING	28.880,00	28.880,00	-
255	SD N 02 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
256	SD N 03 SUNGAI GERINGGING	18.094,00	18.006,00	88,00
257	SD N 04 SUNGAI GERINGGING	216.218,00	216.218,00	-

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
258	SD N 05 SUNGAI GERINGGING	32.780,00	32.780,00	-
259	SD N 06 SUNGAI GERINGGING	28.974,00	28.974,00	-
260	SD N 07 SUNGAI GERINGGING	117.175,00	116.255,00	920,00
261	SD N 08 SUNGAI GERINGGING	731.890,00	530.009,00	201.881,00
262	SD N 09 SUNGAI GERINGGING	41.066,00	468,00	40.598,00
263	SD N 10 SUNGAI GERINGGING	68.100,00	-	68.100,00
264	SD N 11 SUNGAI GERINGGING	46.269,00	-	46.269,00
265	SD N 12 SUNGAI GERINGGING	37.714,00	37.714,00	-
266	SD N 13 SUNGAI GERINGGING	357.009,00	357.009,00	-
267	SD N 14 SUNGAI GERINGGING	63.133,00	-	63.133,00
268	SD N 15 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
269	SD N 16 SUNGAI GERINGGING	47.830,00	47.830,00	-
270	SD N 17 SUNGAI GERINGGING	13.931.689,00	13.334.948,00	596.741,00
271	SD N 18 SUNGAI GERINGGING	100.583,00	-	100.583,00
272	SD N 19 SUNGAI GERINGGING	511,00	511,00	-
273	SD N 20 SUNGAI GERINGGING	20.962,00	20.962,00	-
274	SD N 21 SUNGAI GERINGGING	29.388,00	26.351,00	3.037,00
275	SD N 22 SUNGAI GERINGGING	94.789,00	94.789,00	-
276	SD N 23 SUNGAI GERINGGING	5.899,00	5.451,00	448,00
277	SD N 24 SUNGAI GERINGGING	129.397,00	110.692,00	18.705,00
278	SD N 25 SUNGAI GERINGGING	213.625,00	213.625,00	-
279	SD N 26 SUNGAI GERINGGING	94.204,00	94.204,00	-
280	SD N 27 SUNGAI GERINGGING	378.433,00	378.433,00	-
281	SD N 28 SUNGAI GERINGGING	151.678,00	151.678,00	-
282	SD N 29 SUNGAI GERINGGING	10.478,00	10.478,00	-
283	SD N 30 SUNGAI GERINGGING	12.374,00	-	12.374,00
284	SD N 01 SUNGAI LIMAU	29.424,00	-	29.424,00
285	SD N 02 SUNGAI LIMAU	502.949,00	402.948,00	100.001,00
286	SD N 03 SUNGAI LIMAU	93.563,00	93.563,00	-
287	SD N 04 SUNGAI LIMAU	7.630,00	-	7.630,00
288	SD N 05 SUNGAI LIMAU	162.234,00	162.234,00	-
289	SD N 06 SUNGAI LIMAU	1.392.479,00	42.479,00	1.350.000,00
290	SD N 07 SUNGAI LIMAU	57.454,00	57.454,00	-
291	SD N 08 SUNGAI LIMAU	74.234,00	74.234,00	-
292	SD N 09 SUNGAI LIMAU	17.874,00	17.874,00	-
293	SD N 10 SUNGAI LIMAU	90.578,00	35.578,00	55.000,00
294	SD N 11 SUNGAI LIMAU	81.616,00	-	81.616,00

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
295	SD N 12 SUNGAI LIMAU	21.631,00	-	21.631,00
296	SD N 13 SUNGAI LIMAU	128.281,00	128.281,00	-
297	SD N 14 SUNGAI LIMAU	1.670,00	-	1.670,00
298	SD N 15 SUNGAI LIMAU	19.063,00	19.063,00	-
299	SD N 16 SUNGAI LIMAU	-	-	-
300	SD N 17 SUNGAI LIMAU	5.789,00	5.789,00	-
301	SD N 18 SUNGAI LIMAU	1.026,00	1.026,00	-
302	SD N 19 SUNGAI LIMAU	201.380,00	-	201.380,00
303	SD N 20 SUNGAI LIMAU	2.895,00	-	2.895,00
304	SD N 21 SUNGAI LIMAU	40.729,00	29,00	40.700,00
305	SD N 22 SUNGAI LIMAU	149.271,00	149.271,00	-
306	SD N 23 SUNGAI LIMAU	33.079,00	33.079,00	-
307	SD N 24 SUNGAI LIMAU	73.495,00	73.495,00	-
308	SD N 25 SUNGAI LIMAU	39.484,00	39.484,00	-
309	SD N 26 SUNGAI LIMAU	58.305,00	58.305,00	-
310	SD N 27 SUNGAI LIMAU	1.321.363,00	23.863,00	1.297.500,00
311	SD N 28 SUNGAI LIMAU	8.220,00	8.220,00	-
312	SD N 29 SUNGAI LIMAU	-	-	-
313	SD N 30 SUNGAI LIMAU	18.528,00	18.528,00	-
314	SD N 31 SUNGAI LIMAU	277.683,00	140.923,00	136.760,00
315	SD N 32 SUNGAI LIMAU	25.446,00	-	25.446,00
316	SD N 33 SUNGAI LIMAU	29.552,00	29.552,00	-
317	SD N 34 SUNGAI LIMAU	247.192,00	179.192,00	68.000,00
318	SD N 35 SUNGAI LIMAU	4.413,00	4.413,00	-
319	SD N 36 SUNGAI LIMAU	210.829,00	210.829,00	-
320	SD N 37 SUNGAI LIMAU	8.461,00	8.461,00	-
321	SD N 38 SUNGAI LIMAU	9.780,00	9.780,00	-
322	SD N 39 SUNGAI LIMAU	316.434,00	316.434,00	-
323	SD N 40 SUNGAI LIMAU	17.010,00	17.010,00	-
324	SD N 41 SUNGAI LIMAU	90.074,00	90.074,00	-
325	SD N 01 ULAKAN TAPAKIS	65.557,00	65.557,00	-
326	SD N 02 ULAKAN TAPAKIS	155.836,00	-	155.836,00
327	SD N 03 ULAKAN TAPAKIS	81.358,00	81.358,00	-
328	SD N 04 ULAKAN TAPAKIS	701.359,00	701.359,00	-
329	SD N 05 ULAKAN TAPAKIS	103.121,00	103.121,00	-
330	SD N 06 ULAKAN TAPAKIS	36.305,00	-	36.305,00
331	SD N 07 ULAKAN TAPAKIS	16.252,00	-	16.252,00

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
332	SD N 08 ULAKAN TAPAKIS	182.992,00	120.053,00	62.939,00
333	SD N 09 ULAKAN TAPAKIS	70.614,00	64.114,00	6.500,00
334	SD N 10 ULAKAN TAPAKIS	131.176,00	114.644,00	16.532,00
335	SD N 11 ULAKAN TAPAKIS	-	-	-
336	SD N 12 ULAKAN TAPAKIS	246.059,00	246.059,00	-
337	SD N 13 ULAKAN TAPAKIS	184.832,00	-	184.832,00
338	SD N 14 ULAKAN TAPAKIS	160.269,00	160.269,00	-
339	SD N 15 ULAKAN TAPAKIS	26.151,00	26.151,00	-
340	SD N 16 ULAKAN TAPAKIS	1.014.904,00	614.904,00	400.000,00
341	SD N 17 ULAKAN TAPAKIS	54.000,00	-	54.000,00
342	SD N 01 V KOTO TIMUR	116.900,00	-	116.900,00
343	SD N 02 V KOTO TIMUR	101.028,00	-	101.028,00
344	SD N 03 V KOTO TIMUR	135.374,00	-	135.374,00
345	SD N 04 V KOTO TIMUR	105.405,00	-	105.405,00
346	SD N 05 V KOTO TIMUR	27.065,00	165,00	26.900,00
347	SD N 06 V KOTO TIMUR	65.319,00	-	65.319,00
348	SD N 07 V KOTO TIMUR	6.121,00	6.121,00	-
349	SD N 08 V KOTO TIMUR	24.255,00	24.245,00	10,00
350	SD N 09 V KOTO TIMUR	16.931,00	-	16.931,00
351	SD N 10 V KOTO TIMUR	114.799,00	114.799,00	-
352	SD N 11 V KOTO TIMUR	100.111,00	-	100.111,00
353	SD N 12 V KOTO TIMUR	4.433.381,00	330.081,00	4.103.300,00
354	SD N 13 V KOTO TIMUR	112.730,00	-	112.730,00
355	SD N 14 V KOTO TIMUR	-	-	-
356	SD N 15 V KOTO TIMUR	99.959,00	10.309,00	89.650,00
357	SD N 16 V KOTO TIMUR	-	-	-
358	SD N 17 V KOTO TIMUR	130.332,00	-	130.332,00
359	SD N 18 V KOTO TIMUR	-	-	-
360	SD N 19 V KOTO TIMUR	444.511,00	-	444.511,00
361	SD N 20 V KOTO TIMUR	395.436,00	-	395.436,00
362	SD N 21 V KOTO TIMUR	30.474,00	-	30.474,00
363	SD N 22 V KOTO TIMUR	1.987.297,00	-	1.987.297,00
364	SD N 23 V KOTO TIMUR	122.551,00	122.551,00	-
365	SD N 24 V KOTO TIMUR	6.500,00	-	6.500,00
366	SD N 01 VII KOTO SUNGAI SARIK	101.927,00	101.927,00	-
367	SD N 02 VII KOTO SUNGAI SARIK	108.117,00	108.117,00	-
368	SD N 03 VII KOTO SUNGAI SARIK	94.434,00	94.424,00	10,00

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
369	SD N 04 VII KOTO SUNGAI SARIK	283.929,00	283.929,00	-
370	SD N 05 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
371	SD N 06 VII KOTO SUNGAI SARIK	34.443,00	34.443,00	-
372	SD N 07 VII KOTO SUNGAI SARIK	982.875,00	982.875,00	-
373	SD N 08 VII KOTO SUNGAI SARIK	50.140,00	50.140,00	-
374	SD N 09 VII KOTO SUNGAI SARIK	363.368,00	363.350,00	18,00
375	SD N 10 VII KOTO SUNGAI SARIK	71.787,00	71.787,00	-
376	SD N 11 VII KOTO SUNGAI SARIK	505.316,00	68.216,00	437.100,00
377	SD N 12 VII KOTO SUNGAI SARIK	80.405,00	80.405,00	-
378	SD N 13 VII KOTO SUNGAI SARIK	36.849,00	36.849,00	-
379	SD N 14 VII KOTO SUNGAI SARIK	14.925,00	65,00	14.860,00
380	SD N 15 VII KOTO SUNGAI SARIK	36.473,00	36.473,00	-
381	SD N 16 VII KOTO SUNGAI SARIK	102.413,00	102.413,00	-
382	SD N 17 VII KOTO SUNGAI SARIK	191.512,00	191.512,00	-
383	SD N 18 VII KOTO SUNGAI SARIK	9.295,00	9.295,00	-
384	SD N 19 VII KOTO SUNGAI SARIK	43.733,00	43.733,00	-
385	SD N 20 VII KOTO SUNGAI SARIK	85.781,00	34.316,00	51.465,00
386	SD N 21 VII KOTO SUNGAI SARIK	53.097,00	-	53.097,00
387	SD N 22 VII KOTO SUNGAI SARIK	21.121,00	21.121,00	-
388	SD N 23 VII KOTO SUNGAI SARIK	143.671,00	143.671,00	-
389	SD N 24 VII KOTO SUNGAI SARIK	106.988,00	106.988,00	-
390	SD N 25 VII KOTO SUNGAI SARIK	85.636,00	-	85.636,00
391	SD N 26 VII KOTO SUNGAI SARIK	489.223,00	111.123,00	378.100,00
392	SD N 27 VII KOTO SUNGAI SARIK	62.745,00	62.745,00	-
393	SD N 28 VII KOTO SUNGAI SARIK	252.058,00	252.058,00	-
394	SD N 29 VII KOTO SUNGAI SARIK	23.365,00	23.365,00	-
395	SD N 30 VII KOTO SUNGAI SARIK	2.574,00	-	2.574,00
396	SD N 31 VII KOTO SUNGAI SARIK	33.124,00	-	33.124,00
397	SD N 32 VII KOTO SUNGAI SARIK	36.172,00	36.172,00	-
398	SD N 33 VII KOTO SUNGAI SARIK	71.555,00	-	71.555,00
399	SD N 34 VII KOTO SUNGAI SARIK	34.845,00	34.845,00	-
400	SD N 35 VII KOTO SUNGAI SARIK	94.234,00	94.234,00	-
401	SD UNGGUL TERPADU	176.190,00	-	176.190,00
JUMLAH SALDO BOS SD		97.406.941,00	46.676.877,00	50.730.064,00
402	SMPN 1 2 X 11 ENAM LINGKUNG	192.915,00	122.325,00	70.590,00
403	SMPN 2 2 X 11 ENAM LINGKUNG	77.396,00	77.220,00	176,00
404	SMPN 1 ENAM LINGKUNG	128.027,00	-	128.027,00

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
405	SMPN 2 ENAM LINGKUNG	141.923,00	141.923,00	-
406	SMPN 1 2 X 11 KAYU TANAM	17.500,00	17.500,00	-
407	SMPN 2 2 X 11 KAYU TANAM	684.680,00	339.212,00	345.468,00
408	SMPN 3 2 X 11 KAYU TANAM	97.349,00	97.349,00	-
409	SMPN 4 2 X 11 KAYU TANAM	2.196,00	2.196,00	-
410	SMPN 1 LUBUK ALUNG	79.761,00	-	79.761,00
411	SMPN 2 LUBUK ALUNG	32.501,00	32.501,00	-
412	SMPN 3 LUBUK ALUNG	198.583,00	63,00	198.520,00
413	SMPN 4 LUBUK ALUNG	388.385,00	388.385,00	-
414	SMPN 5 LUBUK ALUNG	12.500,00	-	12.500,00
415	SMPN 6 LUBUK ALUNG	22.994,00	22.994,00	-
416	SMPN 1 BATANG ANAI	9.137,00	-	9.137,00
417	SMPN 2 BATANG ANAI	12.067,00	-	12.067,00
418	SMPN 3 BATANG ANAI	-	-	-
419	SMPN 4 BATANG ANAI	-	-	-
420	SMPN 1 SINTUK TOBOH GADANG	175.123,00	175.042,00	81,00
421	SMPN 2 SINTUK TOBOH GADANG	157.053,00	-	157.053,00
422	SMPN 1 ULAKAN TAPAKIS	36.138,00	-	36.138,00
423	SMPN 2 ULAKAN TAPAKIS	60.775,00	-	60.775,00
424	SMPN 3 ULAKAN TAPAKIS	27.875,00	27.875,00	-
425	SMPN 1 NAN SABARIS	1.112.235,00	1.112.235,00	-
426	SMPN 2 NAN SABARIS	368.217,00	-	368.217,00
427	SMPN 3 NAN SABARIS	35.725,00	123,00	35.602,00
428	SMPN 1 PATAMUAN	39.415,00	-	39.415,00
429	SMPN 2 PATAMUAN	-	-	-
430	SMPN 3 PATAMUAN	104.894,00	-	104.894,00
431	SMPN 1 PADANG SAGO	220.328,00	43.390,00	176.938,00
432	SMPN 2 PADANG SAGO	18.811,00	-	18.811,00
433	SMPN 1 VII KOTO SUNGAI SARIK	901.039,00	871.341,00	29.698,00
434	SMPN 2 VII KOTO SUNGAI SARIK	803.627,00	-	803.627,00
435	SMPN 3 VII KOTO SUNGAI SARIK	102.034,00	-	102.034,00
436	SMPN 4 VII KOTO SUNGAI SARIK	-	-	-
437	SMPN 1 V KOTO TIMUR	48.552,00	48.552,00	-
438	SMPN 2 V KOTO TIMUR	43.408,00	-	43.408,00
439	SMPN 1 V KOTO KAMPUNG DALAM	180.074,00	-	180.074,00
440	SMPN 2 V KOTO KAMPUNG DALAM	552.863,00	-	552.863,00
441	SMPN 3 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-

No.	Sekolah	Saldo Akhir	Saldo bank	Saldo tunai
1	2	3 =(4 + 5)	4	5
442	SMPN 4 V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-
443	SMPN 1 SUNGAI LIMAU	-	-	-
444	SMPN 2 SUNGAI LIMAU	252.204,00	252.204,00	-
445	SMPN 3 SUNGAI LIMAU	316.061,00	681,00	315.380,00
446	SMPN 4 SUNGAI LIMAU	131.988,00	95.988,00	36.000,00
447	SMPN 5 SUNGAI LIMAU	722.435,00	18.659,00	703.776,00
448	SMPN 1 SUNGAI GERINGGING	-	-	-
449	SMPN 2 SUNGAI GERINGGING	128.136,00	11.500,00	116.636,00
450	SMPN 3 SUNGAI GERINGGING	62.093,00	-	62.093,00
451	SMPN 4 SUNGAI GERINGGING	1.734.291,00	33.916,00	1.700.375,00
452	SMPN 1 IV KOTO AUR MALINTANG	4.764,00	-	4.764,00
453	SMPN 2 IV KOTO AUR MALINTANG	25.099,00	-	25.099,00
454	SMPN 3 IV KOTO AUR MALINTANG	31.404,00	-	31.404,00
455	SMPN 4 IV KOTO AUR MALINTANG	441.744,00	41.744,00	400.000,00
456	SMPN 5 IV KOTO AUR MALINTANG	1.721,00	-	1.721,00
457	SMPN 1 BATANG GASAN	692.920,00	62.426,00	630.494,00
458	SMPN 2 BATANG GASAN	16.673,00	15.930,00	743,00
459	SMPN 3 BATANG GASAN	652.207,00	707,00	651.500,00
JUMLAH SALDO BOS SLTP		12.299.840,00	4.053.981,00	8.245.859,00
JUMLAH SALDO BOP PAUD		9.900.000,00	9.900.000,00	-
TOTAL		119.606.781,00	60.630.858,00	58.975.923,00

PIUTANG PAJAK REKLAME TAHUN 2024

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023
 Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2024
 Penerimaan Pajak Reklamen Tahun 2024
 Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024

Rp 64.389.300,00
 Rp 1.008.794.750
 Rp (994.031.250,00)
 Rp **79.152.800,00**

NO	NO.SKP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
1	015	RAT SALON	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	130.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	130.000,00
2	035	PT.GUDANG GARAM	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	520.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	520.000,00
3	036	PT.GUDANG GARAM	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	325.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	325.000,00
4	044	BENGKEL MOBIL FIRDAUS	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	156.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	156.000,00
5	047	RM. AMPERA DUA SAUDARA	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	146.250,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	146.250,00
6	106	DSM MOTOR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	97.500,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	97.500,00
7	107	GIPER	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	100.000,00
8	137	IRHAS	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	325.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	325.000,00
9	140	RM. PONDOK SAKINAH	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	93.600,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	93.600,00
10	149	YODA MART	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	166.400,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	166.400,00
11	150	DEPOT ISI ULANG SYAUFIFA	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	97.500,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	97.500,00
12	154	RUMAH BERSALIN BUAH HATI	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	487.500,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	487.500,00
13	173	TIRTA BENING	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	124.800,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	124.800,00
14	314	BENGKEL AJI MAMBO	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	96.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	96.000,00
15	316	DUTA MOTOR	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	96.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	96.000,00
16	264	DIANA SALON	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	130.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	130.000,00
17	362	ORGEN GISEL	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	150.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	150.000,00
18	408	PARMA FOTOCOPY	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	100.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	100.000,00
19	446	TOMMY TOUR & TRAVEL	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	162.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	162.000,00
20	455	HUSNI MOTOR	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	128.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	128.000,00
21	458	BENGKEL ALFAS MANDIRI	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	100.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	100.000,00
22	157	RM. SAMBALADO	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	650.000,00	2016	TUTUP	100%	650.000,00
23	163	AZZAHRA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	260.000,00	2016	TUTUP	100%	260.000,00
24	182	RM CAHAYA SURYA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	325.000,00	2016	TUTUP	100%	325.000,00
25	183	KAISAR	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	325.000,00	2016	TUTUP	100%	325.000,00
26	191	KAWACHI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	260.000,00	2016	TUTUP	100%	260.000,00
27	235	RAFA MART DAN CELL	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	TUTUP	100%	195.000,00
28	238	CAHAYA SURYA	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	260.000,00	2016	TUTUP	100%	260.000,00
29	246	PISANG SALAI MAMA	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	130.000,00	2016	TUTUP	100%	130.000,00
30	252	ALIBI SHOP	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	TUTUP	100%	195.000,00
31	275	PUTRA TANJUNG FURNITURE	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	130.000,00	2016	TUTUP	100%	130.000,00
32	284	HANNOCH KETAPING	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	1.125.000,00	2016	TUTUP	100%	1.125.000,00
33	309	PONDOK LESEHAN TIANG BULEK	02 APR 2016 S/D 1 APR 2017	75.000,00	2016	TUTUP	100%	75.000,00
34	326	BAKSO NGUDI	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	120.000,00	2016	TUTUP	100%	120.000,00

NO	NO.SKIP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
35	338	RAGNI AQUARIUM	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	60.000,00	2016	TUTUP	100%	60.000,00
36	384	KUE BIKI IDOLA	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	96.000,00	2016	TUTUP	100%	96.000,00
37	419	RM KASIAH BUNDO	20 JULI 2016 S/D 19 JULI 2017	88.000,00	2016	TUTUP	100%	88.000,00
38	449	UMEGA PENGANTEN	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	112.000,00	2016	TUTUP	100%	112.000,00
39	453	DAFFA KONSTRUKSI	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	120.000,00	2016	TUTUP	100%	120.000,00
40	029	SETIAWAN MOTOR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	260.000,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	260.000,00
41	041	PRIMADONA CAR WASH	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	650.000,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	650.000,00
42	139	AJOES DIGITAL	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	900.000,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	900.000,00
43	186	BUDI MULYA II	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	487.500,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	487.500,00
44	358	USAHA MUDA	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	77.000,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	77.000,00
45	293	PT.BUANA LESTARI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	843.750,00	2016	JADI HIMBAUAN	100%	843.750,00
46	144	CANON DIGITAL COPIER	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	130.000,00	2016	UKURAN KECIL	100%	130.000,00
47	161	FDI DIGITAL FUJI TECK	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	650.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	650.000,00
48	165	ADVAN UTAMA COMPUTER	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	292.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	292.500,00
49	166	AXIO COMPUTER	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	260.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	260.000,00
50	228	NASI SOP ELOK EVO	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	195.000,00
51	243	TB.AMANAH / IKAD KERAMIK	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	1.096.900,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	1.096.900,00
52	266	EVERCROSS	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	325.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	325.000,00
53	268	YULHERI ALIOES, SH	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	260.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	260.000,00
54	317	MENTARI / INDOSAT	01 APRIL 16 S/D 31 MAR 17	2.900.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	2.900.000,00
55	332	PT.WORLD INNOVATIVE TELECOMUNICATION	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	162.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	162.500,00
56	333	EVERCOSS AZHARA	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	240.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	240.000,00
57	346	COOLPAD AZHARA	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	225.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	225.000,00
58	348	EVERCOSS	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	240.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	240.000,00
59	352	PT.DWITAMA WUKIRINDO SOLUSI	08 JUNI 2016 S/D 7 JUNI 2017	2.250.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	2.250.000,00
60	381	NESHA PUTRI	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	126.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	126.000,00
61	389	UNCU FENY	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	156.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	156.000,00
62	415	ALVONI ADVERTISING	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	144.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	144.000,00
63	020	TOKO BANGUNAN MAKMUR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	650.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	650.000,00
64	021	TOKO BANGUNAN RUCITA	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	243.750,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	243.750,00
65	032	SIEC I SICINCIN	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	146.250,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	146.250,00
66	034	PRAKTEK DOKTER GIGI	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	91.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	91.000,00
67	121	LAPAU COKLAT	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	2.400.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	2.400.000,00
68	122	LAPAU COKLAT	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	1.200.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	1.200.000,00
69	134	RM.CAHAYA SURYA	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	260.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	260.000,00
70	136	ANISA TOURS DAN TRAVEL	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	731.250,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	731.250,00

NO	NO.SKIP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
71	152	MASTRO COMPUTER	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	195.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	195.000,00
72	180	PT. ASURANSI BUMI PUTERA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	136.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	136.500,00
73	206	NOTARIS MIRA FEBRIANI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	243.750,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	243.750,00
74	236	SPBU JAMBAK LUBUK ALUNG	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	1.800.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	1.800.000,00
75	272	NOTARIS INDRA SAKTI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	292.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	292.500,00
76	276	NOTARIS ADE (BLM)	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	292.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	292.500,00
77	277	MUHAMMAD YUS, SH	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	130.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	130.000,00
78	285	RIRI AGUSTIEN, SH. MKn	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	168.750,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	168.750,00
79	289	NOTARIS DESMAYANTI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	168.750,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	168.750,00
80	291	LAPAU COKLAT	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	4.500.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	4.500.000,00
81	297	NOTARIS DEVI HASIBUAN	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	225.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	225.000,00
82	345	TITIPAN KILAT BINGKUANG MAS	03 JUNI 2016 S/D 02 JUNI 2017	240.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	240.000,00
83	369	FAREL PROFIL	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	104.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	104.000,00
84	394	DUA PUTRI MAMA L.ALUNG	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	150.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	150.000,00
85	395	DUA PUTRI MAMA PAUH KAMBAR	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	540.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	540.000,00
86	192	SUZUKI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	97.500,00	2016	JANJI BAYAR	100%	97.500,00
87	164	pajak reklame pt wordl innovative telecommunication oppo rafaa cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	250.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	250.000,00
88	169	pajak reklame pt world innovative telecommunication oppo matahari cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	1.800.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	1.800.000,00
89	172	pajak reklame pt world innovative telecommunication oppo matahari cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	325.000,00
90	174	pajak reklame pt world innovative telecommunication oppo raffa cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	325.000,00
91	176	pajak reklame pt world innovative telecommunication oppo prima cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	325.000,00
92	268	pajak reklame pt citra media nusantara/oskar	6 SEPT 2017 S/D 4 SEPT 2018	1.800.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	1.800.000,00
93	205	PAJAK REKLAME WESTERN UNION	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	250.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	250.000,00
94	206	pajak reklame pt pos indonesia ky tanam	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	540.000,00
95	207	pajak reklame pt pos indonesia sicincin	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	540.000,00
96	208	pajak reklame pt pos indonesia pasar usang	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	540.000,00
97	209	pajak reklame pt pos indonesia pauh kambar	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	540.000,00
98	272	pajak reklame PT BUANA LESTARI NUSANTARA reklame honda gajah motor	1 MAR.2017 - 1 MAR 2018	11.718.750,00	2017	Dicabut	100%	11.718.750,00
99	053	PT BUMI SARIMAS INDONESIA	25 FEB 19 S/D 24 FEB 2020	200,00	2019	Kekurangan Bayar	100%	200,00
100	107	OPTIK MUSTIKA	30 MRT 19 S/D 29 MRT 2020	400,00	2019	Kekurangan Bayar	100%	400,00
101	211	RM SELAYU MUTIARA	12 JUNI 19 S/D 11 JUNI 2020	75.600,00	2019	Kekurangan Bayar	100%	75.600,00

NO	NO.SKP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
102	127	PT BANDANO CITRA BANUA	12 APR 19 S/D 11 APR 2020	270.000,00	2019		100%	270.000,00
103	279	OPTIK MULIA PASAR MUDIK	06 SEPT 19 S/D 05 SEPT 2020	500,00	2019	Kekurangan Bayar	100%	500,00
104		SMK KESEHATAN MANDIRI	08 FEB 2020 S/D 07 FEBRUARI 2021	360.000,00	2020	Kekurangan Bayar	100%	360.000,00
105	066	APOTIK MUSTIKA	28 MARET 2020 S/D 28 MARET 2021	410.400,00	2020	dicabut	100%	410.400,00
106	121	CAHAYA SUCI	16 APRIL 2020 S/D 15 APRIL 2021	360.000,00	2020		100%	360.000,00
107	033	HONDA KENDAL	30 JANUARI 2021 S/D 29 JANUARI 2022	450.000,00	2021		50%	225.000,00
108	130	CHIA SAGITAKO	16 MARET 2021 S/D 15 MARET 2022	121.500,00	2021		50%	60.750,00
109	152	CV BAKRI MANDIRI	01 APRIL 2021 S/D 31 MARET 2022	270.000,00	2021		50%	135.000,00
110	216	DECO CELL	17 MEI 2021 S/D 16 MEI 2022	675.000,00	2021		50%	337.500,00
111	356A	OPTIK SURJAYA	04 OKTOBER 2021 S/D 03 OKTOBER 2022	360.000,00	2021		50%	180.000,00
112	384	VIVO (ASYA GROUP)	11 OKTOBER 2021 S/D 10 OKTOBER 2022	750.000,00	2021		50%	375.000,00
113	413	ROMANTIS ADVERTISING	18 NOVEMBER 2021 S/D 17 NOVEMBER 2022	216.000,00	2021		50%	108.000,00
114	331	MARTABAK KUBANG HAYUDA	28 MARET 2023 - 27 MARET 2024	360.000,00	2023		25%	90.000,00
115	332	SURYA KOMPUTER	01 APRIL 2023 S/D 31 MARET 2024	540.000,00	2023		25%	135.000,00
116	333	R.M LINTAS RAYA	16 APRIL 2023 S/D 15 APRIL 2024	360.000,00	2023		25%	90.000,00
117	338	VALENCIA PESTA	03 JULI 2023 S/D 02 JULI 2024	360.000,00	2023		25%	90.000,00
118	109	NADIA ELEKTRONIK	25 JULI 2023 S/D 24 JULI 2024	57.000,00	2023		25%	14.250,00
119	333	MARTABAK MESIR KUBANG	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	200.000,00	2023		25%	50.000,00
120	334	MARTABAK MESIR KUBANG	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	360.000,00	2023		25%	90.000,00
121	335	PALANTA NASI UNI EVI	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	625.000,00	2023		25%	156.250,00
122	336	PINYARAM TINA	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	500.000,00	2023		25%	125.000,00
123	337	AMPERA GAYA BARU	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	400.000,00	2023		25%	100.000,00
124	262	ALEXIS MEDIAPRO ADVERTISING	18 SEPTEMBER 2023 s/d 17 SEPTEMBER 2024	843.750,00	2023		25%	210.937,50
125	339	CINTO SATWA	3 APRIL 2023 S/D 2 APRIL 2023	270.000,00	2023		25%	67.500,00
126	114	SPBU 13.225.522 SICINCIN	20 MAR 2024 - 20 MAR 2025	1.875.000,00	2024		0,5%	9.375,00
127	225	RM KIAMBANG RAYA	17 MEI 2024 - 16 MEI 2025	810.000,00	2024		0,5%	4.050,00
128	227	BRI CABANG PADANG PANJANG	28 MEI 2024 - 27 MEI 2025	750.000,00	2024		0,5%	3.750,00
129	310	PT. ARVINDO BANGUN MULIA	22 AGUS 2024 - 21 SEPT 2024	1.687.500,00	2024		0,5%	8.437,50
130	381	PROFESIONAL	11 SEPT 2024 - 10 SEPT 2025	1.020.000,00	2024		0,5%	5.100,00
131	496	SEMPURNA PRINTING	22 DES S/D 28 DES 2024	1.350.000,00	2024		0,5%	6.750,00
132	500	PT.CAESAR OOHMEDIA	25 DES 2024 S/D 23 JAN 2025	2.700.000,00	2024		0,5%	13.500,00
133	501	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	240.000,00	2024		0,5%	1.200,00
134	502	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	1.123.500,00	2024		0,5%	5.617,50
135	503	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	148.200,00	2024		0,5%	741,00
136	504	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	62.300,00	2024		0,5%	311,50
137	505	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	3.102.000,00	2024		0,5%	15.510,00
JUMLAH				79.152.800,00				59.280.580,00

KERTAS KERJA PIUTANG PBB

Piutang PBB P2 Tahun 2014 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2014 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2014	REALISASI PIUTANG 2014 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2014 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024
	KECAMATAN			TUNGGAKAN	TUNGGAKAN	Realisasi		TUNGGAKAN		Audited
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 544.015.671	Rp 142.680	Rp 544.158.351	Rp 3.838.008	Rp 770.478	Rp 540.320.343	Rp - ,00	540.320.343
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 119.351.016		Rp 119.351.016	Rp 415.870	Rp 92.380	Rp 118.935.146	Rp - ,00	118.935.146
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 230.484.381		Rp 230.484.381	Rp 178.940	Rp 64.341	Rp 230.305.441	Rp - ,00	230.305.441
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 140.783.605		Rp 140.783.605	Rp 477.845	Rp 96.543	Rp 140.305.760	Rp - ,00	140.305.760
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 83.456.065		Rp 83.456.065	Rp 230.830	Rp 94.586	Rp 83.225.235	Rp - ,00	83.225.235
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 190.373.788		Rp 190.373.788	Rp 425.697	Rp 54.156	Rp 189.948.091	Rp - ,00	189.948.091
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 293.746.177		Rp 293.746.177	Rp 858.653	Rp 138.550	Rp 292.887.524	Rp - ,00	292.887.524
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 96.258.479		Rp 96.258.479	Rp 49.028	Rp 23.533	Rp 96.209.451	Rp - ,00	96.209.451
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 20.891.183		Rp 20.891.183	Rp 191.403	Rp 67.357	Rp 20.699.780	Rp - ,00	20.699.780
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 52.481.828		Rp 52.481.828	Rp 48.270	Rp 18.369	Rp 52.433.558	Rp - ,00	52.433.558
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 94.454.402		Rp 94.454.402	Rp 3.270.177	Rp -	Rp 91.184.225	Rp - ,00	91.184.225
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 236.137.806		Rp 236.137.806	Rp 285.223	Rp 28.535	Rp 235.852.583	Rp - ,00	235.852.583
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 45.323.788		Rp 45.323.788	Rp 4.170.595	Rp -	Rp 41.153.193	Rp - ,00	41.153.193
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 70.156.925		Rp 70.156.925	Rp 397.026	Rp 107.967	Rp 69.759.899	Rp - ,00	69.759.899
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 131.632.297		Rp 131.632.297	Rp 114.692	Rp -	Rp 131.517.605	Rp - ,00	131.517.605
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 52.250.284		Rp 52.250.284	Rp 64.851	Rp 31.128	Rp 52.185.433	Rp - ,00	52.185.433
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 52.873.821		Rp 52.873.821	Rp 119.492	Rp 18.585	Rp 52.754.329	Rp - ,00	52.754.329
Jumlah			Rp 2.454.671.516	Rp 142.680	Rp 2.454.814.196	Rp 15.136.600	Rp 1.606.508	Rp 2.439.677.596	Rp - ,00	Rp 2.439.677.596

Piutang PBB P2 Tahun 2015 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2015 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2015	REALISASI PIUTANG 2015 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2015 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN			TUNGGAKAN	TUNGGAKAN	Realisasi		TUNGGAKAN		
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp636.259.246		Rp 636.259.246	Rp 4.137.546	Rp 799.881	Rp 632.121.700	Rp - ,00	632.121.700
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp58.758.430		Rp 58.758.430	Rp 500.177	Rp 107.172	Rp 58.258.253	Rp - ,00	58.258.253
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp292.030.248		Rp 292.030.248	Rp 37.061	Rp -	Rp 291.993.187	Rp - ,00	291.993.187
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp126.107.291		Rp 126.107.291	Rp 514.797	Rp 173.617	Rp 125.592.494	Rp - ,00	125.592.494
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp73.614.133		Rp 73.614.133	Rp 44.675	Rp 16.152	Rp 73.569.458	Rp - ,00	73.569.458
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp151.136.104		Rp 151.136.104	Rp 326.693	Rp 24.435	Rp 150.809.411	Rp - ,00	150.809.411
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp233.982.646		Rp 233.982.646	Rp 926.868	Rp 113.464	Rp 233.055.778	Rp - ,00	233.055.778
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp83.908.293		Rp 83.908.293	Rp 50.013	Rp 24.006	Rp 83.858.280	Rp - ,00	83.858.280
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp12.848.738		Rp 12.848.738	Rp 164.411	Rp 51.201	Rp 12.684.327	Rp - ,00	12.684.327
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp47.172.100		Rp 47.172.100	Rp 46.860	Rp 22.492	Rp 47.125.240	Rp - ,00	47.125.240
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp79.077.115		Rp 79.077.115			Rp 79.077.115	Rp - ,00	79.077.115
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp148.388.563		Rp 148.388.563	Rp 248.612	Rp 9.976	Rp 148.139.951	Rp - ,00	148.139.951
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp41.971.331		Rp 41.971.331	Rp 925.359	Rp -	Rp 41.045.972	Rp - ,00	41.045.972
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp28.383.600		Rp 28.383.600	Rp 155.600	Rp 24.000	Rp 28.228.000	Rp - ,00	28.228.000
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp144.559.369		Rp 144.559.369	Rp 87.692	Rp -	Rp 144.471.677	Rp - ,00	144.471.677
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp47.270.437		Rp 47.270.437	Rp 57.750	Rp 4.800	Rp 47.212.687	Rp - ,00	47.212.687
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp38.108.369		Rp 38.108.369	Rp 129.492	Rp 23.385	Rp 37.978.877	Rp - ,00	37.978.877
Jumlah			Rp2.243.576.013	Rp0	Rp2.243.576.013	Rp8.353.606	Rp1.394.581	Rp 2.235.222.407,00	Rp - ,00	2.235.222.407

Piutang PBB P2 Tahun 2016 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2016 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2016	REALISASI PIUTANG 2016 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2016 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN									
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 936.153.258		Rp 936.153.258	Rp 3.798.405	Rp 893.098	Rp 932.354.853	Rp - ,00	932.354.853
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 368.307.195		Rp 368.307.195	Rp 736.371	Rp 221.815	Rp 367.570.824	Rp - ,00	367.570.824
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 33.000.569		Rp 33.000.569	Rp 71.254	Rp 19.101	Rp 32.929.315	Rp - ,00	32.929.315
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 49.413.912		Rp 49.413.912	Rp 152.652	Rp 37.209	Rp 49.261.260	Rp - ,00	49.261.260
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 26.050.618		Rp 26.050.618	Rp 33.650	Rp 16.152	Rp 26.016.968	Rp - ,00	26.016.968
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 74.253.797		Rp 74.253.797	Rp 631.773	Rp 122.631	Rp 73.622.024	Rp - ,00	73.622.024
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 207.332.220		Rp 207.332.220	Rp 787.926	Rp 175.133	Rp 206.544.294	Rp - ,00	206.544.294
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 112.910.495		Rp 112.910.495	Rp 70.000	Rp 14.400	Rp 112.840.495	Rp - ,00	112.840.495
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 153.560.880		Rp 153.560.880	Rp 370.564	Rp 150.153	Rp 153.190.316	Rp - ,00	153.190.316
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 40.975.275		Rp 40.975.275	Rp 61.633	Rp 13.569	Rp 40.913.642	Rp - ,00	40.913.642
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 4.421.815		Rp 4.421.815			Rp 4.421.815	Rp - ,00	4.421.815
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 45.520.338		Rp 45.520.338	Rp 527.270	Rp 14.776	Rp 44.993.068	Rp - ,00	44.993.068
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 12.261.157		Rp 12.261.157			Rp 12.261.157	Rp - ,00	12.261.157
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 92.189.393		Rp 92.189.393	Rp 113.000	Rp 26.592	Rp 92.076.393	Rp - ,00	92.076.393
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 51.346.199		Rp 51.346.199	Rp 57.500	Rp -	Rp 51.288.699	Rp - ,00	51.288.699
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 36.472.933		Rp 36.472.933			Rp 36.472.933	Rp - ,00	36.472.933
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 38.803.813		Rp 38.803.813	Rp 30.000	Rp 4.800	Rp 38.773.813	Rp - ,00	38.773.813
Jumlah			Rp 2.282.973.867	Rp -	Rp 2.282.973.867	Rp 7.441.998	Rp 1.709.429	Rp 2.275.531.869	Rp - ,00	Rp 2.275.531.869

Piutang PBB P2 Tahun 2017 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2017 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2017	REALISASI PIUTANG 2017 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2017 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN									
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 1.140.754.965		Rp 1.140.754.965	Rp 5.643.220	Rp 1.619.107	Rp 1.135.111.745	Rp - ,00	1.135.111.745
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 347.122.555		Rp 347.122.555	Rp 1.092.966	Rp 356.406	Rp 346.029.589	Rp - ,00	346.029.589
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 28.580.555		Rp 28.580.555	Rp 41.886	Rp 13.656	Rp 28.538.669	Rp - ,00	28.538.669
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 42.439.255		Rp 42.439.255	Rp 204.611	Rp 78.169	Rp 42.234.644	Rp - ,00	42.234.644
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 22.964.563		Rp 22.964.563	Rp 34.444	Rp 11.241	Rp 22.930.119	Rp - ,00	22.930.119
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 42.443.722		Rp 42.443.722	Rp 343.043	Rp 117.831	Rp 42.100.679	Rp - ,00	42.100.679
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 207.328.216		Rp 207.328.216	Rp 1.213.453	Rp 386.542	Rp 206.114.763	Rp - ,00	206.114.763
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 95.377.563		Rp 95.377.563	Rp 61.410	Rp 15.076	Rp 95.316.153	Rp - ,00	95.316.153
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 66.375.891		Rp 66.375.891	Rp 178.071	Rp 57.757	Rp 66.197.820	Rp - ,00	66.197.820
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 2.520.531		Rp 2.520.531			Rp 2.520.531	Rp - ,00	2.520.531
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 99.711		Rp 99.711			Rp 99.711	Rp - ,00	99.711
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 19.031.751		Rp 19.031.751			Rp 19.031.751	Rp - ,00	19.031.751
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 10.172.984		Rp 10.172.984	Rp 94.508	Rp 4.800	Rp 10.078.476	Rp - ,00	10.078.476
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 77.123.246		Rp 77.123.246	Rp 123.000	Rp 26.592	Rp 77.000.246	Rp - ,00	77.000.246
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 49.583.361		Rp 49.583.361	Rp 20.192	Rp -	Rp 49.563.169	Rp - ,00	49.563.169
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 53.821.297		Rp 53.821.297			Rp 53.821.297	Rp - ,00	53.821.297
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 57.794.520		Rp 57.794.520	Rp 40.772	Rp 4.800	Rp 57.753.748	Rp - ,00	57.753.748
Jumlah			Rp 2.263.534.686	Rp -	Rp 2.263.534.686	Rp 9.091.576	Rp 2.691.977	Rp 2.254.443.110	Rp - ,00	Rp 2.254.443.110

Piutang PBB P2 Tahun 2018 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2018 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2018	REALISASI PIUTANG 2018 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2018 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN									
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 1.514.212.130		Rp 1.514.212.130	Rp 8.442.176	Rp 1.987.293	Rp 1.505.769.954	Rp - ,00	1.505.769.954
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 516.702.823		Rp 516.702.823	Rp 1.257.499	Rp 154.964	Rp 515.445.324	Rp - ,00	515.445.324
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 30.845.472		Rp 30.845.472	Rp 43.230	Rp 14.301	Rp 30.802.242	Rp - ,00	30.802.242
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 33.324.763		Rp 33.324.763	Rp 81.865	Rp 29.695	Rp 33.242.898	Rp - ,00	33.242.898
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 16.999.567		Rp 16.999.567	Rp 46.219	Rp 22.185	Rp 16.953.348	Rp - ,00	16.953.348
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 45.024.861		Rp 45.024.861	Rp 109.787	Rp 10.158	Rp 44.915.074	Rp - ,00	44.915.074
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 221.215.769		Rp 221.215.769	Rp 1.493.647	Rp 337.856	Rp 219.722.122	Rp - ,00	219.722.122
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 107.114.914		Rp 107.114.914	Rp 20.000	Rp -	Rp 107.094.914	Rp - ,00	107.094.914
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 56.347.832		Rp 56.347.832	Rp 236.153	Rp 103.752	Rp 56.111.679	Rp - ,00	56.111.679
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 7.356.386		Rp 7.356.386			Rp 7.356.386	Rp - ,00	7.356.386
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 86.305		Rp 86.305			Rp 86.305	Rp - ,00	86.305
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 38.229.698		Rp 38.229.698	Rp 50.000	Rp 9.600	Rp 38.179.698	Rp - ,00	38.179.698
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 3.530.748		Rp 3.530.748			Rp 3.530.748	Rp - ,00	3.530.748
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 75.444.572		Rp 75.444.572	Rp 88.000	Rp 14.400	Rp 75.356.572	Rp - ,00	75.356.572
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 65.103.283		Rp 65.103.283	Rp 67.500	Rp -	Rp 65.035.783	Rp - ,00	65.035.783
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 50.175.296		Rp 50.175.296	Rp 71.685	Rp 24.631	Rp 50.103.611	Rp - ,00	50.103.611
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 64.203.111		Rp 64.203.111	Rp 70.772	Rp 4.800	Rp 64.132.339	Rp - ,00	64.132.339
Jumlah			Rp 2.845.917.530	Rp -	Rp 2.845.917.530	Rp 12.078.533	Rp 2.713.635	Rp 2.833.838.997	Rp - ,00	Rp 2.833.838.997

Piutang PBB P2 Tahun 2019 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2019 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2019	REALISASI PIUTANG 2019 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2019 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN									
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 2.283.416.820		Rp 2.283.416.820	Rp 12.261.478	Rp 2.384.877	Rp 2.271.155.342	Rp - ,00	2.271.155.342
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 633.420.983		Rp 633.420.983	Rp 2.422.412	Rp 514.266	Rp 630.998.571	Rp - ,00	630.998.571
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 11.838.295		Rp 11.838.295	Rp 207.249	Rp 28.445	Rp 11.631.046	Rp - ,00	11.631.046
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 29.636.427		Rp 29.636.427	Rp 314.292	Rp 96.093	Rp 29.322.135	Rp - ,00	29.322.135
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 21.898.945		Rp 21.898.945	Rp 206.195	Rp 40.240	Rp 21.692.750	Rp - ,00	21.692.750
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 43.103.745		Rp 43.103.745	Rp 92.574	Rp 11.358	Rp 43.011.171	Rp - ,00	43.011.171
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 282.105.930		Rp 282.105.930	Rp 1.463.333	Rp 169.392	Rp 280.642.597	Rp - ,00	280.642.597
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 105.289.174		Rp 105.289.174	Rp 62.404	Rp 14.473	Rp 105.226.770	Rp - ,00	105.226.770
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 53.834.695		Rp 53.834.695	Rp 373.214	Rp 122.072	Rp 53.461.481	Rp - ,00	53.461.481
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 17.092.557		Rp 17.092.557	Rp 637.360	Rp 305.932	Rp 16.455.197	Rp - ,00	16.455.197
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 96.105		Rp 96.105			Rp 96.105	Rp - ,00	96.105
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 37.934.884		Rp 37.934.884	Rp 20.000	Rp 200	Rp 37.914.884	Rp - ,00	37.914.884
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 2.395.251		Rp 2.395.251			Rp 2.395.251	Rp - ,00	2.395.251
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 70.368.259		Rp 70.368.259	Rp 114.100	Rp 40.304	Rp 70.254.159	Rp - ,00	70.254.159
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 78.165.005		Rp 78.165.005	Rp 40.192	Rp 4.800	Rp 78.124.813	Rp - ,00	78.124.813
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 51.539.198		Rp 51.539.198			Rp 51.539.198	Rp - ,00	51.539.198
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 88.311.096		Rp 88.311.096	Rp 68.720	Rp 13.785	Rp 88.242.376	Rp - ,00	88.242.376
Jumlah			Rp 3.810.447.369	Rp -	Rp 3.810.447.369	Rp 18.283.523	Rp 3.746.237	Rp 3.792.163.846	Rp - ,00	Rp 3.792.163.846

Piutang PBB P2 Tahun 2020 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2020 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2020	REALISASI PIUTANG 2020 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2020 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN									
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 2.231.304.518	Rp 27.188.538	Rp 2.258.493.056	Rp 25.342.246	Rp 3.373.305	Rp 2.233.150.810	Rp - ,00	2.233.150.810
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 697.359.380	Rp 4.202.794	Rp 701.562.174	Rp 5.424.336	Rp 706.141	Rp 696.137.838	Rp - ,00	696.137.838
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 10.275.283	Rp 158.404	Rp 10.433.687	Rp 300.568	Rp 23.645	Rp 10.133.119	Rp - ,00	10.133.119
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 30.634.196	Rp 204.474	Rp 30.838.670	Rp 340.855	Rp 76.108	Rp 30.497.815	Rp - ,00	30.497.815
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 14.583.960	Rp 2.404.718	Rp 16.988.678	Rp 1.432.922	Rp 34.096	Rp 15.555.756	Rp - ,00	15.555.756
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 46.449.146	Rp 109.491	Rp 46.558.637	Rp 482.592	Rp 11.358	Rp 46.076.045	Rp - ,00	46.076.045
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 237.408.037	Rp 1.209.491	Rp 238.617.528	Rp 2.304.207	Rp 252.214	Rp 236.313.321	Rp - ,00	236.313.321
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 121.995.989	Rp 200.834	Rp 122.196.823	Rp 605.168	Rp 52.839	Rp 121.591.655	Rp - ,00	121.591.655
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 95.781.094	Rp 307.378	Rp 96.088.472	Rp 779.102	Rp 164.456	Rp 95.309.370	Rp - ,00	95.309.370
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 16.912.308	Rp 253.037	Rp 17.165.345	Rp 650.762	Rp 285.196	Rp 16.514.583	Rp - ,00	16.514.583
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 764.575		Rp 764.575			Rp 764.575	Rp - ,00	764.575
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 42.496.200	Rp 168.450	Rp 42.664.650	Rp 238.087	Rp 24.025	Rp 42.426.563	Rp - ,00	42.426.563
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 8.724.557	Rp 56.321	Rp 8.780.878	Rp 140.829	Rp 14.782	Rp 8.640.049	Rp - ,00	8.640.049
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 73.801.241	Rp 190.304	Rp 73.991.545	Rp 310.698	Rp 82.655	Rp 73.680.847	Rp - ,00	73.680.847
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 59.740.746	Rp 84.580	Rp 59.825.326	Rp 132.080	Rp -	Rp 59.693.246	Rp - ,00	59.693.246
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 105.704.522	Rp 86.484	Rp 105.791.006	Rp 83.737	Rp 25.793	Rp 105.707.269	Rp - ,00	105.707.269
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 115.481.586	Rp 159.136	Rp 115.640.722	Rp 257.878	Rp 31.425	Rp 115.382.844	Rp - ,00	115.382.844
Jumlah			Rp 3.909.417.338	Rp 36.984.434	Rp 3.946.401.772	Rp 38.826.067	Rp 5.158.038	Rp 3.907.575.705	Rp - ,00	Rp 3.907.575.705

Piutang PBB P2 Tahun 2021 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Nilai Piutang PBB Audited	PBB 2021 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2021	REALISASI PIUTANG 2021 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2021 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN									
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 2.014.518.752	Rp 31.121.422	Rp 2.045.640.174	Rp 35.571.381	Rp 3.777.475	Rp 2.010.068.793	Rp - ,00	2.010.068.793
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 730.470.317	Rp 4.168.154	Rp 734.638.471	Rp 7.132.705	Rp 1.333.984	Rp 727.505.766	Rp - ,00	727.505.766
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 11.998.920	Rp 306.948	Rp 12.305.868	Rp 1.051.181	Rp 316.739	Rp 11.254.687	Rp - ,00	11.254.687
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 18.512.258	Rp 161.690	Rp 18.673.948	Rp 2.190.382	Rp 939.794	Rp 16.483.566	Rp - ,00	16.483.566
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 9.286.384	Rp 2.450.600	Rp 11.736.984	Rp 1.429.785	Rp 1.255	Rp 10.307.199	Rp - ,00	10.307.199
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 53.786.301	Rp 109.491	Rp 53.895.792	Rp 577.406	Rp 187.173	Rp 53.318.386	Rp - ,00	53.318.386
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 254.470.571	Rp 1.198.059	Rp 255.668.630	Rp 4.886.724	Rp 1.404.599	Rp 250.781.906	Rp - ,00	250.781.906
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 122.281.285	Rp 200.834	Rp 122.482.119	Rp 898.725	Rp 203.346	Rp 121.583.394	Rp - ,00	121.583.394
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 103.100.724	Rp 307.378	Rp 103.408.102	Rp 641.385	Rp 103.253	Rp 102.766.717	Rp - ,00	102.766.717
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 15.085.475	Rp 253.037	Rp 15.338.512	Rp 609.802	Rp 265.536	Rp 14.728.710	Rp - ,00	14.728.710
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 449.653	Rp 30.000	Rp 479.653	Rp 30.000	Rp -	Rp 449.653	Rp - ,00	449.653
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 18.707.285	Rp 208.400	Rp 18.915.685	Rp 944.919	Rp 310.436	Rp 17.970.766	Rp - ,00	17.970.766
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 4.752.569	Rp 56.321	Rp 4.808.890	Rp 646.877	Rp 293.066	Rp 4.162.013	Rp - ,00	4.162.013,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 62.277.739	Rp 190.304	Rp 62.468.043	Rp 2.045.923	Rp 918.618	Rp 60.422.120	Rp - ,00	60422120
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 74.000.439	Rp 84.580	Rp 74.085.019	Rp 141.772	Rp -	Rp 73.943.247	Rp - ,00	73943247
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 67.431.562	Rp 86.484	Rp 67.518.046	Rp 87.750	Rp 4.800	Rp 67.430.296	Rp - ,00	67.430.296,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 99.312.136	Rp 159.136	Rp 99.471.272	Rp 959.441	Rp 382.575	Rp 98.511.831	Rp - ,00	98.511.831,00
Jumlah			Rp 3.660.442.370	Rp 41.092.838	Rp 3.701.535.208	Rp 59.846.158	Rp 10.442.649	Rp 3.641.689.050	Rp - ,00	Rp 3.641.689.050

Piutang PBB P2 Tahun 2022 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Saldo Piutang PBB Audited	PBB 2022 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2022	REALISASI PIUTANG 2022 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2022 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN									
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 2.358.611.481	Rp 33.918.739	Rp 2.392.530.220	Rp 39.095.549	Rp 4.043.717	Rp 2.353.434.671	Rp - ,00	2.353.434.671
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 885.887.872	Rp 4.546.923	Rp 890.434.795	Rp 9.150.738	Rp 1.180.561	Rp 881.284.057	Rp - ,00	881.284.057
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 10.695.105	Rp 306.948	Rp 11.002.053	Rp 1.708.069	Rp 460.644	Rp 9.293.984	Rp - ,00	9.293.984
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 49.880.302	Rp 161.690	Rp 50.041.992	Rp 3.841.640	Rp 1.146.300	Rp 46.200.352	Rp - ,00	46.200.352
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 20.633.771	Rp 3.007.499	Rp 23.641.270	Rp 2.072.979	Rp 191.469	Rp 21.568.291	Rp - ,00	21.568.291
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 48.796.289	Rp 109.491	Rp 48.905.780	Rp 296.216	Rp 39.744	Rp 48.609.564	Rp - ,00	48.609.564
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 258.017.309	Rp 1.185.614	Rp 259.202.923	Rp 5.527.075	Rp 997.982	Rp 253.675.848	Rp - ,00	253.675.848
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 79.794.922	Rp 264.265	Rp 80.059.187	Rp 3.251.522	Rp 582.932	Rp 76.807.665	Rp - ,00	76.807.665
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 97.107.654	Rp 294.861.959	Rp 391.969.613	Rp 2.848.132	Rp 3.880	Rp 389.121.481	Rp - ,00	389.121.481
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 1.216.522	Rp 199.560.080	Rp 200.776.602	Rp 1.540.168	Rp -	Rp 199.236.434	Rp - ,00	199.236.434
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 1.291.758	Rp 30.000	Rp 1.321.758	Rp 30.000	Rp -	Rp 1.291.758	Rp - ,00	1.291.758
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 19.973.563	Rp 218.400	Rp 20.191.963	Rp 878.159	Rp 202.322	Rp 19.313.804	Rp - ,00	19.313.804
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 7.661.495	Rp 56.321	Rp 7.717.816	Rp 1.253.514	Rp 366.873	Rp 6.464.302	Rp - ,00	6.464.302
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 50.754.031	Rp 190.304	Rp 50.944.335	Rp 2.099.845	Rp 626.226	Rp 48.844.490	Rp - ,00	48.844.490
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 67.887.429	Rp 84.580	Rp 67.972.009	Rp 766.485	Rp 211.748	Rp 67.205.524	Rp - ,00	67.205.524
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 72.808.259	Rp 86.484	Rp 72.894.743	Rp 1.770.649	Rp 554.348	Rp 71.124.094	Rp - ,00	71.124.094
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 78.184.257	Rp 159.136	Rp 78.343.393	Rp 878.600	Rp 224.748	Rp 77.464.793	Rp - ,00	77.464.793
Jumlah			Rp 4.109.202.019	Rp 538.748.433	Rp 4.647.950.452	Rp 77.009.340	Rp 10.833.494	Rp 4.570.941.112	Rp - ,00	Rp 4.570.941.112

Piutang PBB P2 Tahun 2023 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	Saldo Piutang PBB Audited	PBB 2023 TERBIT 2024	TOTAL PIUTANG 2023	REALISASI PIUTANG 2023 JAN-DES 2024	DENDA PIUTANG	Piutang 2023 per 31 des 2024	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN									
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 8.354.991.177	Rp 49.372.395	Rp 8.404.363.572	Rp 201.627.925	Rp 8.358.478	Rp 8.202.735.647	Rp 2.933.740,0000	8.205.669.387,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 2.246.840.001	Rp 11.883.924	Rp 2.258.723.925	Rp 39.079.198	Rp 1.625.716	Rp 2.219.644.727	Rp 4.224.638,0000	2.223.869.365,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 16.202.637	Rp 306.948	Rp 16.509.585	Rp 2.622.202	Rp 59.309	Rp 13.887.383	Rp - ,00	13.887.383,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 34.116.849	Rp 276.219	Rp 34.393.068	Rp 3.242.847	Rp 77.913	Rp 31.150.221	Rp 50.000,0000	31.200.221,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 23.495.804	Rp 3.034.499	Rp 26.530.303	Rp 2.319.944	Rp 48.645	Rp 24.210.359	Rp 395.738,0000	24.606.097,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 52.940.460	Rp 109.491	Rp 53.049.951	Rp 658.922	Rp 38.043	Rp 52.391.029	Rp - ,00	52.391.029,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 246.259.558	Rp 1.265.614	Rp 247.525.172	Rp 11.179.245	Rp 171.972	Rp 236.345.927	Rp - ,00	236.345.927,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 122.848.210	Rp 249.874	Rp 123.098.084	Rp 3.221.739	Rp 82.999	Rp 119.876.345	Rp 25.200,0000	119.901.545,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 76.564.363	Rp 449.125	Rp 77.013.488	Rp 3.604.878	Rp 117.053	Rp 73.408.610	Rp 46.872,0000	73.455.482,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp -	Rp 253.037	Rp 253.037	Rp 2.236.855	Rp 38.363	-Rp 1.983.818	Rp 5.632.083,0000	3.648.265,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 2.521.783	Rp 54.050	Rp 2.575.833	Rp 714.563	Rp 13.210	Rp 1.861.270	Rp - ,00	1.861.270,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 16.491.968	Rp 257.470	Rp 16.749.438	Rp 1.566.892	Rp 39.555	Rp 15.182.546	Rp 260.660,0000	15.443.206,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 14.848.024	Rp 56.321	Rp 14.904.345	Rp 2.551.255	Rp 71.217	Rp 12.353.090	Rp - ,00	12.353.090,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 54.183.631	Rp 190.304	Rp 54.373.935	Rp 4.250.683	Rp 109.422	Rp 50.123.252	Rp - ,00	50.123.252,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 54.191.638	Rp 84.580	Rp 54.276.218	Rp 776.485	Rp 14.234	Rp 53.499.733	Rp - ,00	53.499.733,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 72.406.253	Rp 168.104	Rp 72.574.357	Rp 2.366.686	Rp 58.761	Rp 70.207.671	Rp 51.225,0000	70.258.896,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 66.410.805	Rp 159.136	Rp 66.569.941	Rp 2.202.940	Rp 67.701	Rp 64.367.001	Rp 40.000,0000	64.407.001,00
Jumlah			Rp 11.455.313.161	Rp 68.171.091	Rp 11.523.484.252	Rp 284.223.259	Rp 10.992.591	Rp 11.239.260.993	Rp 13.660.156	Rp 11.252.921.149

Piutang PBB P2 Tahun 2024 per 31 Desember 2024

No	KODE	Uraian	KETETAPAN	REALISASI	PIUTANG	Koreksi Audit	Saldo Piutang per 31 Desember 2024 Audited
	KECAMATAN						
1	1305050	Kecamatan Batang Anai	Rp 18.962.327.775	Rp 12.516.260.708	Rp 6.446.067.067	Rp 540.950,00	Rp 6.446.608.017,00
2	1305060	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 1.877.698.108	Rp 425.043.835	Rp 1.452.654.273	Rp 285.709,00	Rp 1.452.939.982,00
3	1305061	Kecamatan Sintoga	Rp 256.477.786	Rp 243.866.662	Rp 12.611.124	Rp 36.634,00	Rp 12.647.758,00
4	1305070	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 196.075.676	Rp 155.879.588	Rp 40.196.088	Rp 20.885,00	Rp 40.216.973,00
5	1305071	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 137.407.649	Rp 122.901.773	Rp 14.505.876	-	Rp 14.505.876,00
6	1305080	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 385.960.327	Rp 219.545.117	Rp 166.415.210	Rp 30.030,00	Rp 166.445.240,00
7	1305082	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 1.322.330.590	Rp 859.354.109	Rp 462.976.481	Rp 203.777,00	Rp 463.180.258,00
8	1305083	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 434.190.688	Rp 266.129.974	Rp 168.060.714	Rp 245.650,00	Rp 168.306.364,00
9	1305090	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 283.973.853	Rp 240.905.923	Rp 43.067.930	-	Rp 43.067.930,00
10	1305091	Kecamatan Patamuan	Rp 200.582.457	Rp 198.413.882	Rp 2.168.575	-	Rp 2.168.575,00
11	1305092	Kecamatan Padang Sago	Rp 60.066.275	Rp 59.459.595	Rp 606.680	-	Rp 606.680,00
12	1305101	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 133.213.090	Rp 129.270.122	Rp 3.942.968	-	Rp 3.942.968,00
13	1305102	Kecamatan V Koto Timur	Rp 106.667.915	Rp 91.435.549	Rp 15.232.366	-	Rp 15.232.366,00
14	1305110	Kecamatan Sungai Limau	Rp 141.211.110	Rp 103.617.004	Rp 37.594.106	Rp 1.241.638,00	Rp 38.835.744,00
15	1305111	Kecamatan Batang Gasan	Rp 103.484.087	Rp 30.623.503	Rp 72.860.584	Rp 19.250,00	Rp 72.879.834,00
16	1305120	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 169.484.313	Rp 103.167.622	Rp 66.316.691	-	Rp 66.316.691,00
17	1305121	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 135.025.076	Rp 110.557.637	Rp 24.467.439	Rp 486.748,00	Rp 24.954.187,00
Jumlah			Rp 24.906.176.775	Rp 15.876.432.603	Rp 9.029.744.172	Rp 3.111.271	Rp 9.032.855.443

TOTAL REALISASI 2024

NO	TAHUN PAJAK	REALISASI	PIUTANG	Koreksi Audit	Saldo Audited
	2009		Rp 2.843.675.290,00		Rp 2.843.675.290,00
	2010		Rp 2.911.173.985,00		Rp 2.911.173.985,00
	2011		Rp 4.152.722.763,00		Rp 4.152.722.763,00
	2012		Rp 3.717.761.420,00		Rp 3.717.761.420,00
	2013		Rp 4.573.338.653,00		Rp 4.573.338.653,00
1	2014	Rp 15.136.600	Rp 2.439.677.596		Rp 2.439.677.596,00
2	2015	Rp 8.353.606	Rp 2.235.222.407		Rp 2.235.222.407,00
3	2016	Rp 7.441.998	Rp 2.275.531.869		Rp 2.275.531.869,00
4	2017	Rp 9.091.576	Rp 2.254.443.110		Rp 2.254.443.110,00
5	2018	Rp 12.078.533	Rp 2.833.838.997		Rp 2.833.838.997,00
6	2019	Rp 18.283.523	Rp 3.792.163.846		Rp 3.792.163.846,00
7	2020	Rp 38.826.067	Rp 3.907.575.705		Rp 3.907.575.705,00
8	2021	Rp 59.846.158	Rp 3.641.689.050		Rp 3.641.689.050,00
9	2022	Rp 77.009.340	Rp 4.570.941.112		Rp 4.570.941.112,00
10	2023	Rp 284.223.259	Rp 11.239.260.993	Rp 13.660.156,00	Rp 11.252.921.149,00
11	2024	Rp 15.876.432.603	Rp 9.029.744.172	Rp 3.111.271	Rp 9.032.855.443,00
		Rp 16.406.723.263	Rp 66.418.760.968	Rp 16.771.427	Rp 66.435.532.395,00

Daftar Rincian Penyisihan Piutang Pajak Reklame

NO	NO.SKP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
1	015	RAT SALON	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	130.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	130.000,00
2	035	PT.GUDANG GARAM	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	520.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	520.000,00
3	036	PT.GUDANG GARAM	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	325.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	325.000,00
4	044	BENGKEL MOBIL FIRDAUS	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	156.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	156.000,00
5	047	RM. AMPERA DUA SAUDARA	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	146.250,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	146.250,00
6	106	DSM MOTOR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	97.500,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	97.500,00
7	107	GIPER	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	100.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	100.000,00
8	137	IRHAS	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	325.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	325.000,00
9	140	RM. PONDOK SAKINAH	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	93.600,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	93.600,00
10	149	YODA MART	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	166.400,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	166.400,00
11	150	DEPOT ISI ULANG SYAUFIFA	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	97.500,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	97.500,00
12	154	RUMAH BERSALIN BUAH HATI	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	487.500,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	487.500,00
13	173	TIRTA BENING	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	124.800,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	124.800,00
14	314	BENGKEL AJI MAMBO	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	96.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	96.000,00
15	316	DUTA MOTOR	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	96.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	96.000,00
16	264	DIANA SALON	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	130.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	130.000,00
17	362	ORGEN GISEL	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	150.000,00	2016	SDH DIBONGKAR	100%	150.000,00
18	408	PARMA FOTOCOPY	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	100.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	100.000,00
19	446	TOMMY TOUR & TRAVEL	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	162.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	162.000,00
20	455	HUSNI MOTOR	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	128.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	128.000,00
21	458	BENGKEL ALFAS MANDIRI	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	100.000,00	2016	SDH DI BONGKAR	100%	100.000,00
22	157	RM. SAMBALADO	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	650.000,00	2016	TUTUP	100%	650.000,00
23	163	AZZAHRA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	260.000,00	2016	TUTUP	100%	260.000,00
24	182	RM CAHAYA SURYA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	325.000,00	2016	TUTUP	100%	325.000,00
25	183	KAISAR	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	325.000,00	2016	TUTUP	100%	325.000,00
26	191	KAWACHI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	260.000,00	2016	TUTUP	100%	260.000,00
27	235	RAFA MART DAN CELL	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	TUTUP	100%	195.000,00
28	238	CAHAYA SURYA	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	260.000,00	2016	TUTUP	100%	260.000,00
29	246	PISANG SALAI MAMA	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	130.000,00	2016	TUTUP	100%	130.000,00
30	252	ALIBI SHOP	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	TUTUP	100%	195.000,00
31	275	PUTRA TANJUNG FURNITURE	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	130.000,00	2016	TUTUP	100%	130.000,00
32	284	HANNOCH KETAPING	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	1.125.000,00	2016	TUTUP	100%	1.125.000,00
33	309	PONDOK LESEHAN TIANG BULEK	02 APR 2016 S/D 1 APR 2017	75.000,00	2016	TUTUP	100%	75.000,00
34	326	BAKSO NGUDI	20 JUNI 16 S/D 19 JUNI 17	120.000,00	2016	TUTUP	100%	120.000,00
35	338	RAGNI AQUARIUM	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	60.000,00	2016	TUTUP	100%	60.000,00
36	384	KUE BIKI IDOLA	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	96.000,00	2016	TUTUP	100%	96.000,00
37	419	RM KASIAH BUNDO	20 JULI 2016 S/D 19 JULI 2017	88.000,00	2016	TUTUP	100%	88.000,00

NO	NO.SKP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
38	449	UMEGA PENGANTEN	25 JULI 2016 S/D 24 JULI 2017	112.000,00	2016	TUTUP	100%	112.000,00
39	453	DAFFA KONSTRUKSI	8 AGT 2016 S/D 07 AGT 2017	120.000,00	2016	TUTUP	100%	120.000,00
40	029	SETIAWAN MOTOR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	260.000,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	260.000,00
41	041	PRIMADONA CAR WASH	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	650.000,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	650.000,00
42	139	AJOES DIGITAL	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	900.000,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	900.000,00
43	186	BUDI MULYA II	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	487.500,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	487.500,00
44	358	USAHA MUDA	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	77.000,00	2016	MELEKAT KE BANGUNAN	100%	77.000,00
45	293	PT.BUANA LESTARI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	843.750,00	2016	JADI HIMBAUAN	100%	843.750,00
46	144	CANON DIGITAL COPIER	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	130.000,00	2016	UKURAN KECIL	100%	130.000,00
47	161	FDI DIGITAL FUJI TECK	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	650.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	650.000,00
48	165	ADVAN UTAMA COMPUTER	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	292.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	292.500,00
49	166	AXIO COMPUTER	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	260.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	260.000,00
50	228	NASI SOP ELOK EVO	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	195.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	195.000,00
51	243	TB.AMANAH / IKAD KERAMIK	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	1.096.900,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	1.096.900,00
52	266	EVERCROSS	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	325.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	325.000,00
53	268	YULHERI ALIOES, SH	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	260.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	260.000,00
54	317	MENTARI / INDOSAT	01 APRIL 16 S/D 31 MAR 17	2.900.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	2.900.000,00
55	332	PT.WORLD INNOVATIVE TELECOMUNICATION	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	162.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	162.500,00
56	333	EVERCOSS AZHARA	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	240.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	240.000,00
57	346	COOLPAD AZHARA	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	225.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	225.000,00
58	348	EVERCOSS	07 JUNI 2016 S/D 06 JUNI 2017	240.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	240.000,00
59	352	PT.DWITAMA WUKIRINDO SOLUSI	08 JUNI 2016 S/D 7 JUNI 2017	2.250.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	2.250.000,00
60	381	NESHA PUTRI	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	126.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	126.000,00
61	389	UNCU FENY	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	156.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	156.000,00
62	415	ALVONI ADVERTISING	18 JULI 2016 S/D 17 JULI 2017	144.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	144.000,00
63	020	TOKO BANGUNAN MAKMUR	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	650.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	650.000,00
64	021	TOKO BANGUNAN RUCITA	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	243.750,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	243.750,00
65	032	SIEC I SICINCIN	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	146.250,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	146.250,00
66	034	PRAKTEK DOKTER GIGI	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	91.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	91.000,00
67	121	LAPAU COKLAT	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	2.400.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	2.400.000,00
68	122	LAPAU COKLAT	29 FEB 2016 S/D 28 FEB 2017	1.200.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	1.200.000,00
69	134	RM.CAHAYA SURYA	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	260.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	260.000,00
70	136	ANISA TOURS DAN TRAVEL	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	731.250,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	731.250,00
71	152	MASTRO COMPUTER	14 MAR 2016 S/D 14 MAR 2017	195.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	195.000,00
72	180	PT. ASURANSI BUMI PUTERA	28 MAR 2016 S/D 28 MAR 2017	136.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	136.500,00
73	206	NOTARIS MIRA FEBRIANI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	243.750,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	243.750,00
74	236	SPBU JAMBAL LUBUK ALUNG	30 MAR 2016 S/D 30 MAR 2017	1.800.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	1.800.000,00
75	272	NOTARIS INDRA SAKTI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	292.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	292.500,00

NO	NO.SKP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
76	276	NOTARIS ADE (BLM)	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	292.500,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	292.500,00
77	277	MUHAMMAD YUS, SH	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	130.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	130.000,00
78	285	RIRI AGUSTIEN, SH. MKn	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	168.750,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	168.750,00
79	289	NOTARIS DESMAYANTI	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	168.750,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	168.750,00
80	291	LAPAU COKLAT	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	4.500.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	4.500.000,00
81	297	NOTARIS DEVI HASIBUAN	21 APR 2016 S/D 20 APR 2017	225.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	225.000,00
82	345	TITIPAN KILAT BINGKUANG MAS	03 JUNI 2016 S/D 02 JUNI 2017	240.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	240.000,00
83	369	FAREL PROFIL	9 JUNI 2016 S/D 8 JUNI 2017	104.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	104.000,00
84	394	DUA PUTRI MAMA L.ALUNG	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	150.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	150.000,00
85	395	DUA PUTRI MAMA PAUH KAMBAR	10 JUNI 2016 S/D 9 JUNI 2017	540.000,00	2016	TDK MAU BAYAR	100%	540.000,00
86	192	SUZUKI	29 MAR 2016 S/D 29 MAR 2017	97.500,00	2016	JANJI BAYAR	100%	97.500,00
87	164	pajak reklame pt wordl innovative telecommunication oppo rafaa cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	250.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	250.000,00
88	169	pajak reklame pt world innovative telecommunication oppo matahari cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	1.800.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	1.800.000,00
89	172	pajak reklame pt world innovative telecommunication oppo matahari cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	325.000,00
90	174	pajak reklame pt world innovative telecommunication oppo raffa cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	325.000,00
91	176	pajak reklame pt world innovative telecommunication oppo prima cell	9 JUNI 2017 S/D 8 JUNI 2018	325.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	325.000,00
92	268	pajak reklame pt citra media nusantara/oskar	6 SEPT 2017 S/D 4 SEPT 2018	1.800.000,00	2017	JANJI BAYAR	100%	1.800.000,00
93	205	PAJAK REKLAME WESTERN UNION	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	250.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	250.000,00
94	206	pajak reklame pt pos indonesia ky tanam	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	540.000,00
95	207	pajak reklame pt pos indonesia sicincin	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	540.000,00
96	208	pajak reklame pt pos indonesia pasar usang	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	540.000,00
97	209	pajak reklame pt pos indonesia pauh kamar	22 AGUS 2017 S/D 22 AGUS 2018	540.000,00	2017	Plang Merk Pemerintahan	100%	540.000,00
98	272	pajak reklame PT BUANA LESTARI NUSANTARA reklame honda gajah motor	1 MAR.2017 - 1 MAR 2018	11.718.750,00	2017	Dicabut	100%	11.718.750,00
99	053	PT BUMI SARIMAS INDONESIA	25 FEB 19 S/D 24 FEB 2020	200,00	2019	Kekurangan Bayar	100%	200,00
100	107	OPTIK MUSTIKA	30 MRT 19 S/D 29 MRT 2020	400,00	2019	Kekurangan Bayar	100%	400,00
101	211	RM SELAYU MUTIARA	12 JUNI 19 S/D 11 JUNI 2020	75.600,00	2019	Kekurangan Bayar	100%	75.600,00
102	127	PT BANDANO CITRA BANUA	12 APR 19 S/D 11 APR 2020	270.000,00	2019		100%	270.000,00

NO	NO.SKP	URAIAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH	TAHUN	KET	TARIF	NILAI PENYISIHAN
103	279	OPTIK MULIA PASAR MUDIK	06 SEPT 19 S/D 05 SEPT 2020	500,00	2019	Kekurangan Bayar	100%	500,00
104		SMK KESEHATAN MANDIRI	08 FEB 2020 S/D 07 FEBRUARI 2021	360.000,00	2020	Kekurangan Bayar	100%	360.000,00
105	066	APOTIK MUSTIKA	28 MARET 2020 S/D 28 MARET 2021	410.400,00	2020	dicabut	100%	410.400,00
106	121	CAHAYA SUCI	16 APRIL 2020 S/D 15 APRIL 2021	360.000,00	2020		100%	360.000,00
107	033	HONDA KENDAL	30 JANUARI 2021 S/D 29 JANUARI 2022	450.000,00	2021		50%	225.000,00
108	130	CHIA SAGITAKO	16 MARET 2021 S/D 15 MARET 2022	121.500,00	2021		50%	60.750,00
109	152	CV BAKRI MANDIRI	01 APRIL 2021 S/D 31 MARET 2022	270.000,00	2021		50%	135.000,00
110	216	DECO CELL	17 MEI 2021 S/D 16 MEI 2022	675.000,00	2021		50%	337.500,00
111	356A	OPTIK SURJAYA	04 OKTOBER 2021 S/D 03 OKTOBER 2022	360.000,00	2021		50%	180.000,00
112	384	VIVO (ASYA GROUP)	11 OKTOBER 2021 S/D 10 OKTOBER 2022	750.000,00	2021		50%	375.000,00
113	413	ROMANTIS ADVERTISING	18 NOVEMBER 2021 S/D 17 NOVEMBER 2022	216.000,00	2021		50%	108.000,00
114	331	MARTABAK KUBANG HAYUDA	28 MARET 2023 - 27 MARET 2024	360.000,00	2023		25%	90.000,00
115	332	SURYA KOMPUTER	01 APRIL 2023 S/D 31 MARET 2024	540.000,00	2023		25%	135.000,00
116	333	R.M LINTAS RAYA	16 APRIL 2023 S/D 15 APRIL 2024	360.000,00	2023		25%	90.000,00
117	338	VALENCIA PESTA	03 JULI 2023 S/D 02 JULI 2024	360.000,00	2023		25%	90.000,00
118	109	NADIA ELEKTRONIK	25 JULI 2023 S/D 24 JULI 2024	57.000,00	2023		25%	14.250,00
119	333	MARTABAK MESIR KUBANG	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	200.000,00	2023		25%	50.000,00
120	334	MARTABAK MESIR KUBANG	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	360.000,00	2023		25%	90.000,00
121	335	PALANTA NASI UNI EVI	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	625.000,00	2023		25%	156.250,00
122	336	PINYARAM TINA	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	500.000,00	2023		25%	125.000,00
123	337	AMPERA GAYA BARU	01 JULI 2023 S/D 01 JULI 2024	400.000,00	2023		25%	100.000,00
124	262	ALEXIS MEDIAPRO ADVERTISING	18 SEPTEMBER 2023 s/d 17 SEPTEMBER 2024	843.750,00	2023		25%	210.937,50
125	339	CINTO SATWA	3 APRIL 2023 S/D 2 APRIL 2023	270.000,00	2023		25%	67.500,00
127	114	SPBU 13.225.522 SICINCIN	20 MAR 2024 - 20 MAR 2025	1.875.000,00	2024		0,5%	9.375,00
128	225	RM KIAMBANG RAYA	17 MEI 2024 - 16 MEI 2025	810.000,00	2024		0,5%	4.050,00
129	227	BRI CABANG PADANG PANJANG	28 MEI 2024 - 27 MEI 2025	750.000,00	2024		0,5%	3.750,00
130	310	PT. ARVINDO BANGUN MULIA	22 AGUS 2024 - 21 SEPT 2024	1.687.500,00	2024		0,5%	8.437,50
131	381	PROFESIONAL	11 SEPT 2024 - 10 SEPT 2025	1.020.000,00	2024		0,5%	5.100,00
132	496	SEMPURNA PRINTING	22 DES S/D 28 DES 2024	1.350.000,00	2024		0,5%	6.750,00
133	500	PT.CAESAR OOHMEDIA	25 DES 2024 S/D 23 JAN 2025	2.700.000,00	2024		0,5%	13.500,00
134	501	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	240.000,00	2024		0,5%	1.200,00
135	502	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	1.123.500,00	2024		0,5%	5.617,50
136	503	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	148.200,00	2024		0,5%	741,00
137	504	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	62.300,00	2024		0,5%	311,50
138	505	PT.DAYA INDAH SEJAHTERA	10 DES 2024 S/D9 DES 2025	3.102.000,00	2024		0,5%	15.510,00
		JUMLAH		79.152.800,00				59.280.580,00

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah per wajib pajak sebagai berikut:

NO	WAJIB PAJAK	TGL SKPD	MASA PAJAK	TAHUN	Nomor SKPD	JUMLAH	TARIF	NILAI PENYISIHAN	KET
1	PT Multikon Jagad Perkasa	04 Des 20	Des	2020	185	437.964,00	100%	437.964,00	
2	PT Multikon Jagad Perkasa	02 Januari	Januari	2023	002	1.382.932,00	25%	345.733,00	
3	PT Multikon Jagad Perkasa	01 Februari	Februari	2023	020	1.382.932,00	25%	345.733,00	
4	PT Multikon Jagad Perkasa	01 Mar	Maret	2023	038	1.382.932,00	25%	345.733,00	
5	PT Multikon Jagad Perkasa	03 A pril	April	2023	057	1.382.932,00	25%	345.733,00	
6	PT Multikon Jagad Perkasa	02 Mei	Mei	2023	076	1.382.932,00	25%	345.733,00	
7	PT Multikon Jagad Perkasa	05 Juni	Juni	2023	096	1.382.932,00	25%	345.733,00	
8	PT Multikon Jagad Perkasa	03 juli	Juli	2023	114	1.382.932,00	25%	345.733,00	
9	PT.Jaya Sentrikon Indonesia	01 oktober	September	2024	194	32.748.012,00	0,5%	163.740,06	
10	PT.Jaya Sentrikon Indonesia	1 Nov 2024	Oktober	2024	215	3.503.069,00	0,5%	17.515,35	
11	PT.Jaya Sentrikon Indonesia	2 Dese 2024	November	2024	236	8.404.153,00	0,5%	42.020,77	
12	PT.Kunango Jantan	2 Des 2024	Desember	2024	228	6.002.646,00	0,5%	30.013,23	
Jumlah Piutang						60.776.368,00		3.111.384,40	

Piutang PBB P2 Tahun 2014 per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	Rp 540.320.343	Rp 540.320.343	100%	540.320.343,00	0,00	540.320.343
2	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 118.935.146	Rp 118.935.146	100%	118.935.146,00	0,00	118.935.146
3	Kecamatan Sintoga	Rp 230.305.441	Rp 230.305.441	100%	230.305.441,00	0,00	230.305.441
4	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 140.305.760	Rp 140.305.760	100%	140.305.760,00	0,00	140.305.760
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 83.225.235	Rp 83.225.235	100%	83.225.235,00	0,00	83.225.235
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 189.948.091	Rp 189.948.091	100%	189.948.091,00	0,00	189.948.091
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 292.887.524	Rp 292.887.524	100%	292.887.524,00	0,00	292.887.524
8	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 96.209.451	Rp 96.209.451	100%	96.209.451,00	0,00	96.209.451
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 20.699.780	Rp 20.699.780	100%	20.699.780,00	0,00	20.699.780
10	Kecamatan Patamuan	Rp 52.433.558	Rp 52.433.558	100%	52.433.558,00	0,00	52.433.558
11	Kecamatan Padang Sago	Rp 91.184.225	Rp 91.184.225	100%	91.184.225,00	0,00	91.184.225
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 235.852.583	Rp 235.852.583	100%	235.852.583,00	0,00	235.852.583
13	Kecamatan V Koto Timur	Rp 41.153.193	Rp 41.153.193	100%	41.153.193,00	0,00	41.153.193
14	Kecamatan Sungai Limau	Rp 69.759.899	Rp 69.759.899	100%	69.759.899,00	0,00	69.759.899
15	Kecamatan Batang Gasan	Rp 131.517.605	Rp 131.517.605	100%	131.517.605,00	0,00	131.517.605
16	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 52.185.433	Rp 52.185.433	100%	52.185.433,00	0,00	52.185.433
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 52.754.329	Rp 52.754.329	100%	52.754.329,00	0,00	52.754.329
Jumlah		2.439.677.596,00	2.439.677.596,00		2.439.677.596,00	-	2.439.677.596,00

Piutang PBB P2 Tahun 2015 per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	632.121.700,00	632.121.700,00	100%	632.121.700,00	0,00	632.121.700
2	Kecamatan Lubuk Alung	58.258.253,00	58.258.253,00	100%	58.258.253,00	0,00	58.258.253
3	Kecamatan Sintoga	291.993.187,00	291.993.187,00	100%	291.993.187,00	0,00	291.993.187
4	Kecamatan Nan Sabaris	125.592.494,00	125.592.494,00	100%	125.592.494,00	0,00	125.592.494
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	73.569.458,00	73.569.458,00	100%	73.569.458,00	0,00	73.569.458
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	150.809.411,00	150.809.411,00	100%	150.809.411,00	0,00	150.809.411
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	233.055.778,00	233.055.778,00	100%	233.055.778,00	0,00	233.055.778
8	Kecamatan Enam Lingkung	83.858.280,00	83.858.280,00	100%	83.858.280,00	0,00	83.858.280
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	12.684.327,00	12.684.327,00	100%	12.684.327,00	0,00	12.684.327
10	Kecamatan Patamuan	47.125.240,00	47.125.240,00	100%	47.125.240,00	0,00	47.125.240
11	Kecamatan Padang Sago	79.077.115,00	79.077.115,00	100%	79.077.115,00	0,00	79.077.115
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	148.139.951,00	148.139.951,00	100%	148.139.951,00	0,00	148.139.951
13	Kecamatan V Koto Timur	41.045.972,00	41.045.972,00	100%	41.045.972,00	0,00	41.045.972
14	Kecamatan Sungai Limau	28.228.000,00	28.228.000,00	100%	28.228.000,00	0,00	28.228.000
15	Kecamatan Batang Gasan	144.471.677,00	144.471.677,00	100%	144.471.677,00	0,00	144.471.677
16	Kecamatan Sungai Geringging	47.212.687,00	47.212.687,00	100%	47.212.687,00	0,00	47.212.687
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	37.978.877,00	37.978.877,00	100%	37.978.877,00	0,00	37.978.877
Jumlah		2.235.222.407,00	2.235.222.407,00		2.235.222.407,00	-	2.235.222.407,00

Piutang PBB P2 Tahun 2016 per 31 Desember 2024 sebagai berikut :							
No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	932.354.853,00	932.354.853,00	100%	932.354.853,00	0,00	932.354.853
2	Kecamatan Lubuk Alung	367.570.824,00	367.570.824,00	100%	367.570.824,00	0,00	367.570.824
3	Kecamatan Sintoga	32.929.315,00	32.929.315,00	100%	32.929.315,00	0,00	32.929.315
4	Kecamatan Nan Sabaris	49.261.260,00	49.261.260,00	100%	49.261.260,00	0,00	49.261.260
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	26.016.968,00	26.016.968,00	100%	26.016.968,00	0,00	26.016.968
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	73.622.024,00	73.622.024,00	100%	73.622.024,00	0,00	73.622.024
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	206.544.294,00	206.544.294,00	100%	206.544.294,00	0,00	206.544.294
8	Kecamatan Enam Lingkung	112.840.495,00	112.840.495,00	100%	112.840.495,00	0,00	112.840.495
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	153.190.316,00	153.190.316,00	100%	153.190.316,00	0,00	153.190.316
10	Kecamatan Patamuan	40.913.642,00	40.913.642,00	100%	40.913.642,00	0,00	40.913.642
11	Kecamatan Padang Sago	4.421.815,00	4.421.815,00	100%	4.421.815,00	0,00	4.421.815
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	44.993.068,00	44.993.068,00	100%	44.993.068,00	0,00	44.993.068
13	Kecamatan V Koto Timur	12.261.157,00	12.261.157,00	100%	12.261.157,00	0,00	12.261.157
14	Kecamatan Sungai Limau	92.076.393,00	92.076.393,00	100%	92.076.393,00	0,00	92.076.393
15	Kecamatan Batang Gasan	51.288.699,00	51.288.699,00	100%	51.288.699,00	0,00	51.288.699
16	Kecamatan Sungai Geringging	36.472.933,00	36.472.933,00	100%	36.472.933,00	0,00	36.472.933
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	38.773.813,00	38.773.813,00	100%	38.773.813,00	0,00	38.773.813
Jumlah		2.275.531.869,00	2.275.531.869,00		2.275.531.869,00	-	2.275.531.869,00

Piutang PBB P2 Tahun 2017 per 31 Desember 2024 sebagai berikut :							
No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	1.135.111.745,00	1.135.111.745,00	100%	1.135.111.745,00	0,00	1.135.111.745
2	Kecamatan Lubuk Alung	346.029.589,00	346.029.589,00	100%	346.029.589,00	0,00	346.029.589
3	Kecamatan Sintoga	28.538.669,00	28.538.669,00	100%	28.538.669,00	0,00	28.538.669
4	Kecamatan Nan Sabaris	42.234.644,00	42.234.644,00	100%	42.234.644,00	0,00	42.234.644
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	22.930.119,00	22.930.119,00	100%	22.930.119,00	0,00	22.930.119
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	42.100.679,00	42.100.679,00	100%	42.100.679,00	0,00	42.100.679
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	206.114.763,00	206.114.763,00	100%	206.114.763,00	0,00	206.114.763
8	Kecamatan Enam Lingkung	95.316.153,00	95.316.153,00	100%	95.316.153,00	0,00	95.316.153
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	66.197.820,00	66.197.820,00	100%	66.197.820,00	0,00	66.197.820
10	Kecamatan Patamuan	2.520.531,00	2.520.531,00	100%	2.520.531,00	0,00	2.520.531
11	Kecamatan Padang Sago	99.711,00	99.711,00	100%	99.711,00	0,00	99.711
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	19.031.751,00	19.031.751,00	100%	19.031.751,00	0,00	19.031.751
13	Kecamatan V Koto Timur	10.078.476,00	10.078.476,00	100%	10.078.476,00	0,00	10.078.476
14	Kecamatan Sungai Limau	77.000.246,00	77.000.246,00	100%	77.000.246,00	0,00	77.000.246
15	Kecamatan Batang Gasan	49.563.169,00	49.563.169,00	100%	49.563.169,00	0,00	49.563.169
16	Kecamatan Sungai Geringging	53.821.297,00	53.821.297,00	100%	53.821.297,00	0,00	53.821.297
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	57.753.748,00	57.753.748,00	100%	57.753.748,00	0,00	57.753.748
Jumlah		2.254.443.110,00	2.254.443.110,00			-	2.254.443.110,00

Piutang PBB P2 Tahun 2018 per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	1.505.769.954,00	1.505.769.954,00	100%	1.505.769.954,00	0,00	1.505.769.954
2	Kecamatan Lubuk Alung	515.445.324,00	515.445.324,00	100%	515.445.324,00	0,00	515.445.324
3	Kecamatan Sintoga	30.802.242,00	30.802.242,00	100%	30.802.242,00	0,00	30.802.242
4	Kecamatan Nan Sabaris	33.242.898,00	33.242.898,00	100%	33.242.898,00	0,00	33.242.898
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	16.953.348,00	16.953.348,00	100%	16.953.348,00	0,00	16.953.348
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	44.915.074,00	44.915.074,00	100%	44.915.074,00	0,00	44.915.074
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	219.722.122,00	219.722.122,00	100%	219.722.122,00	0,00	219.722.122
8	Kecamatan Enam Lingkung	107.094.914,00	107.094.914,00	100%	107.094.914,00	0,00	107.094.914
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	56.111.679,00	56.111.679,00	100%	56.111.679,00	0,00	56.111.679
10	Kecamatan Patamuan	7.356.386,00	7.356.386,00	100%	7.356.386,00	0,00	7.356.386
11	Kecamatan Padang Sago	86.305,00	86.305,00	100%	86.305,00	0,00	86.305
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	38.179.698,00	38.179.698,00	100%	38.179.698,00	0,00	38.179.698
13	Kecamatan V Koto Timur	3.530.748,00	3.530.748,00	100%	3.530.748,00	0,00	3.530.748
14	Kecamatan Sungai Limau	75.356.572,00	75.356.572,00	100%	75.356.572,00	0,00	75.356.572
15	Kecamatan Batang Gasan	65.035.783,00	65.035.783,00	100%	65.035.783,00	0,00	65.035.783
16	Kecamatan Sungai Geringging	50.103.611,00	50.103.611,00	100%	50.103.611,00	0,00	50.103.611
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	64.132.339,00	64.132.339,00	100%	64.132.339,00	0,00	64.132.339
Jumlah		2.833.838.997,00	2.833.838.997,00		2.833.838.997,00	-	2.833.838.997,00

Piutang PBB P2 Tahun 2019 per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	2.271.155.342,00	2.271.155.342,00	100%	2.271.155.342,00	0,00	2.271.155.342
2	Kecamatan Lubuk Alung	630.998.571,00	630.998.571,00	100%	630.998.571,00	0,00	630.998.571
3	Kecamatan Sintoga	11.631.046,00	11.631.046,00	100%	11.631.046,00	0,00	11.631.046
4	Kecamatan Nan Sabaris	29.322.135,00	29.322.135,00	100%	29.322.135,00	0,00	29.322.135
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	21.692.750,00	21.692.750,00	100%	21.692.750,00	0,00	21.692.750
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	43.011.171,00	43.011.171,00	100%	43.011.171,00	0,00	43.011.171
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	280.642.597,00	280.642.597,00	100%	280.642.597,00	0,00	280.642.597
8	Kecamatan Enam Lingkung	105.226.770,00	105.226.770,00	100%	105.226.770,00	0,00	105.226.770
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	53.461.481,00	53.461.481,00	100%	53.461.481,00	0,00	53.461.481
10	Kecamatan Patamuan	16.455.197,00	16.455.197,00	100%	16.455.197,00	0,00	16.455.197
11	Kecamatan Padang Sago	96.105,00	96.105,00	100%	96.105,00	0,00	96.105
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	37.914.884,00	37.914.884,00	100%	37.914.884,00	0,00	37.914.884
13	Kecamatan V Koto Timur	2.395.251,00	2.395.251,00	100%	2.395.251,00	0,00	2.395.251
14	Kecamatan Sungai Limau	70.254.159,00	70.254.159,00	100%	70.254.159,00	0,00	70.254.159
15	Kecamatan Batang Gasan	78.124.813,00	78.124.813,00	100%	78.124.813,00	0,00	78.124.813
16	Kecamatan Sungai Geringging	51.539.198,00	51.539.198,00	100%	51.539.198,00	0,00	51.539.198
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	88.242.376,00	88.242.376,00	100%	88.242.376,00	0,00	88.242.376
Jumlah		3.792.163.846,00	3.792.163.846,00		3.792.163.846,00	-	3.792.163.846,00

Piutang PBB P2 Tahun 2020 per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	2.233.150.810,00	2.233.150.810,00	50%	1.116.575.405,00	0,00	1.116.575.405
2	Kecamatan Lubuk Alung	696.137.838,00	696.137.838,00	50%	348.068.919,00	0,00	348.068.919
3	Kecamatan Sintoga	10.133.119,00	10.133.119,00	50%	5.066.559,50	0,00	5.066.560
4	Kecamatan Nan Sabaris	30.497.815,00	30.497.815,00	50%	15.248.907,50	0,00	15.248.908
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	15.555.756,00	15.555.756,00	50%	7.777.878,00	0,00	7.777.878
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	46.076.045,00	46.076.045,00	50%	23.038.022,50	0,00	23.038.023
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	236.313.321,00	236.313.321,00	50%	118.156.660,50	0,00	118.156.661
8	Kecamatan Enam Lingkung	121.591.655,00	121.591.655,00	50%	60.795.827,50	0,00	60.795.828
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	95.309.370,00	95.309.370,00	50%	47.654.685,00	0,00	47.654.685
10	Kecamatan Patamuan	16.514.583,00	16.514.583,00	50%	8.257.291,50	0,00	8.257.292
11	Kecamatan Padang Sago	764.575,00	764.575,00	50%	382.287,50	0,00	382.288
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	42.426.563,00	42.426.563,00	50%	21.213.281,50	0,00	21.213.282
13	Kecamatan V Koto Timur	8.640.049,00	8.640.049,00	50%	4.320.024,50	0,00	4.320.025
14	Kecamatan Sungai Limau	73.680.847,00	73.680.847,00	50%	36.840.423,50	0,00	36.840.424
15	Kecamatan Batang Gasan	59.693.246,00	59.693.246,00	50%	29.846.623,00	0,00	29.846.623
16	Kecamatan Sungai Geringging	105.707.269,00	105.707.269,00	50%	52.853.634,50	0,00	52.853.635
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	115.382.844,00	115.382.844,00	50%	57.691.422,00	0,00	57.691.422
Jumlah		3.907.575.705,00	3.907.575.705,00		1.953.787.852,50	-	1.953.787.852,50

Piutang PBB P2 Tahun 2021 per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :							
No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	2.010.068.793,00	2.010.068.793,00	50%	1.005.034.396,50	0,00	1.005.034.397
2	Kecamatan Lubuk Alung	727.505.766,00	727.505.766,00	50%	363.752.883,00	0,00	363.752.883
3	Kecamatan Sintoga	11.254.687,00	11.254.687,00	50%	5.627.343,50	0,00	5.627.344
4	Kecamatan Nan Sabaris	16.483.566,00	16.483.566,00	50%	8.241.783,00	0,00	8.241.783
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	10.307.199,00	10.307.199,00	50%	5.153.599,50	0,00	5.153.600
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	53.318.386,00	53.318.386,00	50%	26.659.193,00	0,00	26.659.193
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	250.781.906,00	250.781.906,00	50%	125.390.953,00	0,00	125.390.953
8	Kecamatan Enam Lingkung	121.583.394,00	121.583.394,00	50%	60.791.697,00	0,00	60.791.697
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	102.766.717,00	102.766.717,00	50%	51.383.358,50	0,00	51.383.359
10	Kecamatan Patamuan	14.728.710,00	14.728.710,00	50%	7.364.355,00	0,00	7.364.355
11	Kecamatan Padang Sago	449.653,00	449.653,00	50%	224.826,50	0,00	224.827
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	17.970.766,00	17.970.766,00	50%	8.985.383,00	0,00	8.985.383
13	Kecamatan V Koto Timur	4.162.013,00	4.162.013,00	50%	2.081.006,50	0,00	2.081.007
14	Kecamatan Sungai Limau	60.422.120,00	60.422.120,00	50%	30.211.060,00	0,00	30.211.060
15	Kecamatan Batang Gasan	73.943.247,00	73.943.247,00	50%	36.971.623,50	0,00	36.971.624
16	Kecamatan Sungai Geringging	67.430.296,00	67.430.296,00	50%	33.715.148,00	0,00	33.715.148
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	98.511.831,00	98.511.831,00	50%	49.255.915,50	0,00	49.255.916
Jumlah		3.641.689.050,00	3.641.689.050,00		1.820.844.525,00	-	1.820.844.525,00

Piutang PBB P2 Tahun 2022 per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	2.353.434.671,00	2.353.434.671,00	25%	588.358.667,75	0,00	588.358.668
2	Kecamatan Lubuk Alung	881.284.057,00	881.284.057,00	25%	220.321.014,25	0,00	220.321.014
3	Kecamatan Sintoga	9.293.984,00	9.293.984,00	25%	2.323.496,00	0,00	2.323.496
4	Kecamatan Nan Sabaris	46.200.352,00	46.200.352,00	25%	11.550.088,00	0,00	11.550.088
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	21.568.291,00	21.568.291,00	25%	5.392.072,75	0,00	5.392.073
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	48.609.564,00	48.609.564,00	25%	12.152.391,00	0,00	12.152.391
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	253.675.848,00	253.675.848,00	25%	63.418.962,00	0,00	63.418.962
8	Kecamatan Enam Lingkung	76.807.665,00	76.807.665,00	25%	19.201.916,25	0,00	19.201.916
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	389.121.481,00	389.121.481,00	25%	97.280.370,25	0,00	97.280.370
10	Kecamatan Patamuan	199.236.434,00	199.236.434,00	25%	49.809.108,50	0,00	49.809.109
11	Kecamatan Padang Sago	1.291.758,00	1.291.758,00	25%	322.939,50	0,00	322.940
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	19.313.804,00	19.313.804,00	25%	4.828.451,00	0,00	4.828.451
13	Kecamatan V Koto Timur	6.464.302,00	6.464.302,00	25%	1.616.075,50	0,00	1.616.076
14	Kecamatan Sungai Limau	48.844.490,00	48.844.490,00	25%	12.211.122,50	0,00	12.211.123
15	Kecamatan Batang Gasan	67.205.524,00	67.205.524,00	25%	16.801.381,00	0,00	16.801.381
16	Kecamatan Sungai Geringging	71.124.094,00	71.124.094,00	25%	17.781.023,50	0,00	17.781.024
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	77.464.793,00	77.464.793,00	25%	19.366.198,25	0,00	19.366.198
Jumlah		4.570.941.112,00	4.570.941.112,00		1.142.735.278,00	-	1.142.735.278,00

Piutang PBB P2 Tahun 2023 per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PIUTANG PBB 2023	Saldo Audited	REALISASI PBB 2023	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	Rp 8.202.735.647	Rp 8.205.669.387	25%	2.050.683.911,75	733435,00	2.051.417.347
2	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 2.219.644.727	Rp 2.223.869.365	25%	554.911.181,75	1056159,50	555.967.341
3	Kecamatan Sintoga	Rp 13.887.383	Rp 13.887.383	25%	3.471.845,75	0,00	3.471.846
4	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 31.150.221	Rp 31.200.221	25%	7.787.555,25	12500,00	7.800.055
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 24.210.359	Rp 24.606.097	25%	6.052.589,75	98934,50	6.151.524
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 52.391.029	Rp 52.391.029	25%	13.097.757,25	0,00	13.097.757
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 236.345.927	Rp 236.345.927	25%	59.086.481,75	0,00	59.086.482
8	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 119.876.345	Rp 119.901.545	25%	29.969.086,25	6300,00	29.975.386
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 73.408.610	Rp 73.455.482	25%	18.352.152,50	11718,00	18.363.871
10	Kecamatan Patamuan	-Rp 1.983.818	Rp 3.648.265	25%	- 495.954,50	1408020,75	912.066
11	Kecamatan Padang Sago	Rp 1.861.270	Rp 1.861.270	25%	465.317,50	0,00	465.318
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 15.182.546	Rp 15.443.206	25%	3.795.636,50	65165,00	3.860.802
13	Kecamatan V Koto Timur	Rp 12.353.090	Rp 12.353.090	25%	3.088.272,50	0,00	3.088.273
14	Kecamatan Sungai Limau	Rp 50.123.252	Rp 50.123.252	25%	12.530.813,00	0,00	12.530.813
15	Kecamatan Batang Gasan	Rp 53.499.733	Rp 53.499.733	25%	13.374.933,25	0,00	13.374.933
16	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 70.207.671	Rp 70.258.896	25%	17.551.917,75	12806,25	17.564.724
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 64.367.001	Rp 64.407.001	25%	16.091.750,25	10000,00	16.101.750
Jumlah		Rp 11.239.260.993	Rp 11.252.921.149		Rp 2.809.815.248	Rp 3.415.039	Rp 2.813.230.287

Piutang PBB P2 Tahun 2024 per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PIUTANG PBB 2023	Saldo Audited	REALISASI PBB 2023	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Kecamatan Batang Anai	Rp 6.446.067.067	Rp 6.446.608.017	0,5%	Rp 32.230.335	2704,75	32.233.040
2	Kecamatan Lubuk Alung	Rp 1.452.654.273	Rp 1.452.939.982	0,5%	Rp 7.263.271	1428,54	7.264.700
3	Kecamatan Sintoga	Rp 12.611.124	Rp 12.647.758	0,5%	Rp 63.056	183,17	63.239
4	Kecamatan Nan Sabaris	Rp 40.196.088	Rp 40.216.973	0,5%	Rp 200.980	104,42	201.085
5	Kecamatan Ulakan Tapakis	Rp 14.505.876	Rp 14.505.876	0,5%	Rp 72.529	0,00	72.529
6	Kecamatan 2x11 Enam Lingkung	Rp 166.415.210	Rp 166.445.240	0,5%	Rp 832.076	150,15	832.226
7	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Rp 462.976.481	Rp 463.180.258	0,5%	Rp 2.314.882	1018,88	2.315.901
8	Kecamatan Enam Lingkung	Rp 168.060.714	Rp 168.306.364	0,5%	Rp 840.304	1228,25	841.532
9	Kecamatan VII Koto Sei Sarik	Rp 43.067.930	Rp 43.067.930	0,5%	Rp 215.340	0,00	215.340
10	Kecamatan Patamuan	Rp 2.168.575	Rp 2.168.575	0,5%	Rp 10.843	0,00	10.843
11	Kecamatan Padang Sago	Rp 606.680	Rp 606.680	0,5%	Rp 3.033	0,00	3.033
12	Kecamatan V Koto Kp Dalam	Rp 3.942.968	Rp 3.942.968	0,5%	Rp 19.715	0,00	19.715
13	Kecamatan V Koto Timur	Rp 15.232.366	Rp 15.232.366	0,5%	Rp 76.162	0,00	76.162
14	Kecamatan Sungai Limau	Rp 37.594.106	Rp 38.835.744	0,5%	Rp 187.971	6208,19	194.179
15	Kecamatan Batang Gasan	Rp 72.860.584	Rp 72.879.834	0,5%	Rp 364.303	96,25	364.399
16	Kecamatan Sungai Geringging	Rp 66.316.691	Rp 66.316.691	0,5%	Rp 331.583	0,00	331.583
17	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	Rp 24.467.439	Rp 24.954.187	0,5%	Rp 122.337	2433,74	124.771
Jumlah		Rp 9.029.744.172	Rp 9.032.855.443	Rp 0	Rp 45.148.721	Rp 15.556	Rp 45.164.277

No	Tahun	Saldo Piutang Un Audited	Saldo Audited	Tarif	Saldo Penyisihan Un Audited	Koreksi Audit	Nilai Piutang PBB Audited
1	Tahun 2009	2.843.675.290,00	2.843.675.290,00	100%	2.843.675.290,00	Rp -	2.843.675.290,00
2	Tahun 2010	2.911.173.985,00	2.911.173.985,00	100%	2.911.173.985,00	Rp -	2.911.173.985,00
3	Tahun 2011	4.152.722.763,00	4.152.722.763,00	100%	4.152.722.763,00	Rp -	4.152.722.763,00
4	Tahun 2012	3.717.761.420,00	3.717.761.420,00	100%	3.717.761.420,00	Rp -	3.717.761.420,00
5	Tahun 2013	4.573.338.653,00	4.573.338.653,00	100%	4.573.338.653,00	Rp -	4.573.338.653,00
6	Tahun 2014	2.439.677.596,00	2.439.677.596,00	100%	2.439.677.596,00	Rp -	2.439.677.596,00
7	Tahun 2015	2.235.222.407,00	2.235.222.407,00	100%	2.235.222.407,00	Rp -	2.235.222.407,00
8	Tahun 2016	2.275.531.869,00	2.275.531.869,00	100%	2.275.531.869,00	Rp -	2.275.531.869,00
9	Tahun 2017	2.254.443.110,00	2.254.443.110,00	100%	2.254.443.110,00	Rp -	2.254.443.110,00
10	Tahun 2018	2.833.838.997,00	2.833.838.997,00	100%	2.833.838.997,00	Rp -	2.833.838.997,00
11	Tahun 2019	3.792.163.846,00	3.792.163.846,00	100%	3.792.163.846,00	Rp -	3.792.163.846,00
12	Tahun 2020	3.907.575.705,00	3.907.575.705,00	50%	1.953.787.852,50	Rp -	1.953.787.852,50
13	Tahun 2021	3.641.689.050,00	3.641.689.050,00	50%	1.820.844.525,00	Rp -	1.820.844.525,00
14	Tahun 2022	4.570.941.112,00	4.570.941.112,00	25%	1.142.735.278,00	Rp -	1.142.735.278,00
15	Tahun 2023	11.239.260.993,00	11.252.921.149,00	25%	2.809.815.248,25	Rp 3.415.039,00	2.806.400.209,25
16	Tahun 2024	9.029.744.172,00	9.032.855.443,00	0,5%	45.148.720,86	Rp 15.556,35	
Jumlah		66.418.760.968,00	66.435.532.395,00		41.801.881.560,61	Rp 3.415.039,00	41.753.317.800,75

Progress Validasi Piutang PBB P2 Tahun 2024

No.	Uraian hasil Validasi		Per Tgl 10 Mei 2025	Per Tgl 11 Mei 2025	Per Tgl 14 Mei 2025	TOTAL
A	OBJEK PAJAK DAN SEBJEK PAJAK TIDAK DIKETAHUI DAN GANDA					
	1	NAGARI KETAPING	2.970.608.793,00		1.959.133.350,00	
	2	NAGARI KASANG	1.712.249.271,00		2.265.224.921,00	
	3	NAGARI SUNGAI BULUH BARAT	674.749.715,00		966.575.270,00	
	4	NAGARI SUNGAI BULUH SELATAN	110.951.001,00		125.700.504,00	
	5	NAGARI SUNGAI BULUH TIMUR	14.834.796,00		114.259.639,00	
	6	NAGARI SUNGAI BULUH UTARA	202.016.442,00		415.393.665,00	
	7	NAGARI BUAYAN LUBUK ALUNG	103.436.350,00			
	8	SUNGAI BULUH	81.029.864,00			
	9	NAGARI AIA TAJUN		267.627.434,00		
	10	NAGARI BALAH HILIR		1.635.053.194,00		
	11	NAGARI LUBUK ALUNG		864.036.734,00		
	12	NAGARI PUNGGUNG KASIAK		760.709.489,00		
	13	NAGARI SUNGAI ABANG		299.475.305,00		
	14	NAGARI SINGGULING		344.212.052,00		
	15	NAGARI SIKABU		324.361.342,00		
	16	NAGARI SALIBUTAN		120.789.301,00		
	17	NAGARI PASIE LAWEH		129.999.677,00		
	18	KEC. 2X11 ENAM LINGKUNG			57.246.740,00	
	19	KEC 2X11 KAYU TANAM			590.636.206,00	
	20	KEC. AUR MALINTANG			446.609.459,00	
	21	KEC. PADANG SAGO			1.005.437,00	
	22	KEC. SINTUK TOBOH GADANG			46.331.780,00	
	23	KEC. SUNGAI LIMAU			247.220.938,00	
	24	KEC ENAM LINGKUNG			160.354.591,00	
	25	KEC. KAMPUNG DALAM			30.184.385,00	
	26	KEC. BATANG GASAN			143.329.043,00	
	27	KEC. SUNGAI GERINGGING			47.264.618,00	
		Jumlah Objek Pajak dan Subjek Pajak Tidak Diketahui dan Gar	5.869.876.232,00	4.746.264.528,00	7.616.470.546,00	18.232.611.306,00
		Ganda				57.991.925,00
		Jumlah Objek Pajak dan Subjek Pajak Tidak Diketahui				18.174.619.381,00

B	OBJEK PAJAK DIKETAHUI DAN SUBJEK PAJAK TIDAK DIKETAHUI					
	1	NAGARI KASANG	150.392.299,00			
	2	NAGARI KETAPING	28.618.067,00			
	3	NAGARI SUNGAI BULUH BARAT	3.840.256,00			
	4	NAGARI SUNGAI BULUH SELATAN	9.331.151,00			
	5	NAGARI BUAYAN LUBUK ALUNG	83.349.552,00			
		Jumlah Objek Pajak Diketahui dan Subjek Pajak Tidak Diketahui	275.531.325,00			275.531.325,00
C	OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK DIKETAHUI					
	1	NAGARI KASANG	570.715.752,00		2.097.065.371,00	
	2	NAGARI KETAPING	1.949.575.751,00		6.023.894.090,00	
	3	NAGARI SUNGAI BULUH	13.356.722,00		137.678.858,00	
	4	NAGARI SUNGAI BULUH UTARA	636.738.958,00		148.897.025,00	
	5	NAGARI SUNGAI BULUH BARAT	374.562.732,00		692.597.278,00	
	6	NAGARI SUNGAI BULUH SELATAN	384.860.191,00		288.149.839,00	
	7	NAGARI BUAYAN LUBUK ALUNG	387.168.881,00			
	8	PIP, JAYA SENTRIKON DAN JUSUF KALLA	2.479.029.663,00			
	9	NAGARI BALH HILIR LUBUK ALUNG		1.000.278.962,00		
	10	NAGARI SALIBUTAN LUBUK ALUNG		77.258.332,00		
	11	NAGARI SINGGULING		224.412.588,00		
	12	NAGARI SUNGAI ABANG		616.936.757,00		
	13	NAGARI PUNGGUNG KASIAK		301.182.525,00		
	14	NAGARI SIKABU		119.522.201,00		
	15	NAGARI AIA TAJUN		230.531.357,00		
	16	NAGARI LUBUK ALUNG		434.461.437,00		
	17	NAGARI PASIE LAWEH		268.124.039,00		
	18	NAGARI SUNGAI BULUH TIMUR			89.779.651,00	
		Jumlah Objek Pajak dan Subjek Pajak Diketahui	6.796.008.650,00	3.272.708.198,00	9.478.062.112,00	19.546.778.960,00
D	1	OBJEK PAJAK DENGAN SUBJEK PAJAK GANDA	57.991.925,00			57.991.925,00

TOTAL PIUTANG		66.435.532.395,00
LIMPAHAN KPP PRATAMA		18.198.672.111,00
HASIL VALIDASI S.D 16 MAY 2025		
OP DAN SP DIKETAHUI	19.546.778.960,00	
OP DAN SP TIDAK DIKETAHUI	18.174.619.381,00	
OP DENGAN SP GANDA	57.991.925,00	
OP DIKETAHUI SP TIDAK DIKETAHUI	275.531.325,00	
	JUMLAH HASIL VALIDASI	38.054.921.591,00
	SISA BELUM DIVALIDASI	10.181.938.693,00

OP DAN SP DIKETAHUI

NAGARI	NOP	PIUTANG
KASANG	5751	2.667.781.123,00
KETAPING	11176	7.973.469.841,00
SUNGAI BULUH	521	151.035.580,00
SUNGAI BULUH UTARA	703	785.635.983,00
SUNGAI BULUH BARAT	363	1.067.160.010,00
SUNGAI BULUH SELATAN	1499	673.010.030,00
BUAYAN LUBUK ALUNG	72	387.168.881,00
PIP, JAYA SENTRIKON DAN JUSUF KALLA	14	2.479.029.663,00
BALH HILIR LUBUK ALUNG	1927	1.000.278.962,00
SALIBUTAN LUBUK ALUNG	574	77.258.332,00
SINGGULING	1704	224.412.588,00
SUNGAI ABANG	1332	616.936.757,00
PUNGGUNG KASIAK	1398	301.182.525,00
SIKABU	473	119.522.201,00
AIA TAJUN	972	230.531.357,00
LUBUK ALUNG	2665	434.461.437,00
PASIE LAWEH	2653	268.124.039,00
SUNGAI BULUH TIMUR	776	89.779.651,00
	34573	19.546.778.960,00

OP DAN SP TIDAK DIKETAHUI

NAGARI	NOP	PIUTANG
KETAPING	4243	4.929.742.143,00
KASANG	2899	3.977.474.192,00
SUNGAI BULUH BARAT	568	1.641.324.985,00
SUNGAI BULUH SELATAN	759	236.651.505,00
SUNGAI BULUH TIMUR	61	129.094.435,00
SUNGAI BULUH UTARA	554	617.410.107,00
BUAYAN LUBUK ALUNG	86	103.436.350,00
SUNGAI BULUH	11	81.029.864,00
AIA TAJUN	1172	267.627.434,00
BALAH HILIR	3168	1.635.053.194,00
LUBUK ALUNG	3128	864.036.734,00
PUNGGUNG KASIAK	2461	760.709.489,00
SUNGAI ABANG	873	299.475.305,00
SINGGULING	1188	344.212.052,00
SIKABU	500	324.361.342,00
SALIBUTAN	531	120.789.301,00
PASIE LAWEH	2305	129.999.677,00
SICINCIN	327	31.126.820,00
LUBUK PANDAN	79	8.774.973,00
SUNGAI ASAM	177	17.344.947,00
GUGUAK	19	5.663.383,00
ANDURING	749	163.771.446,00
KAPALO HILALANG	1095	361.741.652,00
KAYU TANAM	192	59.459.725,00
III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	3738	217.670.024,00
III KOTO AUR MALINTANG TIMUR	689	8.815.286,00

III KOTO AUR MALINTANG SELATAN	6669	195.518.599,00
III KOTO AUR MALINTANG UTARA	1010	16.830.705,00
BALAI BAIK	627	7.774.845,00
Batu Kalang	25	275.730,00
Batu Kalang Utara	23	300.950,00
Koto Dalam Selatan	20	428.757,00
TOBOH GADANG	29	3.703.012,00
TOBOH GADANG TIMUR	23	1.246.410,00
TOBOH GADANG BARAT	66	2.979.171,00
TOBOH GADANG SELATAN	21	756.114,00
SINTUK	407	37.647.073,00
Guguak Kuranji Hilir	33	20.239.040,00
KURANJI HILIR	2043	46.813.777,00
KURANJI HILIR	4050	124.577.904,00
PILUBANG	4227	55.590.217,00
GADUR	67	6.226.939,00
TOBOH KETEK	1013	14.489.377,00
PARIT MALINTANG	67	6.896.454,00
PAKANDANGAN	1077	45.588.200,00
KOTO TINGGI	1096	87.153.621,00
SIKUCUR TIMUR	307	24.897.649,00
SIKUCUR TENGAH	2	102.245,00
SIKUCUR BARAT	22	2.439.708,00
CAMPAGO BARAT	7	449.091,00
CAMPAGO	127	2.295.692,00
MALAI V SUKU TMR	2960	88.218.705,00
GASAN GADANG KURANJI HULU	342	10.469.621,00
GASAN GADANG	1203	23.249.416,00
MALAI V SUKU	576	19.812.533,00
MALAI V SUKU TIMUR	36	1.578.768,00
BATU GADANG KURANJI HILIR	198	4.253.475,00
Malai III Koto	367	23.515.221,00
SEI SIRAH KURANJI HULU	284	5.584.498,00
KURANJI HULU	272	13.911.424,00
	60868	18.232.611.306,00
GANDA	141	57.991.925,00
TOTAL OP DAN SP TIDAK DIKETAHUI	60.727	18.174.619.381,00

OBJEK PAJAK DIKETAHUI DAN SUBJEK PAJAK TIDAK DIKETAHUI

NAGARI	NOP	PIUTANG
KASANG	204	150.392.299,00
KETAPING	18	28.618.067,00
SUNGAI BULUH BARAT	3	3.840.256,00
SUNGAI BULUH SELATAN	6	9.331.151,00
BUAYAN LUBUK ALUNG	49	83.349.552,00
	280	275.531.325,00

Daftar Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

NO.	NAMA PERUSAHAAN	Sisa Piutang tahun 2023	Penerimaan Tahun 2024	Sisa Piutang Sampai dengan Tahun 2024	% Penyisihan piutang tahun 2023	Penyisihan Piutang sampai tahun 2023 di tahun 2024
1	PT. Centratama Menara	94.000.000,00	139.000.000,00		100,00%	-
2	PT. Akses Prima Indonesia	14.250.000,00		14.250.000,00	100,00%	14.250.000,00
3	PT. Tower Bersama Group (TBG)	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00
4	PT. Mega Tower	63.060.729,00		63.060.729,00	100,00%	63.060.729,00
5	PT. XL Axiata, Tbk	142.500.000,00		142.500.000,00	100,00%	142.500.000,00
6	PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk	67.250.000,00	44.500.000,00	22.750.000,00	100,00%	22.750.000,00
7	PT. Infrasy Persada	22.284.263,00		22.284.263,00	100,00%	22.284.263,00
8	PT. Indosat	134.500.000,00		134.500.000,00	100,00%	134.500.000,00
9	PT. Dayamitra Telekomunikasi	-		-	100,00%	-
10	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	156.500.000,00	156.500.000,00	-	100,00%	-
11	PT. Telkomsel	6.937.658,00		6.937.658,00	100,00%	6.937.658,00
12	PT Inti Bangun Sejahtera	41.250.000,00		41.250.000,00	100,00%	41.250.000,00
JUMLAH		745.032.650,00	340.000.000,00	450.032.650,00		450.032.650,00

Penyisihan Piutang Retribusi Sampah

NO	Nama Pihak Ke 3	Kontrak Setahun	Jumlah Bayar Tahun 2024	Tunggakan / (lebih Bayar 2024)	Piutang 2023	Sisa Tunggakan / Lebih Bayar	Piutang 2024	lebih Bayar 2024	Penyisihann Piutang				Total Penyisihan Piutang
									Tahun 2023		Tahun 2024		
									%	Rp	%	Rp	
1	PT. PLN	13.416.000,00	12.708.000,00	708.000,00	200.000,00	908.000,00	908.000,00		100%	200.000,00	25%	177.000,00	377.000,00
2	Pasar Sungai Limau	8.400.000,00	7.000.000,00	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		100%	700.000,00	25%	350.000,00	1.050.000,00
3	PT.HKI	36.000.000,00	44.000.000,00	(8.000.000,00)		(8.000.000,00)		8.000.000,00	100%	-	25%		-
4	PT.BSI	90.000.000,00	97.500.000,00	(7.500.000,00)	22.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100%	22.500.000,00	25%		22.500.000,00
5	PT. Jaya sentrikon	24.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100%	4.000.000,00	25%	500.000,00	4.500.000,00
6	PT. Japfa	120.000.000,00	130.000.000,00	(10.000.000,00)	10.000.000,00	-			100%	10.000.000,00	25%		10.000.000,00
7	Subulussalam	7.200.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00	4.200.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100%	4.200.000,00	25%	1.200.000,00	5.400.000,00
8	PT. Angkasa Pura	120.000.000,00	130.000.000,00	(10.000.000,00)	-	(10.000.000,00)			100%	-	25%		-
9	PT.Sumatera Tropical Spices	18.000.000,00	18.000.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		100%	7.500.000,00	25%	-	7.500.000,00
10	Klinik Eye Center	9.000.000,00	9.750.000,00	(750.000,00)	-	(750.000,00)		750.000,00	100%	-	25%		-
11	Pasar Pakandangan	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	3.000.000,00		100%	-	25%	375.000,00	375.000,00
12	Pasar Kampung Dalam	6.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00	10.500.000,00		100%	500.000,00	25%	1.250.000,00	1.750.000,00
13	SMP I Enam Lingkung	7.200.000,00	7.200.000,00	-	600.000,00	600.000,00	600.000,00		100%	600.000,00	25%	-	600.000,00
14	SMA I Batang Anai	8.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	700.000,00	4.900.000,00	9.100.000,00		100%	700.000,00	25%	1.050.000,00	1.750.000,00
15	Pasar Sicincin	8.400.000,00	9.800.000,00	(1.400.000,00)	7.000.000,00	5.600.000,00	4.200.000,00		100%	7.000.000,00	25%		7.000.000,00
16	Ponpes Nurul Yakin	6.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00		100%	1.500.000,00	25%	1.125.000,00	2.625.000,00
17	PT. Usaha Inti	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	-	-		100%	-	25%	-	-
18	Rumah Sakit paru	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-		100%	-	25%	-	-
19	SMP I Sintoga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100%	4.000.000,00	25%	-	4.000.000,00
20	Pasar Usang	4.800.000,00	800.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	6.800.000,00	10.800.000,00		100%	2.800.000,00	25%	1.000.000,00	3.800.000,00
21	Puskesmas Lubuk Alung	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-		100%	-	25%	-	-
22	RSUD Parit Malintang	14.400.000,00	13.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00		100%	1.200.000,00	25%	300.000,00	1.500.000,00
23	Klinik RMC	12.000.000,00	12.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100%	9.000.000,00	25%	-	9.000.000,00
24	Kiambang Raya	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00	10.800.000,00	14.400.000,00		100%	7.200.000,00	25%	900.000,00	8.100.000,00
25	SMP 1 Lubuk Alung	8.400.000,00	11.900.000,00	(3.500.000,00)	4.120.000,00	620.000,00			100%	4.120.000,00	25%		4.120.000,00
26	SMA 1 Lubuk Alung	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-		100%	-	25%	-	-
27	Dinas Kesehatan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	-	-		100%	-	25%	-	-
28	Pasar Pauh Kamba	7.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	2.000.000,00		100%	-	25%	250.000,00	250.000,00
29	PPNI Sadaniah			-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100%	4.000.000,00	25%	-	4.000.000,00
JUMLAH		599.216.000,00	606.458.000,00	(7.242.000,00)	91.720.000,00	84.478.000,00	126.208.000,00	8.750.000,00		91.720.000,00		8.477.000,00	100.197.000,00

Daftar Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD

PIUTANG BLUD PUSKESMAS

No	Uraian	Tahun	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
1	Puskesmas Anduring	2024			-
2	Puskesmas Batu Basa	2024			-
3	Puskesmas Gasan Gadang	2024			-
4	Puskesmas Ketaping	2024			-
5	Puskesmas Kampung Dalam	2024			-
6	Puskesmas Kampung Guci	2024			-
7	Puskesmas Koto Bangko	2024			-
8	Puskesmas Kayu Tanam	2024			-
9	Puskesmas Limau Purut	2024	2.045.000,00	0,50%	10.225,00
10	Puskesmas Lubuk Alung	2024			-
11	Puskesmas Padang Alai	2024			-
12	Puskesmas Padang Sago	2024			-
13	Puskesmas Enam Lingkung	2024			-
14	Puskesmas Pasar Usang	2024	8.307.000,00	0,50%	41.535,00
15	Puskesmas Patamuan	2024			-
16	Puskesmas Sungai Geringging	2024			-
17	Puskesmas Sungai Limau	2024	8.720.000,00	0,50%	43.600,00
18	Puskesmas Sungai Sarik	2024			-
19	Puskesmas Sicincin	2024			-
20	Puskesmas Sikabu	2024			-
21	Puskesmas Sintuk	2024			-
22	Puskesmas Ulakan	2024			-
23	Puskesmas Pauh Kambar	2024		0,50%	-
24	Puskesmas Ampalu	2024			-
25	Puskesmas Sikucur	2024			-
Jumlah			19.072.000,00		95.360,00

Piutang Lain-lain PAD

No	Uraian	Tahun	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
1	RSUD	2020	1.504.450,00	100,00%	1.504.450,00
		2021	1.453.900,00	100,00%	1.453.900,00
		2023	38.334.135,00	50,00%	19.167.067,50
		2024	144.655.011,00	0,50%	723.275,06
Jumlah			185.947.496,00		22.125.417,50
Total Piutang dan Penyisihan Piurang BLUD			205.019.496,00	-	22.220.777,50
2	Penyisihan Piutang Dana Bos				
	Piutang	2019	2.121.323,00	100%	2.121.323,00
	Piutang	2020	783.159,00	100%	783.159,00
	Piutang	2021	575.785,00	100%	575.785,00
Total Piutang dana Bos			3.480.267,00		3.480.267,00
Total			208.499.763,00	-	25.701.044,50

REKAP PENERIMAAN DBH PROVINSI TAHUN 2024
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JENIS DBH	TOTAL DBH PROV TAHUN 2024	KURANG SALUR DBH PROV TAHUN 2023	TOTAL MASUK KE KASDA	ALOKASI DEFINITIF DBH PROV TAHUN 2024	POTONGAN BPJS	KURANG / LEBIH SALUR DBH PROV TAHUN 2024	% Penyisihan	Saldo Penyisihan
1	7 = 2+3+4+5+6	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10-11-7	13	14 = (12*13)
PKB	11.217.659.311,00	4.980.163.352,00	16.197.822.663,00	16.171.746.715,00	0,00	4.954.087.404,00	0,50%	24.770.437,02
BBNKB	5.802.375.612,00	2.302.874.802,00	8.105.250.414,00	7.600.699.729,00	0,00	1.798.324.117,00	0,50%	8.991.620,59
PBBKB	14.950.840.784,00	16.200.211.351,00	31.151.052.135,00	38.064.060.165,00	0,00	23.113.219.381,00	0,50%	115.566.096,91
PAP	89.375.246,00	32.051.005,00	121.426.251,00	143.737.971,00	0,00	54.362.725,00	0,50%	271.813,63
PAJAK ROKOK	20.350.242.688,00	0,00	20.350.242.688,00	20.350.242.688,00	0,00	0,00	0,50%	0,00
JUMLAH	52.410.493.641,00	23.515.300.510,00	75.925.794.151,00	82.330.487.268,00		29.919.993.627,00		149.599.968,13

Daftar Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

No	Uraian	Tahun	Jumlah	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan	Koreksi Audit	Saldo Audit
1	Reklasifikasi PPh Pasal 21	2011	3.040.305,00	100%	3.040.305,00	0,00	3.040.305,00
2	Reklass TGR ke Bagian Lancar TGR	2019	3.150.000,00	100%	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
3	Reklass TGR ke Bagian Lancar TGR	2020	350.000,00	100%	350.000,00	0,00	350.000,00
4	Reklas ke Bagian Lancar TGR	2022	4.600.000,00	100%	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
Jumlah			11.140.305,00		11.140.305,00		11.140.305,00

LAMPIRAN DAFTAR PERSEDIAAN TAHUN 2024

No	SKPD	Persediaan					TOTAL
		Persediaan Barang Habis Pakai					
		Persediaan Bahan	Persediaan Suku Cadang	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Persediaan Obat-Obatan	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
2	DINAS KESEHATAN	-	-	4.504.800,00	9.919.229.944,37	-	9.923.734.744,37
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	20.192.945,00	-	165.992.944,00	5.026.902.097,30	-	5.213.087.986,30
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	19.415.249,00	-	-	79.700.000,00	99.115.249,00
5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-	-	-
6	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-	-	-
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	204.273.000,00	-	-	204.273.000,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	535.000.000,00	-	-	535.000.000,00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-
15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-
17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-	-	-
18	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
19	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
20	DINAS PERIKANAN	-	-	-	-	-	-
21	DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	-	-	-	-	-
22	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
23	KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-
24	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	6.605.000,00	-	-	6.605.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-	-	-
26	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG	-	-	-	-	-	-
27	PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM	-	-	-	-	-	-
28	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI	-	-	-	-	-	-
29	PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN	-	-	-	-	-	-
30	PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG	-	-	-	-	-	-
31	PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	-	-	-	-	-	-

No	SKPD	Persediaan					TOTAL
		Persediaan Barang Habis Pakai					
		Persediaan Bahan	Persediaan Suku Cadang	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Persediaan Obat-Obatan	Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan	
32	PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG	-	-	-	-	-	-
33	PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS	-	-	-	-	-	-
34	PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO	-	-	-	-	-	-
35	PEMERINTAH KECAMATAN PATAMUAN	-	-	-	-	-	-
36	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	-	-	-	-	-	-
37	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU	-	-	-	-	-	-
38	PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	-	-	-	-	-	-
39	PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS	-	-	-	-	-	-
40	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR	-	-	-	-	-	-
41	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	-	-	-	-	-	-
42	PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK	-	-	-	-	-	-
43	INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-	-
44	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-	-	-
45	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-	-	-
TOTAL		20.192.945,00	19.415.249,00	916.375.744,00	14.946.132.041,67	84.200.000,00	15.986.315.979,67

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Ket	Neraca 31/12/2014	Rincian			Kesimpulan		
			Plafon	Angsuran	Tunggakan	Keterangan	over statement	under statement
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat							
	- Usaha Eko. Desa - Simpan Pinj.	116.500.000	330.000.000	213.500.000	116.500.000		-	
	- POKMAS Teknologi Tepat Guna	179.166.600	330.000.000	150.833.400	179.166.600		-	
2	Dinas Peternakan	234.065.682	381.400.000	147.334.318	234.065.682		-	
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.669.900	60.000.000	8.330.100	51.669.900		-	
	- Pry.Pemberdayaan Nelayan	36.857.000	39.500.000	2.643.000	36.857.000		-	
	- Pry.Pemberd. Ptn. Ikan Darat	23.913.300	27.000.000	3.086.700	23.913.300		-	
	- Pry.Perikanan Darat	6.095.000	8.000.000	1.905.000	6.095.000		-	
4	Perekonomian							
	- Kredit K-5	8.500.000	30.000.000	21.500.000	8.500.000		-	
	- Pasar	-						
	- PT. BPR PKPP	-						
5	Bantuan Penguatan Modal Pengrajin	58.172.000	68.000.000	9.828.000	58.172.000		-	
	Dana Bantuan untuk UKM	36.875.000	50.000.000	13.125.000	36.875.000		-	
	Perindagkoptam	177.070.000				Ditemukan SK Bupati No.454/KEP/2001 tentang Juklak Bantuan Modal Usaha Bergulir dengan Plafon sebesar Rp140,07 juta, masih dalam penelusuran, diusulkan dimasukan ke dalam aset lainnya sub kelompok dana bergulir dalam penelusuran. Neraca 31 Des 2015 = overstatement	177.070.000	
6	Pertanian	-						
7	Dana Bergulir pada Bank Nagari	3.406.808.250	6.492.950.000	3.086.141.750	3.406.808.250		-	
Total		4.335.692.732	7.816.850.000	3.658.227.268	4.158.622.732		177.070.000	-

**REKAPITULASI AGING SCHEDULE
INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR)
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	KRITERIA	KONDISI	NAMA DANA BERGULIR	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	% PENYISIHAN	TIDAK TERTAGIH	DAPAT DITAGIH	KETERANGAN
1	Lancar	Tidak ada tunggakan						0%	-	-	
2	Diragukan	Tunggakan ≤ 1 Thn						25%	-	-	
3	Macet	> 1 s.d 3 Tahun						50%	-	-	
		> 3 s.d 5 Tahun						75%	-	-	
			Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)								
		> 7 Thn	- Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP)	330.000.000	213.500.000	116.500.000	2003	100%	116.500.000	-	Lampiran 7.b
		> 7 Thn	- Kelompok Masyarakat Teknologi Tepat Guna (Pokmas TTG)	330.000.000	150.833.400	179.166.600	2004	100%	179.166.600	-	Lampiran 7.c
			Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan (Distannakhut)								
		> 7 Thn	- Bantuan Penguatan Modal Peternak (BPMP) Tahun 2001	381.400.000	147.334.318	234.065.682	2004	100%	234.065.682	-	Lampiran 7.d
			Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Diskoperindag ESDM)								
			- Proyek Pembinaan Industri Kecil Bordir	68.000.000	9.828.000	58.172.000	2006	100%	58.172.000	-	Lampiran 7.e
			- Proyek Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Menengah	102.000.000	31.657.500	70.342.500	2006	100%	70.342.500	-	Lampiran 7.e
			- Untuk Pengusaha Kecil dan Menengah	50.000.000	13.125.000	36.875.000	2005	100%	36.875.000	-	Lampiran 7.f
			Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)								
			- Proyek Pemberdayaan Petani Ikan Darat Tahun 2002	27.000.000	3.086.700	23.913.300	2004	100%	23.913.300	-	Lampiran 7.g
			- Proyek Pemberdayaan Petani Nelayan	39.500.000	2.643.000	36.857.000	2004	100%	36.857.000	-	Lampiran 7.g
			- Proyek Bantuan Penguatan Modal Bidang Perikanan Darat/PAD TA 2002	8.000.000	1.905.000	6.095.000	2004	100%	6.095.000	-	Lampiran 7.g
			- Proyek Penguatan Modal Nelayan Tahun 2001	60.000.000	8.330.100	51.669.900	2004	100%	51.669.900	-	Lampiran 7.h
			Bagian Ekonomi dan Pembangunan								
			Kredit Usaha Pedagang Kaki Lima (Kredit K-5)	30.000.000	21.500.000	8.500.000	2002	100%	8.500.000	-	Lampiran 7.i

NO	KRITERIA	KONDISI	NAMA DANA BERGULIR	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	% PENYISIHAN	TIDAK TERTAGIH	DAPAT DITAGIH	KETERANGAN
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003 (Revolving Fund Tahap I)								Lampiran 7.j
			Pertanian	387.500.000	238.810.000	148.690.000	2005	100%	148.690.000	-	
			Peternakan	950.000.000	303.666.000	646.334.000	2005	100%	646.334.000	-	
			Perindag	301.000.000	162.317.500	138.682.500	2005	100%	138.682.500	-	
			Perikanan dan Kelautan	257.500.000	108.355.500	149.144.500	2005	100%	149.144.500	-	
			Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam	115.000.000	95.860.000	19.140.000	2005	100%	19.140.000	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 52/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap II)								Lampiran 7.k
			Perindag	58.750.000	51.343.750	7.406.250	2005	100%	7.406.250	-	
			Pertanian	265.000.000	211.800.000	53.200.000	2005	100%	53.200.000	-	
			Perikanan	118.000.000	84.125.000	33.875.000	2005	100%	33.875.000	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 42-98-407-437-440/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund KUD Sumber Rezeki)								Lampiran 7.l
			Peternakan dan Koperasi	1.057.600.000	216.800.000	840.800.000	2006	100%	840.800.000	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap IV)								Lampiran 7.m
			Perindag	203.000.000	82.598.000	120.402.000	2005	100%	120.402.000	-	
			Pertanian	57.500.000	21.430.000	36.070.000	2005	100%	36.070.000	-	
			Peternakan	389.000.000	103.400.000	285.600.000	2005	100%	285.600.000	-	
			Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam	47.500.000	47.500.000	-	2005	100%	-	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 137/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap VI)								Lampiran 7.n
			Perikanan	35.000.000	35.000.000	-	2005	100%	-	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 451/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap VII)								Lampiran 7.o
			Peternakan	32.000.000	16.188.000	15.812.000	2006	100%	15.812.000	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 467/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap XI)								Lampiran 7.p
			Perindag	65.000.000	30.000.000	35.000.000	2006	100%	35.000.000	-	
			Perikanan	25.000.000	3.960.000	21.040.000	2006	100%	21.040.000	-	

NO	KRITERIA	KONDISI	NAMA DANA BERGULIR	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	% PENYISIHAN	TIDAK TERTAGIH	DAPAT DITAGIH	KETERANGAN
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap XII)								Lampiran 7.q
			Koperindag dan PKM	193.000.000	123.849.000	69.151.000	2006	100%	69.151.000	-	
			Pertanian	155.000.000	80.643.000	74.357.000	2006	100%	74.357.000	-	
			Perikanan	172.500.000	84.941.000	87.559.000	2006	100%	87.559.000	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 563/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap XIII)								Lampiran 7.r
			Koperindag dan PKM	85.000.000	73.775.000	11.225.000	2006	100%	11.225.000	-	
			Peternakan	204.000.000	121.235.000	82.765.000	2006	100%	82.765.000	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 22/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap XIV)								Lampiran 7.s
			Peternakan	30.000.000	10.000.000	20.000.000	2007	100%	20.000.000	-	
			Koperindag dan PKM	93.500.000	31.980.000	61.520.000	2007	100%	61.520.000	-	
			Pertanian	170.000.000	110.000.000	60.000.000	2007	100%	60.000.000	-	
		> 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 48/KEP/BPP/2005 (Revolving Fund Tahap XV)								Lampiran 7.t
			Peternakan	40.000.000	2.000.000	38.000.000	2007	100%	38.000.000	-	
		> 5 s.d 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 344/KEP/BPP/2005 (Revolving Fund Tahap XVI)								Lampiran 7.u
			Koperindag dan PKM	138.000.000	85.795.000	52.205.000	2008	100%	52.205.000	-	
			Perikanan	101.500.000	39.230.000	62.270.000	2008	100%	62.270.000	-	
		> 5 s.d 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 135/KEP/BPP/2006 (Revolving Fund Tahap XVII)								Lampiran 7.v
			Koperindag dan PKM	25.500.000	20.000.000	5.500.000	2008	100%	5.500.000	-	
			Pertanian	60.000.000	35.000.000	25.000.000	2008	100%	25.000.000	-	
			Peternakan	91.600.000	59.500.000	32.100.000	2008	100%	32.100.000	-	
		> 5 s.d 7 Thn	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 008/KEP/BPP/2007 (Revolving Fund Tahap XVIII)								Lampiran 7.w
			Koperindag dan PKM	359.500.000	232.800.000	126.700.000	2009	100%	126.700.000	-	
			Pertanian	205.000.000	162.240.000	42.760.000	2009	100%	42.760.000	-	
			Jumlah	7.914.350.000	3.689.884.768	4.224.465.232			4.224.465.232	-	

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI INVESTASI NON PERMANEN (DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2022

[illegible]

NO	NAMA SKPD/KEGIATAN	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
		Persentase				0,5%	25%	25%	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap IV)																
	Perindag	203.000.000	82.598.000	120.402.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.402.000	
	Pertanian	57.500.000	21.430.000	36.070.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.070.000	
	Peternakan	389.000.000	103.400.000	285.600.000	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.600.000	
	Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam	47.500.000	47.500.000	-	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 137/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap VI)																
	Perikanan	35.000.000	35.000.000	-	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 451/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap VII)																
	Peternakan	32.000.000	16.188.000	15.812.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.812.000	
12	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 467/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap XI)																
	Perindag	65.000.000	30.000.000	35.000.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	
	Perikanan	25.000.000	3.960.000	21.040.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.040.000	
13	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap XII)																
	Koperindag dan PKM	193.000.000	123.849.000	69.151.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.151.000	
	Pertanian	155.000.000	80.643.000	74.357.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.357.000	
	Perikanan	172.500.000	84.941.000	87.559.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.559.000	
14	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 563/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap XIII)																
	Koperindag dan PKM	85.000.000	73.775.000	11.225.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.225.000	
	Peternakan	204.000.000	121.235.000	82.765.000	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.765.000	
15	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 22/KEP/BPP/2004 (Revolving Fund Tahap XIV)																
	Peternakan	30.000.000	10.000.000	20.000.000	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	
	Koperindag dan PKM	93.500.000	31.980.000	61.520.000	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.520.000	
	Pertanian	170.000.000	110.000.000	60.000.000	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	
16	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 48/KEP/BPP/2005 (Revolving Fund Tahap XV)																
	Peternakan	40.000.000	2.000.000	38.000.000	2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.000.000	
17	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 344/KEP/BPP/2005 (Revolving Fund Tahap XVI)																
	Koperindag dan PKM	138.000.000	85.795.000	52.205.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.205.000	-	
	Perikanan	101.500.000	39.230.000	62.270.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.270.000	-	
18	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 135/KEP/BPP/2006 (Revolving Fund Tahap XVII)																
	Koperindag dan PKM	25.500.000	20.000.000	5.500.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-	
	Pertanian	60.000.000	35.000.000	25.000.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	
	Peternakan	91.600.000	59.500.000	32.100.000	2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100.000	-	
19	SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 008/KEP/BPP/2007 (Revolving Fund Tahap XVIII)																
	Koperindag dan PKM	359.500.000	232.800.000	126.700.000	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.700.000	-	
	Pertanian	205.000.000	162.240.000	42.760.000	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.760.000	-	
	TOTAL	7.914.350.000	3.689.884.768	4.224.465.232		-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.460.000	177.075.000	
1	% Dana Bergulir Tidak Tertagih					0,5%	25%	25%	25%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Dana Bergulir Tidak Tertagih					-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.460.000	177.075.000	
	TOTAL DANA BERGULIR TIDAK TERTAGIH															4.232.465.232,00	
																-	
	TOTAL DANA BERGULIR YANG DIAGING															4.232.465.232,00	

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

USAHA EKONOMI DESA - SIMPAN PINJAM

[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BANTUAN PENGUATAN MODAL PETERNAK

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	SAPI																
1	Agus Salim	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000	
2	Tarmizi	15.000.000	7.500.000	7.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	
3	Muslim	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000	
4	M. Nasir	15.000.000	10.000.000	5.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
5	Kamaruzaman	15.000.000	15.000.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Nasarudin AOT	15.000.000	7.500.000	7.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	
7	Syahril	15.000.000	5.000.000	10.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	
8	Syarifudin	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000	
9	Syawir ST. B	15.000.000	2.500.000	12.500.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000	
10	Taufik Hidayat	15.000.000	1.950.000	13.050.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.050.000	
	Jumlah	150.000.000	56.950.000	93.050.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.050.000	
	AYAM BURAS																
1	Yendranita	2.775.000	2.775.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Nursuhut	2.775.000	925.000	1.850.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000	
3	Masnah	2.775.000	2.775.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Bachtiar Syam	2.775.000	2.775.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	11.100.000	9.250.000	1.850.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000	
	KERBAU																
1	Akhiruddin	8.000.000	-	8.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	
2	Alisman	8.000.000	8.000.000	-	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Buyung Lukuak	8.000.000	1.733.333	6.266.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.266.667	
4	Bukhari A	8.000.000	-	8.000.000	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	
5	Bukhari	8.000.000	3.999.999	4.000.001	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.001	
6	Darisman	8.000.000	1.333.333	6.666.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.667	
7	Erwin	8.000.000	2.866.666	5.133.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.133.334	
8	Feri	8.000.000	1.333.333	6.666.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.667	
9	Irsadi	8.000.000	2.666.666	5.333.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.333.334	
10	Ilyas	8.000.000	6.633.332	1.366.668	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.366.668	
11	Jasril Bakar T	8.000.000	3.999.999	4.000.001	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.001	
12	Joni Herman	8.000.000	2.666.666	5.333.334	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.333.334	
13	Makmur	8.000.000	1.333.333	6.666.667	2004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.666.667	

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BANTUAN PENGUATAN MODAL PENGRAJIN

[illegible]

BANTUAN PENGUATAN MODAL PENGRAJIN

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
4	JUNIARTI	3.400.000	2.551.500	848.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848.500
5	YUMISLIARNI	3.400.000	2.646.000	754.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.000
6	AZIZAH	3.400.000	2.646.000	754.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.000
7	AZMI	3.400.000	2.646.000	754.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.000
8	ABRIATI	3.400.000	472.500	2.927.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.927.500
9	RIZA ELVINA	3.400.000	2.457.000	943.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943.000
10	JAFRI YANTI	3.400.000	3.213.000	187.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.000
11	SALMAINI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
12	RAUDHATUL JANNAH	3.400.000	378.000	3.022.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.022.000
13	SITI ALIMAH	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
14	ELVI YANTI	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
15	ASNIMAR	3.400.000	1.512.000	1.888.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888.000
16	MIMI SULASTRI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
17	MARNIS	3.400.000	1.984.500	1.415.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.415.500
18	SALMI	3.400.000	1.417.500	1.982.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.982.500
19	REFNITA	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
20	YULIMAR	3.400.000	94.500	3.305.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.305.500
21	RISMAWATI	3.400.000	189.000	3.211.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.000
22	ARNITA	3.400.000	756.000	2.644.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.644.000
23	NURAINI	3.400.000	472.500	2.927.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.927.500
24	ASRAYANTI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
25	UPIK	3.400.000	283.500	3.116.500	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.116.500
26	NURLELY	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
27	ZULFIYETTI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
28	HERLINDA INDRIANA RIZKI	3.400.000	945.000	2.455.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.455.000
29	MUZIARNI	3.400.000	-	3.400.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000
30	SAYANG	3.400.000	756.000	2.644.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.644.000
Jumlah		102.000.000	31.657.500	70.342.500	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.342.500
Total		170.000.000	41.485.500	128.514.500	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.514.500

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

DANA BANTUAN UNTUK UKM

[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BANTUAN PENGUATAN MODAL NELAYAN

[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

BANTUAN PENGUATAN MODAL NELAYAN GASAN GADANG (KELOMPOK NELAYAN SINAR LAUT)

[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KREDIT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (KREDIT K-5)

[illegible]

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PERTANIAN																
1	BUJANG SE	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	M. TORON DT. SINARO	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	AHMAD BASRI	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	H. YUSUF TK. SIDI	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SAHRUDIN	25.000.000	12.510.000	12.490.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.490.000
6	ABUZAMAR	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MARJOHAN	50.000.000	5.600.000	44.400.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.400.000
8	HERMAN LAMBUK	15.000.000	10.020.000	4.980.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.980.000
9	KUDRI LAMBUK	15.000.000	4.175.000	10.825.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.825.000
10	BURHANUDDIN	12.500.000	2.780.000	9.720.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.720.000
11	SUDIRMAN	130.000.000	63.725.000	66.275.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.275.000
12	YUDI ARTHA ANWAR	30.000.000	30.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	387.500.000	238.810.000	148.690.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PETERNAKAN																
1	ABUZANAR	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
2	ULI	12.000.000	3.188.000	8.812.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.812.000
3	HASAN BASRI	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
4	YAHYA	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
5	ZAINAL	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
6	ALEN	8.000.000	2.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
7	YEN	8.000.000	2.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
8	ABUTIAR	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SYAIFUL ALWI	12.000.000	6.070.000	5.930.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930.000
10	ABITAL	12.000.000	6.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
11	ANER RKY DT BUNGSU	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
12	YUNISMAN DT	12.000.000	470.000	11.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.530.000
13	JARAN KATIB	8.000.000	188.000	7.812.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.812.000
14	YUSTAM EFENDI	15.000.000	3.750.000	11.250.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250.000
15	MHD HERI																

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
21	ERIZAL	8.000.000	2.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
22	ZULKIFLI JAMBAK	8.000.000	3.000.000	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
23	NAGUR	12.000.000	470.000	11.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.530.000
24	HERI TANJUNG	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
25	ADELMEN	10.000.000	940.000	9.060.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.060.000
26	ALI MASRIL	8.000.000	2.470.000	5.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530.000
27	AKMAL	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
28	NURTI	10.000.000	3.920.000	6.080.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.080.000
29	YONAI	12.000.000	2.350.000	9.650.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.650.000
30	AGUSMAWI HASAN	12.000.000	6.000.000	6.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
31	MANSYARDIN	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ANWAR	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
33	JEMPOL ISKANDAR	12.000.000	850.000	11.150.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.150.000
34	JAFRI S.Ag	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
35	H. TARMIZI	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
36	ALI NURDIN M. NUR	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
37	ALI SADIKIN	12.000.000	11.421.000	579.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579.000
38	YURNIS	10.000.000	2.641.000	7.359.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.359.000
39	ISMAEL	8.000.000	282.000	7.718.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.718.000
40	ABU BAKAR	8.000.000	2.470.000	5.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.530.000
41	NAZAR	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
42	ASRIL ISKANDAR	10.000.000	300.000	9.700.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.700.000
43	RIFIA MARNI	35.000.000	5.470.000	29.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.530.000
44	ZULKIFLI	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
45	AMIRUDDIN	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
46	DASRIL	12.000.000	3.500.000	8.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000
47	DEDI SUSANTO	12.000.000	4.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
48	AZWAR .M	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	REFRIZAL	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
50	NOVA ARDI	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	INDRA	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	IRSAL	35.000.000	8.500.000	26.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500.000
53	ALIZAR	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	AGUSTAMI	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	ARKADIUS	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
56	HENDRI TASMEN	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	KAHARUDDIN	8.000.000	500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
58	ARMY ZANIUS	8.000.000	6.000.000	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
59	BGD. JARAN	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
60	DARLIS TANJUNG	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
61	Ir. MARKIYUS	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	EDI CHANDRA	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
63	ALIYASIR	8.000.000	1.000.000	7.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
64	ROSNIDA	8.000.000	6.470.000	1.530.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530.000
65	ZAIRIL	8.000.000	4.000.000	4.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
66	ALI ARDI	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	BAHRI	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Drs. YAMAN HIJAZ	10.000.000	5.000.000	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
69	SYAMSUL MARDAN	10.000.000	6.500.000	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
70	SUKIMAN	8.000.000	4.000.000	4.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
71	YUSUF	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	KARUDDIN	10.000.000	8.034.000	1.966.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.966.000
73	MANSUARDI	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
74	NAKIM	10.000.000	2.970.000	7.030.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.030.000
75	AKIRMAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	USMAN	8.000.000	3.940.000	4.060.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.060.000
77	KARI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	INDRA	10.000.000	2.970.000	7.030.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.030.000
79	ARDONIS	10.000.000	2.641.000	7.359.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.359.000
80	ERIKA ICHWAN	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	AFRIZAL ERI GUNUNG	10.000.000	141.000	9.859.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.859.000
82	JALIUS	12.000.000	-	12.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
83	KIAN	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	IRVAN, S.Pt	8.000.000	1.000.000	7.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
85	M. RAIS ZEIN	35.000.000	10.750.000	24.250.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.250.000
86	Drs. ZUKIRMAN	20.000.000	7.000.000	13.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000
87	JONLISMAN	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
88	INDRA YAMAN	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
89	M. EFENDI	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
90	MUDASIR	8.000.000	8.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	ZAINUDDIN	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
	JUMLAH	950.000.000	303.666.000	646.334.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERINDAG																
1	RATNAWILIS	7.500.000	1.670.000	5.830.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830.000
2	ADINAR	7.500.000	1.670.000	5.830.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830.000
3	ANIMAR	7.500.000	1.670.000	5.830.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830.000
4	FITRIYANI	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
5	DARFINIS	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
6	MARLINA	7.500.000	1.670.000	5.830.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.830.000
7	YUSNIMAR	7.500.000	6.340.000	1.160.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160.000
8	ZALHAIDA	5.000.000	1.960.000	3.040.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.040.000
9	JUSFINADITA	6.000.000	1.340.000	4.660.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.660.000
10	NELLY SURYANI	5.000.000	1.960.000	3.040.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.040.000
11	GUSNAYETI	7.500.000	3.715.000	3.785.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.785.000
12	ZAINAL .A	10.000.000	2.800.000	7.200.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000
13	RISMAN	3.000.000	3.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ZAFDINUL	7.500.000	417.500	7.082.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.082.500
15	ERMAWATI	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	AKHIRUDDIN	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ALI ARDIN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MARLI	7.500.000	7.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ASRIL	8.000.000	445.000	7.555.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.555.000
20	DARMADI DARMAN	8.000.000	6.675.000	1.325.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325.000
21	YANHENDRI	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NAZARUDDIN	5.000.000	4.400.000	600.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000
23	YULINAR	3.000.000	2.000.000	1.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
24	YULIUS Dt. MARAJO	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	DESMITA	5.000.000	1.960.000	3.040.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.040.000
26	DIDI DARMADI	3.000.000	3.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ERMAWATI	4.000.000	4.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RIDWAN	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	H. BASRI/ Hj. JANIMAR	6.000.000	4.355.000	1.645.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.645.000
30	DELFI SATRIADI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MUDRIZAL	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SYAFARUDDIN	5.000.000	3.920.000	1.080.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000
33	SYAFRIZAL	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	SUDIRMAN	20.000.000	-	20.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
35	EPI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	EMI/ERMI	35.000.000	5.850.000	29.150.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.150.000
	JUMLAH	301.000.000	162.317.500	138.682.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KELAUTAN DAN PERIKANAN																
1	PUTRA AGUNG	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
2	ZAKIRMAN	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUARDI SALIM	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ANAS RAUF	5.000.000	3.780.000	1.220.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.220.000
5	ZAKIRMAN	3.500.000	583.500	2.916.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.916.500
6	AINSYAH RAHMAT	3.500.000	3.112.000	388.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.000

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)												
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10	
7	YAZID	10.000.000	556.000	9.444.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.444.000	
8	AGUSTIAN	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SYAFRIZAL	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	MAAZ	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
11	AMIR SIDI	2.000.000	112.000	1.888.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.888.000	
12	PURNAWIRMAN	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	SUHARDIMAN AUS	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	NASRIL	3.500.000	1.167.000	2.333.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.333.000	
15	SYAMSUIR	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	MULYADI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	MOTHIA AZIZ	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	SYAMSAWIR	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
19	DESMAWATI	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ASRAF	2.000.000	336.000	1.664.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.664.000	
21	NASRUL	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	ZAINUDDIN	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	MUSADAR	3.500.000	583.500	2.916.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.916.500	
24	ZULKI HENDRI	2.000.000	336.000	1.664.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.664.000	
25	GUSMANTO	2.000.000	1.792.000	208.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.000	
26	WELHI HERTI	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	NURSYAHRUL	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	ZAL KHAIRI	3.500.000	1.361.500	2.138.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.138.500	
29	M. NASIR	3.500.000	2.528.500	971.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971.500	
30	Z. EFENDI	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	FIRDAUS	3.500.000	2.334.000	1.166.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.166.000	
32	BASRI	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	JON EDI	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	
34	JAKFARUDDIN	2.000.000	1.232.000	768.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.000	
35	SABARUDDIN	2.500.000	976.500	1.523.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.523.500	
36	A.H. DT. SINARO	2.500.000	1.255.500	1.244.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244.500	
37	YUSRI, SE	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	
38	RIKE WANDRA	2.500.000	-	2.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	
39	ISMAIL	2.000.000	224.000	1.776.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.776.000	
40	DENI ADRIAN, SE	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	MULYDISON	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
42	SYAFRIAL DEDI	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
43	AKHIRUDDIN	3.500.000	1.167.000	2.333.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.333.000	
44	FERDINAL	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
45	JANUARISMAN	2.500.000	279.000	2.221.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.221.000	

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 430/KEP/BPP/2003)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
46	ALI HUSIN	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	H. By. ADIK	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ROSNAM	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
49	HENDRI	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
50	SUKURCAN	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	HARDAN TANJUNG	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
52	JANUAR	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	TASLIM	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
54	LAZUARDI	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
55	SYAKARUDDIN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	SALMAN	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
57	ALI WALDANA	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
58	ASRIL MAAZ	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
59	HIDAYAT SUTRISMAN	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
60	IRSYAD	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
61	ZUL EFENDI	3.500.000	-	3.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
62	SUMARDI	3.500.000	3.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	ALI MIRIN	2.500.000	139.500	2.360.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.360.500
64	SYAMSURIZAL	2.000.000	-	2.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
65	ANZARNI	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	257.500.000	108.355.500	149.144.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	UED-SP DAN BPM																
1	SARYAH	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SAIYO SUKA MAJU	25.000.000	23.630.000	1.370.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.370.000
3	USAHA BERSAMA	15.000.000	1.670.000	13.330.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.330.000
4	DURIAN BANGKOK	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MELATI	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	AMANAH	10.000.000	5.560.000	4.440.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000
	JUMLAH	115.000.000	95.860.000	19.140.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REKAPITULASI																
1	PERTANIAN	387.500.000	238.810.000	148.690.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.690.000
2	PETERNAKAN	950.000.000	303.666.000	646.334.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.334.000
3	PERINDAG	301.000.000	162.317.500	138.682.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.682.500
4	KELAUTAN DAN PERIKANAN	257.500.000	108.355.500	149.144.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.144.500
5	UED-SP DAN BPM	115.000.000	95.860.000	19.140.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.140.000
	TOTAL	2.011.000.000	909.009.000	1.101.991.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	RITA IRIANTI	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	ASNIZAR	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	MAIMUNAH	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	KASMAWATI	2.000.000	1.375.000	625.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000	
5	NURHAYATI	2.000.000	2.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	NASRI	12.500.000	12.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	ZULKARNAINI	12.500.000	12.500.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	JONI Dt. MALIN	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	NORA/NORA FERİ	750.000	187.500	562.500	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.500	
10	JONI/JON KENEDI	750.000	140.625	609.375	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.375	
11	YETI	750.000	750.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	DESMIATI	750.000	140.625	609.375	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	609.375	
13	NAZRAN	750.000	750.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	ALIATAR .MT	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	
	JUMLAH	58.750.000	51.343.750	7.406.250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PERTANIAN																
1	SYAMSUDIN	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	BUKHARI	5.000.000	5.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ZAILI	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	YUNIRMAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	SYAFRUDDIN	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	RAMLI	25.000.000	25.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Hj. SYOFINAR DOANI	20.000.000	12.735.000	7.265.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.265.000	
8	DASRIL	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	BAKAR .M	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	RIDWAN	20.000.000	20.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	AMIRUDDIN	20.000.000	1.250.000	18.750.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750.000	
12	TRIA ZARFI	15.000.000	1.875.000	13.125.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.125.000	
13	RIZAL IDRUS	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	ASRIAL	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	AHMAD BAKHRI	15.000.000	940.000	14.060.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.060.000	
16	ANTONI	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-						

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 52/KEP/BPP/2004)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 42-98-407-437-440/KEP/BPP/2004)

[illegible]

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	KOPERASI DAN PKM																
1	ZULBAINI	5.000.000	1.432.000	3.568.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.568.000
2	SURYANI	6.000.000	430.000	5.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.570.000
3	SUKIRMAN	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
4	SYAFRIMEN	6.500.000	930.000	5.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.570.000
5	SYAFIDAWATI	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
6	NURJALI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RENO ALI	7.500.000	-	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
8	SARI	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
9	GUSMANIDAR	7.500.000	-	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
10	YULMANIDAR	7.500.000	-	7.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
11	SYAMSIDAR SALEH	5.000.000	1.432.000	3.568.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.568.000
12	TIRANYAM	5.000.000	1.074.000	3.926.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.926.000
13	ROSNi	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
14	SYAFRIL .M	10.000.000	715.000	9.285.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.285.000
15	ZAINUDDIN .M	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
16	JUNAIDI	5.000.000	-	5.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
17	FEBRIDAWATI	5.000.000	1.790.000	3.210.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.210.000
18	SUPIK	4.000.000	4.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	TARIPAH	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SYAMSIR ALAM	4.000.000	1.430.000	2.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570.000
21	ARNIS	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	DALMARNI	15.000.000	15.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ASNAM	3.000.000	860.000	2.140.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.140.000
24	JUMARI	3.000.000	645.000	2.355.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.355.000
25	MURSIDA	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KASMARI/UPIK	3.000.000	3.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ANI	3.000.000	430.000	2.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570.000
28	ERMALELI	3.000.000	3.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ERMAN Dt. Bgd. MARAJO	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SURYADI	-	-	-	2005												

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
33	YUSLINAR	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	NURJANAH	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	KASMIARNI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ELI MARTI	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	RITA	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	ERNAWANIS	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	SAPARUDIN	10.000.000	1.430.000	8.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.570.000
40	SYAMSIR	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	203.000.000	82.598.000	120.402.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERTANIAN																-
1	DALIMA	10.000.000	1.430.000	8.570.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.570.000
2	H. DARMAWI	15.000.000	-	15.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
3	FITRIA DELVITA	12.500.000	-	12.500.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500.000
4	RAFYUL AKYAR	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ISMAEL Lb. JALELO	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	57.500.000	21.430.000	36.070.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PETERNAKAN																-
1	ABDUL MANAF SK	150.000.000	-	150.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000
2	YUNI HELMI, SH	75.000.000	-	75.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
3	JAMARIS Dt. BATUAH	30.000.000	10.000.000	20.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
4	MARJOHAN	-	-	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	JAMARIS	10.000.000	-	10.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
6	ALI USMAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RAMLI	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ALI AMRAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ZAINUR/By. ZAINUR	12.000.000	3.000.000	9.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000
10	ABDUL RAJAB	8.000.000	-	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
11	AMIN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ABDUL RAHMAN	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	By. PUTIH	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SYOFYAN, S.Pd	10.000.000	10.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ERDISON	10.000.000	4.400.000	5.600.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600.000
16	BUYUNG ADANG	12.000.000	4.000.000	8.000.000	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
17	MURNI	12.000.000	12.000.000	-	2005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	389.000.000	103.400.000	285.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 92/KEP/BPP/2004)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 137/KEP/BPP/2004)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 451/KEP/BPP/2004)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 467/KEP/BPP/2004)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004)[illegible]

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PERTANIAN																
1	Hj. SUARNI ELOK	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ZULKIFLI .AS	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUKARDI, B.Sc	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	M. THAHER	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Hj. YUNINAR DARWIS	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SYAHRUL	15.000.000	470.000	14.530.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.530.000
7	YENNY	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SAWIR	15.000.000	1.580.000	13.420.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.420.000
9	EDIR ASNADI	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SAWIRMAN .LD	15.000.000	-	15.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
11	AYADI TIOMAS	10.000.000	4.743.000	5.257.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.257.000
12	LIPAP SYAHBUDDIN	20.000.000	6.330.000	13.670.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.670.000
13	KHAIDIR GUCI	20.000.000	20.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ZULAMRI	20.000.000	20.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	YUSMAN	15.000.000	2.520.000	12.480.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.480.000
16	ZAMZAMI	15.000.000	15.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	155.000.000	80.643.000	74.357.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.357.000
	PERIKANAN																
1	FAUZAN	6.000.000	6.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FATIMAH	5.000.000	-	5.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
3	SYAMSIMAR	7.000.000	-	7.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
4	MAWARDI Dt. MUNCAK	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SAIFUL BAHRI	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	INDRAWADI	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ZULFADRI ARUS	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	HASAN BASRI	7.500.000	-	7.500.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
9	SUDIRMAN	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ATMAJAYA RIAN TI	3.000.000	1.753.000	1.247.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.247.000
11	MUSLIM	10.000.000	3.162.000	6.838.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.838.000
12	INDRA	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SYAHRIAL	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	IRWAN	5.000.000	-	5.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
15	Bgd. TANDO	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RIDWAN	3.000.000	-	3.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
17	NURMAINI	5.000.000	1.060.000	3.940.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.940.000
18	H. SYAFRI	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	H. RUSLI USMAN	6.000.000	6.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
20	ANWAR	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SYAHRUARDI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	AZWAR	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	MASRIZAL	3.000.000	1.106.000	1.894.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.894.000
24	RIDWAN ABAS	7.500.000	3.160.000	4.340.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.340.000
25	SABIRIN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SALMAN	25.000.000	-	25.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000
27	S. Dt. RAJO BULAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	GAZALI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	TAUFIKURRAHMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	M. NUR JAMBAK	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SYAHRUDDIN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	SYAKBANRI	3.000.000	948.000	2.052.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052.000
33	BASRAINI	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	ZAIDI	3.000.000	2.054.000	946.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946.000
35	JAMUNIR	3.000.000	316.000	2.684.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684.000
36	FADRI OSWIZAL	3.000.000	790.000	2.210.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.210.000
37	EDI MARDANIF	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	JAFRIZAL	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	RAFLES	3.000.000	316.000	2.684.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684.000
40	DESMARDI USMAN	3.000.000	790.000	2.210.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.210.000
41	ERMAN FIRMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	TARJALIUS	3.000.000	948.000	2.052.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.052.000
43	MITRATURACHMAH	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	RISWANTO	3.000.000	2.370.000	630.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.000
45	MIBAT	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	AMRIL NURMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	RUDI SUSANTO	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	ERMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	ERMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	NURSYAMSU	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	AMIN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	ROSTAM	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	KURNIA HERMAN	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	SALMI	8.500.000	7.168.000	1.332.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.332.000
	JUMLAH	172.500.000	84.941.000	87.559.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.559.000

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 512/KEP/BPP/2004)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 563/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)												
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10	
	KOPERINDAG DAN PKM																	
1	ERMATATI	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ANIDA	15.000.000	15.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	HERMAN KOTO	5.000.000	5.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	AREI REZA PUTRA	25.000.000	25.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ERLINDA	4.500.000	480.000	4.020.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.020.000	
6	AZIMAH	1.000.000	605.000	395.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.000	
7	SALFAHMI MARNI	1.000.000	275.000	725.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725.000	
8	ANISMAR	1.000.000	440.000	560.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.000	
9	EMI	1.000.000	165.000	835.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835.000	
10	ERMAWATI	1.000.000	330.000	670.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670.000	
11	MARTIAS	20.000.000	20.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	ILYAS	3.000.000	3.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ALI MUNIR	4.500.000	480.000	4.020.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.020.000	
	JUMLAH	85.000.000	73.775.000	11.225.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.225.000	
	PETERNAKAN																	
1	SUDIRMAN	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MURNIYATI	8.000.000	-	8.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	
3	AMINULLAH	4.500.000	-	4.500.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	
4	ELFAMA ZAIN	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	SYAFRI	8.000.000	-	8.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	
6	Drs. HARISMAN	6.000.000	6.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ALI ABUZAR	7.000.000	7.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	MUSLIM M. NUR	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SAALUDIN	4.500.000	2.295.000	2.205.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.205.000	
10	St. YURNALIS	8.000.000	6.000.000	2.000.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	
11	St. ZAKIR	8.000.000	8.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Bgd. SUWIRMAN	4.500.000	940.000	3.560.000	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.560.000	
13	OSMAN	10.000.000	10.000.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	AZRUL A. Tk. MUDO, SE	2.500.000	2.500.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	AHMAD DH Tk. B	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	ALIBASAR Tk. SUTAN	2.500.000	2.500.000	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	MULYADI Tk. SIDI	-	-	-	2006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 563/KEP/BPP/2004)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 22/KEP/BPP/2004)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PETERNAKAN																
1	SUDIRMAN Rky. RM	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TUANKU KUNIANANG	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
3	MULYADI	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
4	YONEDI, S.Pd	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
5	DASNI TANJUNG	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
6	ALI AMRAN	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
7	KARI	10.000.000	10.000.000	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	30.000.000	10.000.000	20.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
	KOPERINDAG DAN PKM																
1	IRWAN	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SYAFRINALDI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SALDI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUKIRMAN	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	HERI HENDRI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JAMARIS	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SYAFEI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MUSLIM	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tk. PADIN	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ISMAEL	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	AMRIZAL	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ZULKARNAINI	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	HENDRI .T	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DASMI TIAR	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
15	MISRIYANTI	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
16	ASMANIAR	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
17	NOFRIZAL	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
18	EDO	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
19	EMI	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
20	APRIDA	4.500.000	-	4.500.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
21	RAYO	4.000.000	-	4.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
22	ASNIMAR	3.000.000	-	3.000.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
23	AIDA RIFNI, INDO USAHA J	-	-	-	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	AFRIZAL .Z, UMEGA TANI	4.500.000	240.000	4.260.000	2007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.260.000

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 22/KEP/BPP/2004)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 48/KEP/BPP/2005)[illegible]

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 344/KEP/BPP/2005)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)												
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10	
	KOPERINDAG DAN PKM																	
1	NURANI	2.500.000	140.000	2.360.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.360.000	-	
2	YURNIATI	2.500.000	2.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	NURAINI	2.500.000	420.000	2.080.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.080.000	-	
4	ALISMAN	3.000.000	3.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	KAMBARULLAH	3.000.000	1.350.000	1.650.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650.000	-	
6	ARIZAL	2.500.000	1.680.000	820.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.000	-	
7	AGUSMAN	2.500.000	2.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	NURMA	2.500.000	2.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	AHMAD NURI	2.500.000	2.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	JAMALI	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	RIDWAN AD	2.500.000	1.120.000	1.380.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380.000	-	
12	NURHAYATI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	HALIMAH	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	BASRI IRIAS	10.000.000	2.875.000	7.125.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.125.000	-	
15	RISMAN	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	
16	TUTI SUARNI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	IRWAN	3.000.000	170.000	2.830.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.830.000	-	
18	SYAFRINALDI	3.000.000	1.020.000	1.980.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.000	-	
19	SALDI	3.000.000	340.000	2.660.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.660.000	-	
20	SUHARMAN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	HERI HEDRI	3.000.000	-	3.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	
22	JAMARIS	3.000.000	680.000	2.320.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.000	-	
23	SYAFRI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	YUNIZAR	2.000.000	2.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	FLAMBOYAN	10.000.000	-	10.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	
26	YUNIDAR	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	PULAU	1.000.000	1.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	SUPVIRGO	4.500.000	-	4.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	
29	KAIDIR	30.000.000	30.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	FIRMAN ALI INDRA	20.000.000	20.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ROSNITA	4.500.000	-	4.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	
	JUMLAH	138.000.000	85.795.000	52.205.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.205.000		

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 344/KEP/BPP/2005)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
	PERIKANAN																
1	ZUARDIN KUD SINAR LAUT	20.000.000	12.650.000	7.350.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.350.000	-
2	JAMAL HIDAYAT KUD PIUN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ZAINAL KOPERASI PESISIF	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SETIA BUANA KOP. SUKA I	7.500.000	-	7.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-
5	SYAHRIAL KOP. PINAGO IN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ANAS RAUF	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ABIZAL	5.000.000	560.000	4.440.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000	-
8	ALI MUNAR	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ZAILIS	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	AWALUDDIN WAN	3.000.000	1.020.000	1.980.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.000	-
11	JOHN HENDRA, A.Md	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DAUD ZAKRI	3.000.000	340.000	2.660.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.660.000	-
13	TONI SETIAWAN	3.000.000	-	3.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-
14	SYAFRI MAYARDI	3.000.000	340.000	2.660.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.660.000	-
15	RUSLI	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	MULYADI	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
17	LUKMAN	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
18	LILY MARNI	5.000.000	560.000	4.440.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440.000	-
19	MIBAT	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
20	RUDI SUSANTO	5.000.000	-	5.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
21	ERMAN	3.000.000	1.920.000	1.080.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080.000	-
22	BASRI TAUFAN DT. LABIH	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SYARIFUDDIN RAID	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SYAFRI PN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	MARION RS	3.000.000	3.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SAHARUDIN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	AFRIZAL	3.000.000	3.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	AKHIRUDDIN	5.000.000	840.000	4.160.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.160.000	-
29	SYAMSINAR	5.000.000	5.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SYAFIRMAN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	M. RAFI	3.000.000	-	3.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-
	JUMLAH	101.500.000	39.230.000	62.270.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.270.000	-
	REKAPITULASI																
1	KOPERINDAG DAN PKM	138.000.000	85.795.000	52.205.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.205.000	-
2	PERIKANAN	101.500.000	39.230.000	62.270.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.270.000	-
	TOTAL	239.500.000	125.025.000	114.475.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.475.000	-

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO. 135/KEP/BPP/2006)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)												
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10	
	KOPERINDAG DAN PKM																	
1	NURDIATI	10.000.000	10.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	AGUSMAINI	10.000.000	10.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	JASMANI	2.500.000	-	2.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-	
4	MAHYUDDIN	3.000.000	-	3.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	
	JUMLAH	25.500.000	20.000.000	5.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-	
	PERTANIAN																	
1	Ir. BAHAR U Dt. M.L	25.000.000	25.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	NURHAYATI	25.000.000	-	25.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	
3	TOGOK	10.000.000	10.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	60.000.000	35.000.000	25.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	
	PETERNAKAN																	
1	ARZIL	15.000.000	15.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SYAFRIL AWALI	4.500.000	4.500.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	JUFRIZAL	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SYAFRIFUDDIN	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ABUTIAR	15.000.000	15.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RICKI	15.000.000	15.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	BACHTARUDDIN	10.000.000	2.500.000	7.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-	
8	SYAIFUL ANWAR	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	By. SUREK	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	SYAHARUDDIN	5.600.000	-	5.600.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600.000	-	
11	JAMALUDDIN/SUDDIN	7.000.000	7.000.000	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	LILY SUSILA	15.000.000	-	15.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-	
13	ERMIDAWATI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Ir. ZULKARDI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	AZUZAR	4.500.000	500.000	4.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	
16	AMINURI	-	-	-	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	91.600.000	59.500.000	32.100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100.000	-	
	REKAPITULASI																	
1	KOPERINDAG DAN PKM	25.500.000	20.000.000	5.500.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500.000	-	
2	PERTANIAN	60.000.000	35.000.000	25.000.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-	
3	PETERNAKAN	91.600.000	59.500.000	32.100.000	2008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.100.000	-	
	TOTAL	177.100.000	114.500.000	62.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.600.000	-	

**AGING SCHEDULE
DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO.008/KEP/BPP/2007)[illegible]

REVOLVING FUND (SK BUPATI PADANG PARIAMAN NO.008/KEP/BPP/2007)

No	NAMA PENERIMA	REALISASI KREDIT	ANGSURAN	TUNGGAKAN	JATUH TEMPO	AGING SCHEDULE (TAHUN)											
						< 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	> 10
22	BUYUNG GAYA	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ARIFIN	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	M. YASIN	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ALI BASAR TK ST SINARO	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	AZRUL ASWAT	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ASNI	-	-	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	359.500.000	232.800.000	126.700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.700.000	-	-
	PERTANIAN																
1	BAKAR .M	20.000.000	20.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RIZAL IDRUS	25.000.000	4.200.000	20.800.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	20.800.000	-	-
3	EDI TIWARMAN	30.000.000	30.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	AHMAD BASRI	30.000.000	30.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ZAMZAMI	20.000.000	20.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ZAILI	25.000.000	25.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SYAFRIAL	10.000.000	10.000.000	-	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Hj. SAMIAH	30.000.000	22.100.000	7.900.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	7.900.000	-	-
9	ANDI ERMAN SAYTI	15.000.000	940.000	14.060.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	14.060.000	-	-
	JUMLAH	205.000.000	162.240.000	42.760.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.760.000	-	-
	REKAPITULASI																
1	KOPERINDAG DAN PKM	359.500.000	232.800.000	126.700.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	126.700.000	-	-
2	PERTANIAN	205.000.000	162.240.000	42.760.000	2009		-	-	-	-	-	-	-	-	42.760.000	-	-
	TOTAL	564.500.000	395.040.000	169.460.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.460.000	-	-



LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements

**Untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2024**

For the year ended December 31, 2024

PT BANK NAGARI

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2024

DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL TERSEBUT

BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK NAGARI

FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2024

AND FOR THE YEAR

THEN ENDED

WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

	<u>Halaman/ Pages</u>	
Daftar Isi		<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6 - 7	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	8 - 191	<i>Notes to the Financial Statement</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

PT BANK NAGARI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : GUSTI CANDRA
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No 21 Padang
Alamat Domisili : Komplek Mutiara Bingkuang
Blok A. No. 2, RT/RW
001/004 Kelurahan Koto
Panjang Ikua Koto,
Kecamatan Koto Tangah,
Kota Padang, Sumatera
Barat, Kode pos 25175
Telepon : (0751) 31577
Jabatan : Direktur Utama

- 2 Nama : RONI EDRIAN
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No 21 Padang
Alamat Domisili : Aur Duri Indah 1 No. 35,
RT/RW 003/003 Kelurahan
Parak Gadang Timur,
Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Sumatera
Barat, Kode pos 25123
Telepon : (0751) 31577
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan Bahwa :

- 1 Kami Bertanggung Jawab Atas Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan PT Bank Nagari;
2 Laporan Keuangan PT Bank Nagari telah disusun dan
Disajikan Sesuai Dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia;



bernama dengan nama

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENT AS OF
DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

PT BANK NAGARI

We, the undersigned,

- 1 Name : GUSTI CANDRA
Office Address : Jl. Pemuda No 21 Padang
Residential Address : Komplek Mutiara
Bingkuang Blok A. No. 2,
RT/RW 001/004 Kelurahan
Koto Panjang Ikua Koto,
Kecamatan Koto Tangah,
Kota Padang, Sumatera
Barat, Kode pos 25175
Telephone : (0751) 31577
Title : President Director

- 2 Name : RONI EDRIAN
Office Address : Jl. Pemuda No 21 Padang
Residential Address : Aur Duri Indah 1 No 35,
RT/RW 003/003 Kelurahan
Parak Gadang Timur,
Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Sumatera
Barat, Kode pos 25123
Telephone : (0751) 31577
Title : Managing Director -
Finance

Declare that :

- 1 We are responsible for the preparation and
presentation of financial statements of PT Bank
Nagari,
2 The financial statements of PT Bank Nagari have
been prepared and presented in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards,



3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Nagari telah dimuat secara lengkap dan benar; b. Laporan keuangan PT Bank Nagari tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; 4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Nagari.	3 a. All information in the financial statements of PT Bank Nagari have been disclosed in a complete and truthful manner; b. The financial statements of PT Bank Nagari do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts; 4 We are responsible for PT Bank Nagari internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/ For and on behalf of the Board of Directors

Padang, 03 Maret 2025/March 03, 2025

 GUSTI CANDRA Direktur Utama /President Director	 RONI EDRIAN Direktur Keuangan /Managing Director - Finance

PT BANK NAGARI
LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2024

(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2024

(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2 0 2 4	2 0 2 3	
ASET				ASSETS
Kas	2.c, 2.e, 2.g, 4	523.298.458.711	542.255.303.562	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.c, 2.e, 2.h, 5	853.044.633.798	1.447.250.076.865	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.e, 2.c, 2.h, 6			Current accounts with other banks
Pihak ketiga		14.352.928.693	15.027.892.681	Third parties
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.155.067)	(8.476.196)	Allowance for impairment losses
Jumlah giro pada bank lain		14.350.773.626	15.019.416.485	Total current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pihak ketiga	2.e, 2.i, 7	874.927.154.594	2.693.753.558.200	Placement with Bank Indonesia and other banks third parties
Efek - efek untuk tujuan investasi	2.e, 2.j, 8	4.003.649.364.308	2.544.989.603.533	Marketable securities for investment purposes
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pihak ketiga	2.e, 2.k, 9	575.748.691.871	296.200.557.727	Marketable securities purchased Under agreement to resell Third parties
Pinjaman yang diberikan	2.e, 2.l, 2.d, 10			Loans
Pihak berelasi		29.147.121.076	17.225.355.401	Related parties
Pihak ketiga		25.521.676.467.114	24.014.795.768.171	Third parties
Jumlah pinjaman yang diberikan		25.550.823.588.190	24.032.021.123.572	Total loans
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(509.853.185.186)	(605.338.442.879)	Allowance for impairment losses
Jumlah pinjaman yang diberikan		25.040.970.403.004	23.426.682.680.693	Total loans
Penyertaan saham	2.e, 2.m, 11	2.641.053.571	2.632.299.233	Investment in shares
Aset tetap	2.o, 12	610.361.074.163	606.648.038.574	Fixed assets
Dikurangi: akumulasi penyusutan		(197.840.855.351)	(182.094.039.843)	Less: accumulated depreciation
Jumlah aset tetap		412.520.218.812	424.553.998.731	Total fixed assets
Aset takberwujud	13	22.374.733.804	21.925.033.804	Intangible assets
Dikurangi: akumulasi penyusutan		(21.125.372.064)	(20.407.350.620)	Less: accumulated depreciation
Jumlah aset takberwujud		1.249.361.740	1.517.683.184	Total intangible assets
Aset hak guna	2.o, 14	106.354.137.677	37.231.921.745	Right-of-use of assets
Aset pajak tangguhan	2.y, 36.c	230.986.012.373	244.008.185.090	Deferred tax assets
Aset lain-lain	2.n, 2.q, 15	318.074.641.200	238.604.086.229	Other assets
JUMLAH ASET		32.957.814.905.285	31.914.699.371.277	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK NAGARI
LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2024

(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2024

(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2 0 2 4	2 0 2 3	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	2.r, 16	335.473.578.554	475.668.285.740	Obligations due immediately
Simpanan nasabah				Deposits from customers
Giro - giro wadiah				Current accounts - wadiah
Pihak berelasi	2.d, 2.s, 17, 40	444.984.391.075	805.357.473.346	Related parties
Pihak ketiga		1.327.979.770.444	1.670.539.777.205	Third parties
Jumlah giro - giro wadiah		1.772.964.161.519	2.475.897.250.551	Total current accounts - wadiah
Tabungan - tabungan wadiah				Savings - wadiah
Pihak berelasi	2.d, 2.s, 17, 40	14.256.945.893	54.289.616.788	Related parties
Pihak ketiga		7.222.640.212.529	6.973.289.439.500	Third parties
Jumlah tabungan - tabungan wadiah		7.236.897.158.422	7.027.579.056.288	Total savings - wadiah
Deposito berjangka				Time deposits
Pihak berelasi	2.d, 2.s, 17, 40	5.403.000.000	32.855.500.000	Related parties
Pihak ketiga		13.123.427.010.618	12.847.628.619.252	Third parties
Jumlah deposito		13.128.830.010.618	12.880.484.119.252	Total time deposits
		22.138.691.330.559	22.383.960.426.091	
Simpanan dari bank lain	2.d, 2.t, 18	159.134.213.861	163.494.346.199	Deposits from other banks
Utang pajak	2.y, 36.a	32.493.973.476	91.318.149.152	Taxes payable
Liabilitas sewa	20	95.995.669.205	24.264.690.972	Lease liabilities
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	21	1.104.728.386	1.310.454.532	Allowance for possible on Commitments and contingencies
Pinjaman yang diterima	2.u, 19	780.653.379.943	560.209.118.751	Borrowings
Imbalan kerja	2.x, 39	308.681.229.231	315.475.895.068	Employee benefits
Liabilitas lain-lain	2.p, 22	356.082.736.072	359.583.512.886	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		24.208.310.839.287	24.375.284.879.391	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Bukan bank	23.a			Non banks
Pihak berelasi		584.620.863.812	639.343.863.024	Related parties
Pihak ketiga		3.960.048.506.048	2.922.339.975.941	Third parties
		4.544.669.369.860	3.561.683.838.965	
Bank	23.b	26.460.022.316	17.061.314.542	Banks
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		4.571.129.392.176	3.578.745.153.507	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK NAGARI
LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2024

(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2024

(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Modal dasar Seri A: 3.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dan Seri B: 20.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per saham pada tahun 2024 dan 2023				Authorized capital Series A: 3,000,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share and Series B: 20,000,000 shares with a par value of Rp100,000 per share in 2024 and 2023
Modal ditempatkan dan disetor 1.904.573 dan 1.849.067 pada tahun 2024 dan 2023	2.z, 24	1.904.573.000.000	1.849.067.000.000	Issued and paid up capital 1,904,573 and 1,849,067 in 2024 and 2023
Tambahan modal disetor	24	4.884.038.842	10.884.038.843	Additional paid-in capital
Keuntungan atas liabilitas Imbalan pasca kerja - bersih	2.x, 39	15.683.528.443	18.915.212.653	Gain on employee benefits
Surplus revaluasi aset tetap	25	170.853.322.254	173.476.596.666	Fixed assets revaluation surplus
Saldo laba yang ditentukan penggunaannya	26	1.531.201.865.502	1.374.071.325.154	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya		551.178.918.781	534.255.165.063	Unappropriated retained earnings
JUMLAH EKUITAS		4.178.374.673.822	3.960.669.338.379	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		32.957.814.905.285	31.914.699.371.277	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK NAGARI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2024

(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the year ended

December 31, 2024

(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2 0 2 4	2 0 2 3	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	2.v, 27	2.982.746.754.160	2.823.481.258.065	Interest income and sharia income
Beban bunga dan beban syariah	2.v, 29	(1.203.044.028.336)	(1.020.443.761.474)	Interest expense and sharia expense
Jumlah pendapatan bunga dan pendapatan syariah - bersih		1.779.702.725.824	1.803.037.496.591	Total interest income and sharia income - net
Pendapatan operasional lainnya	2.w, 28	221.218.588.387	203.145.799.613	Other operating income
Beban operasional lainnya				Other operating expenses
Tenaga kerja	30	(852.036.824.221)	(861.990.864.220)	Employee
Umum dan administrasi	31	(447.074.532.786)	(428.263.122.712)	General and administrative
Pembentukan:				allowance for:
Cadangan kerugian penurunan nilai	32	(75.468.340.043)	(81.661.499.379)	Impairment losses
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	2.ac, 33	205.726.146	(829.029.621)	Commitment and contingencies
Jumlah beban operasional lainnya		(1.374.373.970.904)	(1.372.744.515.932)	Total other operating expenses
LABA OPERASIONAL		626.547.343.307	633.438.780.272	OPERATING INCOME
Pendapatan (beban) bukan operasional				Non-operating income (expenses)
Pendapatan non operasional	34	79.406.626.560	50.444.701.080	Non-operating income
Beban non operasional	35	(1.431.227.741)	(1.759.410.648)	Non-operating expenses
Jumlah pendapatan bukan operasional - bersih		77.975.398.819	48.685.290.432	Total non-operating Income - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		704.522.742.126	682.124.070.704	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
Penghasilan (beban) pajak				Income (expense) tax
Pajak kini	2.y, 36.b	(152.520.121.600)	(165.099.599.720)	Current tax expense
Pajak kini - koreksi hasil pemeriksaan pajak penghasilan tahun sebelumnya		-	7.701.856.046	Current tax - adjustment income tax previously
Beban pajak tangguhan	2.y, 36.d	(13.933.673.393)	(957.859.203)	Deferred tax expense
Total beban pajak		(166.453.794.993)	(158.355.602.877)	Total income tax expenses
LABA TAHUN BERJALAN		538.068.947.133	523.768.467.827	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit loss
Surplus revaluasi aset tetap		-	43.645.979.238	Surplus on revaluation of fixed assets
Pajak penghasilan terkait		-	(2.148.496.203)	Related income taxes
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja		(4.143.184.886)	747.015.968	Actuarial gain (losses) for employee benefit
Pajak penghasilan terkait		911.500.676	(164.343.513)	Related income tax
Jumlah penghasilan komprehensif lain - bersih setelah pajak		(3.231.684.210)	42.080.155.490	Total other comprehensive income - net tax
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		534.837.262.923	565.848.623.317	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	26, 37	287.895	287.284	EARNING PER SHARES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK NAGARI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
December 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Issued and fully paid-up capital</i>	Tambahan modal disetori/ <i>Additional paid- in capital</i>	Cadangan revaluasi aset/ <i>Asset revaluation reserve</i>	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan/ <i>Actuarial gains (losses) on defined benefit plans after deducting deferred tax</i>	Ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>			
	Catatan/ <i>Notes</i>					Cadangan umum dan bertujuan khusus/ <i>General and aim reserve</i>	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	Jumlah ekuitas/ <i>Total equity</i>	
Saldo 31 Desember 2022		1.808.138.000.000	9.884.038.842	134.602.388.043	18.332.540.198	1.232.689.544.842	479.136.023.865	3.682.782.535.791	Balance as of December 31, 2022
Setoran modal	2.aa, 24	35.929.000.000	6.000.000.000	-	-	-	-	41.929.000.000	<i>Paid-in capital</i>
Reklasifikasi setoran modal		5.000.000.000	(5.000.000.000)	-	-	-	-	-	<i>Reclassification paid-in capital</i>
Pembagian laba tahun 2022:									<i>Distribution of 2020 net income:</i>
Dividen	2.ab	-	-	-	-	-	(329.890.820.729)	(329.890.820.729)	<i>Dividend</i>
Cadangan	26	-	-	-	-	141.381.780.312	(141.381.780.312)	-	<i>Reserve</i>
Laba komprehensif periode berjalan	2.ac, 2.ae	-	-	-	582.672.455	-	523.768.467.827	524.351.140.282	<i>Comprehensive income for the period</i>
Surplus revaluasi aset tetap		-	-	41.497.483.035	-	-	-	41.497.483.035	<i>Revaluation surplus fixed assets</i>
Surplus revaluasi dipindahkan ke saldo laba	25	-	-	(2.623.274.412)	-	-	2.623.274.412	-	<i>Revaluation surplus transferred to retained earnings</i>
Saldo 31 Desember 2023		1.849.067.000.000	10.884.038.842	173.476.596.666	18.915.212.653	1.374.071.325.154	534.255.165.063	3.960.669.338.379	Balance as of December 31, 2023
Setoran modal	2.aa, 24	49.506.000.000	-	-	-	-	-	49.506.000.000	<i>Paid-in capital</i>
Reklasifikasi setoran modal		6.000.000.000	(6.000.000.000)	-	-	-	-	-	<i>Reclassification paid-in capital</i>
Pembagian laba tahun 2023:									<i>Distribution of 2021 net income:</i>
Dividen	2.ab	-	-	-	-	-	(366.637.927.479)	(366.637.927.479)	<i>Dividend</i>
Cadangan	26	-	-	-	-	157.130.540.348	(157.130.540.348)	-	<i>Reserve</i>
Laba komprehensif periode berjalan	2.ac, 2.ae	-	-	-	(3.231.684.210)	-	538.068.947.133	534.837.262.923	<i>Comprehensive income for the period</i>
Surplus revaluasi aset tetap		-	-	-	-	-	-	-	<i>Revaluation surplus fixed assets</i>
Surplus revaluasi dipindahkan ke saldo laba	25	-	-	(2.623.274.412)	-	-	2.623.274.412	-	<i>Revaluation surplus transferred to retained earnings</i>
Saldo 31 Desember 2024		1.904.573.000.000	4.884.038.842	170.853.322.254	15.683.528.443	1.531.201.865.502	551.178.918.781	4.178.374.673.823	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK NAGARI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2024

(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the years ended

December 31, 2024

(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan bunga, provisi dan komisi	27	2.925.673.135.835	2.766.294.307.551	Interest Income, provision and commission
Beban bunga dan beban pembayaran lainnya yang dibayar	29	(1.202.562.738.834)	(1.011.146.023.343)	Interest expense and Other expense
Pembayaran beban karyawan	30	(912.038.368.243)	(852.461.674.140)	Employee expense
Pembayaran beban umum dan administrasi	31	(382.797.473.002)	(365.219.932.294)	General and administrative expense
Pendapatan operasional lainnya	28	221.307.516.987	203.145.799.613	Other operating revenues
Pendapatan (beban) non-operasional lainnya	34, 35	78.054.426.655	46.566.319.543	Non-operating Revenue (expenses)
Pajak penghasilan	36	(165.322.268.644)	(192.047.127.429)	Income tax
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		562.314.230.754	595.131.669.501	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in Operating assets and liabilities:
Penurunan/ (kenaikan) aset operasi				Decrease/ (increase) in operating assets
Kredit yang diberikan	10	(1.627.832.975.043)	(1.631.894.645.202)	Loans
Aset hak guna	14	(112.877.193.516)	(22.516.271.170)	Right-to-use assets
Aset lain-lain	15	(76.142.738.635)	(30.657.477.145)	Others assets
Kenaikan/ (penurunan) aset operasi				Increase/ (decrease) operating assets
Liabilitas segera	16	(140.194.707.186)	117.717.002.371	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	17	(245.269.095.532)	688.675.256.126	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	18	(4.360.132.338)	(45.288.185.820)	Deposits from other banks
Liabilitas sewa	20	71.730.978.233	(18.765.099.868)	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain	22	(864.481.164)	66.808.369.047	Other liabilities
Dana syirkah temporer	23	992.384.238.669	665.401.532.419	Temporary syirkah funds
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(581.111.875.758)	384.612.150.259	Net cash provided from (used for) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9	(286.326.391.846)	284.336.266.540	Effects purchased with the promise of resale
Efek-efek untuk tujuan investasi	8	(1.458.659.760.775)	(375.608.243.996)	Effects for investment purposes
Pembelian aset tetap	12	(9.637.983.165)	(9.376.391.043)	Purchase of fixed asset
Pembelian aset takberwujud	13	(449.700.000)	(384.100.000)	Purchase of intangible assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(1.755.073.835.786)	(101.032.468.499)	Net cash used for investing activities

PT BANK NAGARI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2024
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2024
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2 0 2 4	2 0 2 3	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan setoran modal	24	49.506.000.000	41.929.000.000	Increase paid in capital
Pembayaran dividen dan dana	26	(366.637.927.479)	(329.890.820.729)	Payment for dividend and prosperity
Kenaikan pinjaman yang diterima	20	220.444.261.192	81.547.008.380	Increase in borrowings
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(96.687.666.287)	(206.414.812.349)	Net cash used for financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(2.432.873.377.831)	77.164.869.411	NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4	4.698.267.021.282	4.621.102.151.871	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		2.265.393.643.451	4.698.267.021.282	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF THE YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents:
Kas	4	523.298.458.711	542.255.303.562	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	853.044.633.798	1.447.250.076.865	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6	14.352.928.693	15.027.892.681	Current account with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7	874.697.622.249	2.693.733.748.174	Placement with other banks and Bank Indonesia
Jumlah		2.265.393.643.451	4.698.267.021.282	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KABUPATEN PADANG APRIAMAN
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

DAFTAR ISI	Halaman
SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1
LAPORAN LABA RUGI	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN ARUS KAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 18



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANAI

Jalan Syech Burhannudin Padang Bungo – Kenagarian Gadur - Kecamatan Enam Lingsung
Kabupaten Padang Pariaman Telpn. (0751) 4674000

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KAB. PADANG PARIAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: M. Fadhly S, S. AP, M.M
Alamat Rumah	: Jl. Kampuang Koto, Kel. Ulakan, Kec. Ulakan Tapakih
Alamat Kantor	: Jl. Syech Burhannudin Padang Bungo, Kenagarian Gadur, Kec. Enam Lingsung, Kab. Padang Pariaman
Telepon	: 0751 - 7005291
Jabatan	: Plt. Direktur (periode 11 April 2025 – sekarang)
Nama	: Aminuddin, ST
Alamat Rumah	: Jl. Korong Simpang, Kel. Ketaping, Kec. Batang Anai
Alamat Kantor	: Jl. Syech Burhannudin Padang Bungo, Kenagarian Gadur, Kec. Enam Lingsung, Kab. Padang Pariaman
Telepon	: 0751 - 7005291
Jabatan	: <i>Ex</i> Direktur (periode 2021 – 11 April 2025)

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman.
2. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berlaku umum di Indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman tidak mengandung informasi yang menyesatkan, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta material terhadap laporan keuangan.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANAI**

Jalan Syech Burhannudin Padang Bungo – Kenagarian Gadur - Kecamatan Enam Lingsung
Kabupaten Padang Pariaman Telpn. (0751) 4674000

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gadur, 23 April 2025

Hormat kami,

[Handwritten signature]



M. Fadhly S, S. AP, M.M
Plt. Direktur

Aminuddin, ST

No. 00550/2.0459/AU.2/11/1511-3/1/IV/2025

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth:

**Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai
Kabupaten Padang Pariaman**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman, yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi likuidasi oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam Laporan Keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi Laporan Keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah Laporan Keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
HELIANTONO & REKAN



Raimon, SE, M.Si, Ak, CA, QIA, CPA, CFI
Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP. 1511

Jakarta, 23 April 2025

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KAB. PADANG PARIAMAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

ASET	Catatan	2024	2023
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2b, 4	1.156.360.829	1.284.223.115
Piutang Usaha	2c, 5	6.259.364.434	6.722.448.963
Piutang Non Usaha	2c, 6	149.933.311	94.134.179
Persediaan	2d, 7	986.639.884	676.118.511
Pembayaran Dimuka	8	159.421.335	198.622.191
Jumlah Aset Lancar		8.711.719.793	8.975.546.959
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 121.195.340.007 pada tahun 2024 dan Rp47.217.030.353 pada tahun 2023)	2e, 9	44.700.835.892	45.399.434.126
Aset Lain-lain	2e, 10	88.930.172	2.155.826.589
Jumlah Aset Tidak Lancar		44.789.766.065	47.555.260.716
JUMLAH ASET		53.501.485.857	56.530.807.676
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	11	459.401.913	246.116.033
Utang Non Usaha	12	1.716.931.433	1.780.248.172
Utang Pajak	13	1.152.074.011	512.825.959
Utang Kendaraan	14	150.400.000	293.568.000
Jumlah Kewajiban		3.478.807.357	2.832.758.164
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2j15	3.083.230.976	5.130.985.628
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.083.230.976	5.130.985.628
JUMLAH KEWAJIBAN		6.562.038.333	7.963.743.792
EKUITAS			
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	16	99.082.995.187	99.082.995.187
Penyertaan Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya	17	28.020.521.385	28.020.521.385
Modal Hibah	18	1.909.193.333	1.592.016.000
Laba Ditahan	19	(80.769.668.623)	(74.709.076.899)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(1.303.593.757)	(5.419.391.787)
Jumlah Ekuitas		46.939.447.525	48.567.063.884
TOTAL EKUITAS		53.501.485.858	56.530.807.676

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KAB. PADANG PARIAMAN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Penjualan Air	2f, 20	25.165.381.130	25.821.362.158
Pendapatan Non Air	2f, 20	2.054.666.140	1.850.776.043
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		27.220.047.270	27.672.138.201
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	2g, 21	11.449.430.889	13.652.283.327
Beban Kesejahteraan Pegawai	2g, 22	2.726.900.158	3.421.533.965
Beban Listrik dan Kantor	2g, 23	1.361.001.970	1.149.500.160
Beban Penyusutan	2g, 24	4.272.202.249	4.464.114.307
Beban Pemeliharaan	2g, 25	1.517.278.939	1.984.512.757
Beban Pemakaian Bahan Pembantu	2g, 26	59.346.610	56.883.950
Beban Keuangan dan Umum	2g, 27	4.316.168.471	6.176.054.167
Beban Operasional Lainnya	2g, 28	2.189.146.777	1.081.578.625
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		27.891.476.062	31.986.461.259
LABA USAHA		(671.428.793)	(4.314.323.058)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Jasa Giro	2f, 29	13.955.025	12.474.179
Pendapatan Bunga Deposito	2f, 29	-	-
Beban Administrasi Bank	2f, 29	(6.432.524)	(5.828.930)
Beban Pajak	2f, 29	(439.413)	(579.432.199)
Kerugian Penghapusan Persediaan		-	(19.455.821)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		7.083.088	(592.242.771)
LABA SEBELUM PAJAK		(664.345.705)	(4.906.565.828)
Taksiran Pajak Penghasilan	13b	639.248.052	512.825.959
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		(1.303.593.757)	(5.419.391.787)

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KAB. PADANG PARIAMAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah)

Uraian	Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan	Penyertaan Pemerintah yg Belum Ditetapkan	Modal Hibah	Saldo Laba Ditahan (Akumulasi Rugi)	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2022	99.082.995.187	28.020.521.385	1.592.016.000	(75.517.369.644)	53.178.162.928
Penambahan Modal Tahun 2022					-
Koreksi Laba Ditahan				808.292.745	808.292.745
Laba Rugi Tahun Berjalan 2022				(5.419.391.787)	(5.419.391.787)
Saldo per 31 Desember 2023	99.082.995.187	28.020.521.385	1.592.016.000	(80.128.468.686)	48.567.063.885
Penambahan Modal Tahun 2023			317.177.333		317.177.333
Koreksi Laba Ditahan				(641.199.937)	(641.199.937)
Laba Rugi Tahun Berjalan 2023				(1.303.593.757)	(1.303.593.757)
Saldo per 31 Desember 2024	99.082.995.187	28.020.521.385	1.909.193.333	(82.073.262.380)	46.939.447.524

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANAI KAB. PADANG PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) bersih	(1.303.593.757)	(5.419.391.787)
Penyusutan	73.978.309.653	4.148.922.814
Piutang Usaha	463.084.529	1.282.551.372
Piutang Non Usaha	(55.799.132)	27.405.160
Persediaan	(310.521.373)	55.959.285
Biaya Dibayar Dimuka	39.200.856	(78.347.363)
Utang Usaha	213.285.881	(291.175.599)
Utang Non Usaha	(63.316.739)	(523.415.598)
Utang Pajak	639.248.052	500.034.833
Kewajiban Dana Pensiun	-	-
Utang Kendaraan	(143.168.000)	(487.528.000)
Arus Kas Bersih Yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	73.456.729.971	(784.984.883)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pelepasan (Pemerolehan) Aset Tetap	(73.279.711.419)	498.365.995
Aset Lainnya -Aset Rusak/Tidak Ada	2.066.896.417	(2.155.826.592)
Arus Kas Bersih Yang diperoleh dari Aktivitas Investasi	(71.212.815.002)	(1.657.460.597)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(2.047.754.652)	408.922.976
Modal Hibah	317.177.333	-
Laba Tahun Lalu	(641.199.934)	808.292.745
Arus Kas Bersih Yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(2.371.777.253)	1.217.215.721
Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(127.862.285)	(1.225.229.759)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.284.223.114	2.509.452.873
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.156.360.829	1.284.223.114

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

**PT. BPR
PEMBANGUNAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1
LAPORAN LABA RUGI	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN ARUS KAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 – 23
 LAMPIRAN : Rincian Beban Administrasi dan Umum	

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
T E N T A N G
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	: Dedviandri, SE
Alamat kantor	: Sungai Paku Jl. Raya Sungai Limau Kel. Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
Telepon	: 0751 695590
Jabatan	: Direktur Utama
2. Nama	: Syafriyanto, S.Pd
Alamat kantor	: Sungai Paku Jl. Raya Sungai Limau Kel. Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman
Telepon	: 0751 695590
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa :

1. PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Dengan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan.
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan terlampir.
4. Laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan ketentuan yang ditetapkan otoritas perbankan.
5. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.



6. PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
7. Direksi PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, serta sistem pengendalian internal dalam PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Dedviandri, SE
Direktur Utama




Syafriyanto, S.Pd
Direktur

Sungai Limau, 12 Februari 2025

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. AFRIZAL SY
 Registered Public Accountant & Management Consultant

Izin Usaha No. KEP-659/KM.17/1998, 07 September 1998
 Izin Akuntan Publik NRA/PAP.0526
 Terdaftar Di OJK : STTD.KAP-82/PM.22/2018 Di Sektor
 Pasar Modal, KIB, Perbankan Konvensional dan Syariah

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00014/2.0092/AU.2/07/0526-5/1/II/2025

Kepada Yth.

Dewan Komisaris dan Direksi

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Opini Wajar

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan professional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR. Berdasarkan POJK Nomor 1 Tahun 2024, BPR wajib menentukan Kualitas Aset Produktif untuk Kredit yang diberikan, Kualitas Aset Produktif pada Sertifikat Bank Indonesia, Kualitas Aset Produktif untuk Penempatan Pada Bank Lain dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif.

Penekanan suatu hal

Seperti diungkapkan pada catatan 29 atas laporan keuangan, NPL kredit 31 Desember 2024 sebesar 21,25% dan 31 Desember 2023 sebesar 9,33%. Tingginya persentase NPL akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha bank.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
2. Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
3. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
4. Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
5. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. AFRIZAL SY



Drs. Afrizal Sy, CA, CPA
Izin Akuntan Publik AP. 0526

Jakarta, 12 Februari 2025



LAPORAN KEUANGAN POKOK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN ARUS KAS**

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
Kas	3	183.310.100	273.701.000
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	4	71.625.765	74.140.865
Penempatan Pada Bank Lain	5	2.882.010.385	4.319.069.367
Penyisihan Kerugian		-	(198.704)
Total		2.882.010.385	4.318.870.663
Kredit Yang Diberikan	6	11.460.761.176	9.806.502.104
Penyisihan Kerugian		(919.135.343)	(407.207.818)
Total		10.541.625.833	9.399.294.286
Aset Tetap dan Inventaris	7	1.093.395.050	946.782.050
Akumulasi Penyusutan		(668.707.478)	(775.311.657)
Total		424.687.572	171.470.393
Aset Tidak Berwujud	8	1	1
Aset Lain-Lain	9	250.098.239	127.054.232
Jumlah Aset		14.353.357.895	14.364.531.440
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	10	16.687.477	17.759.896
Hutang Bunga	11	7.649.345	3.499.841
Hutang Pajak	12	-	17.052.435
Simpanan	13		
Tabungan		4.356.680.506	4.745.921.056
Deposito		2.406.500.000	1.985.000.000
Simpanan dari Bank Lain	14	687.183.429	186.441.773
Kewajiban Lain-Lain	15	-	68.000.000
Jumlah Kewajiban		7.474.700.757	7.023.675.001
EKUITAS			
Modal			
Modal Disetor	1b	6.771.500.000	6.771.500.000
Dana Setoran Modal - Ekuitas		-	-
Saldo Laba	16		
Cadangan umum		438.832.570	382.893.770
Belum Ditentukan Tujuannya		(331.675.432)	186.462.669
Total		107.157.138	569.356.439
Jumlah Ekuitas		6.878.657.138	7.340.856.439
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		14.353.357.895	14.364.531.440

12 Februari 2025


Dedviandri, SE
 Direktur Utama


Syafrianto, S.Pd
 Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN LABA-RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
Pendapatan Operasional			
Pendapatan bunga	17		
Surat berharga		-	-
Penempatan pada bank lain		153.800.619	115.222.922
Kredit yang diberikan		1.322.485.947	1.424.380.794
Provisi kredit		72.488.771	81.028.681
Biaya transaksi		-	-
Pendapatan lainnya	18	361.417.560	341.543.001
Jumlah Pendapatan Operasional		1.910.192.897	1.962.175.398
Beban Operasional			
Beban bunga	19	203.398.462	178.898.242
Beban penyisihan penghapusan aset produktif	20	617.010.203	481.364
Beban pemasaran	21	18.335.000	14.593.972
Beban administrasi dan umum	22	1.468.789.756	1.484.851.677
Beban lainnya	23	64.964.908	59.326.034
Jumlah Beban Operasional		2.372.498.329	1.738.151.289
Laba (Rugi) Operasional		(462.305.432)	224.024.109
Pendapatan dan Beban Non Operasional	24		
Pendapatan Non Operasional		135.700.000	-
Beban Non Operasional		(5.070.000)	(5.567.500)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		130.630.000	(5.567.500)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		(331.675.432)	218.456.609
Taksiran Pajak Penghasilan		-	(31.993.940)
Laba (Rugi) Netto		(331.675.432)	186.462.669

12 Februari 2025


Dedviandri, SE
 Direktur Utama


Syafrianto, S.Pd
 Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Modal Disetor	Dana Setoran Modal - Ekuitas	Saldo Laba			Jumlah
			Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan	
Saldo per 31 Desember 2022	6.021.500.000	750.000.000	333.367.116	-	165.088.848	7.269.955.964
Pembagian laba	-	-	-	-	(165.088.848)	(165.088.848)
Modal	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000
Pembentukan cadangan	-	-	49.526.654	-	-	49.526.654
Dana Setoran Modal - Ekuitas	-	(750.000.000)	-	-	-	(750.000.000)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	-	186.462.669	186.462.669
Saldo per 31 Desember 2023	6.771.500.000	-	382.893.770	-	186.462.669	7.340.856.439
Pembagian laba	-	-	-	-	(186.462.669)	(186.462.669)
Modal	-	-	-	-	-	-
Pembentukan cadangan	-	-	55.938.801	-	-	55.938.801
Dana Setoran Modal - Ekuitas	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	-	(331.675.432)	(331.675.432)
Saldo per 31 Desember 2024	6.771.500.000	-	438.832.570	-	(331.675.432)	6.878.657.138

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2024	2023
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	Laba (Rugi) Setelah Pajak		(331.675.432)	186.462.669
	Penyesuaian Untuk :			
	Penyisihan Penempatan Pada Bank Lain (net)		(198.704)	198.704
	Amortisasi Propisi/Biaya Transaksi		7.690.995	(50.343.470)
	Penyisihan Kredit (net)		511.927.525	282.660
	Penyusutan Aset Tetap (net)		(106.604.179)	67.289.575
	Penyusutan Aset Tidak Berwujud (net)		-	-
	Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja		81.140.205	203.890.138
	Penurunan (Kenaikan) Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		2.515.100	1.986.073
	Penurunan (Kenaikan) Penempatan Pada Bank Lain		(200.000.000)	600.000.000
	Penurunan (Kenaikan) Kredit Yang Diberikan		(1.661.950.067)	587.467.723
	Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-Lain		(123.044.007)	27.778.007
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Segera		(1.072.419)	127.158
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Bunga		4.149.504	(300.987)
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak		(17.052.435)	8.966.861
	Kenaikan (Penurunan) Tabungan		(389.240.551)	521.679.649
	Kenaikan (Penurunan) Deposito		421.500.000	132.000.000
	Kenaikan (Penurunan) Simpanan dari Bank Lain		500.741.656	150.724.909
	Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lain-Lain		(68.000.000)	14.973.784
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		(1.450.313.014)	2.249.293.315
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Pembelian (Penjualan) Aset Tetap dan Inventaris		(146.613.000)	(39.527.000)
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		(146.613.000)	(39.527.000)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Penerimaan (Pembayaran) Modal Disetor		-	750.000.000
	Penerimaan (Pembayaran) Dana Setoran Modal - Ekuitas		-	(750.000.000)
	Kenaikan (Penurunan) Cadangan		55.938.801	49.526.654
	Pembagian Laba Tahun Lalu		(186.462.669)	(165.088.848)
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		(130.523.868)	(115.562.194)
	Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		(1.727.449.882)	2.094.204.121
	Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode	d, 3	3.842.770.367	1.748.566.246
	Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode	d, 3	2.115.320.485	3.842.770.367
	Kas dan Setara Kas terdiri dari :			
	Kas		183.310.100	273.701.000
	Giro Pada Bank Lain		-	-
	Tabungan		1.132.010.385	1.869.069.367
	Deposito Berjangka 1 s/d 3 bulan		800.000.000	1.700.000.000
	Jumlah		2.115.320.485	3.842.770.367

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



**LAPORAN KEUANGAN
UN AUDIT**

**PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
PER 31 DESEMBER 2024**



PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Neraca.....	1
Laporan Laba/Rugi.....	2
Laporan Perubahan Modal.....	3
Laporan Arus Kas.....	4
Catatan atas Laporan Keuangan.....	5-21

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	CAT	2024
ASET		
<u>Aset Lancar</u>		
Kas dan Setara Kas	2c.,3	1.214.047.914
Piutang Usaha	2k.,4	252.259.598
Persediaan	2d.,5.	200.795.676
Perlengkapan Operasional Hotel	6.	160.897.302
Uang Muka	7.	15.493.436
Jumlah Aset Lancar		1.843.493.927
<u>Aset Tidak Lancar</u>		
Aset Tetap (Setelah dikurangi depresiasi)	2e.,2g. ,9.	161.447.482.859
Aset Tidak Berwujud (Setelah dikurangi amortisasi)	2f.,10.	-
Aset Pajak Tangguhan	8.c	131.080.508
Jumlah Aset Tidak Lancar		161.578.563.367
Aset Lain-lain	11	1.198.918.819
TOTAL ASET		164.620.976.113
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>Liabilitas Lancar</u>		
Utang Usaha	2k.,12.	838.617.929
Beban Akrua	2k.,13.	682.810.277
Utang Pajak	2h.,8.a.	8.328.323.740
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	2j.,14.	1.139.987.516
Peny Penggantian Perlengkapan Hotel	2i.,	-
Utang Dividen	15.	-
Utang Lain-lain	2k.,16.	170.778.737
Jumlah Liabilitas Lancar		11.160.518.200
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Liabilitas Pajak Tangguhan	2h.,8.c.	3.034.899.797
Utang Imbalan Pasca Kerja		354.250.000
Jumlah Liabilitas		14.549.667.997
<u>Ekuitas</u>		
Modal Dasar Rp.308.078.000.000 terdiri dari 184.848 Saham Seri A Nilai Nominal		
Rp.1000.000 per Saham dan 123.230.000 Saham Seri B Nilai Nominal Rp.1.000 per		
Saham.		
Modal Ditempatkan dan Disetor terdiri dari 98.405 Saham Seri A dan 65.620.990		
Saham Seri B	16	164.025.990.000
Tambahan Modal Disetor - TA		2.030.287.790
Selisih Revaluasi Aset Tetap		33.329.979.575
Defisit		(49.314.949.249)
Jumlah Modal		150.071.308.116
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		164.620.976.113

Jakarta, 30 Januari 2024


 Oktofrida Wisnu Pamung
 Direktur

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	CAT	2024
Pendapatan Usaha	3j.,17	15.256.322.662
Beban Pokok Penjualan	3j.,18	5.950.957.367
LABA (RUGI) KOTOR		9.305.365.295
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	21	4.511.047
Jumlah Laba Kotor & Pendapatan Lainnya		9.309.876.341
<u>Beban Usaha</u>		
Beban Pemasaran	3j.,19	1.069.855.189
Beban Administrasi dan Umum	3j.,20	6.456.241.118
Jumlah Beban Usaha		7.526.096.307
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PENYUSUTAN & AMORTISASI		1.783.780.034
Beban Penyusutan & Amortisasi		2.974.781.892
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(1.191.001.858)
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	8b	-
Pajak Tangguhan	8c	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		-
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK PENGHASILAN		(1.191.001.858)

Jakarta, 30 Januari 2024


Oktofrida Wisna-Pamungka
Direktur

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	Cat	Modal Saham	Selisih Revaluasi	Tambahan Modal Disetor- TA	Saldo Laba (Defisit)	Jumlah Ekuitas
EKUITAS AWAL						
Saldo per 1 Januari 2023		164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(45.015.622.288)	154.370.635.077
Tambahan Modal Disetor		-	-	-	-	-
Koreksi Uang Muka Pembagian Dividen		-	-	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	-	-	-
Rugi Bersih		-	-	-	(3.108.325.102)	(3.108.325.102)
Saldo per 31 Desember 2023		164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(48.123.947.390)	151.262.309.975
Tambahan Modal Disetor						
Pembagian Dividen						-
Tambahan Modal Disetor - TA						-
Koreksi Laba Ditahan						-
Selisih Revaluasi Aset Tetap						-
Rugi Bersih					(1.191.001.858)	(1.191.001.858)
EKUITAS AKHIR TAHUN 2024		164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(49.314.949.249)	150.071.308.116

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
 dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dinyatakan dalam Rupiah)

K E T E R A N G A N	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Kas dari Pelanggan	18.910.381.569
Pembayaran kepada karyawan	(6.684.024.623)
Pembayaran beban operasional	(8.779.254.373)
Pembayaran PBB dan pajak pembangunan daerah	(1.669.358.418)
	1.777.744.155
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Pembelian aset tetap	(322.320.313)
Pekerjaan dalam Penyelesaian	(801.957.944)
	(1.124.278.257)
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan Pinjaman	-
Pengembalian Pinjaman	-
	-
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	653.465.898
Kas dan setara kas awal tahun	560.582.016
Kas dan setara kas akhir tahun	1.214.047.914



Jakarta, 30 Januari 2025

Nomor : 04-3/BCS/DIR/I-2025

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : **Laporan Keuangan PT. Balairung Citrajaya Sumbar dan Konfirmasi Penyertaan Modal Kabupaten Padang Pariaman**

Kepada Yth

Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman

Cq. Bidang Akuntansi

di

Tempat

Dengan Hormat,

Semoga Bapak/Ibu dan jajaran staff dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amiin Yaa Rabbal'alamiin.

Menindaklanjuti surat nomor 920/753/BPKD-AKT/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Permintaan Laporan Keuangan sebagai data untuk penyusunan LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami lampirkan :

1. Laporan Keuangan PT. Balairung Citrajaya Sumbar Tahun 2024 (Un Audit)
2. Komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam struktur modal perusahaan dari penyertaan modal yang sudah disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

Oktofrida Wisnu Pamungkas

Direktur

SURAT PERNYATAAN

No. 04-3/BCS-SP/DIR/III-2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Oktofrida Wisnu Pamungkas
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan - Jawa Tengah, 12 Oktober 1984
Jabatan : Direktur PT Balairung Citrajaya Sumbar (Perseroda)

Melalui surat ini kami sampaikan sbb :

1. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp 2.824.899.000,-** (*dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)
2. Total modal Perusahaan adalah sebesar **Rp 164.025.990.000,-** (*Seratus enam puluh empat milyar dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
3. Prosentase penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2024 adalah sebesar 1.72%
4. Jumlah lembar Saham sebanyak 1.132.593 lembar, yang terdiri dari:
 - a. Saham seri A = Sebanyak : 1.694 lembar
 - b. Saham seri B = Sebanyak : 1.130.899 lembar

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2024**

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	MUTASI TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
01.01	Kantor DPRD	-	-	-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-	-	-	-
01.03	Sekretariat Daerah	14.644.966.241,00	2.270.580.000,00	57.200.000	16.858.346.241,00
01.04	Sekretariat DPRD	7.652.000,00	-	-	7.652.000,00
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	-
01.06	Inspektorat Kabupaten	8.360.000,00	-	-	8.360.000,00
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
		-	-	-	-
01.09	Kecamatan	-	-	-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	772.500.000,00	-	-	772.500.000,00
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	38.900.000,00	-	-	38.900.000,00
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	10.922.500,00	-	-	10.922.500,00
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	55.485.000,00	-	-	55.485.000,00
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	15.925.000,00	-	-	15.925.000,00
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	60.480.000,00	-	-	60.480.000,00
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	11.325.000,00	-	-	11.325.000,00
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	12.900.000,00	-	-	12.900.000,00
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	4.970.000,00	-	-	4.970.000,00
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	75.680.000,00	-	-	75.680.000,00
01.09.14	Kecamatan Patamuan	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	MUTASI TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
			TOTAL MUTASI TAMBAH	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Sub Jumlah	15.904.065.741	2.270.580.000	57.200.000,00	18.117.445.741
02	Bidang Pendidikan			-	
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.073.133.533,00	-	-	13.073.133.533,00
		-	-	-	-
03	Bidang Kesehatan	-	-	-	-
03.01	Dinas Kesehatan	2.438.188.100,00	-	52.200.000,00	2.385.988.100,00
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	1.222.160.000,00	-	-	1.222.160.000,00
		-	-	-	-
04	Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.003.591.225,00	-	-	141.003.591.225,00
		-	-	-	-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
		-	-	-	-
06	Bidang Perhubungan	-	-	-	-
06.01	Dinas Perhubungan	483.109.000,00		-	483.109.000,00
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	-		-	-
		-	-	-	-
07	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28.933.115.750,00	1.087.632.000,00	-	30.020.747.750,00
		-	-	-	-
08	Bidang Kependudukan dan Capil		-	-	
08.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.740.000,00	-	-	14.740.000,00

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	MUTASI TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
			TOTAL MUTASI TAMBAH	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
		-	-	-	-
10	Bidang Sosial	-	-	-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335.370.000,00	-	-	335.370.000,00
		-	-	-	-
11	Bidang Koperasi dan UKM	-	-	-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	96.595.000,00	-	-	96.595.000,00
		-	-	-	-
12	Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	-	-	-	-
		-	-	-	-
13	Bidang Kebudayaan	-	-	-	-
		-	-	-	-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.762.858.400,00	50.000.000,00	-	1.812.858.400,00
		-	-	-	-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri	-	-	-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	52.200.000,00	-	52.200.000,00
		-	-	-	-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa	-	-	-	-
		-	-	-	-
17	Bidang Perpustakaan	-	-	-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	321.630.000,00	-	-	321.630.000,00
		-	-	-	-
18	Bidang Pertanian	-	-	-	-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.030.468.000,00	-	-	4.030.468.000,00
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	55.750.000,00	-	-	55.750.000,00
		-	-	-	-

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	MUTASI TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
			TOTAL MUTASI TAMBAH	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	-
		-	-	-	-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
20.01	Dinas Perikanan	3.113.542.000,00	-		3.113.542.000,00
			-		
	TOTAL	213.088.316.749,00	3.460.412.000,00	109.400.000,00	216.439.328.749,00



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tambah					
			Belanja Modal	Pindah Masuk Antar OPD	Hibah Dari Pihak Ketiga	Reklase Masuk	Reklase Dari Belanja Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	8	9	16	18
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
01.01	Kantor DPRD	-				-		-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-				-		-
01.03	Sekretariat Daerah	26.868.237.646,71	350.369.280,00	1.568.906.375,00		-		1.919.275.655,00
01.04	Sekretariat DPRD	9.103.322.887,78	239.609.500,00			-		239.609.500,00
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	5.723.201.808,00	483.247.000,00	148.137.875,00		-		631.384.875,00
01.06	Inspektorat Kabupaten	1.546.748.147,00		37.880.000,00		-		37.880.000,00
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.879.984.316,00	34.000.000,00	347.740.000,00		-		381.740.000,00
						-		-
01.09						-		-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	462.108.243,00	42.000.000,00			-		42.000.000,00
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	556.331.440,00	29.623.000,00			-		29.623.000,00
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	485.068.578,00	18.000.000,00			-		18.000.000,00
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	464.164.191,00				-		-
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	593.992.958,00	7.000.000,00			-		7.000.000,00
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	475.385.558,00	11.600.000,00			-		11.600.000,00
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	541.910.231,00				-		-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	441.137.192,00	27.084.000,00			-		27.084.000,00
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	497.456.952,00	4.750.000,00			-		4.750.000,00
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	547.956.645,00	25.404.184,00			-		25.404.184,00
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	542.277.727,00	6.416.800,00			3.385.500,00	3.385.500,00	9.802.300,00
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	432.826.651,00				-		-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	537.877.501,00				-		-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	588.711.008,00				-		-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	404.760.006,00				-		-

**ASET TETAP - PERALATAN DADN MESIN
PER 31 DESEMBER 2024**

Mutasi 2024									Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
Mutasi Kurang									
Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar	Reklase Ke Aset Gedung dan Bangunan	Reklase Ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	Reklase Ke ALL Rusak Berat	Reklase Ke Ekstra Kompatable	Reklase Ke Barang dan Jasa	Total Mutasi Kurang	
(Rp) 19	(Rp) 23	(Rp) 24	(Rp) 25	(Rp) 26	(Rp) 29	(Rp) 32	(Rp) 34	(Rp) 35	(Rp) 36
		-						-	-
		-						-	-
623.073.000,00		-						623.073.000,00	28.164.440.301,71
	1.103.649.647,55	-						1.103.649.647,55	8.239.282.740,23
954.869.538,00		-						954.869.538,00	5.399.717.145,00
		145.325.500,00			145.325.500,00			145.325.500,00	1.439.302.647,00
196.950.000,00		169.033.000,00			169.033.000,00			365.983.000,00	1.895.741.316,00
		-						-	
		-						-	
		-						-	504.108.243,00
		-						-	585.954.440,00
		-						-	503.068.578,00
		-						-	464.164.191,00
		-						-	600.992.958,00
		-						-	486.985.558,00
		33.508.800,00			33.508.800,00			33.508.800,00	508.401.431,00
		13.440.025,00			13.440.025,00			13.440.025,00	454.781.167,00
		-						-	502.206.952,00
		13.189.600,00			13.189.600,00			13.189.600,00	560.171.229,00
		-						-	552.080.027,00
		-						-	432.826.651,00
		31.521.250,00			31.521.250,00			31.521.250,00	506.356.251,00
		-						-	588.711.008,00
		29.407.750,00			29.407.750,00			29.407.750,00	375.352.256,00

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024						
			Mutasi Tambah					
			Belanja Modal	Pindah Masuk Antar OPD	Hibah Dari Pihak Ketiga	Reklase Masuk	Reklase Dari Belanja Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	664.076.107,00				-		-
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	602.754.593,00				-		-
	Sub Jumlah	53.960.290.386,49	1.279.103.764,00	2.102.664.250,00	-	3.385.500,00	3.385.500,00	3.385.153.514,00
02	Bidang Pendidikan							
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	132.033.542.019,81	8.295.514.281,00		37.773.001,00	7.125.000,00	7.125.000,00	8.340.412.282,00
		-				-		-
03	Bidang Kesehatan	-				-		-
03.01	Dinas Kesehatan	94.749.797.404,64	3.202.517.895,00			-		3.202.517.895,00
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	92.725.848.531,75	6.748.836.595,00			-		6.748.836.595,00
		-				-		-
04	Bidang Pekerjaan Umum	-				-		-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.976.269.621,10	226.912.200,00			34.046.000,00	34.046.000,00	260.958.200,00
		-				-		-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan	-				-		-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.144.704.693,00	507.302.750,00			-		507.302.750,00
		-				-		-
06	Bidang Perhubungan	-				-		-
06.01	Dinas Perhubungan	10.533.393.126,00				-		-
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.004.954.460,60	10.500.000,00	24.550.000,00		-		35.050.000,00
		-				-		-
07	Bidang Lingkungan Hidup	-				-		-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.995.446.711,00	478.337.124,00	196.950.000,00	181.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	857.787.124,00
		-				-		-
08	Bidang Kependudukan dan Capil					-		-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	3.297.726.825,00	115.824.475,00	17.080.000,00		-		132.904.475,00
		-				-		-

Mutasi 2024									Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
Mutasi Kurang									
Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar	Reklase Ke Aset Gedung dan Bangunan	Reklase Ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	Reklase Ke ALL Rusak Berat	Reklase Ke Ekstra Kompatable	Reklase Ke Barang dan Jasa	Total Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
124.884.000,00		9.955.000,00			9.955.000,00			134.839.000,00	529.237.107,00
		-						-	602.754.593,00
1.899.776.538,00	1.103.649.647,55	445.380.925,00	-	-	445.380.925,00	-	-	3.448.807.110,55	53.896.636.789,94
								-	
		2.039.366.458,00	27.622.000,00	5.000.000,00		1.931.791.658,00	74.952.800,00	2.039.366.458,00	138.334.587.843,81
		-						-	-
		-						-	-
	185.600.000,00	916.233.729,45	35.990.000,00	19.880.000,00	811.716.869,45	43.146.860,00	5.500.000,00	1.101.833.729,45	96.850.481.570,19
		1.827.500,00				1.827.500,00		1.827.500,00	99.472.857.626,75
		-						-	-
		-						-	-
	58.377.200,00	-						58.377.200,00	17.178.850.621,10
		-						-	-
		-						-	-
297.935.200,00		-						297.935.200,00	2.354.072.243,00
		-						-	-
		-						-	-
	141.000.000,00	-						141.000.000,00	10.392.393.126,00
		-						-	4.040.004.460,60
		-						-	-
		-						-	-
		260.524.316,00			260.524.316,00			260.524.316,00	8.592.709.519,00
		-						-	-
		-						-	-
		924.075,00					924.075,00	924.075,00	3.429.707.225,00
		-						-	-

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024						
			Mutasi Tambah					
			Belanja Modal	Pindah Masuk Antar OPD	Hibah Dari Pihak Ketiga	Reklase Masuk	Reklase Dari Belanja Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-				-		-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	956.518.615,00		496.183.000,00		-		496.183.000,00
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.998.468.664,00	958.083.820,00	240.350.000,00		-		1.198.433.820,00
		-				-		-
10	Bidang Sosial	-				-		-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.154.050.891,00		617.909.538,00		-		617.909.538,00
		-				-		-
11	Bidang Koperasi dan UKM	-				-		-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	4.508.442.756,23	10.545.000,00			-		10.545.000,00
		-				-		-
12	Bidang Penanaman Modal	-				-		-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	5.762.311.803,00		56.820.000,00	17.651.040,00	-		74.471.040,00
						-		-
13	Bidang Kebudayaan					-		-
						-		-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga					-		-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.269.760.689,00	1.800.726.000,00			-		1.800.726.000,00
						-		-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri					-		-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	392.360.359,00				-		-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	11.617.635.625,00	78.700.000,00	115.000.000,00		-		193.700.000,00
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.594.966.463,00	28.400.000,00		49.250.000,00	-		77.650.000,00
						-		

Mutasi 2024									Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
Mutasi Kurang									
Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar	Reklase Ke Aset Gedung dan Bangunan	Reklase Ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	Reklase Ke ALL Rusak Berat	Reklase Ke Ekstra Kompatable	Reklase Ke Barang dan Jasa	Total Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		-						-	-
412.641.000,00		-						412.641.000,00	1.040.060.615,00
	222.707.500,00	-						222.707.500,00	8.974.194.984,00
		-						-	-
		-						-	-
438.990.000,00		-						438.990.000,00	2.332.970.429,00
		-						-	-
		-						-	-
	4.000.000,00	-						4.000.000,00	4.514.987.756,23
		-						-	-
		-						-	-
		171.957.498,00			170.229.398,00		1.728.100,00	171.957.498,00	5.664.825.345,00
		-						-	
		-						-	
		-						-	
		-						-	
976.163.350,00		5.400.000,00				5.400.000,00		981.563.350,00	3.088.923.339,00
		-						-	
		-						-	
		8.000.000,00			8.000.000,00			8.000.000,00	384.360.359,00
	40.000.000	-						40.000.000,00	11.771.335.625,00
		65.961.428,00			65.961.428,00			65.961.428,00	7.606.655.035,00
		-						-	

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024						
			Mutasi Tambah					
			Belanja Modal	Pindah Masuk Antar OPD	Hibah Dari Pihak Ketiga	Reklase Masuk	Reklase Dari Belanja Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa					-		-
						-		-
17	Bidang Perpustakaan					-		-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.651.121.093,00	129.492.800,00			-		129.492.800,00
						-		-
18	Bidang Pertanian					-		-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.721.071.032,36		199.000.000,00		-		199.000.000,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.681.143.663,66				-		-
						-		-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral					-		-
						-		-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan					-		-
20.01	Dinas Perikanan	4.147.274.844,94	18.000.000,00	24.500.000,00		-		42.500.000,00
		-				-		-
	TOTAL	478.877.100.278,58	23.888.796.704,00	4.091.006.788,00	285.674.041,00	46.056.500,00	46.056.500,00	28.311.534.033,00

Mutasi 2024									Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
Mutasi Kurang									
Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar	Reklase Ke Aset Gedung dan Bangunan	Reklase Ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	Reklase Ke ALL Rusak Berat	Reklase Ke Ekstra Kompatable	Reklase Ke Barang dan Jasa	Total Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		-						-	
		-						-	
		-						-	
		-						-	3.780.613.893,00
		-						-	
		-						-	
65.500.700,00		-						65.500.700,00	6.854.570.332,36
		-						-	2.681.143.663,66
		-						-	
		-						-	
		-						-	
		-						-	
		-						-	
		-						-	4.189.774.844,94
		-						-	-
4.091.006.788,00	1.755.334.347,55	3.915.575.929,45	63.612.000,00	24.880.000,00	1.761.812.936,45	1.982.166.018,00	83.104.975,00	9.761.917.065,00	497.426.717.246,58



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2024**

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tah						
			Mutasi Tambah						
			Belanja Modal	Pindah Masuk Antar OPD	Reklase Masuk	Reklase dari Peralatan dan Mesin	Reklase dari KDP	Reklase Dari Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
1	2	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
01.01	Kantor DPRD	-			-				-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-			-				-
01.03	Sekretariat Daerah	118.455.039.885,97			-				-
01.04	Sekretariat DPRD	5.595.516.907,00			-				-
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	8.447.792.643,00			-				-
01.06	Inspektorat Kabupaten	6.355.963.180,00			-				-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-			-				-
		-			-				-
01.09	Kecamatan	-			-				-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	611.425.616,00		165.816.380,00	-				165.816.380,00
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	1.264.134.420,00			-				-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1.100.052.986,00			-				-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	737.238.000,00			-				-
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	1.178.889.000,00		149.114.642,00	-				149.114.642,00
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	1.960.376.000,00			-				-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	2.722.535.567,76			-				-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	618.482.600,00		165.823.380,00	-				165.823.380,00
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	1.366.565.000,00			-				-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	697.992.900,00			-				-
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	634.140.000,00			-				-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	297.000.000,00			-				-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	2.259.848.679,48			-				-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	787.339.363,00			-				-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	540.192.000,00			-				-
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	705.058.801,00		165.793.380,00	-				165.793.380,00
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	496.577.750,00		165.819.380,00	-				165.819.380,00
	Sub Jumlah	156.832.161.299,21	-	812.367.162,00	-	-	-	-	812.367.162,00

un 2024							Saldo Per 31 Desember 2024
Mutasi Kurang							
Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar	Reklase ke Aset JJI	Reklase ke Aset KDP	Reklase ke Utang Jangka Pendek	Nilai Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
20	22	24	26	27	32	33	34
						-	-
						-	-
		-				-	118.455.039.885,97
		-				-	5.595.516.907,00
		-				-	8.447.792.643,00
		-				-	6.355.963.180,00
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	777.241.996,00
206.102.617,00		-				206.102.617,00	1.058.031.803,00
		-				-	1.100.052.986,00
		-				-	737.238.000,00
		-				-	1.328.003.642,00
		-				-	1.960.376.000,00
		-				-	2.722.535.567,76
		-				-	784.305.980,00
		-				-	1.366.565.000,00
		-				-	697.992.900,00
		-				-	634.140.000,00
		-				-	297.000.000,00
		-				-	2.259.848.679,48
		-				-	787.339.363,00
		-				-	540.192.000,00
		-				-	870.852.181,00
		-				-	662.397.130,00
206.102.617,00	-	-		-	-	206.102.617,00	157.438.425.844,21

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tah						
			Mutasi Tambah						
			Belanja Modal	Pindah Masuk Antar OPD	Reklase Masuk	Reklase dari Peralatan dan Mesin	Reklase dari KDP	Reklase Dari Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
1	2	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Bidang Pendidikan								
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	587.984.633.483,19	9.663.287.684,00		490.491.100,00	27.622.000,00		462.869.100,00	10.153.778.784,00
		-			-				-
03	Bidang Kesehatan								
03.01	Dinas Kesehatan	102.406.274.763,11	1.685.219.510,00		35.990.000,00	35.990.000,00			1.721.209.510,00
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	87.355.760.783,39	548.224.622,00		-				548.224.622,00
		-			-				-
04	Bidang Pekerjaan Umum								
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.019.074.299,60	5.087.446.250,00		119.158.500,00			119.158.500,00	5.206.604.750,00
		-			-				-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan								
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.205.138.715,06			-				-
		-			-				-
06	Bidang Perhubungan								
06.01	Dinas Perhubungan	9.235.123.443,80			-				-
	Dinas Komunikasi dan Informatika				-				-
		-			-				-
07	Bidang Lingkungan Hidup								
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.857.422.678,00			-				-
		-			-				-
08	Bidang Kependudukan dan Capil								
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	488.343.425,00			-				-
		-			-				-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.000.000,00			-				-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.181.090.576,82			-				-
		-			-				-
10	Bidang Sosial								
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	912.089.524,00			-				-
		-			-				-
11	Bidang Koperasi dan UKM								
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	1.232.364.200,00			-				-
		-			-				-

un 2024							Saldo Per 31 Desember 2024
Mutasi Kurang							
Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar	Reklase ke Aset JJI	Reklase ke Aset KDP	Reklase ke Utang Jangka Pendek	Nilai Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
20	22	24	26	27	32	33	34
						-	
		1.001.862.260,00	11.011.200,00	856.117.145,00	134.733.915,00	1.001.862.260,00	597.136.550.007,19
		-				-	-
		-				-	-
227.098.814,00		-				227.098.814,00	103.900.385.459,11
		-				-	87.903.985.405,39
		-				-	-
		-				-	-
812.367.162,00		4.073.558.750,00		2.532.066.000,00	4.988.750,00	4.885.925.912,00	17.339.753.137,60
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	10.205.138.715,06
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	9.235.123.443,80
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	24.857.422.678,00
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	488.343.425,00
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	65.000.000,00
		-				-	5.181.090.576,82
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	912.089.524,00
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	1.232.364.200,00
		-				-	-

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tah						
			Mutasi Tambah						
			Belanja Modal	Pindah Masuk Antar OPD	Reklase Masuk	Reklase dari Peralatan dan Mesin	Reklase dari KDP	Reklase Dari Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
1	2	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Bidang Penanaman Modal	-			-				-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	40.878.550.266,44			-				-
		-			-				-
13	Bidang Kebudayaan	-			-				-
		-			-				-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-			-				-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	8.010.711.939,00	3.841.886.572,00		14.080.382.293,20		14.080.382.293,20		17.922.268.865,20
		-			-				-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri	-			-				-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-				-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	548.974.000,00		206.102.617,00	-				206.102.617,00
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.695.687.250,00		227.098.814,00	-				227.098.814,00
		-			-				-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa	-			-				-
		-			-				-
17	Bidang Perpustakaan	-			-				-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.575.544.240,00			-				-
		-			-				-
18	Bidang Pertanian	-			-				-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.294.198.795,00			-				-
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.073.332.010,00			-				-
		-			-				-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-			-				-
		-			-				-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan	-			-				-
20.01	Dinas Perikanan	6.908.498.828,99			-				-
		-			-				-
	TOTAL	1.081.759.974.520,61	20.826.064.638,00	1.245.568.593,00	14.726.021.893,20	63.612.000,00	14.080.382.293,20	582.027.600,00	36.797.655.124,20

un 2024							Saldo Per 31 Desember 2024
Mutasi Kurang							
Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar	Reklase ke Aset JJI	Reklase ke Aset KDP	Reklase ke Utang Jangka Pendek	Nilai Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
20	22	24	26	27	32	33	34
		-				-	-
		-				-	40.878.550.266,44
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		43.851.200,00		43.851.200,00		43.851.200,00	25.889.129.604,20
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	755.076.617,00
	227.098.814,00	-				227.098.814,00	3.695.687.250,00
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	1.575.544.240,00
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	13.294.198.795,00
		-				-	3.073.332.010,00
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	-
		-				-	6.908.498.828,99
		-				-	-
1.245.568.593,00	227.098.814,00	5.119.272.210,00	11.011.200,00	3.432.034.345,00	139.722.665,00	6.591.939.617,00	1.111.965.690.027,81

**ASET TETAP - JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2024**

[illegible]

[illegible]

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024									
			Mutasi Tambah									
			Belanja Modal	BTT	Pindah Masuk Antar SKPD	Utang Jangka Pendek	Reklase Masuk	Reklase Dari Peralatan dan Mesin	Reklase Dari Gedung dan Bangunan	Reklase Dari KDP	Reklase Dari Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
1	2	(Rp) 3	(Rp) 4	(Rp) 5	(Rp) 6	(Rp) 7	(Rp) 9	(Rp) 10	(Rp) 11	(Rp) 13	(Rp) 15	(Rp) 17
02	Bidang Pendidikan											-
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	848.925.943,00	159.579.517,00				16.011.200,00	5.000.000,00	11.011.200,00			175.590.717,00
		-					-					-
03	Bidang Kesehatan	-										-
03.01	Dinas Kesehatan	588.280.789,00	9.000.000,00				19.880.000,00	19.880.000,00				28.880.000,00
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	2.794.966.796,00	749.395.830,00				-					749.395.830,00
		-					-					-
04	Bidang Pekerjaan Umum	-										-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.533.530.459.085,81	91.311.399.963,00	4.811.148.000,00	8.959.094.400,00	#####	#####			2.574.981.543,00	385.327.553,00	108.213.553.483,00
		-					-					-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan	-										-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-					-					-
		-					-					-
06	Bidang Perhubungan	-										-
06.01	Dinas Perhubungan	7.368.682.116,00					84.816.210,00				84.816.210,00	84.816.210,00
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	-										-
		-					-					-
07	Bidang Lingkungan Hidup	-										-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	133.946.000,00					-					-
		-					-					-
08	Bidang Kependudukan dan Capil	-										-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	118.061.808,00					-					-
		-					-					-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-										-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	-					-					-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00					-					-
		-					-					-
10	Bidang Sosial	-										-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	139.975.000,00					-					-
		-					-					-
11	Bidang Koperasi dan UKM	-										-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	30.143.000,00	24.963.900,00				-					24.963.900,00
		-					-					-
12	Bidang Penanaman Modal	-										-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	1.744.474.500,00					-					-
		-					-					-

Mutasi Kurang								Saldo Per 31 Desember 2024
Penghapusan	Pindah Keluar Antar OPD	Reklase Keluar	Reklase ke KDP	Reklase ke Aset Tak Berwujud	Reklase ke Barang dan Jasa	Reklase ke Utang Jangka Pendek	Nilai Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
19	20	22	26	29	30	32	33	34
							-	
		-					-	1.024.516.660,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	617.160.789,00
		-					-	3.544.362.626,00
		-					-	-
		-					-	-
1.462.385.000,00		1.354.534.570,00	599.419.400,00	#####	647.077.720,00	#####	2.816.919.570,00	#####
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	7.453.498.326,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	133.946.000,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	118.061.808,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	25.000.000,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	139.975.000,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	55.106.900,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	1.744.474.500,00
		-					-	-

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024									
			Mutasi Tambah									
			Belanja Modal	BTT	Pindah Masuk Antar SKPD	Utang Jangka Pendek	Reklase Masuk	Reklase Dari Peralatan dan Mesin	Reklase Dari Gedung dan Bangunan	Reklase Dari KDP	Reklase Dari Barang dan Jasa	Total Mutasi Tambah
1	2	(Rp) 3	(Rp) 4	(Rp) 5	(Rp) 6	(Rp) 7	(Rp) 9	(Rp) 10	(Rp) 11	(Rp) 13	(Rp) 15	(Rp) 17
13	Bidang Kebudayaan	-					-					-
		-					-					-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-					-					-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00					-					-
		-					-					-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri						-					-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	177.447.000,00					-					-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	8.550.000,00					-					-
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.987.834.400,00	11.291.103.500,00				#####			6.380.554.454,00		17.671.657.954,00
		-					-					-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa	-					-					-
		-					-					-
17	Bidang Perpustakaan	-					-					-
17.01	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	10.265.000,00					-					-
		-					-					-
18	Bidang Pertanian						-					-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.587.840,00					-					-
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	52.850.000,00					-					-
		-					-					-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-					-					-
		-					-					-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan	-					-					-
20.01	Dinas Perikanan	8.655.493.024,24					-					-
	TOTAL	2.566.695.708.812,05	103.545.442.710,00	4.811.148.000,00	8.959.094.400,00	#####	#####	24.880.000,00	11.011.200,00	8.955.535.997,00	470.143.763,00	126.948.858.094,00

Mutasi Kurang								Saldo Per 31 Desember 2024
Penghapusan	Pindah Keluar Antar OPD	Reklase Keluar	Reklase ke KDP	Reklase ke Aset Tak Berwujud	Reklase ke Barang dan Jasa	Reklase ke Utang Jangka Pendek	Nilai Mutasi Kurang	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
19	20	22	26	29	30	32	33	34
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	25.000.000,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	177.447.000,00
		-					-	8.550.000,00
	8.959.094.400,00	132.500.000,00	132.500.000,00				9.091.594.400,00	17.567.897.954,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	10.265.000,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	29.587.840,00
		-					-	52.850.000,00
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	-
		-					-	8.655.493.024,24
1.462.385.000,00	8.959.094.400,00	1.487.034.570,00	731.919.400,00	#####	647.077.720,00	#####	11.908.513.970,00	#####



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024**

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024			Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah			
			Belanja Modal	Hibah Dari Pihak Ketiga	Total Mutasi Tambah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6	11	25
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
01.01	Kantor DPRD	-			-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-			-	-
01.03	Sekretariat Daerah	109.298.300,00			-	109.298.300,00
01.04	Sekretariat DPRD	-			-	-
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-			-	-
01.06	Inspektorat Kabupaten	-			-	-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-			-	-
		-			-	-
01.09	Kecamatan	-			-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	-			-	-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	-			-	-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	-			-	-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	-			-	-
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	-			-	-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	-			-	-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	-			-	-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	-			-	-
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	-			-	-

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024			Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah			
			Belanja Modal	Hibah Dari Pihak Ketiga	Total Mutasi Tambah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6	11	25
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	-			-	-
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	-			-	-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	-			-	-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	-			-	-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	-			-	-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-			-	-
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	7.000.000,00			-	7.000.000,00
01.09.17	Kecamatan Enam Lingsung	-			-	-
	Sub Jumlah	116.298.300,00	-	-	-	116.298.300,00
02	Bidang Pendidikan					
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.954.662.940,79	5.655.829.800	227.170.877,00	5.883.000.677,00	92.837.663.617,79
					-	
03	Bidang Kesehatan	-			-	-
03.01	Dinas Kesehatan	13.869.505,00			-	13.869.505,00
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	50.454.300,00			-	50.454.300,00
		-			-	-
04	Bidang Pekerjaan Umum	-			-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.550.000,00			-	49.550.000,00
		-			-	-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan	-			-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	49.269.000,00			-	49.269.000,00
		-			-	

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024			Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah			
			Belanja Modal	Hibah Dari Pihak Ketiga	Total Mutasi Tambah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6	11	25
06	Bidang Perhubungan	-			-	-
06.01	Dinas Perhubungan	193.861.200,00			-	193.861.200,00
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			-	-
		-			-	-
07	Bidang Lingkungan Hidup	-			-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	678.469.998,00			-	678.469.998,00
		-			-	-
08	Bidang Kependudukan dan Capil	-			-	-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	-			-	-
		-			-	-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-			-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-			-	-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				-	
		-			-	-
10	Bidang Sosial	-			-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-			-	-
		-			-	-
11	Bidang Koperasi dan UKM	-			-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	747.811.761,56			-	747.811.761,56
		-			-	-
12	Bidang Penanaman Modal	-			-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	49.275.000,00			-	49.275.000,00
		-			-	

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	Mutasi Tahun 2024			Saldo Akhir Per 31 Desember 2024
			Mutasi Tambah			
			Belanja Modal	Hibah Dari Pihak Ketiga	Total Mutasi Tambah	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6	11	25
13	Bidang Kebudayaan	-			-	-
		-			-	-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-			-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	218.522.500,00			-	218.522.500,00
		-			-	-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri	-			-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-			-	-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	-			-	-
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			-	-
		-			-	-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa	-			-	-
		-			-	-
17	Bidang Perpustakaan	-			-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	805.686.839,00	49.492.000,00		49.492.000,00	855.178.839,00
		-			-	-
18	Bidang Pertanian	-			-	-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.222.000,00			-	20.222.000,00
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.150.000,00			-	11.150.000,00
		-			-	-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-			-	-
		-			-	-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan	-			-	-
20.01	Dinas Perikanan	114.237.583,00			-	114.237.583,00
	TOTAL	90.073.340.927,35	5.705.321.800,00	227.170.877,00	5.932.492.677,00	96.005.833.604,35



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ASET TETAP - TANAH
PER 31 DESEMBER 2024

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	MUTASI TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
		(Rp)	TOTAL MUTASI TAMBAH (Rp)	TOTAL MUTASI KURANG (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
01.01	Kantor DPRD	-	-	-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-	-	-	-
01.03	Sekretariat Daerah	14.644.966.241,00	2.270.580.000,00	57.200.000	16.858.346.241,00
01.04	Sekretariat DPRD	7.652.000,00	-	-	7.652.000,00
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	-
01.06	Inspektorat Kabupaten	8.360.000,00	-	-	8.360.000,00
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
		-	-	-	-
01.09	Kecamatan	-	-	-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	772.500.000,00	-	-	772.500.000,00
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	38.900.000,00	-	-	38.900.000,00
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	10.922.500,00	-	-	10.922.500,00
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	55.485.000,00	-	-	55.485.000,00
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	15.925.000,00	-	-	15.925.000,00
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	60.480.000,00	-	-	60.480.000,00
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	11.325.000,00	-	-	11.325.000,00
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	12.900.000,00	-	-	12.900.000,00
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	4.970.000,00	-	-	4.970.000,00
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	75.680.000,00	-	-	75.680.000,00
01.09.14	Kecamatan Patamuan	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	MUTASI TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
			TOTAL MUTASI TAMBAH	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Sub Jumlah	15.904.065.741	2.270.580.000	57.200.000,00	18.117.445.741
02	Bidang Pendidikan			-	
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.073.133.533,00	-	-	13.073.133.533,00
		-	-	-	-
03	Bidang Kesehatan	-	-	-	-
03.01	Dinas Kesehatan	2.438.188.100,00	-	52.200.000,00	2.385.988.100,00
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	1.222.160.000,00	-	-	1.222.160.000,00
		-	-	-	-
04	Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.003.591.225,00	-	-	141.003.591.225,00
		-	-	-	-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
		-	-	-	-
06	Bidang Perhubungan	-	-	-	-
06.01	Dinas Perhubungan	483.109.000,00		-	483.109.000,00
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	-		-	-
		-	-	-	-
07	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28.933.115.750,00	1.087.632.000,00	-	30.020.747.750,00
		-	-	-	-
08	Bidang Kependudukan dan Capil		-	-	
08.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.740.000,00	-	-	14.740.000,00

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	MUTASI TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
			TOTAL MUTASI TAMBAH	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
		-	-	-	-
10	Bidang Sosial	-	-	-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	335.370.000,00	-	-	335.370.000,00
		-	-	-	-
11	Bidang Koperasi dan UKM	-	-	-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	96.595.000,00	-	-	96.595.000,00
		-	-	-	-
12	Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	-	-	-	-
		-	-	-	-
13	Bidang Kebudayaan	-	-	-	-
		-	-	-	-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.762.858.400,00	50.000.000,00	-	1.812.858.400,00
		-	-	-	-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri	-	-	-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	52.200.000,00	-	52.200.000,00
		-	-	-	-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa	-	-	-	-
		-	-	-	-
17	Bidang Perpustakaan	-	-	-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	321.630.000,00	-	-	321.630.000,00
		-	-	-	-
18	Bidang Pertanian	-	-	-	-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.030.468.000,00	-	-	4.030.468.000,00
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	55.750.000,00	-	-	55.750.000,00
		-	-	-	-

No. Urut	Nama SKPD	Saldo Per 1 Januari 2024	MUTASI TAHUN 2024		SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	
			TOTAL MUTASI TAMBAH	TOTAL MUTASI KURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	-
		-	-	-	-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
20.01	Dinas Perikanan	3.113.542.000,00	-		3.113.542.000,00
			-		
	TOTAL	213.088.316.749,00	3.460.412.000,00	109.400.000,00	216.439.328.749,00



KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
per 31 Desember 2024

Provinsi
Kabupaten/Kota

: Sumatera Barat
: Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Awal Akumu				
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah		Koreksi Kurang
					Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD	
1	2	3	4	5			7
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
01.01	Kantor DPRD	-	-	-	-	-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-	-	-	-	-	-
01.03	Sekretariat Daerah	147.485.228.237,68	63.046.776.171,71	630.862.763,00	-	630.862.763,00	476.839.501,00
01.04	Sekretariat DPRD	13.973.627.097,23	10.401.534.887,78	-	-	-	777.720.249,55
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	13.981.950.988,00	8.621.065.155,00	139.769.453,00	-	139.769.453,00	830.971.871,00
01.06	Inspektorat Kabupaten	7.875.522.827,00	3.524.271.449,00	-	-	-	145.325.500,00
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.936.756.316,00	1.752.324.894,00	176.976.333,00	-	176.976.333,00	365.119.080,00
		-		-	-	-	-
01.09	Kecamatan	-		-	-	-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	1.322.224.549,00	881.071.189,00	-	-	-	-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	1.650.974.243,00	1.128.186.028,00	-	-	-	40.839.260,00
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1.610.054.564,00	1.066.663.854,00	-	-	-	-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	1.208.373.691,00	1.147.324.090,00	-	-	-	-
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	1.935.984.600,00	1.168.956.993,00	-	-	-	-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	2.454.361.558,00	1.317.576.977,00	-	-	-	-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	3.237.827.498,76	1.370.808.335,00	-	-	-	31.135.466,00
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	1.252.817.647,00	956.165.194,00	-	-	-	13.440.025,00
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	1.875.759.952,00	1.541.579.169,00	-	-	-	-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	1.265.156.129,00	1.222.819.768,00	-	-	-	13.189.600,00
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	1.196.691.527,00	901.164.197,00	-	-	-	-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	739.668.651,00	735.446.055,00	-	-	-	-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	2.773.134.930,48	1.322.510.949,00	-	-	-	30.897.917,00
01.09.14	Kecamatan Patamuhan	1.383.050.371,00	976.119.903,00	-	-	-	-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	922.544.256,00	842.945.850,00	-	-	-	28.857.750,00
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	1.407.077.288,00	1.103.965.257,00	-	-	-	134.839.000,00
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	1.272.042.223,00	1.028.655.523,00	-	-	-	-
	Sub Jumlah	212.760.829.144,15	106.057.931.888,49	947.608.549,00	-	947.608.549,00	2.889.175.219,55

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
per 31 Desember 2024

Iasi Penyusutan					Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Penjelasan Koreksi Kurang				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024			
Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar				
				8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,00	476.839.500,00	-	-	63.200.799.433,71	7.167.082.135,00	70.367.881.568,71	77.117.346.668,97
-	-	777.720.249,55	-	9.623.814.638,23	532.946.710,00	10.156.761.348,23	3.816.865.749,00
-	830.971.871,00	-	-	7.929.862.737,00	693.823.688,00	8.623.686.425,00	5.358.264.563,00
-	-	-	145.325.500,00	3.378.945.949,00	387.555.690,00	3.766.501.639,00	4.109.021.188,00
-	196.950.000,00	-	168.169.080,00	1.564.182.147,00	103.238.378,00	1.667.420.525,00	269.335.791,00
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	881.071.189,00	36.183.760,00	917.254.949,00	404.969.600,00
-	40.839.260,00	-	-	1.087.346.768,00	64.222.351,00	1.151.569.119,00	499.405.124,00
-	-	-	-	1.066.663.854,00	65.988.139,00	1.132.651.993,00	477.402.571,00
-	-	-	-	1.147.324.090,00	10.640.433,00	1.157.964.523,00	50.409.168,00
-	-	-	-	1.168.956.993,00	61.203.091,00	1.230.160.084,00	705.824.516,00
-	-	-	-	1.317.576.977,00	114.097.391,00	1.431.674.368,00	1.022.687.190,00
-	-	-	31.135.466,00	1.339.672.869,00	144.032.990,00	1.483.705.859,00	1.754.121.639,76
-	-	-	13.440.025,00	942.725.169,00	28.162.473,00	970.887.642,00	281.930.005,00
-	-	-	-	1.541.579.169,00	43.028.418,00	1.584.607.587,00	291.152.365,00
-	-	-	13.189.600,00	1.209.630.168,00	16.104.341,00	1.225.734.509,00	39.421.620,00
-	-	-	-	901.164.197,00	35.432.682,00	936.596.879,00	260.094.648,00
-	-	-	-	735.446.055,00	4.121.763,00	739.567.818,00	100.833,00
-	-	-	30.897.917,00	1.291.613.032,00	128.139.697,00	1.419.752.729,00	1.353.382.201,48
-	-	-	-	976.119.903,00	56.902.700,00	1.033.022.603,00	350.027.768,00
-	-	-	28.857.750,00	814.088.100,00	30.736.744,00	844.824.844,00	77.719.412,00
-	124.884.000,00	-	9.955.000,00	969.126.257,00	39.212.208,00	1.008.338.465,00	398.738.823,00
-	-	-	-	1.028.655.523,00	200.727.575,00	1.229.383.098,00	42.659.125,00
1,00	1.670.484.631,00	777.720.249,55	440.970.338,00	104.116.365.217,94	9.963.583.357,00	114.079.948.574,94	98.680.880.569,21

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Awal Akumu				
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah		Koreksi Kurang
1	2	3	4	5	Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD	7
02	Bidang Pendidikan						
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	736.495.654.511,00	455.411.250.015,29	82.535.753,00	82.535.753,00	-	70.614.765,00
				-	-	-	-
03	Bidang Kesehatan			-	-	-	-
03.01	Dinas Kesehatan	201.368.027.818,30	108.178.036.300,64	58.576.566,00	58.576.566,00	-	1.196.836.929,45
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	190.921.205.658,14	102.950.411.923,75	36.052.838,00	36.052.838,00	-	-
				-	-	-	-
04	Bidang Pekerjaan Umum			-	-	-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.673.445.696.757,51	2.508.147.149.050,91	2.543.664.907,00	2.326.197.543,00	217.467.364,00	1.738.229.564,00
				-	-	-	-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan			-	-	-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.559.210.958,06	4.551.455.487,00	-	-	-	176.976.333,00
				-	-	-	-
06	Bidang Perhubungan			-	-	-	-
06.01	Dinas Perhubungan	27.081.014.895,80	21.507.741.321,00	-	-	-	141.000.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.040.004.460,60	2.817.204.719,60	-	-	-	-
				-	-	-	-
07	Bidang Lingkungan Hidup			-	-	-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	33.584.078.197,00	7.465.962.148,00	196.950.000,00	-	196.950.000,00	241.917.887,00
				-	-	-	-
08	Bidang Kependudukan dan Capil			-	-	-	-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	4.036.112.458,00	3.330.966.654,00	284.667,00	-	284.667,00	-
				-	-	-	-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-	-	-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.105.060.615,00	835.301.283,00	396.785.333,00	-	396.785.333,00	412.641.000,00
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.180.285.560,82	9.733.789.242,00	240.350.000,00	-	240.350.000,00	222.707.500,00
				-	-	-	-
10	Bidang Sosial			-	-	-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.385.034.953,00	2.369.462.126,00	471.676.038,00	-	471.676.038,00	285.343.500,00
				-	-	-	-
11	Bidang Koperasi dan UKM			-	-	-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	5.802.458.856,23	4.518.575.758,23	-	-	-	4.000.000,00
				-	-	-	-

Iasi Penyusutan					Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Penjelasan Koreksi Kurang				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024			
Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar				
				8	9	10	11
70.614.765,00	-	-	-	455.423.171.003,29	39.814.254.367,99	495.237.425.371,28	241.258.229.139,72
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	227.098.814,00	185.600.000,00	784.138.115,45	107.039.775.937,19	13.978.946.946,00	121.018.722.883,19	80.349.304.935,11
-	-	-	-	102.986.464.761,75	14.485.514.463,00	117.471.979.224,75	73.449.226.433,39
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
217.467.364,00	-	1.520.762.200,00	-	2.508.952.584.393,91	25.049.736.982,00	2.534.002.321.375,91	139.443.375.381,60
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	176.976.333,00	-	-	4.374.479.154,00	711.727.258,00	5.086.206.412,00	7.473.004.546,06
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	141.000.000,00	-	21.366.741.321,00	1.208.052.981,00	22.574.794.302,00	4.506.220.593,80
-	-	-	-	2.817.204.719,60	389.266.804,00	3.206.471.523,60	833.532.937,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	241.917.887,00	7.420.994.261,00	2.122.650.674,00	9.543.644.935,00	24.040.433.262,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.331.251.321,00	226.349.057,00	3.557.600.378,00	478.512.080,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	412.641.000,00	-	-	819.445.616,00	73.893.523,00	893.339.139,00	211.721.476,00
-	-	222.707.500,00	-	9.751.431.742,00	545.447.383,00	10.296.879.125,00	3.883.406.435,82
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	285.343.500,00	-	-	2.555.794.664,00	196.462.473,00	2.752.257.137,00	632.777.816,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.000.000,00	-	4.514.575.758,23	291.009.640,00	4.805.585.398,23	996.873.458,00
-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Awal Akumu				
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah		Koreksi Kurang
1	2	3	4	5	Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD	7
12	Bidang Penanaman Modal			-	-	-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	48.287.850.111,44	11.778.474.866,00	-	-	-	168.118.798,00
				-	-	-	-
13	Bidang Kebudayaan			-	-	-	-
				-	-	-	-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			-	-	-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	29.003.052.943,20	6.859.628.880,00	8.163.167,00	8.163.167,00	-	542.973,00
				-	-	-	-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri			-	-	-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	561.807.359,00	559.907.358,00	-	-	-	8.000.000,00
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	12.534.962.242,00	8.395.078.114,00	155.839.260,00	-	155.839.260,00	40.000.000,00
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.870.240.239,00	10.167.384.141,00	248.191.513,00	21.092.699,00	227.098.814,00	510.307.606,00
				-	-	-	-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa			-	-	-	-
				-	-	-	-
17	Bidang Perpustakaan			-	-	-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.366.423.133,00	3.517.712.993,00	-	-	-	-
				-	-	-	-
18	Bidang Pertanian			-	-	-	-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.178.356.967,36	12.757.426.408,36	199.000.000,00	-	199.000.000,00	62.505.410,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.807.325.673,66	4.563.923.971,66	17.867.374,00	17.867.374,00	-	-
				-	-	-	-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			-	-	-	-
				-	-	-	-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan			-	-	-	-
20.01	Dinas Perikanan	19.753.766.698,17	15.644.028.506,18	-	-	-	-
	TOTAL	4.291.128.460.210,44	3.412.118.803.156,11	5.603.545.965,00	2.550.485.940,00	3.053.060.025,00	8.168.917.485,00

Iasi Penyusutan					Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Penjelasan Koreksi Kurang				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024			
Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar				
				8	9	10	11
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	168.118.798,00	11.610.356.068,00	3.191.602.952,00	14.801.959.020,00	33.485.891.091,44
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	542.973,00	-	-	6.867.249.074,00	568.450.406,00	7.435.699.480,00	21.567.353.463,20
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	8.000.000,00	551.907.358,00	7.400.001,00	559.307.359,00	2.500.000,00
-	-	40.000.000,00	-	8.510.917.374,00	649.434.319,00	9.160.351.693,00	3.374.610.549,00
-	217.467.364,00	227.098.814,00	65.741.428,00	9.905.268.048,00	1.278.366.051,00	11.183.634.099,00	17.686.606.140,00
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	3.517.712.993,00	347.377.877,00	3.865.090.870,00	1.501.332.263,00
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	62.505.410,00	-	-	12.893.920.998,36	867.117.785,00	13.761.038.783,36	6.417.318.184,00
-	-	-	-	4.581.791.345,66	196.119.234,00	4.777.910.579,66	1.029.415.094,00
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	15.644.028.506,18	447.454.016,00	16.091.482.522,18	3.662.284.175,99
288.082.130,00	3.053.060.025,00	3.118.888.763,55	1.708.886.566,45	3.409.553.431.636,11	116.610.218.549,99	3.526.163.650.186,10	764.964.810.024,34



KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET PERALATAN DAN MESIN
per 31 Desember 2024

Provinsi
Kabupaten/Kota

: Sumatera Barat
: Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Awal Akumulasi I				
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah		Koreksi Kurang
1	2	3	4	5	Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD	6
01	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
01.01	Kantor DPRD		-	-			-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil		-	-			-
01.03	Sekretariat Daerah	28.164.440.301,71	21.563.018.601,71	630.862.763,00		630.862.763,00	476.839.501,00
01.04	Sekretariat DPRD	8.239.282.740,23	7.134.207.238,78	-			777.720.249,55
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	5.399.717.145,00	4.896.312.084,00	139.769.453,00		139.769.453,00	830.971.871,00
01.06	Inspektorat Kabupaten	1.439.302.647,00	1.313.127.850,00	-			145.325.500,00
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.895.741.316,00	1.711.309.894,00	176.976.333,00		176.976.333,00	365.119.080,00
01.09	Kecamatan		0	-			-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	504.108.243,00	418.329.304,00	-			-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	585.954.440,00	536.041.976,00	-			-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	503.068.578,00	476.622.534,00	-			-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	464.164.191,00	452.162.890,00	-			-
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	600.992.958,00	552.653.748,00	-			-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	486.985.558,00	438.018.514,00	-			-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Saria	508.401.431,00	519.925.535,00	-			31.135.466,00
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	454.781.167,00	419.191.416,00	-			13.440.025,00
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	502.206.952,00	465.037.169,00	-			-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	560.171.229,00	527.316.922,00	-			13.189.600,00
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	552.080.027,00	507.233.050,00	-			-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	432.826.651,00	428.604.055,00	-			-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	506.356.251,00	515.217.875,00	-			30.897.917,00
01.09.14	Kecamatan Patamuan	588.711.008,00	546.514.779,00	-			-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	375.352.256,00	387.898.912,00	-			28.857.750,00
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	529.237.107,00	629.328.939,00	-			134.839.000,00
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	602.754.593,00	570.663.008,00	-			-
	Sub Jumlah	53.896.636.789,94	45.008.736.294,49	947.608.549,00	-	947.608.549,00	2.848.335.959,55

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET PERALATAN DAN MESIN
per 31 Desember 2024

Penyusutan				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024	Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar				
				7	8	9	10
				-			-
				-			-
1,00	476.839.500,00			21.717.041.863,71	1.122.963.351,00	22.840.005.214,71	5.324.435.087,00
		777.720.249,55		6.356.486.989,23	358.423.466,00	6.714.910.455,23	1.524.372.285,00
	830.971.871,00			4.205.109.666,00	271.434.056,00	4.476.543.722,00	923.173.423,00
			145.325.500,00	1.167.802.350,00	81.719.755,00	1.249.522.105,00	189.780.542,00
	196.950.000,00		168.169.080,00	1.523.167.147,00	103.238.378,00	1.626.405.525,00	269.335.791,00
				-			-
				-		-	-
				418.329.304,00	13.960.949,00	432.290.253,00	71.817.990,00
				536.041.976,00	17.029.404,00	553.071.380,00	32.883.060,00
				476.622.534,00	9.745.211,00	486.367.745,00	16.700.833,00
				452.162.890,00	3.042.633,00	455.205.523,00	8.958.668,00
				552.653.748,00	13.553.594,00	566.207.342,00	34.785.616,00
				438.018.514,00	15.591.544,00	453.610.058,00	33.375.500,00
			31.135.466,00	488.790.069,00	9.047.845,00	497.837.914,00	10.563.517,00
			13.440.025,00	405.751.391,00	10.045.643,00	415.797.034,00	38.984.133,00
				465.037.169,00	18.104.418,00	483.141.587,00	19.065.365,00
			13.189.600,00	514.127.322,00	13.683.391,00	527.810.713,00	32.360.516,00
				507.233.050,00	9.229.517,00	516.462.567,00	35.617.460,00
				428.604.055,00	4.121.763,00	432.725.818,00	100.833,00
			30.897.917,00	484.319.958,00	15.147.263,00	499.467.221,00	6.889.030,00
				546.514.779,00	16.903.165,00	563.417.944,00	25.293.064,00
			28.857.750,00	359.041.162,00	3.727.144,00	362.768.306,00	12.583.950,00
	124.884.000,00		9.955.000,00	494.489.939,00	16.143.794,00	510.633.733,00	18.603.374,00
				570.663.008,00	11.832.883,00	582.495.891,00	20.258.702,00
1,00	1.629.645.371,00	777.720.249,55	440.970.338,00	43.108.008.883,94	2.138.689.167,00	45.246.698.050,94	8.649.938.739,00

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Awal Akumulasi I				
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah		Koreksi Kurang
1	2	3	4	5	Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD	6
02	Bidang Pendidikan						
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	138.334.587.843,81	103.878.438.863,73	81.153.870,00	81.153.870,00		-
				-			-
03	Bidang Kesehatan			-			-
03.01	Dinas Kesehatan	96.850.481.570,19	64.514.950.491,64	-			969.738.115,45
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	99.472.857.626,75	72.760.884.474,75	247.530,00	247.530,00		-
				-			-
04	Bidang Pekerjaan Umum			-			-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.178.850.621,10	15.268.478.781,10	-			58.377.200,00
				-			-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan			-			-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.354.072.243,00	1.465.788.314,00	-			176.976.333,00
				-			-
06	Bidang Perhubungan			-			-
06.01	Dinas Perhubungan	10.392.393.126,00	8.721.018.794,00	-			141.000.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.040.004.460,60	2.817.204.719,60	-			-
				-			-
07	Bidang Lingkungan Hidup			-			-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.592.709.519,00	5.150.512.412,00	196.950.000,00		196.950.000,00	241.917.887,00
				-			-
08	Bidang Kependudukan dan Capil			-			-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	3.429.707.225,00	2.737.562.903,00	284.667,00		284.667,00	-
				-			-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			-			-
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.040.060.615,00	770.301.283,00	396.785.333,00		396.785.333,00	412.641.000,00
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.974.194.984,00	7.423.919.984,00	240.350.000,00		240.350.000,00	222.707.500,00
				-			-
10	Bidang Sosial			-			-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.332.970.429,00	1.619.546.107,00	471.676.038,00		471.676.038,00	285.343.500,00
				-			-
11	Bidang Koperasi dan UKM			-			-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	4.514.987.756,23	3.900.499.884,23	-			4.000.000,00
				-			-
12	Bidang Penanaman Modal			-			-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	5.664.825.345,00	3.847.042.041,00	-			168.118.798,00
				-			-

Penyusutan				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024	Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar				
				7	8	9	10
				103.959.592.733,73	12.062.538.090,00	116.022.130.823,73	22.312.457.020,08
				-			-
		185.600.000,00	784.138.115,45	63.545.212.376,19	8.852.228.161,00	72.397.440.537,19	24.453.041.033,00
				72.761.132.004,75	8.626.994.602,00	81.388.126.606,75	18.084.731.020,00
				-			-
		58.377.200,00		15.210.101.581,10	751.618.103,00	15.961.719.684,10	1.217.130.937,00
				-			-
	176.976.333,00			1.288.811.981,00	201.470.322,00	1.490.282.303,00	863.789.940,00
				-			-
		141.000.000,00		8.580.018.794,00	644.099.152,00	9.224.117.946,00	1.168.275.180,00
				2.817.204.719,60	389.266.804,00	3.206.471.523,60	833.532.937,00
				-			-
			241.917.887,00	5.105.544.525,00	873.563.540,00	5.979.108.065,00	2.613.601.454,00
				-			-
				-			-
				2.737.847.570,00	225.342.491,00	2.963.190.061,00	466.517.164,00
				-			-
				-			-
	412.641.000,00			754.445.616,00	73.893.523,00	828.339.139,00	211.721.476,00
		222.707.500,00		7.441.562.484,00	296.708.998,00	7.738.271.482,00	1.235.923.502,00
				-			-
				-			-
	285.343.500,00			1.805.878.645,00	165.960.706,00	1.971.839.351,00	361.131.078,00
							-
				-			-
		4.000.000,00		3.896.499.884,23	247.746.860,00	4.144.246.744,23	370.741.012,00
				-			-
				-			-
			168.118.798,00	3.678.923.243,00	872.984.429,00	4.551.907.672,00	1.112.917.673,00
				-			-

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo Awal Akumulasi I				
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah		Koreksi Kurang
1	2	3	4	5	Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD	6
13	Bidang Kebudayaan			-			-
				-			-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			-			-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.088.923.339,00	1.479.713.938,00	8.163.167,00	8.163.167,00		542.973,00
				-			-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri			-			-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	384.360.359,00	382.460.358,00	-			8.000.000,00
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	11.771.335.625,00	8.014.227.280,00	115.000.000,00		115.000.000,00	40.000.000,00
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.606.655.035,00	6.946.645.805,00	18.296.500,00	18.296.500,00		65.741.428,00
				-			-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa			-			-
				-			-
17	Bidang Perpustakaan			-			-
17.01	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	3.780.613.893,00	1.931.903.753,00	-			-
				-			-
18	Bidang Pertanian			-			-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.854.570.332,36	5.926.522.062,36	199.000.000,00		199.000.000,00	62.505.410,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.681.143.663,66	2.192.437.136,66	17.867.374,00	17.867.374,00		-
				-			-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			-			-
				-			-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan			-			-
20.01	Dinas Perikanan	4.189.774.844,94	4.100.083.927,94	-			-
	TOTAL	497.426.717.246,58	370.858.879.608,50	2.693.383.028,00	125.728.441,00	2.567.654.587,00	5.705.946.104,00

Penyusutan				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024	Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan	Reklase Keluar				
				7	8	9	10
				-			-
				-			-
				-			-
	542.973,00			1.487.334.132,00	189.951.733,00	1.677.285.865,00	1.411.637.474,00
				-			-
				-			-
			8.000.000,00	374.460.358,00	7.400.001,00	381.860.359,00	2.500.000,00
		40.000.000,00		8.089.227.280,00	621.642.011,00	8.710.869.291,00	3.060.466.334,00
			65.741.428,00	6.899.200.877,00	216.623.790,00	7.115.824.667,00	490.830.368,00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				1.931.903.753,00	347.377.877,00	2.279.281.630,00	1.501.332.263,00
				-			-
				-			-
	62.505.410,00			6.063.016.652,36	317.641.057,00	6.380.657.709,36	473.912.623,00
				2.210.304.510,66	118.759.078,00	2.329.063.588,66	352.080.075,00
				-			-
				-			-
				-			-
				-			-
				4.100.083.927,94	29.519.365,00	4.129.603.292,94	60.171.552,00
1,00	2.567.654.587,00	1.429.404.949,55	1.708.886.566,45	367.846.316.532,50	38.272.019.860,00	406.118.336.392,50	91.308.380.854,08



KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET GEDUNG DAN BANGUNAN
per 31 Desember 2024

Provinsi
Kabupaten/Kota

: Sumatera Barat
: Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo A			
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah	
1	2	3	4	5	Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
01.01	Kantor DPRD		-	-		
01.02	Kepala Daerah dan Wakil		-	-		
01.03	Sekretariat Daerah	118.455.039.885,97	40.679.621.653,00	-		
01.04	Sekretariat DPRD	5.595.516.907,00	3.128.500.199,00	-		
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	8.447.792.643,00	3.590.311.871,00	-		
01.06	Inspektorat Kabupaten	6.355.963.180,00	2.149.085.149,00	-		
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-		
			-	-		
01.09	Kecamatan		-	-		
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	777.241.996,00	421.867.575,00	-		
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	1.058.031.803,00	585.156.052,00	-		
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	1.100.052.986,00	583.108.320,00	-		
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	737.238.000,00	688.189.700,00	-		
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	1.328.003.642,00	609.315.245,00	-		
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	1.960.376.000,00	872.558.463,00	-		
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	2.722.535.567,76	843.992.300,00	-		
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	784.305.980,00	523.243.278,00	-		
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	1.366.565.000,00	1.069.554.000,00	-		
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	697.992.900,00	688.510.846,00	-		
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	634.140.000,00	383.459.647,00	-		
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	297.000.000,00	297.000.000,00	-		
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	2.259.848.679,48	800.363.074,00	-		
01.09.14	Kecamatan Patamu	787.339.363,00	422.605.124,00	-		
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	540.192.000,00	448.046.938,00	-		
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	870.852.181,00	467.648.318,00	-		
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	662.397.130,00	451.102.015,00	-		
	Sub Jumlah	157.438.425.844,21	59.703.239.767,00	-	-	-

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET GEDUNG DAN BANGUNAN
per 31 Desember 2024

Detail Akumulasi Penyusutan				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Koreksi Kurang	Penjelasan Koreksi Kurang						
	Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan				
6				7	8	9	10
-				-		-	-
-				-		-	-
-				40.679.621.653,00	6.030.916.184,00	46.710.537.837,00	71.744.502.048,97
-				3.128.500.199,00	174.523.244,00	3.303.023.443,00	2.292.493.464,00
-				3.590.311.871,00	422.389.632,00	4.012.701.503,00	4.435.091.140,00
-				2.149.085.149,00	302.134.535,00	2.451.219.684,00	3.904.743.496,00
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				421.867.575,00	22.222.811,00	444.090.386,00	333.151.610,00
40.839.260,00		40.839.260,00		544.316.792,00	47.192.947,00	591.509.739,00	466.522.064,00
-				583.108.320,00	56.242.928,00	639.351.248,00	460.701.738,00
-				688.189.700,00	7.597.800,00	695.787.500,00	41.450.500,00
-				609.315.245,00	47.649.497,00	656.964.742,00	671.038.900,00
-				872.558.463,00	98.505.847,00	971.064.310,00	989.311.690,00
-				843.992.300,00	134.985.145,00	978.977.445,00	1.743.558.122,76
-				523.243.278,00	18.116.830,00	541.360.108,00	242.945.872,00
-				1.069.554.000,00	24.924.000,00	1.094.478.000,00	272.087.000,00
-				688.510.846,00	2.420.950,00	690.931.796,00	7.061.104,00
-				383.459.647,00	26.203.165,00	409.662.812,00	224.477.188,00
-				297.000.000,00	-	297.000.000,00	-
-				800.363.074,00	112.992.434,00	913.355.508,00	1.346.493.171,48
-				422.605.124,00	39.999.535,00	462.604.659,00	324.734.704,00
-				448.046.938,00	27.009.600,00	475.056.538,00	65.135.462,00
-				467.648.318,00	23.068.414,00	490.716.732,00	380.135.449,00
-				451.102.015,00	188.894.692,00	639.996.707,00	22.400.423,00
40.839.260,00	-	40.839.260,00	-	59.662.400.507,00	7.807.990.190,00	67.470.390.697,00	89.968.035.147,21

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo A			
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah	
1	2	3	4	5	Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD
02	Bidang Pendidikan					
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	597.136.550.007,19	350.759.324.764,56	-		
			-	-		
03	Bidang Kesehatan					
03.01	Dinas Kesehatan	103.900.385.459,11	43.186.331.036,00	58.576.566,00	58.576.566,00	
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	87.903.985.405,39	27.836.048.953,00	-		
			-	-		
04	Bidang Pekerjaan Umum					
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.339.753.137,60	6.164.264.276,00	-		
			-	-		
05	Bidang Perencanaan Pembangunan					
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.205.138.715,06	3.085.667.173,00	-		
			-	-		
06	Bidang Perhubungan					
06.01	Dinas Perhubungan	9.235.123.443,80	6.032.936.659,00	-		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		-	-		
			-	-		
07	Bidang Lingkungan Hidup					
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.857.422.678,00	2.204.813.736,00	-		
			-	-		
08	Bidang Kependudukan dan Capil					
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	488.343.425,00	475.341.943,00	-		
			-	-		
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	-		
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.181.090.576,82	2.284.869.258,00	-		
			-	-		
10	Bidang Sosial					
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	912.089.524,00	615.532.686,00	-		
			-	-		
11	Bidang Koperasi dan UKM					
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	1.232.364.200,00	587.932.874,00	-		
			-	-		
12	Bidang Penanaman Modal					
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	40.878.550.266,44	7.544.654.897,00	-		
			-	-		

Detail Akumulasi Penyusutan				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Koreksi Kurang	Penjelasan Koreksi Kurang						
	Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan				
6				7	8	9	10
70.614.765,00	70.614.765,00			350.688.709.999,56	27.713.286.800,99	378.401.996.800,55	218.734.553.206,64
-				-		-	-
-				-		-	-
227.098.814,00		227.098.814,00		43.017.808.788,00	5.097.454.033,00	48.115.262.821,00	55.785.122.638,11
-				27.836.048.953,00	4.908.879.957,00	32.744.928.910,00	55.159.056.495,39
-				-		-	-
-				-		-	-
-				6.164.264.276,00	810.953.782,00	6.975.218.058,00	10.364.535.079,60
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				3.085.667.173,00	510.256.936,00	3.595.924.109,00	6.609.214.606,06
-				-		-	-
-				-		-	-
-				6.032.936.659,00	291.860.422,00	6.324.797.081,00	2.910.326.362,80
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				2.204.813.736,00	1.242.871.134,00	3.447.684.870,00	21.409.737.808,00
-				-		-	-
-				-		-	-
-				475.341.943,00	1.006.566,00	476.348.509,00	11.994.916,00
-				-		-	-
-				-		-	-
-				65.000.000,00	-	65.000.000,00	-
-				2.284.869.258,00	248.738.385,00	2.533.607.643,00	2.647.482.933,82
-				-		-	-
-				-		-	-
-				615.532.686,00	28.540.100,00	644.072.786,00	268.016.738,00
-				-		-	-
-				-		-	-
-				587.932.874,00	42.430.650,00	630.363.524,00	602.000.676,00
-				-		-	-
-				-		-	-
-				7.544.654.897,00	1.969.723.607,00	9.514.378.504,00	31.364.171.762,44
-				-		-	-

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Saldo A			
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Penjelasan Koreksi Tambah	
1	2	3	4	5	Koreksi Kurang Catat	Pindah Masuk Antar OPD
13	Bidang Kebudayaan		-	-		
			-	-		
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		-	-		
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.889.129.604,20	5.354.914.942,00	-		
			-	-		
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri		-	-		
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-		
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	755.076.617,00	372.300.834,00	40.839.260,00		40.839.260,00
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.695.687.250,00	2.974.530.972,00	229.895.013,00	2.796.199,00	227.098.814,00
			-	-		
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa		-	-		
			-	-		
17	Bidang Perpustakaan		-	-		
17.01	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	1.575.544.240,00	1.575.544.240,00	-		
			-	-		
18	Bidang Pertanian		-	-		
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.294.198.795,00	6.801.316.506,00	-		
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.073.332.010,00	2.318.636.835,00	-		
			-	-		
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		-	-		
			-	-		
20	Bidang Kelautan dan Perikanan		-	-		
20.01	Dinas Perikanan	6.908.498.828,99	3.128.521.722,00	-		
	TOTAL	1.111.965.690.027,81	533.071.724.073,56	329.310.839,00	61.372.765,00	267.938.074,00

Detail Akumulasi Penyusutan				Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Koreksi Kurang	Penjelasan Koreksi Kurang						
	Koreksi Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan				
6				7	8	9	10
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				5.354.914.942,00	378.498.673,00	5.733.413.615,00	20.155.715.989,20
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				413.140.094,00	27.792.308,00	440.932.402,00	314.144.215,00
227.098.814,00			227.098.814,00	2.977.327.171,00	184.784.363,00	3.162.111.534,00	533.575.716,00
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				1.575.544.240,00	-	1.575.544.240,00	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				6.801.316.506,00	549.476.728,00	7.350.793.234,00	5.943.405.561,00
-				2.318.636.835,00	77.360.156,00	2.395.996.991,00	677.335.019,00
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				3.128.521.722,00	353.403.308,00	3.481.925.030,00	3.426.573.798,99
565.651.653,00	70.614.765,00	267.938.074,00	227.098.814,00	532.835.383.259,56	52.245.308.098,99	585.080.691.358,55	526.884.998.669,26



KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
per 31 Desember 2024

Provinsi
Kabupaten/Kota

: Sumatera Barat
: Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Koreksi Tambah	Akumulasi Penyusutan		
					Penjelasan Koreksi Tambah		Koreksi Kurang
					Koreksi Kurang	Catat	Pindah Masuk Antar OPD
1	2	3	4	5			6
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
01.01	Kantor DPRD		-	-			-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil		-	-			-
01.03	Sekretariat Daerah	865.748.050,00	804.135.917,00	-			-
01.04	Sekretariat DPRD	138.827.450,00	138.827.450,00	-			-
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	134.441.200,00	134.441.200,00	-			-
01.06	Inspektorat Kabupaten	80.257.000,00	62.058.450,00	-			-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.015.000,00	41.015.000,00	-			-
			-	-			-
01.09	Kecamatan		0	-			-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	40.874.310,00	40.874.310,00	-			-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	6.988.000,00	6.988.000,00	-			-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	6.933.000,00	6.933.000,00	-			-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	6.971.500,00	6.971.500,00	-			-
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	6.988.000,00	6.988.000,00	-			-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	7.000.000,00	7.000.000,00	-			-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	6.890.500,00	6.890.500,00	-			-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	13.730.500,00	13.730.500,00	-			-
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	6.988.000,00	6.988.000,00	-			-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	6.992.000,00	6.992.000,00	-			-
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	10.471.500,00	10.471.500,00	-			-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	9.842.000,00	9.842.000,00	-			-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	6.930.000,00	6.930.000,00	-			-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	7.000.000,00	7.000.000,00	-			-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	7.000.000,00	7.000.000,00	-			-
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	6.988.000,00	6.988.000,00	-			-
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	6.890.500,00	6.890.500,00	-			-
	Sub Jumlah	1.425.766.510,00	1.345.955.827,00	-	-	-	-

02	Bidang Pendidikan						
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.024.516.660,00	773.486.387,00	1.381.883,00	1.381.883,00		-
			0	-			-
03	Bidang Kesehatan		0	-			-
03.01	Dinas Kesehatan	617.160.789,00	476.754.773,00	-			-
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	3.544.362.626,00	2.353.478.496,00	35.805.308,00	35.805.308,00		-
			-	-			-
04	Bidang Pekerjaan Umum		-	-			-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.638.927.092.998,81	2.486.714.405.993,81	2.543.664.907,00	2.326.197.543,00	217.467.364,00	1.679.852.364,00
			0				-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan		0	-			-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-			-
			-				-
06	Bidang Perhubungan		-				-
06.01	Dinas Perhubungan	7.453.498.326,00	6.753.785.868,00	-			-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-			-
			-				-
07	Bidang Lingkungan Hidup		-				-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	133.946.000,00	110.636.000,00	-			-
			-				-
08	Bidang Kependudukan dan Capil		-				-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	118.061.808,00	118.061.808,00	-			-
			-	-			-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-	-			-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		-	-			-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	25.000.000,00	-			-
			-	-			-
10	Bidang Sosial		-	-			-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	139.975.000,00	134.383.333,00	-			-
			-	-			-
11	Bidang Koperasi dan UKM		-	-			-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	55.106.900,00	30.143.000,00	-			-
			-	-			-
12	Bidang Penanaman Modal		-	-			-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	1.744.474.500,00	386.777.928,00	-			-

			-	-			-
13	Bidang Kebudayaan		-	-			-
			-	-			-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		-	-			-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	25.000.000,00	25.000.000,00	-			-
			-	-			-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri		-	-			-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	177.447.000,00	177.447.000,00	-			-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	8.550.000,00	8.550.000,00	-			-
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.567.897.954,00	246.207.364,00	-			217.467.364,00
			-	-			-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa		-	-			-
			-	-			-
17	Bidang Perpustakaan		-	-			-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.265.000,00	10.265.000,00	-			-
			-	-			-
18	Bidang Pertanian		-	-			-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.587.840,00	29.587.840,00	-			-
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	52.850.000,00	52.850.000,00	-			-
			-	-			-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		-	-			-
			-	-			-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan		-	-			-
20.01	Dinas Perikanan	8.655.493.024,24	8.415.422.856,24	-			-
	TOTAL	2.681.736.052.936,05	2.508.188.199.474,05	2.580.852.098,00	2.363.384.734,00	217.467.364,00	1.897.319.728,00

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
per 31 Desember 2024

Penjelasan Koreksi Kurang			Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	Nilai Buku
Korek Lebih Catat	Pindah Keluar Antar OPD	Penghapusan				
			7	8	9	10
			-		-	-
			-		-	-
			804.135.917,00	13.202.600,00	817.338.517,00	48.409.533,00
			138.827.450,00	-	138.827.450,00	-
			134.441.200,00	0,00	134.441.200,00	-
			62.058.450,00	3.701.400,00	65.759.850,00	14.497.150,00
			41.015.000,00	-	41.015.000,00	-
			-		-	-
			-		-	-
			40.874.310,00	-	40.874.310,00	-
			6.988.000,00	-	6.988.000,00	-
			6.933.000,00	-	6.933.000,00	-
			6.971.500,00	-	6.971.500,00	-
			6.988.000,00	-	6.988.000,00	-
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
			6.890.500,00	-	6.890.500,00	-
			13.730.500,00	-	13.730.500,00	-
			6.988.000,00	-	6.988.000,00	-
			6.992.000,00	-	6.992.000,00	-
			10.471.500,00	-	10.471.500,00	-
			9.842.000,00	-	9.842.000,00	-
			6.930.000,00	-	6.930.000,00	-
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
			7.000.000,00	-	7.000.000,00	-
			6.988.000,00	-	6.988.000,00	-
			6.890.500,00	-	6.890.500,00	-
-	-	-	1.345.955.827,00	16.904.000,00	1.362.859.827,00	62.906.683,00

			774.868.270,00	38.429.477,00	813.297.747,00	211.218.913,00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			476.754.773,00	29.264.752,00	506.019.525,00	111.141.264,00
			2.389.283.804,00	949.639.904,00	3.338.923.708,00	205.438.918,00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
217.467.364,00		1.462.385.000,00	2.487.578.218.536,81	23.487.165.097,00	2.511.065.383.633,81	127.861.709.365,00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			6.753.785.868,00	272.093.407,00	7.025.879.275,00	427.619.051,00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			110.636.000,00	6.216.000,00	116.852.000,00	17.094.000,00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			118.061.808,00	-	118.061.808,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			134.383.333,00	1.961.667,00	136.345.000,00	3.630.000,00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			30.143.000,00	832.130,00	30.975.130,00	24.131.770,00
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			386.777.928,00	348.894.916,00	735.672.844,00	1.008.801.656,00

			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
			-		-	-
			-		-	-
			177.447.000,00	-	177.447.000,00	-
			8.550.000,00	-	8.550.000,00	-
	217.467.364,00		28.740.000,00	876.957.898,00	905.697.898,00	16.662.200.056,00
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			10.265.000,00	-	10.265.000,00	-
			-		-	-
			-		-	-
			29.587.840,00	-	29.587.840,00	-
			52.850.000,00	-	52.850.000,00	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			8.415.422.856,24	64.531.343,00	8.479.954.199,24	175.538.825,00
217.467.364,00	217.467.364,00	1.462.385.000,00	2.508.871.731.844,05	26.092.890.591,00	2.534.964.622.435,05	146.771.430.501,00

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DAFTAR ASET TAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Software Sistem Informasi Pokok Pendidikan Berbasis WEB (Tahun 2012 Rp77.635.000,00)	2012	77.635.000,00
		Software Sistem Informasi Pokok Pendidikan Berbasis WEB (Tahun 2013 Rp19.800.000,00)	2013	19.800.000,00
		Software Media Pendidikan SDN	2016	323.972.000,00
		Software E Waspada	2017	18.700.000,00
		Software Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2017	24.750.000,00
		Software Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SDN dan SMPN (Tahun 2018 adalah Rp. 19.800.000, Tahun 2019 Rp. 22.959.000, Tahun 2022 Rp. 35.000.000, Tahun 2023 Rp.35.000.000)	2018	112.759.000,00
		Software Website Disdikbud Padang Pariaman	2019	15.000.000,00
		Jumlah Aset Tak Berwujud Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		592.616.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Software (Software Manajemen Pasien Puskesmas)	2012	522.500.000,00
		Software Padang Pariaman Sehat	2016	13.000.000,00
		Software Perencanaan dan Penganggaran E-Surenggarkes	2016	22.000.000,00
		Software E-Logistik Berbasis Barcode	2016	44.968.000,00
		Software Sistem Informasi Kepegawaian	2016	15.000.000,00
		Software Aplikasi Sistem Penunjang Kinerja Dinkes	2017	15.000.000,00
		Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Kesehatan		632.468.000,00
3.	RSUD	Software (SIRS)	2014	61.930.000,00
		Software SIRS Rawat Jalan	2015	42.460.000,00
		Software SIRS Administrasi	2016	35.750.000,00
		Software SIRS Laboratorium	2016	26.510.000,00
		Software SIRS Radiologi	2016	26.510.000,00
		Software SIRS Kasir	2016	27.610.000,00
		Software SIRS Keuangan	2016	35.750.000,00
		Software SIRS Kamar Operasi	2016	26.510.000,00
		Perencanaan Review Master Plan Rumah Sakit	2020	99.400.000,00
		Penyusunan UKL/ UPL	2020	49.500.000,00
		Jumlah Aset Tak Berwujud RSUD		431.930.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Software Database Jalan	2016	547.750.000,00
		Kajian Dokumen Rispam Induk	2019	621.546.000,00
		Kajian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Ibukota Kabupaten	2022	976.467.000,00
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan Lubuk Alung	2022	80.000.000,00
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan Tiram	2022	80.000.000,00
		Kajian Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Perkotaan Lubuk Alung	2022	79.850.000,00
		Kajian Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Perkotaan Tiram	2022	79.850.000,00
		Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten Padang Pariaman	2022	69.636.960,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah I)	2023	99.960.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah IV)	2023	99.950.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah III)	2023	99.958.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah V)	2023	99.955.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah II)	2023	99.949.000,00
		Master Plan Drainase Kab. Padang Pariaman (Wilayah VI)	2023	99.961.000,00
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bid Air	2023	69.875.000,00
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bid Air Limbah Paket II	2023	69.952.502,00
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bid Air Minum dan Air Limbah	2023	69.900.000,00
		Jasa Konsultan Pengawasan Perpipaan DDUB	2023	39.629.775,00
		Kajian Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Padang P	2024	49.700.000,00
		Jumlah Aset Tak Berwujud DPUPR		3.433.890.237,00

No	SKPD	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
6.	Badang Penanggulangan Bencana Daerah	Software Website Kebencanaan	2017	19.800.000,00
		Software Database RR	2019	54.574.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud BPBD				74.374.000,00
7.	Dinas Kependudukan dan Capil	Software (Anti Virus Simantek untuk Aplikasi Data SIAK/E-KTP)	2014	6.650.000,00
		Software (Aplikasi Akta Kelahiran Mobile)	2014	21.500.000,00
		Software Survey Kepuasan Pelanggan	2017	17.050.000,00
		Software Inventory Barang	2016	16.753.000,00
		Software Windows Server	2020	13.545.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Dukcapil				75.498.000,00
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software Website PPID	2017	29.535.000,00
		Software Website Lumbung Data	2013	93.144.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Kominfo				122.679.000,00
9.	Dinas Perikanan	Software (Website DKP)	2014	9.975.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Perikanan				9.975.000,00
10	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha	Software (Software Map Info Professional V.11.5)	2012	37.031.500,00
		Software Aplikasi Online Kasir	2021	6.550.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Disdagnakerkop dan UKM				43.581.500,00
11.	Sekretariat Daerah	Software Sistem Tata Naskah Surat Dinas (DAS)	2011	290.015.000,00
		Software (Aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa beban Kerja)	2012	84.315.000,00
		Software (Aplikasi Sub Block Website Bagian Humas)	2013	10.000.000,00
		Software (Remastering Website Padang Pariaman-Bagian PDE)	2013	14.941.000,00
		Software (Aplikasi Pusat Data Bagian PDE)	2013	12.978.600,00
		Software (Aplikasi Pengaduan Masy berbasis SMS Gateway)	2014	44.220.000,00
		Software Website Evaluasi dan Monitoring (Bagian Pembangunan Fisik dan Prasarana)	2017	14.976.500,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Sekretariat Daerah				471.446.100,00
12.	Kantor Camat Enam Lingkung	Softwara (Website dan Aplikasi Buku Tamu)	2017	14.300.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Kantor Camat Enam Lingkung				14.300.000,00
13.	Bapelitbangda	Software (Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	2017	49.940.000,00
		Software ArcGIS Desktop Basic	2017	36.296.127,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Bapelitbangda				86.236.127,00
14.	BPKD	Software (Aplikasi PBB) Update Aplikasi Tahun 2022 senilai Rp. 49.950.000,-	2013	306.600.000,00
		Software (SIG PBB)	2014	124.300.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud BPKD				430.900.000,00
15.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Software (Software Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG)). Tahun 2011 Rp49.500.000.00 dan Tahun 2015 Rp79.189.000.00	2011	128.689.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud BKPSDM				128.689.000,00
16	Dinas Perhubungan	Software Aplikasi BlueCard	2020	46.970.000,00
		Software Modul E-Pemeriksaan Uji	2020	44.000.000,00
		Software (Sistem Aplikasi Blue Card)	2020	27.500.000,00
		Software Aplikasi BLUe dan RFID	2022	27.750.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Perhubungan				146.220.000,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Software (Kaspersky Internet Security 3 PC 1 Tahun)	2020	5.870.000,00
		Software (Microsoft Home and Student 2019 MAC)	2020	2.010.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				7.880.000,00
Total Aset Tak Berwujud				6.702.682.964,00

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2024

NO	BADAN/DINAS/KANTOR	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023	Amortisasi Tahun 2024	Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2024	Nilai Buku
1	Sekretariat Daerah	471.446.100,00	471.446.100,00	-	471.446.100,00	-
2	Dinas Kesehatan	632.468.000,00	632.468.000,00	-	632.468.000,00	-
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	592.616.000,00	592.616.000,00	-	592.616.000,00	-
4	Disdagnakerkop dan UKM	43.581.500,00	40.961.500,00	1.310.000,00	42.271.500,00	1.310.000,00
5	BKPSDM	128.689.000,00	128.689.000,00		128.689.000,00	-
6	BPBD	74.374.000,00	74.374.000,00	-	74.374.000,00	-
7	BPKD	430.900.000,00	430.900.000,00		430.900.000,00	-
8	BAPELITBANGDA	86.236.127,00	86.236.127,00	-	86.236.127,00	-
9	RSUD	431.930.000,00	402.150.000,00	29.780.000,00	431.930.000,00	-
10	Dinas Dukcapil	75.498.000,00	72.789.000,00	2.709.000,00	75.498.000,00	-
11	DPUPR	3.433.890.237,00	1.761.126.439,40	577.228.047,40	2.338.354.486,80	1.095.535.750,20
12	Dinas Perikanan	9.975.000,00	9.975.000,00	-	9.975.000,00	-
13	Dinas Kominfo	122.679.000,00	122.679.000,00	-	122.679.000,00	-
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.880.000,00	6.304.000,00	1.576.000,00	7.880.000,00	-
15	Dinas Perhubungan	146.220.000,00	105.876.000,00	29.244.000,00	135.120.000,00	11.100.000,00
16	Kecamatan Enam lingkung	14.300.000,00	14.300.000,00	-	14.300.000,00	-
	JUMLAH	6.702.682.964,00	4.952.890.166,40	641.847.047,40	5.594.737.213,80	1.107.945.750,20



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**REKAP ASET LAIN-LAIN RUSAK BERAT
PER 31 DESEMBER 2024**

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - RUSAK BERAT				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
01.01	Kantor DPRD					-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil					-
01.03	Sekretariat Daerah	383.313.803,79	-	-	-	383.313.803,79
01.04	Sekretariat DPRD	106.631.750,00	-	-	-	106.631.750,00
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	85.397.950,00	-	-	-	85.397.950,00
01.06	Inspektorat Kabupaten	258.931.750,00	-	-	-	258.931.750,00
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	245.099.000,00	-	-	-	245.099.000,00
		-	-	-	-	-
01.09	Kecamatan	-	-	-	-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	-	-	-	-	-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	34.403.000,00	-	-	-	34.403.000,00
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	114.822.930,00	-	-	-	114.822.930,00
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	3.300.000,00	-	-	-	3.300.000,00
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	-	-	-	-	-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	42.257.800,00	75.000.000,00	-	-	117.257.800,00
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	23.940.025,00	-	-	-	23.940.025,00
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	17.450.000,00	-	-	-	17.450.000,00
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	34.688.600,00	-	-	-	34.688.600,00
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	12.000.000,00	-	-	-	12.000.000,00
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	28.853.000,00	-	-	-	28.853.000,00
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	31.521.250,00	-	-	-	31.521.250,00
01.09.14	Kecamatan Patamuian	62.731.000,00	-	-	-	62.731.000,00
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	96.457.750,00	-	-	-	96.457.750,00
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	12.691.500,00	-	-	-	12.691.500,00
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	30.868.000,00	-	-	-	30.868.000,00
	Sub Jumlah	1.637.359.108,79	75.000.000,00	-	-	1.712.359.108,79

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - RUSAK BERAT				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
02	Bidang Pendidikan					-
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.160.775.495,96	5.780.009.961,00	-	-	6.940.785.456,96
		-		-	-	-
03	Bidang Kesehatan	-		-	-	-
03.01	Dinas Kesehatan	1.311.713.335,45	2.739.414.245,00	-	-	4.051.127.580,45
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	584.444.920,00	-	-	-	584.444.920,00
		-		-	-	-
04	Bidang Pekerjaan Umum	-		-	-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.750.000,00	125.135.000,00	480.000.000,00	-	669.885.000,00
		-		-	-	-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan	-		-	-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	630.245.129,00	-	-	-	630.245.129,00
		-		-	-	-
06	Bidang Perhubungan	-		-	-	-
06.01	Dinas Perhubungan	153.909.867,00	-	-	-	153.909.867,00
06.02	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.806.250,00		-	-	39.806.250,00
		-		-	-	-
07	Bidang Lingkungan Hidup	-		-	-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.634.316,00	-	-	-	366.634.316,00
		-		-	-	-
08	Bidang Kependudukan dan Capil	-		-	-	-
08.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	268.027.675,00	-	-	-	268.027.675,00
		-		-	-	-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	-		-	-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71.466.617,75	-	-	-	71.466.617,75
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	539.584.466,00	-	-	-	539.584.466,00
		-		-	-	-
10	Bidang Sosial	-		-	-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.839.700,00	-	-	-	18.839.700,00
		-		-	-	-

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - RUSAK BERAT				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
11	Bidang Koperasi dan UKM	-		-	-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	519.006.600,00	-	-	-	519.006.600,00
		-		-	-	-
12	Bidang Penanaman Modal	-		-	-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	176.454.398,00	-	-	-	176.454.398,00
		-		-	-	-
13	Bidang Kebudayaan	-		-	-	-
		-		-	-	-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-		-	-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	280.957.500,00	-	-	135.141.000,00	416.098.500,00
		-		-	-	-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri	-		-	-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	501.791.663,34	-	-	-	501.791.663,34
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	25.242.500,00	-	-	-	25.242.500,00
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	136.777.428,00	-	-	-	136.777.428,00
		-		-	-	-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa	-		-	-	-
		-		-	-	-
17	Bidang Perpustakaan	-		-	-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
		-		-	-	-
18	Bidang Pertanian	-		-	-	-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120.790.000,00	-	-	-	120.790.000,00
18.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	97.772.000,00	-	-	-	97.772.000,00
		-		-	-	-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-		-	-	-
		-		-	-	-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan	-		-	-	-
20.01	Dinas Perikanan	136.357.715,00	-	-	-	136.357.715,00
		-		-	-	-
	TOTAL	8.842.706.685,29	8.719.559.206,00	480.000.000,00	135.141.000,00	18.177.406.891,29



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**REKAP ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN
PER 31 DESEMBER 2023**

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
01	Bidang Otonomi Daeah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
01.01	Kantor DPRD	-	-	-	-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil	-	-	-	-	-
01.03	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-
01.04	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	-	-	-	-	-
01.06	Inspektorat Kabupaten	-	-	-	-	-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
01.09	Kecamatan	-	-	-	-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung	-	-	-	-	-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	-	-	-	-	-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	-	-	-	-	-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	-	-	-	-	-
01.09.05	Kecamatan Sei.Limau	-	-	-	-	-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam	-	-	-	-	-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	-	-	-	-	-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	-	-	-	-	-
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	-	-	-	-	-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	-	-	-	-	-
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	-	-	-	-	-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	-	-	-	-	-

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	-	-	-	-	-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	-	-	-	-	-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	-	-	-	-	-
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	-	-	-	-	-
01.09.17	Kecamatan Enam Lingkung	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-
		-				
02	Bidang Pendidikan	-				-
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
03	Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
03.01	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
04	Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
06	Bidang Perhubungan	-	-	-	-	-
06.01	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
07	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
07.01	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
08	Bidang Kependudukan dan Capil	-	-	-	-	-
08.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	-	-	-	-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.629.000,00	-	-	-	25.629.000,00
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
10	Bidang Sosial	-	-	-	-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
11	Bidang Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
12	Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
13	Bidang Kebudayaan	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-	-	-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri	-	-	-	-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

No. Urut	Nama SKPD	ASET LAIN-LAIN - ASET PENELUSURAN				
		PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINYA	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
17	Bidang Perpustakaan	-	-	-	-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
18	Bidang Pertanian	-	-	-	-	-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
18.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-
20.01	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-
					-	
	TOTAL	25.629.000,00	-	-	-	25.629.000,00



KABUPATEN PADANG PARIAMAN
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
per 31 Desember 2024

Provinsi
Kabupaten/Kota

: Sumatera Barat
: Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Aset	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan								Nilai Buku
			Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Akumulasi Penyusutan Per 1 Januari 2024	Penyusutan Tahun Ini	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024	
				Reclass Dari Aset Tetap	Mutasi Tambah	Penghapusan	Mutasi Kurang				
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12
01	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
01.01	Kantor DPRD		-				-	-		-	-
01.02	Kepala Daerah dan Wakil		-				-	-		-	-
01.03	Sekretariat Daerah	383.313.803,79	383.313.803,79		-		-	383.313.803,79	-	383.313.803,79	-
01.04	Sekretariat DPRD	106.631.750,00	106.631.750,00		-		-	106.631.750,00	-	106.631.750,00	-
01.05	Badan Pengelola Keuangan Daerah	85.397.950,00	88.737.950,00		-	3.340.000,00	3.340.000,00	85.397.950,00	-	85.397.950,00	-
01.06	Inspektorat Kabupaten	258.931.750,00	113.606.250,00	145.325.500,00	145.325.500,00		-	258.931.750,00	-	258.931.750,00	-
01.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	245.099.000,00	76.066.000,00	168.169.080,00	168.169.080,00		-	244.235.080,00	863.920,00	245.099.000,00	-
			-		-		-	-		-	-
01.09	Kecamatan		-		-		-	-		-	-
01.09.01	Kecamatan Lubuk Alung		-		-		-	-		-	-
01.09.02	Kecamatan Sei.Geringging	34.403.000,00	34.403.000,00		-		-	34.403.000,00	-	34.403.000,00	-
01.09.03	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	114.822.930,00	114.822.930,00		-		-	114.822.930,00	-	114.822.930,00	-
01.09.04	Kecamatan Ulakan Tapakis	12.000.000,00	12.000.000,00		-		-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
01.09.05	Kecamatan Sungai Limau	3.300.000,00	5.600.000,00		-	2.300.000,00	2.300.000,00	3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
01.09.06	Kecamatan V Koto Kp.Dalam		-		-		-	-		-	-
01.09.07	Kecamatan VII Koto Sungai Sariak	117.257.800,00	83.749.000,00	31.135.466,00	31.135.466,00		-	114.884.466,00	2.373.334,00	117.257.800,00	-
01.09.08	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung	23.940.025,00	10.500.000,00	13.440.025,00	13.440.025,00		-	23.940.025,00	-	23.940.025,00	-
01.09.09	Kecamatan Nan Sabaris	17.450.000,00	17.450.000,00		-		-	17.450.000,00	-	17.450.000,00	-
01.09.10	Kecamatan Batang Anai	34.688.600,00	21.499.000,00	13.189.600,00	13.189.600,00		-	34.688.600,00	-	34.688.600,00	-
01.09.11	Kecamatan V Koto Timur	12.000.000,00	12.000.000,00		-		-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	-
01.09.12	Kecamatan Padang Sago	28.853.000,00	28.853.000,00		-		-	28.853.000,00	-	28.853.000,00	-
01.09.13	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	31.521.250,00	-	30.897.917,00	30.897.917,00		-	30.897.917,00	623.333,00	31.521.250,00	-
01.09.14	Kecamatan Patamuan	62.731.000,00	62.731.000,00		-		-	62.731.000,00	-	62.731.000,00	-
01.09.15	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	96.457.750,00	67.050.000,00	28.857.750,00	28.857.750,00		-	95.907.750,00	550.000,00	96.457.750,00	-
01.09.16	Kecamatan Batang Gasan	12.691.500,00	2.736.500,00	9.955.000,00	9.955.000,00		-	12.691.500,00	-	12.691.500,00	-

01.09.17	Kecamatan Enam Lingsung	30.868.000,00	30.868.000,00		-		-	30.868.000,00	-	30.868.000,00	-
	Sub Jumlah	1.712.359.108,79	1.272.618.183,79	440.970.338,00	440.970.338,00	5.640.000,00	5.640.000,00	1.707.948.521,79	4.410.587,00	1.712.359.108,79	-
02	Bidang Pendidikan										
02.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.940.785.456,96	6.940.785.456,96		-		-	6.940.785.456,96	-	6.940.785.456,96	-
			-				-	-		-	-
03	Bidang Kesehatan		-				-	-		-	-
03.01	Dinas Kesehatan	4.051.127.580,45	3.239.410.711,00	784.138.115,45	784.138.115,45		-	4.023.548.826,45	27.578.754,00	4.051.127.580,45	-
03.02	Rumah Sakit Umum Daerah	584.444.920,00	584.444.920,00		-		-	584.444.920,00	-	584.444.920,00	-
			-				-	-		-	-
04	Bidang Pekerjaan Umum		-				-	-		-	-
04.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	669.885.000,00	669.885.000,00		-		-	669.885.000,00	-	669.885.000,00	-
			-				-	-		-	-
05	Bidang Perencanaan Pembangunan		-				-	-		-	-
05.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	630.245.129,00	630.245.129,00		-		-	630.245.129,00	-	630.245.129,00	-
			-				-	-		-	-
06	Bidang Perhubungan		-				-	-		-	-
06.01	Dinas Perhubungan	153.909.867,00	153.909.867,00		-		-	153.909.867,00		153.909.867,00	-
	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.806.250,00	39.806.250,00		-		-	39.806.250,00	-	39.806.250,00	-
			-				-	-		-	-
07	Bidang Lingkungan Hidup		-				-	-		-	-
07.01	Kawasan Permukiman dan Pertanahan	366.634.316,00	106.110.000,00	241.917.887,00	241.917.887,00		-	348.027.887,00	18.606.429,00	366.634.316,00	-
			-				-	-		-	-
08	Bidang Kependudukan dan Capil		-				-	-		-	-
08.01	Dinas Kependudukan dan Capil	268.027.675,00	268.027.675,00		-		-	268.027.675,00	-	268.027.675,00	-
			-				-	-		-	-
09	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-				-	-		-	-
09.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	97.095.617,75	97.095.617,75		-		-	97.095.617,75	-	97.095.617,75	-
09.02	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	539.584.466,00	539.584.466,00		-		-	539.584.466,00	-	539.584.466,00	-
			-				-	-		-	-
10	Bidang Sosial		-				-	-		-	-
10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.839.700,00	18.839.700,00		-		-	18.839.700,00	-	18.839.700,00	-
			-				-	-		-	-
11	Bidang Koperasi dan UKM		-				-	-		-	-
11.01	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	519.006.600,00	519.006.600,00				-	519.006.600,00	-	519.006.600,00	-
			-				-	-		-	-

12	Bidang Penanaman Modal		-				-	-		-	-
12.01	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	176.454.398,00	6.225.000,00	168.118.798,00	168.118.798,00		-	174.343.798,00	2.110.600,00	176.454.398,00	-
			-				-	-		-	-
13	Bidang Kebudayaan		-				-	-		-	-
			-				-	-		-	-
14	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		-				-	-		-	-
14.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	280.957.500,00	280.957.500,00		-		-	280.957.500,00	-	280.957.500,00	-
			-				-	-		-	-
15	Bidang Kesbang Politik Dalam Negeri		-				-	-		-	-
15.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	501.791.663,34	493.791.663,34	8.000.000,00	8.000.000,00		-	501.791.663,34	-	501.791.663,34	-
15.02	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	25.242.500,00	25.242.500,00		-		-	25.242.500,00	-	25.242.500,00	-
15.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	136.777.428,00	70.816.000,00	65.741.428,00	65.741.428,00		-	136.557.428,00	220.000,00	136.777.428,00	-
			-				-	-		-	-
16	Bidang Pemberdayaan Masy. Desa		-				-	-		-	-
			-				-	-		-	-
17	Bidang Perpustakaan		-				-	-		-	-
17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		-		-		-	-		-	-
			-				-	-		-	-
18	Bidang Pertanian		-				-	-		-	-
18.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120.790.000,00	120.790.000,00		-		-	120.790.000,00	-	120.790.000,00	-
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	97.772.000,00	97.772.000,00		-		-	97.772.000,00	-	97.772.000,00	-
			-				-	-		-	-
19	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral		-				-	-		-	-
			-				-	-		-	-
20	Bidang Kelautan dan Perikanan		-				-			-	-
20.01	Dinas Perikanan	136.357.715,00	136.357.715,00		-		-	136.357.715,00		136.357.715,00	-
	TOTAL	18.067.894.891,29	16.311.721.954,84	1.708.886.566,45	1.708.886.566,45	5.640.000,00	5.640.000,00	18.014.968.521,29	52.926.370,00	18.067.894.891,29	-

Pengujian Terhadap Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi (LRA)

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
1	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	279.163.500.811,00	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	279.189.788.326,00	26.287.515,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
2	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	76.069.344.692,00	8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	76.069.344.692,00	0,00	
3	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.371.684.758,00	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	26.373.845.421,00	2.160.663,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
4	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.339.330.092,00	8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	7.339.330.092,00	0,00	
5	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.910.145.000,00	8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.916.305.000,00	6.160.000,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
6	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.389.474.520,00	8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	23.348.232.080,00	-41.242.440,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
7	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	511.459.280,00	8.1.01.01.04.0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	511.459.280,00	0,00	
8	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.243.440.000,00	8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.244.255.000,00	815.000,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
9	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.301.895.000,00	8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.340.904.082,00	39.009.082,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Tunjangan PPPK Pada Dinas Kesehatan
10	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.913.330.360,00	8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	13.913.692.460,00	362.100,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
11	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.607.650.080,00	8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	4.607.650.080,00	0,00	
12	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	582.082.265,00	8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	584.908.784,00	2.826.519,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
13	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.509.401,00	8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.508.180,00	-1.221,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
14	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.321.409,00	8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.321.409,00	0,00	
15	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.677.153.445,00	8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.676.772.675,00	-380.770,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
16	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.832.833.999,00	8.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.832.833.999,00	0,00	
17	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	572.873.268,00	8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	572.914.746,00	41.478,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
18	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	156.030.424,00	8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	156.030.424,00	0,00	
19	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.714.177.676,00	8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.714.302.010,00	124.334,00	2.1.06.01.01 Utang dan Pelunasan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
20	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	472.519.574,00	8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	472.519.574,00	0,00	
21	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	83.870.604.479,00	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	83.870.604.479,00	0,00	
22	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.517.492.689,00	8.1.01.02.01.0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.517.492.689,00	0,00	

23	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.382.200.602,00	8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.382.200.602,00	0,00	
24	5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.703.238.190,00	8.1.01.02.04.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.703.238.190,00	0,00	
25	5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.250.000,00	8.1.01.03.01.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.250.000,00	0,00	
26	5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	123.000.000,00	8.1.01.03.01.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	123.000.000,00	0,00	
27	5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.075.000,00	8.1.01.03.01.0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.075.000,00	0,00	
28	5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	30.750.000,00	8.1.01.03.01.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	30.750.000,00	0,00	
29	5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	902.000.000,00	8.1.01.03.01.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	902.000.000,00	0,00	
30	5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	41.000.000,00	8.1.01.03.01.0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	41.000.000,00	0,00	
31	5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	46.125.000,00	8.1.01.03.01.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	46.125.000,00	0,00	
32	5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	190.650.000,00	8.1.01.03.01.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	190.650.000,00	0,00	
33	5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	615.000.000,00	8.1.01.03.01.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	615.000.000,00	0,00	
34	5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	338.250.000,00	8.1.01.03.01.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	338.250.000,00	0,00	
35	5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.265.000,00	8.1.01.03.02.0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan	23.265.000,00	0,00	
36	5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.461.600,00	8.1.01.03.02.0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.461.600,00	0,00	
37	5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	31.544.000,00	8.1.01.03.02.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	31.544.000,00	0,00	
38	5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.269.000,00	8.1.01.03.02.0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.269.000,00	0,00	
39	5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	16.400.000,00	8.1.01.03.02.0031	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	16.400.000,00	0,00	
40	5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	133.315.161.625,00	8.1.01.03.03.0001	Beban TPG PNSD	133.315.161.625,00	0,00	
41	5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	4.392.500.000,00	8.1.01.03.05.0001	Beban Tamsil Guru PNSD	4.392.500.000,00	0,00	
42	5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.040.140.421,00	8.1.01.03.06.0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.040.140.421,00	0,00	
43	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.422.020.000,00	8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.422.020.000,00	0,00	

44	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	239.925.000,00	8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	239.925.000,00	0,00	
45	5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	877.665.544,00	8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD	877.665.544,00	0,00	
46	5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	75.677.700,00	8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	75.677.700,00	0,00	
47	5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.251.000,00	8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD	112.251.000,00	0,00	
48	5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	75.306.000,00	8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD	75.306.000,00	0,00	
49	5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.272.201.000,00	8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.272.201.000,00	0,00	
50	5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.732.775,00	8.1.01.04.06.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	104.732.775,00	0,00	
51	5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.844.375,00	8.1.01.04.07.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.844.375,00	0,00	
52	5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.977.109.216,00	8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.977.109.216,00	0,00	
53	5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	497.700.000,00	8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD	497.700.000,00	0,00	
54	5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	664.128,00	8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	664.128,00	0,00	
55	5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	74.911.242,00	8.1.01.04.12.0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	74.911.242,00	0,00	
56	5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.833.804,00	8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.833.804,00	0,00	
57	5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.501.412,00	8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD	5.501.412,00	0,00	
58	5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.084.608.752,00	8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	3.084.608.752,00	0,00	
59	5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.913.734.216,00	8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.913.734.216,00	0,00	
60	5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	358.785.000,00	8.1.01.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	358.785.000,00	0,00	
61	5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	
62	5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	8.1.01.05.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	0,00	
63	5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.720.000,00	8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.720.000,00	0,00	
64	5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	8.1.01.05.04.0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	0,00	
65	5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	328.576,00	8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	328.576,00	0,00	
66	5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	360	8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	360,00	0,00	
67	5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.181.120,00	8.1.01.05.07.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.181.120,00	0,00	
68	5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	8.1.01.05.08.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	
69	5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	8.1.01.05.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	
70	5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.250.000,00	8.1.01.05.10.0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.250.000,00	0,00	
71	5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.000.000,00	8.1.01.05.10.0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	27.000.000,00	0,00	
72	5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	675.000,00	8.1.01.05.10.0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	675.000,00	0,00	
73	5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.750.000,00	8.1.01.05.10.0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.750.000,00	0,00	
74	5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	198.000.000,00	8.1.01.05.10.0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	198.000.000,00	0,00	
75	5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	9.000.000,00	8.1.01.05.10.0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	9.000.000,00	0,00	

76	5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.125.000,00	8.1.01.05.10.0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.125.000,00	0,00	
77	5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.850.000,00	8.1.01.05.10.0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.850.000,00	0,00	
78	5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	135.000.000,00	8.1.01.05.10.0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	135.000.000,00	0,00	
79	5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	74.250.000,00	8.1.01.05.10.0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	74.250.000,00	0,00	
80	5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.485.000,00	8.1.01.05.11.0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.485.000,00	0,00	
81	5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	113.400,00	8.1.01.05.11.0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	113.400,00	0,00	
82	5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	306.000,00	8.1.01.05.11.0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	306.000,00	0,00	
83	5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	81.000,00	8.1.01.05.11.0024	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	81.000,00	0,00	
84	5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.600.000,00	8.1.01.05.11.0031	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.600.000,00	0,00	
85	5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	94.844.000,00	8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	94.844.000,00	0,00	
86	5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	
87	5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	25.813.381.189,00	8.1.01.99.99.9999	Beban Pegawai BLUD	25.813.381.189,00	0,00	
88	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.400.000,00	8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	36.900.000,00	5.500.000,00	Reklasifikas dari Aset ke Beban Barang dan jasa Pada Dinas Kesehatan
89	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	125.729.311,00	8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	125.729.311,00	0,00	
90	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.043.438.531,00	8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.043.438.531,00	0,00	
91	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.860.625,00	8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	10.860.625,00	0,00	
92	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	47.557.500,00	8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	47.557.500,00	0,00	
93	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	39.150.000,00	8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	39.150.000,00	0,00	
94	5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.547.200,00	8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.547.200,00	0,00	
95	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.362.214.884,00	8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.362.214.884,00	0,00	
96	5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	56.893.000,00	8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	56.893.000,00	0,00	
97	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	22.382.040,00	8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	22.382.040,00	0,00	
98	5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.507.000,00	8.1.02.01.01.0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.507.000,00	0,00	
99	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.137.432.000,00	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.239.569.600,00	102.137.600,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024

100	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.118.347.639,00	8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.114.808.639,00	-3.539.000,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024
101	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.242.296.779,00	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.161.284.779,00	-81.012.000,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024
102	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	172.110.400,00	8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	172.110.400,00	0,00	
103	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.255.430.185,00	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.132.549.085,00	-122.881.100,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024
104	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	502.905.673,00	8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	503.829.748,00	924.075,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2024
105	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	280.311.567,00	8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	287.886.567,00	7.575.000,00	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024
106	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	846.450.683,00	8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	846.450.683,00	0,00	
107	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	190.063.990,00	8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	190.063.990,00	0,00	
108	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	184.735.000,00	8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	184.735.000,00	0,00	
109	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.142.200,00	8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.079.556.588,00	2.061.414.388,00	Reklasifikasi dari Aset ke Beban Ekstrakompatable dan Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024
110	5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.875.177.951,00	8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	8.275.455.425,52	-599.722.525,48	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024
111	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	141.920.706,00	8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	450.086.952,88	308.166.246,88	Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024
112	5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.121.295.852,00	8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.198.063.441,00	76.767.589,00	Reklasifikasi dari Aset ke Beban dan Penyesuaian Persediaan Akhir Tahun 2023 dan 2024
113	5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	294.335.925,00	8.1.02.01.01.0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	294.335.925,00	0,00	
114	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	126.297.750,00	8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	126.297.750,00	0,00	
115	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.604.820.323,00	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.604.820.323,00	0,00	
116	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.626.908.013,00	8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.626.908.013,00	0,00	
117	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.064.400,00	8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.064.400,00	0,00	
118	5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	44.622.000,00	8.1.02.01.01.0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	44.622.000,00	0,00	
119	5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	674.814.000,00	8.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	434.854.000,00	-239.960.000,00	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya
120	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	178.107.967,00	8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	178.107.967,00	0,00	
121	5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	47.730.000,00	8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	47.730.000,00	0,00	
122	5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	555.245.540,00	8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	555.245.540,00	0,00	
123	5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	109.790.715,00	8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	109.790.715,00	0,00	
124	5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	64.753.404,00	8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	64.753.404,00	0,00	
125	5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	12.010.500,00	8.1.02.01.04.0127	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	-12.010.500,00	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya

126	5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	34.046.000,00	8.1.02.01.04.0405	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-34.046.000,00	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya
127	5.1.02.01.04.0519	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	462.869.100,00	8.1.02.01.04.0519	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-462.869.100,00	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya
128	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.568.060.000,00	8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.568.060.000,00	0,00	
129	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	668.130.000,00	8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	668.130.000,00	0,00	
130	5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	217.350.000,00	8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	217.350.000,00	0,00	
131	5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	233.900.000,00	8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	233.900.000,00	0,00	
132	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.250.000,00	8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	12.250.000,00	0,00	
133	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	43.800.000,00	8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	43.800.000,00	0,00	
134	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	892.500.000,00	8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	892.500.000,00	0,00	
135	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.711.979.250,00	8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	10.711.979.250,00	0,00	
136	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	978.705.900,00	8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	978.705.900,00	0,00	
137	5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	79.255.500,00	8.1.02.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	79.255.500,00	0,00	
138	5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	210.975.000,00	8.1.02.02.01.0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	210.975.000,00	0,00	
139	5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	380.000.000,00	8.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	380.000.000,00	0,00	
140	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.398.824.808,00	8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	19.398.824.808,00	0,00	
141	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	367.200.000,00	8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	367.200.000,00	0,00	
142	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.683.286.047,00	8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.683.286.047,00	0,00	
143	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.674.658.400,00	8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.674.658.400,00	0,00	
144	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	363.200.000,00	8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	363.200.000,00	0,00	
145	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.770.188.000,00	8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	1.770.188.000,00	0,00	
146	5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.950.000,00	8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.950.000,00	0,00	
147	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	139.480.000,00	8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	139.480.000,00	0,00	
148	5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	13.950.000,00	8.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias	13.950.000,00	0,00	
149	5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	720.000.000,00	8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	720.000.000,00	0,00	
150	5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.171.269.471,00	8.1.02.02.01.0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.171.269.471,00	0,00	
151	5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	252.125.930,00	8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	252.125.930,00	0,00	
152	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8.400.000,00	8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	8.400.000,00	0,00	
153	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	269.857.250,00	8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	269.857.250,00	0,00	
154	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	47.788.162,00	8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	47.788.162,00	0,00	
155	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	73.888.342,00	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	73.888.342,00	0,00	
156	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.268.575.285,00	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	3.267.375.485,00	-1.199.800,00	Penyesuaian Utang Taguhan Listrik

157	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	797.440.000,00	8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	797.440.000,00	0,00	
158	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.882.081.242,00	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.899.416.242,00	17.335.000,00	Utang Beban Internet pada Dinas Kesehatan
159	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	38.319.900,00	8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	38.319.900,00	0,00	
160	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	231.016.500,00	8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	231.016.500,00	0,00	
161	5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	18.844.608.974,00	8.1.02.02.01.0068	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	18.844.608.974,00	0,00	
162	5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	202.705.097,00	8.1.02.02.01.0077	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	202.705.097,00	0,00	
163	5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.733.262.202,00	8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.733.262.202,00	0,00	
164	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	13.537.995.000,00	8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	13.066.357.400,00	-471.637.600,00	Penyesuaian Utang Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Kesehatan
165	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.000.000,00	8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.000.000,00	0,00	
166	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.142.555,00	8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	100.142.555,00	0,00	
167	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	107.569.022,00	8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	107.569.022,00	0,00	
168	5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	38.978.720,00	8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	38.978.720,00	0,00	
169	5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.123.761.388,00	8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.123.761.388,00	0,00	
170	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	303.458.680,00	8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	303.458.680,00	0,00	
171	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.550.000,00	8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.550.000,00	0,00	
172	5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	196.000.000,00	8.1.02.02.04.0043	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	196.000.000,00	0,00	
173	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.234.356.090,00	8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.234.356.090,00	0,00	
174	5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	1.600.000,00	8.1.02.02.04.0121	Beban Sewa Alat Pendingin	1.600.000,00	0,00	
175	5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	10.000.000,00	8.1.02.02.04.0134	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	10.000.000,00	0,00	
176	5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	19.775.000,00	8.1.02.02.04.0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	19.775.000,00	0,00	
177	5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	8.1.02.02.04.0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	0,00	
178	5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	8.000.000,00	8.1.02.02.04.0509	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	8.000.000,00	0,00	
179	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.980.056.500,00	8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.980.056.500,00	0,00	
180	5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	34.500.000,00	8.1.02.02.05.0038	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	34.500.000,00	0,00	
181	5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11.250.000,00	8.1.02.02.07.0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11.250.000,00	0,00	
	5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	199.277.000,00	199.277.000,00	Reklasifikasi dari Aset ke Beban jasa Konsultasi
182	5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	691.386.065,00	8.1.02.02.09.0040	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	691.386.065,00	0,00	
183	5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	49.600.000,00	8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	49.600.000,00	0,00	

184	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	398.937.000,00	8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	398.937.000,00	0,00	
185	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	115.500.000,00	8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	115.500.000,00	0,00	
186	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	468.947.983,00	8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	468.947.983,00	0,00	
187	5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.615.470,00	8.1.02.02.08.0002	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1.615.470,00	0,00	
188	5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	99.918.000,00	8.1.02.03.01.0035	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	99.918.000,00	0,00	
189	5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	118.476.000,00	8.1.02.03.02.0002	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	118.476.000,00	0,00	
190	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.246.498.130,00	8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.246.498.130,00	0,00	
191	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	214.594.400,00	8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	214.594.400,00	0,00	
192	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	79.049.980,00	8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	79.049.980,00	0,00	
193	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	36.495.500,00	8.1.02.03.02.0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	36.495.500,00	0,00	
194	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	167.348.430,00	8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	167.348.430,00	0,00	
195	5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.424.450,00	8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.424.450,00	0,00	
196	5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	16.182.200,00	8.1.02.03.02.0134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	16.182.200,00	0,00	
197	5.1.02.03.02.0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	6.000.000,00	8.1.02.03.02.0375	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	6.000.000,00	0,00	
198	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	153.082.420,00	8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	153.082.420,00	0,00	
199	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	42.108.400,00	8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	42.108.400,00	0,00	
200	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	36.926.065,00	8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	36.926.065,00	0,00	
201	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	571.645.851,00	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	571.645.851,00	0,00	
202	5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	130.000.000,00	8.1.02.03.03.0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	130.000.000,00	0,00	

203	5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten	1.659.999.230,00	8.1.02.03.04.0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten	1.659.999.230,00	0,00	
204	5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.058.774.140,00	8.1.02.03.04.0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.058.774.140,00	0,00	
205	5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	239.425.552,00	8.1.02.03.04.0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	239.425.552,00	0,00	
206	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	6.741.900,00	8.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	6.741.900,00	0,00	
207	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.948.533.515,00	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.948.533.515,00	0,00	
208	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.881.566.691,00	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.881.566.691,00	0,00	
209	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	913.345.400,00	8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	913.345.400,00	0,00	
210	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	24.000.000,00	8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	24.000.000,00	0,00	
211	5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.366.500.000,00	8.1.02.05.01.0008	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.366.500.000,00	0,00	
212	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.175.729.034,00	8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.175.729.034,00	0,00	
213	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.600.000,00	8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.600.000,00	0,00	
214	5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.155.456.443,00	8.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS	44.155.456.443,00	0,00	
215	5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.863.982.076,00	8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	36.125.546.540,83	1.261.564.464,83	Penyesuaian Utang BLUD 2023 dan 2024
216	5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.208.649.840,00	8.1.05.01.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.208.649.840,00	0,00	
217	5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.867.315.800,00	8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.867.315.800,00	0,00	
218	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.283.500.000,00	8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.283.500.000,00	0,00	
219	5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2.927.039.430,00	8.1.05.06.01.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2.927.039.430,00	0,00	
220	5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	125.000.000,00	8.1.05.06.02.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	125.000.000,00	0,00	
221	5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	974.364.166,68	8.1.05.07.01.0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	974.364.166,68	0,00	
222	5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.299.897.000,00	8.1.05.08.02.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.288.648.999,00	-11.248.001,00	Reklasifikasi ke Aset Yang Sebenarnya
223	5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.126.600.000,00	8.1.05.08.03.0001	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.126.600.000,00	0,00	
224	5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.087.632.000,00				-1.087.632.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Tanah
225	5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	20.535.000,00				-20.535.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
226	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	369.990.000,00				-369.990.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
227	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.400.100.000,00				-1.400.100.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin

228	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	48.196.200,00				-48.196.200,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
229	5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	22.200.000,00				-22.200.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
230	5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	4.560.000,00				-4.560.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
231	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	189.239.880,00				-189.239.880,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
232	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	204.028.034,00				-204.028.034,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
233	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.146.453.842,00				-1.146.453.842,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
234	5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	123.000.000,00				-123.000.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
235	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	704.007.900,00				-704.007.900,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
236	5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	4.995.000,00				-4.995.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
237	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	136.727.075,00				-136.727.075,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
238	5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	61.700.000,00				-61.700.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
239	5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	49.800.000,00				-49.800.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
240	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	192.495.300,00				-192.495.300,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
241	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	832.764.500,00				-832.764.500,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
242	5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	3.000.000,00				-3.000.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
243	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.148.142.542,00				-2.148.142.542,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
244	5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	615.737.739,00				-615.737.739,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
245	5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.005.794.262,00				-2.005.794.262,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
246	5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	864.000.000,00				-864.000.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
247	5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	614.500.000,00				-614.500.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
248	5.2.02.08.01.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	43.846.110,00				-43.846.110,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
249	5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	220.265.750,00				-220.265.750,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
250	5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	221.920.000,00				-221.920.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
251	5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	138.858.000,00				-138.858.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin

252	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.419.558.318,00				-1.419.558.318,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
253	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	532.480.502,00				-532.480.502,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
254	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	209.500.000,00				-209.500.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
255	5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.451.587.383,00				-1.451.587.383,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
256	5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.029.432.700,00				-4.029.432.700,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
257	5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	1.026.621.600,00				-1.026.621.600,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
258	5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.832.759.067,00				-2.832.759.067,00	di Kapitalisasi ke Aset Peralatan Mesin
259	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.726.871.082,00				-5.726.871.082,00	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
260	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	548.224.622,00				-548.224.622,00	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
261	5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	314.296.000,00				-314.296.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
262	5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.715.412.421,00				-6.715.412.421,00	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
263	5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.887.681.250,00				-4.887.681.250,00	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
264	5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	773.562.462,00				-773.562.462,00	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
265	5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.860.016.801,00				-1.860.016.801,00	di Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan
266	5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	77.149.161.719,00				-77.149.161.719,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
267	5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	159.579.517,00				-159.579.517,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
268	5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.540.310.974,00				-2.540.310.974,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
269	5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	17.855.396.550,00				-17.855.396.550,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
270	5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.626.948.500,00				-3.626.948.500,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
271	5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	1.132.718.000,00				-1.132.718.000,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
272	5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	9.000.000,00				-9.000.000,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
273	5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	297.967.720,00				-297.967.720,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
274	5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	722.463.900,00				-722.463.900,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
275	5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	51.895.830,00				-51.895.830,00	di Kapitalisasi ke Aset JIJ
276	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	49.492.000,00				-49.492.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Tetap Lainnya
277	5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.104.268.000,00				-2.104.268.000,00	di Kapitalisasi ke Aset Tetap Lainnya
278	5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	3.300.579.100,00				-3.300.579.100,00	di Kapitalisasi ke Aset Tetap Lainnya

279	5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	250.982.700,00				-250.982.700,00	di Kapitalisasi ke Aset Tetap Lainnya
280	5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	7.691.341.000,00	8.2.01.01.01.0001	Beban Tidak Terduga	7.691.341.000,00	0,00	
281	5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.765.183.918,00	8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.125.325.873,40	-639.858.044,60	Penyesuaian Utang Beban Tahun 2023 dan 2024
282	5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	255.651.562,00	8.3.01.02.01.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	194.016.406,20	-61.635.155,80	Penyesuaian Utang Beban Tahun 2023 dan 2024
283	5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	103.458.459.000,00	8.3.02.05.02.0004	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	-103.458.459.000,00	Tidak Dilakukan Jurnal Beban Dana Desa LO
284	5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	77.590.947.500,00	8.3.02.05.02.0005	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	77.590.947.500,00	0,00	
285					Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	11.150,00	11.150,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
286					Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	59.280.580,00	59.280.580,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
287					Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	3.111.384,40	3.111.384,40	Penyesuaian Penyisihan Piutang
288					Beban Penyisihan Piutang PBBP2	41.805.296.599,61	41.805.296.599,61	Penyesuaian Penyisihan Piutang
289					Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.197.000,00	100.197.000,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
290					Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.032.650,00	450.032.650,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
291					Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	3.480.267,00	3.480.267,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
292					Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	22.220.777,50	22.220.777,50	Penyesuaian Penyisihan Piutang
293					Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor	24.770.437,02	24.770.437,02	Penyesuaian Penyisihan Piutang
294					Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.991.620,59	8.991.620,59	Penyesuaian Penyisihan Piutang
295					Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	115.566.096,91	115.566.096,91	Penyesuaian Penyisihan Piutang
296					Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	271.813,63	271.813,63	Penyesuaian Penyisihan Piutang
297					Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	11.140.305,00	11.140.305,00	Penyesuaian Penyisihan Piutang
298					Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	274.765.107,00	274.765.107,00	Penyesuaian Penyusutan Peralatan dan Mesin

299					Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.515.363.662,00	3.515.363.662,00	Penyesuaian Penyusutan Peralatan dan Mesin
300					Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	34.481.891.091,00	34.481.891.091,00	Penyesuaian Penyusutan Peralatan dan Mesin
301					Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	52.245.308.098,99	52.245.308.098,99	Penyesuaian Penyusutan Gedung dan Bangunan
302					Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	7.043.044.452,00	7.043.044.452,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
303					Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	88.326.940,00	88.326.940,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
304					Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.519.597.869,00	9.519.597.869,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
305					Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	940.790.198,00	940.790.198,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
306					Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	3.701.400,00	3.701.400,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
307					Beban Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	8.211.628.513,00	8.211.628.513,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
308					Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	2.145.481,00	2.145.481,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
309					Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	141.039.099,00	141.039.099,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
310					Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	142.616.639,00	142.616.639,00	Penyesuaian Penyusutan JIJ
311					Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	34.839.000,00	34.839.000,00	Penyesuaian Amortisasi Aset Tidak Berwujud
315					Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	607.008.047,40	607.008.047,40	Penyesuaian Amortisasi Aset Tidak Berwujud
316					Defisit Tukar Menukar Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	52.200.000,00	52.200.000,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Tanah antar SKPD
317					Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO	540.716.624,00	540.716.624,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Kendaraan antar SKPD
318					Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	982.635.577,00	982.635.577,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Peralatan dan Mesin antar SKPD
319					Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO	977.630.519,00	977.630.519,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran Bangunan dan Gedung antar SKPD
320					Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO	8.741.627.036,00	8.741.627.036,00	Selisih Nilai Buku Pertukaran JIJ antar SKPD
321					Defisit Penghapusan Tanah-LO	57.200.000,00	57.200.000,00	Akibat Penghapusan Tanah
322					Defisit Penghapusan Alat Angkutan-LO	325.929.398,00	325.929.398,00	Akibat Penghapusan Kendaraan
336								
		TOTAL	1.450.657.035.870,68		TOTAL	1.218.037.559.007,00		

Pengujian Terhadap Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi (LRA)

No	KODE REKENING	URAIAN	LRA	KODE REKENING	URAIAN	LO	SELISIH	PENJELASAN
1	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	439.635.143,00	7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO	439.635.143	0,00	
2	4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.879.817.783,00	7.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	3.882.047.783	-2.230.000,00	1.1.03.07.02.0001 Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
3	4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	107.192.500,00	7.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	107.192.500	0,00	
4	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	994.031.250,00	7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.008.794.750	-14.763.500,00	1.1.03.09.01.0001 Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
5	4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	22.152.538.103,00	7.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	22.152.538.103		
6	4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	1.015.333.318,00	7.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir-LO	1.015.333.318	0,00	
7	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.385.466.152,00	7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO	1.394.081.440	-8.615.288,00	1.1.03.12.01.0001 Piutang Pajak Air Tanah, Pelunasan Piutang Pajak Air Tanah dan Pendapatan Diterima Dimuka
8	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	6.103.732.424,50	7.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	6.103.732.424,50	0,00	
9	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	16.406.733.263,00	7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO	25.608.097.678	-9.201.364.415,00	1.1.03.15.01.0001 Piutang PBBP2
10	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.768.779.351,00	7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	8.768.779.351	0,00	
11	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	19.454.586.207,00	7.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	19.464.648.207	-10.062.000,00	1.1.04.01.01.0001 1.1.06.16.01.0001 Piutang Tahun 2024 dan Pelunasan Piutang BLUD Puskesmas
12	4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	44.760.221.828,00	7.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	44.775.979.300	-15.757.472,00	1.1.04.01.01.0005 1.1.06.16.01.0001 Piutang Tahun 2024 dan Pelunasan Piutang BLUD Rumah sakit
13	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	606.458.000,00	7.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	632.166.000	-25.708.000,00	1.1.04.01.02.0001 Piutang Tahun 2024 dan Pelunasan Piutang Retribus Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pendapatan Diterima Dimuka
14	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	66.800.000,00	7.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	66.800.000	0,00	
15	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	72.950.000,00	7.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	72.950.000	0,00	
16	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.876.000,00	7.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	20.876.000	0,00	
17	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30.040.000,00	7.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	30.040.000	0,00	
18	4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	32.045.000,00	7.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	32.045.000	0,00	
19	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.110.995.949,00	7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.110.995.949	0,00	
20	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.728.317.039,00	7.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	8.728.317.039	0,00	
21	4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	346.117.100,00	7.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO	346.117.100	0,00	
22	4.1.04.01.04.0007	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.780.000,00	7.1.04.01.04.0007	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten-LO	4.780.000	0,00	

23	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	85.000.000,00	7.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD-LO	110.700.000	-25.700.000,00	2.1.05.04.03.0001 Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka dan Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka
24	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.417.465.459,57	7.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.414.843.597,57	2.621.862,00	1.1.06.05.04.0001 Piutang Jasa Giro BOS
25	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.196.849.337,97	7.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.191.471.199,97	5.378.138,00	1.1.04.01.13.0001 Pelunasan Piutang Menara, Dana Bergulir dan Jasa Giro BOS
26	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.340.513.287,41	7.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.340.513.287,41	0,00	
27	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	52.438.120,00	7.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO	52.438.120	0,00	
28	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.750.372.234,98	7.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	1.750.372.234,98	0,00	
29	4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	409.100.896,00	7.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	409.100.896	0,00	
30	4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.713.200.009,00	7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO	3.713.200.009	0,00	
31	4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.151.038.000,00	7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	5.151.038.000	0,00	
32	4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	37.292.000,00	7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO	37.292.000	0,00	
33	4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	147.572.000,00	7.2.01.01.01.0007	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	147.572.000	0,00	
34	4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	690.321.000,00	7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	690.321.000	0,00	
35	4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	53.265.000,00	7.2.01.01.01.0011	DBH SDA Kehutanan-IUUPH-LO	53.265.000	0,00	
36	4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.425.506.000,00	7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan-LO	1.425.506.000	0,00	
37	4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	4.988.397.000,00	7.2.01.01.01.0014	DBH Sawit-LO	4.988.397.000	0,00	
38	4.2.01.01.02.0001	DAU	631.041.835.000,00	7.2.01.01.02.0001	DAU-LO	631.041.835.000	0,00	
39	4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.982.866.956,00	7.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	4.982.866.956	0,00	
40	4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	66.069.660.000,00	7.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	66.069.660.000	0,00	
41	4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.665.531.000,00	7.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	38.665.531.000	0,00	
42	4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	43.720.571.000,00	7.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	43.720.571.000	0,00	
43	4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	227.307.180,00	7.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	227.307.180	0,00	
44	4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.363.451.655,00	7.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	2.363.451.655	0,00	
45	4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.410.416.420,00	7.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	2.410.416.420	0,00	
46	4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.376.487.739,00	7.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	1.376.487.739	0,00	
47	4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.002.900.000,00	7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	7.002.900.000	0,00	
48	4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.997.222.572,00	7.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO	1.997.222.572	0,00	
49	4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	28.471.223.428,00	7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	28.471.223.428	0,00	
50	4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.001.268.300,00	7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	3.001.268.300	0,00	
51	4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	973.914.000,00	7.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	973.914.000	0,00	
52	4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5.799.319.300,00	7.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	5.799.319.300	0,00	

53	4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.437.292.137,00	7.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	57.437.292.137	0,00	
54	4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.925.000.000,00	7.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.925.000.000	0,00	
55	4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	123.205.562.000,00	7.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	123.205.562.000	0,00	
56	4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.979.500.000,00	7.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	3.979.500.000	0,00	
57	4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.126.600.000,00	7.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.126.600.000	0,00	
58	4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.852.673.600,00	7.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	4.852.673.600	0,00	
59	4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	529.902.300,00	7.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	529.902.300	0,00	
60	4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.233.272.528,00	7.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan-LO	1.233.272.528	0,00	
61	4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	816.037.500,00	7.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	816.037.500	0,00	
62	4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	602.373.990,00	7.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	602.373.990	0,00	
63	4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.209.897.000,00	7.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	4.209.897.000	0,00	
64	4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	7.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	90.000.000	0,00	
65	4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.082.148.704,00	7.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	9.082.148.704	0,00	
66	4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.904.544.070,00	7.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	10.904.544.070	0,00	
67	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	103.458.459.000,00	7.2.01.05.01.0001	Dana Desa LO	0,00	103.458.459.000,00	Tidak Dilakukan Jurnal Dana Desa LO
68	4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	27.827.229.000,00	7.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal-LO	27.827.229.000	0,00	
69	4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.197.822.663,00	7.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	16.171.746.715	26.075.948,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
70	4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.105.250.414,00	7.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	7.600.699.729	504.550.685,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
71	4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.151.052.135,00	7.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	38.064.060.165	-6.913.008.030,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
72	4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	121.426.251,00	7.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	143.737.971	-22.311.720,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
73	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.350.242.688,00	7.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	17.527.943.755	2.822.298.933,00	1.1.08.01.01 Peiutang dan Pelunasan Piutang Bagi Hasil Provinsi
74	4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.200.000.000,00	7.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.200.000.000	0,00	
75			0,00	7.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	294.071.917	-294.071.917,00	7.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah
76			0,00	7.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	26.525.000	-26.525.000,00	7.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah
77			0,00	7.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	231.000.000	-231.000.000,00	7.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah
78			0,00	7.4.01.02.01.0004	Surplus Tukar Menukar Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO	52.200.000	-52.200.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
79			0,00	7.4.01.02.02.0035	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan-LO	2.995.290	-2.995.290,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
80			0,00	7.4.01.02.02.0036	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	513.221.334	-513.221.334,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
81			0,00	7.4.01.02.02.0132	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO	142.500.000	-142.500.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD

82			0,00	7.4.01.02.02.0133	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film-LO	615.500.000	-615.500.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
83			0,00	7.4.01.02.02.0134	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar-LO	15.240.044	-15.240.044,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
84			0,00	7.4.01.02.02.0405	Surplus Tukar Menukar Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-LO	229.245.533	-229.245.533,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
85			0,00	7.4.01.02.02.0409	Surplus Tukar Menukar Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer-LO	4.650.000	-4.650.000,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
86			0,00	7.4.01.02.03.0001	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	828.515.877	-828.515.877,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
87			0,00	7.4.01.02.03.0009	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan-LO	149.114.642	-149.114.642,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
88			0,00	7.4.01.02.04.0013	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten-LO	13.848.300.653	-13.848.300.653,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
89			0,00	7.4.01.02.04.0126	Surplus Tukar Menukar Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya-LO	84.816.210	-84.816.210,00	Selisih Nilai Buku Perpindahan Pertukaran Aset antar SKPD
			1.427.456.037.285,43			1.353.914.069.644,43		